

Laporan Tahunan 2016
Annual Report 2016

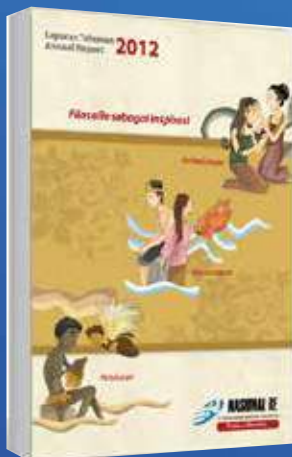


**TERPERCAYA, TANGGUH
& TERUS TUMBUH**

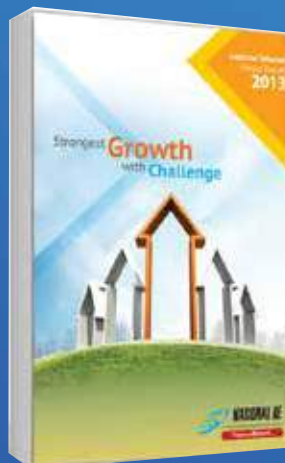
TRUST, STRENGTH & GROWTH



KEBERLANJUTAN TEMA 4 TAHUN TERAKHIR
CONTINUITY OF THEMES IN THE LAST 4 YEARS



2012



2013



2014



2015

PENJELASAN TEMA EXPLANATION OF THEME



2016

TERPERCAYA, TANGGUH & TERUS TUMBUH **TRUST, STRENGTH & GROWTH**

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka Nasional Re harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global dimana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Berbagai catatan prestasi Nasional Re dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi finansial maupun non-finansial, menjadi bukti kuat atas keberhasilan Nasional Re menjadi perusahaan yang dipercaya oleh nasabah dan tangguh dalam menghadapi tantangan di tengah dinamika industri asuransi nasional. Dengan membangun kepercayaan dan tangguh menghadapi tantangan, maka tentunya Nasional Re sanggup menjadi sebuah perusahaan yang terus bertumbuh.

As a company that manages the financial risks of its business partners, Nasional Re should strive to be a company that is trustworthy and reliable even for business partners, especially in the global circumstances in which trust is very hard to find. To obtain a high level of trust of the business partners, the Company should be strong in many areas, particularly in the areas of finance, information technology, and human resources. With the high level of trust from business partners and supported by the resilience of the Company, the Company has a great opportunity to continue to grow from year to year.

Nasional Re track of achievement in the recent years, in terms of financial and non-financial as well, is a strong evidence of the Company's success to become a company that is trusted by customers and is strong in the face of challenges in the national insurance industry dynamics. By building trust and strength to cope with formidable challenges, Nasional Re has what it takes to continuously grow.

Daftar Isi

CONTENTS

- ii **KEBERLANJUTAN TEMA 4 TAHUN TERAKHIR**
CONTINUITY OF THEMES IN THE LAST 4 YEARS
- 1 **PENJELASAN TEMA**
EXPLANATION OF THEME
- 2 **DAFTAR ISI**
CONTENTS

5 **IKHTISAR UTAMA**

HIGHLIGHTS

- 6 **IKHTISAR PENCAPAIAN**
PERFORMANCE HIGHLIGHTS
- 8 **INISIATIF**
INITIATIVES
- 9 **IKHTISAR KEUANGAN PENTING**
FINANCIAL HIGHLIGHTS
- 12 **IKHTISAR PERISTIWA PENTING**
SIGNIFICANT EVENT HIGHLIGHTS
- 13 **PENGHARGAAN**
AWARDS

15 **LAPORAN MANAJEMEN**

MANAGEMENT REPORT

- 16 **LAPORAN DEWAN KOMISARIS**
MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
- 20 **LAPORAN DIREKSI**
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

31 **PROFIL PERUSAHAAN**

COMPANY PROFILE

- 32 **NAMA, ALAMAT DAN INFORMASI UMUM PERUSAHAAN**
COMPANY NAME, ADDRESS, AND GENERAL INFORMATION
- 33 **MAKSUD DAN TUJUAN USAHA**
GOALS AND OBJECTIVES
- 34 **RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN**
COMPANY'S BRIEF HISTORY
- 36 **JEJAK LANGKAH**
MILESTONES
- 40 **KEGIATAN USAHA DAN AKTIFITAS USAHA**
BUSINESS ACTIVITIES
- 41 **VISI DAN MISI**
VISION AND MISSION
- 42 **NILAI-NILAI PERUSAHAAN**
CORPORATE VALUES
- 43 **KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM**
SHAREHOLDERS' COMPOSITION
- 43 **WILAYAH OPERASI ATAU JARINGAN CABANG**
OPERATIONAL AREAS OR NETWORK OF BRANCHES
- 44 **STRUKTUR ORGANISASI**
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
- 46 **IDENTITAS DEWAN KOMISARIS**
BOARD OF COMMISSIONERS' IDENTITY
- 48 **IDENTITAS DIREKSI**
BOARD OF DIRECTORS' IDENTITY
- 49 **KEGIATAN PERUSAHAAN**
CORPORATE EVENTS
- 50 **KEPALA DIVISI**
DIVISION HEADS/SENIOR MANAGERS
- 57 **KETERANGAN MENGENAI INFORMASI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN KARENA NASIONAL RE BUKAN PERUSAHAAN PUBLIK**
EXPLANATION ABOUT UNDISCLOSED INFORMATION SINCE NASIONAL RE IS NOT A PUBLIC COMPANY
- 58 **TINJAUAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**
OVERVIEW OF PLAN, POLICIES AND STRATEGIES

63

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

- 64 TINJAUAN BISNIS
BUSINESS REVIEW
- 68 TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW
- 85 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT REVIEW
- 85 PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
- 103 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
& KOMUNIKASI (TIK)
INFORMATION & COMMUNICATION
TECHNOLOGY MANAGEMENT (ICT)

117 LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

- 118 PENDAHULUAN
PREFACE
- 121 URAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (RUPS)
DESCRIPTION OF GENERAL MEETINGS OF
SHAREHOLDERS (GMS)
- 130 URAIAN DEWAN KOMISARIS
DESCRIPTION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
- 146 URAIAN DIREKSI
DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
- 162 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
- 164 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
THE NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE
- 166 KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN
KOMISARIS
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
COMMISSIONERS
- 168 SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY
- 178 KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
DIRECTORS
- 181 SATUAN PENGAWAS INTERNAL
INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

- 186 AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR

- 187 MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

- 199 MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS
PERUSAHAAN
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

- 203 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

- 209 PERKARA PENTING YANG SEDANG
DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, SERTA
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT
PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN
IMPORTANT CASES BEING FACED BY THE
COMPANY, AND MEMBERS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS OF THE ANNUAL REPORT
PERIOD

- 209 KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

- 211 WHISTLE BLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

215 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

219 LAPORAN KEUANGAN AUDITED

AUDITED FINANCIAL REPORT





Ikhtisar Utama

Highlights



Ikhtisar Pencapaian PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Premi Bruto
Gross Premiums
4.876.870

Aset
Assets
4.799.749

Hasil Underwriting
Underwriting Results
380.845

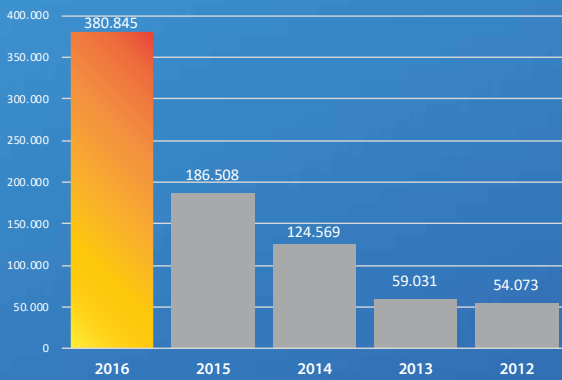
Laba Bersih
Net Income
335.613

Ekuitas
Equity
1.418.496

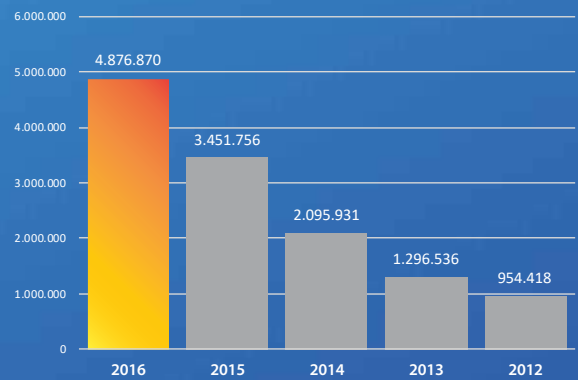
Hasil Investasi
Investment Income
155.725

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

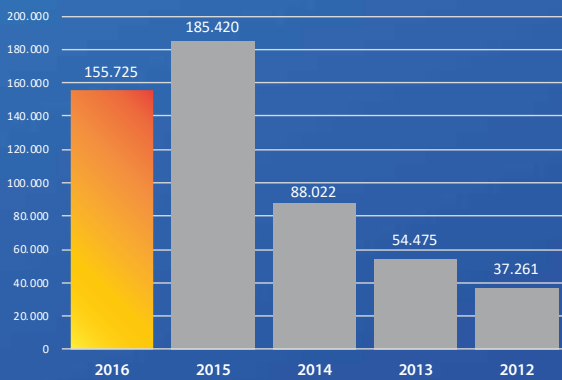
Hasil Underwriting
Underwriting Results



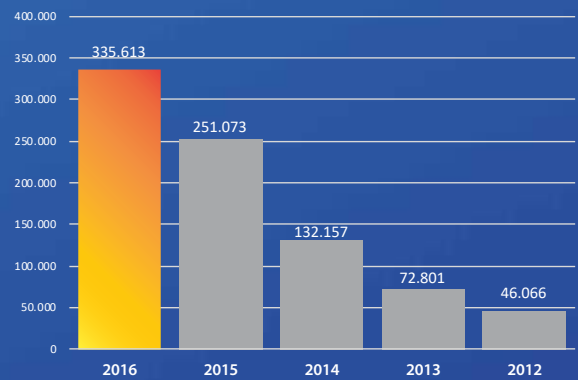
Premi Bruto
Gross Premiums



Hasil Investasi
Investment Income



Laba Bersih
Net Income



INISIATIF

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode tahun 2016 – 2020. Dalam tahun 2016 perusahaan masih berada pada periode I pentahapan RJPP yaitu periode Akselerasi Pertumbuhan Bisnis. Pada tahap ini PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) diharapkan sudah memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki masa pertumbuhan yang cepat. Nasional Re telah mulai mewujudkan hal ini sebagaimana yang terlihat dari pencapaian premi bruto dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Nasional Re merupakan salah satu perusahaan reasuransi domestik dengan premi bruto terbesar.

Upaya peningkatan *market share* terus dilakukan oleh Nasional Re dalam rangka optimalisasi kapasitas yang dimilikinya serta membantu menekan laju defisit neraca pembayaran atau premium *flight* industri asuransi nasional. Secara garis besar, langkah Nasional Re di tahun 2016, terkait dengan untuk:

1. Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Tangguh
Hal ini antara lain dicapai dengan memperkuat fundamental keuangan Nasional Re.
2. Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Terpercaya
Hal ini diwujudkan melalui peningkatan layanan reasuransi, baik dari sisi akseptasi maupun pembayaran klaim, di samping peningkatan pengelolaan perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

INITIATIVES

2016 was the first year of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2016 - 2020. In 2016, the Company was still in the first period within the stages of RJPP, namely Business Growth Acceleration Phase. At this stage, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) is expected to have a strong foundation to enter the stage of rapid growth. Nasional Re began to realize this as evidenced from the achievement of gross premiums in recent years. In fact, the Company is one of the domestic reinsurance companies with the largest gross premium.

The efforts to increase the Company's market shares continue to be done by Nasional Re in order to optimize its capacity and to help reducing the rate of premium balance of payments deficit or premium flight of national insurance industry. Broadly speaking, Nasional Re measures in 2016 are:

1. Establishing as A Strong Domestic Reinsurance Company
This is partly achieved by strengthening the financial fundamentals of Nasional Re.
2. Establishing as A Most Trusted Domestic Reinsurance Company
This is realized through improvements in reinsurance services, both in terms of acceptance and of payment of claims, in addition to improved management of the Company in order to enhance shareholder value.



IKHTISAR KEUANGAN PENTING FINANCIAL HIGHLIGHTS

Dalam jutaan rupiah/in million rupiah

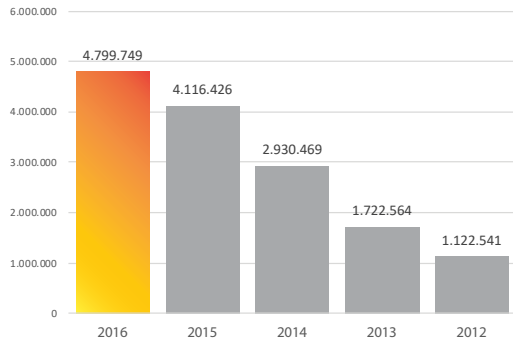
KETERANGAN DESCRIPTIONS	2016	2015	2014	2013	2012
Premi Bruto Gross Premiums	4.876.870	3.451.756	2.095.931	1.296.536	954.418
Premi Retro Retrocession Premiums	2.401.666	1.213.157	242.487	83.085	66.805
Premi Retensi Sendiri Own Retention Premiums	2.475.204	2.238.599	1.853.444	1.213.451	887.613
Klaim Bruto Gross Claims	1.383.395	1.240.357	867.381	521.713	467.280
Beban Klaim Claims Expenses	1.228.866	1.292.430	800.143	626.178	516.846
Beban Komisi Neto Net Commission Expenses	841.946	691.396	544.443	359.335	259.126
Premi Neto Net Premiums	1.633.258	1.547.203	1.309.001	854.116	628.487
Hasil Underwriting Underwriting Results	380.845	186.508	124.569	59.031	54.073
Hasil Investasi Investments Income	155.725	185.420	88.022	54.475	37.261
Beban Usaha Operating Expenses	145.070	116.398	88.689	71.083	52.723
Laba Sebelum Pajak dan Zakat Profit Before Tax and Zakat	407.572	295.190	150.846	81.490	50.078
Laba Setelah Pajak dan Zakat Profit After Tax and Zakat	335.613	251.073	132.157	72.801	46.066
Investasi Investments	2.517.799	2.387.358	1.650.248	1.136.420	859.411
Aset Assets	4.799.749	4.116.426	2.930.469	1.722.564	1.122.541
Cadangan Teknis Technical Reserves	3.144.179	1.608.608	1.359.376	948.258	613.567
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Unearned Premiums	1.671.953	892.099	834.087	481.193	305.320
Estimasi Klaim Retensi Sendiri Estimated Own Retention Claims	1.472.226	716.509	525.289	467.065	308.247
Ekuitas Equity	1.418.496	1.182.824	748.691	371.527	247.105
Modal Disetor Paid-up Capital	538.000	538.000	463.000	213.000	138.000

Dalam jutaan rupiah/in million rupiah

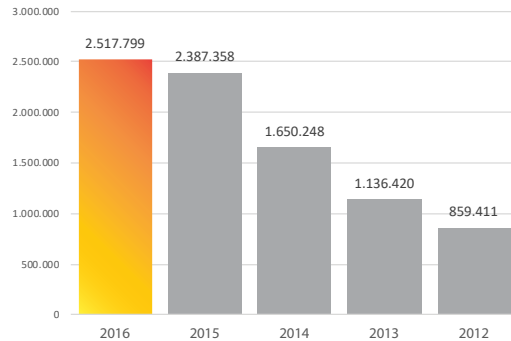
RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS	2016	2015	2014	2013	2012
Return On Aset (ROA)	9,14	8,38	6,48	5,73	5,01
Return On Equity (ROE)	25,78	26,00	23,59	23,54	20,06
Yield On Investment	6,50	9,39	6,60	5,83	5,41
Klaim Bruto/Premi Bruto Gross Claims/Gross Premium	28,37	35,93	41,38	40,24	48,96
Hasil Underwriting/Premi Bruto Underwriting Results/Gross Premiums	7,81	5,40	5,94	4,55	5,67
Likuiditas Liquidity	137,32	134,28	135,75	124,91	136,37
Solvabilitas Solvability	164,97	141,48	135,65	129,16	142,17
Beban Usaha/Premi Bruto Operating Expenses/Gross Premiums	2,97	3,37	4,23	5,48	5,52

Dalam jutaan rupiah | in million rupiah

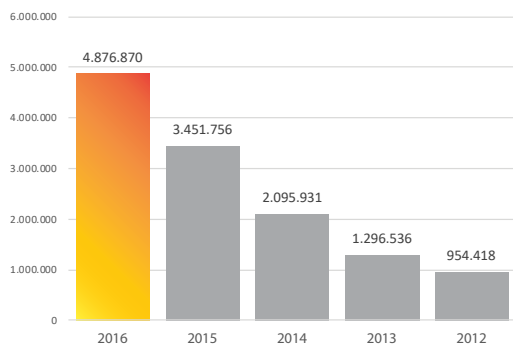
Aset/Assets



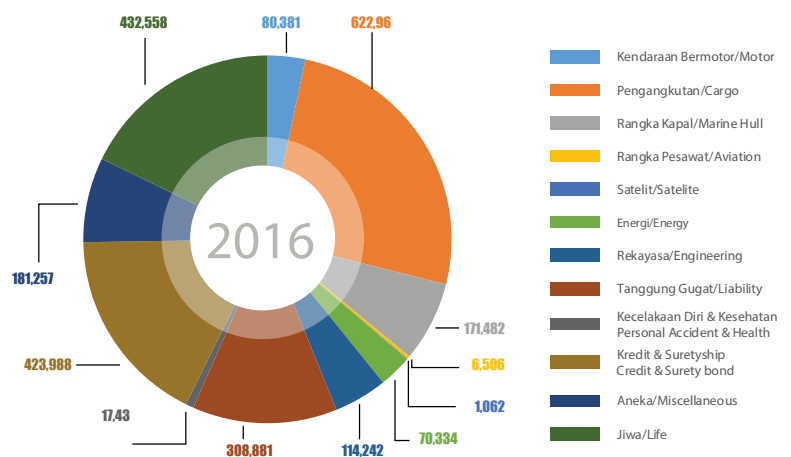
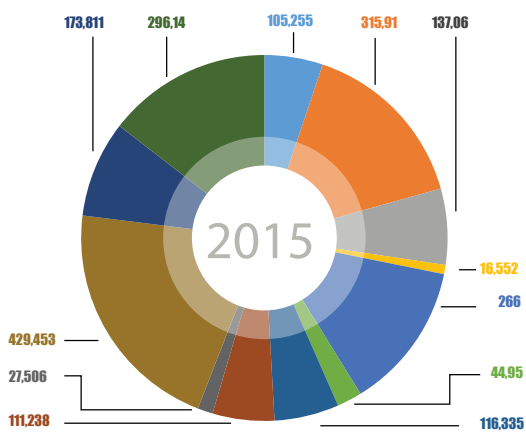
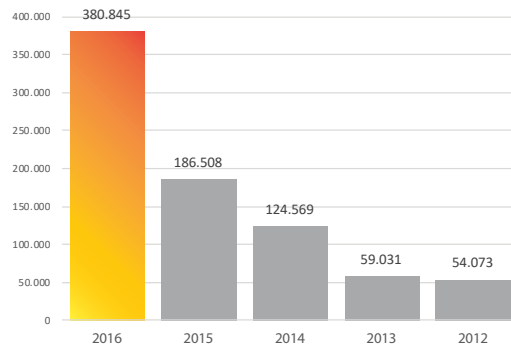
Investasi/Investment



Premi Bruto/Gross Premium

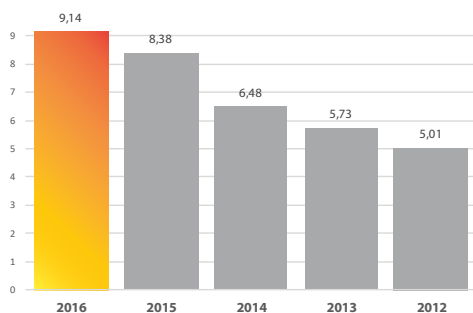


Hasil Underwriting/Underwriting Results

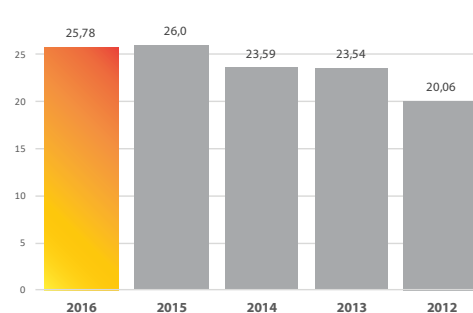


Dalam Persentase | In Percentage

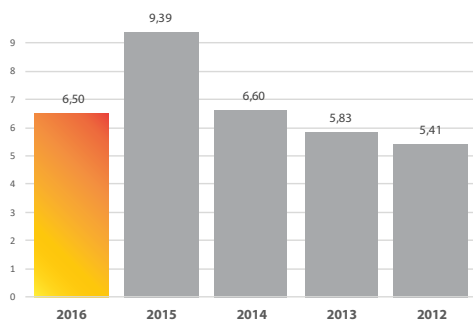
Return On Aset (ROA)



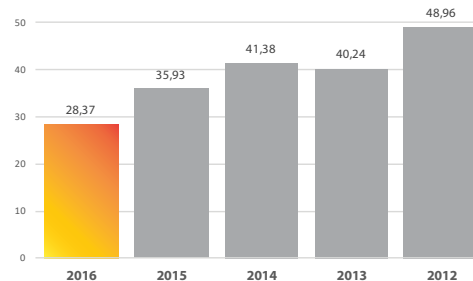
Return On Equity (ROE)



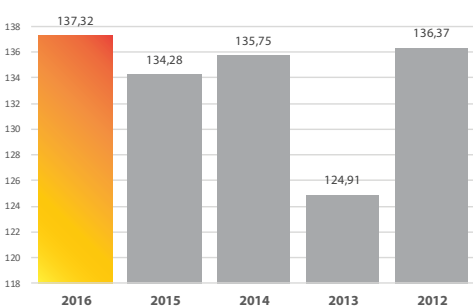
Yield On Investment



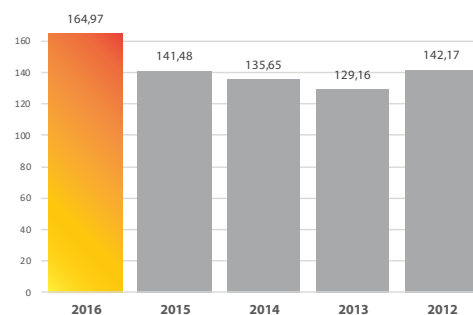
Klaim Bruto/Premi Bruto Gross Claims/Gross Premium



Likuiditas/Liquidity

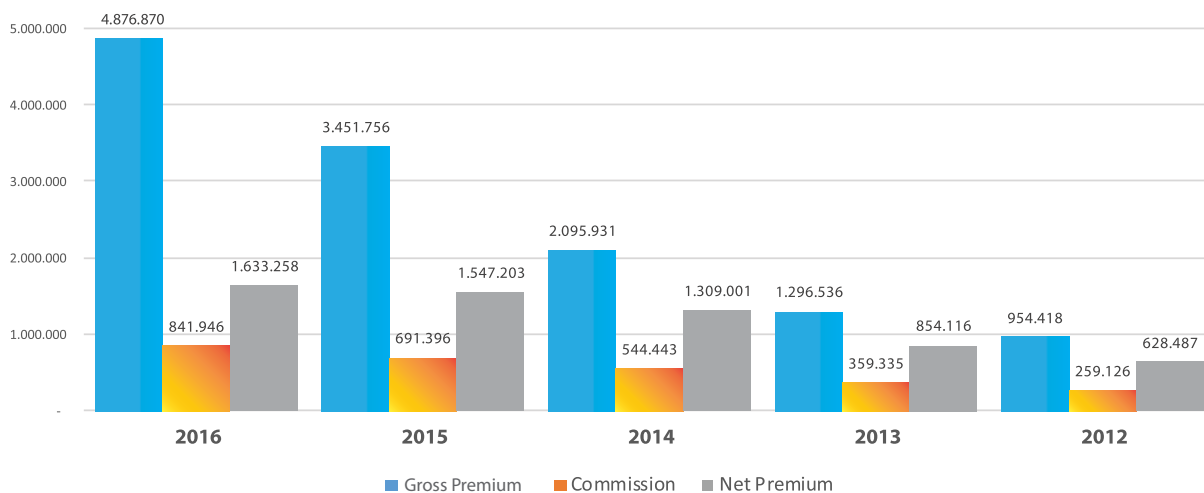


Solvabilitas/Solvability



Pendapatan Premi/Premiums Incomes

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah





IKHTISAR PERISTIWA PENTING SIGNIFICANT EVENT HIGHLIGHTS

- Penambahan jumlah Dewan Komisaris menjadi 2 Komisaris dan 2 Komisaris Independen, untuk memenuhi Pasal 22 Ayat 2 POJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham.
- The increase of the number of Board of Commissioners into 2 Commissioners and 2 Independent Commissioners, to comply with Article 22 Paragraph 2 POJK. 2 / POJK.05/ 2014 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- Dividend Payment to Shareholders.



PENGHARGAAN AWARDS



1. Perusahaan Reasuransi dengan Kinerja Keuangan Terbaik 2016 Oleh Warta Ekonomi
Reinsurance Company with Best Financial Performance 2016 by Warta Ekonomi
2. Reasuransi Terbaik 2016 Oleh Majalah Investor
Best Reinsurance 2016 by Investor Magazine
3. Best Reinsurance 2016 oleh Media Asuransi
Best Reinsurance 2016 by Media Asuransi
4. 2nd Best Reinsurance Company 2016 oleh APPARINDO
2nd Best Reinsurance Company 2016 by APPARINDO

Don't come to me with a flimsy boat
and expect my seas to calm.
I see tornadoes on churning oceans,
water spouts in black clouds
like fingers of a god stirring
his coffee, black as night, expect my seas to calm.
I see a raging storm contained in the churning ocean
and you cannot hold me in a row.
Come for my lightning, come for my god stirring
the way my thunder will hold you in a row
in a way no other storm could.
Don't come to me with your maps not love me in a row
and star charts and facts about the wind come for
set your sails and we'll end up lost will hold you
together, for I know not where one else ever could.
Stand on the bow and raise your arms like an offering, and we'll end up lost
and raise your arms like an offering, and we'll end up lost
have no fear of the rain in me, for I know not where
for I will cradle your ship on the bow
like an infant thing, and give you home
and give you home in all the raging.

Knott
Johnson-





Laporan Manajemen

Management Report



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS



Pemegang saham yang terhormat,
Bersama ini Dewan Komisaris Nasional Re menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengawasan kegiatan perusahaan sekaligus mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Perusahaan di sepanjang tahun 2016, yang ditandai dengan pencapaian yang membanggakan di tengah situasi yang sarat tantangan.

Di tahun 2016, perekonomian dunia tidak dalam kondisi yang menggembirakan, sebagaimana terlihat dari kinerja ekonomi di berbagai negara maju serta berlanjutnya krisis finansial di Eropa, walaupun perekonomian AS mulai membaik. Namun, di tengah situasi kurang kondusif tersebut, Indonesia mencatat kinerja perekonomian yang cukup baik, sebuah bukti bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Situasi ini tentunya menumbuhkan harapan besar bagi Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Namun perlu disikapi dengan berhati-hati mengingat tidak adanya kepastian dalam dinamika global.

Industri Asuransi di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan di tahun 2016. Total pendapatan industri asuransi Indonesia, baik asuransi jiwa, umum, maupun syariah menunjukkan pertumbuhan yang solid. Peluang pun masih terbuka lebar mengingat penetrasi industri asuransi Indonesia masih cukup rendah dibanding negara-negara sekitar.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi menyikapi perkembangan dunia dan Indonesia dengan penuh kehati-hatian. Strategi pertumbuhan di tahun 2016 disusun oleh Direksi dengan memperhatikan dinamika global dan mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi.

Sementara itu, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi mampu membawa Perusahaan mencatat kinerja yang menggembirakan pada tahun 2016, dimana terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada kedua segmen usaha Perusahaan. Peningkatan pendapatan ini tentunya berujung pada peningkatan laba bersih Perusahaan. Terbukti bahwa Direksi mampu mencatat realisasi laba setelah pajak dan zakat tersebut sebesar 104,9% dari target yang dibebankan kepada Direksi. Selaku Dewan Komisaris, kami sangat mengapresiasi pencapaian Direksi di tahun 2016.

Dear Shareholders,

Hereby, the Board of Commissioners of Nasional Re wishes to report on the supervision of the Company's activities, and at the same time, extend our appreciation on the policies taken by the Company throughout 2016, a year marked by a commendable achievement amidst a truly challenging situation.

In 2016, the world economy was not in a favorable condition, as seen from the economic performance of developed countries and the continuing financial crisis in Europe, although the US economy is improving. However, in the midst of the less conducive situation, Indonesia recorded quite an encouraging economic performance, a proof that Indonesia basically has strong economic fundamentals.

This situation certainly raises great expectations for the Company in running its business. But it needs to be addressed with caution given the lack of certainty in the global dynamics.

Insurance Industry in Indonesia also showed an encouraging growth in 2016. The total income of the Indonesian insurance industry, both life insurance, general, and sharia showed a solid growth. Opportunities were still wide open given the penetration of the Indonesian insurance industry that is still quite low compared to the neighboring countries.

The Board of Commissioners viewed that the Board of Directors has responded to the development of the world and Indonesia with prudent and cautious management. The 2016 growth strategy was developed by the Board of Directors by taking into account the global dynamics and anticipating the potential for economic downturn.

In the meantime, the Board of Commissioners also considered that the Board of Directors was able to lead the Company in recording an applaudable performance in 2016, indicated by significant increase in revenues in both business segments. This increase in revenues leads to increase in the Company's net incomes. It is proven that the Board of Directors is able to record the realization of profit after tax and zakat of 104.9% of the target charged to the Board of Directors. As Board of Commissioners, we deeply appreciate the achievement of the Board of Directors in 2016.

Dewan Komisaris setuju dengan kebijakan Direksi dalam pengelolaan SDM, yang diarahkan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan usaha di tengah berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat di dalam negeri maupun di luar negeri. Dewan Komisaris percaya bahwa kebijakan tersebut akan membuat Perusahaan mampu menghadapi tantangan, perubahan dan terus mencatat kinerja yang baik di berbagai aspek, termasuk tata kelola perusahaan.

Terkait dengan termasuk tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris mendukung kebijakan Direksi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris sendiri telah berupaya menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi konsultatif dengan lebih baik. Sepanjang tahun 2016, komunikasi dan kerjasama dengan Direksi dilakukan secara terkoordinasi dan rutin melalui rapat bersama atau melalui sarana-sarana komunikasi lainnya. Dewan Komisaris mempunyai harapan yang sama dengan Direksi, yakni memperkuat keberlangsungan usaha Perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan secara solid.

Dewan Komisaris mengapresiasi kebijakan CSR Nasional Re yang selalu mengedepankan pelaksanaan kegiatan CSR yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberi dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar perusahaan.

Akhir kata, Dewan Komisaris ingin menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas pencapaian yang gemilang di tahun 2016, tentunya berkat dukungan dan kerja keras seluruh karyawan. Kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya, Dewan Komisaris ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya selama ini.


The Board of Commissioners agrees with the Board of Directors' policy on human resource management, which is directed at sustaining business growth amid the rapid changes occurring at home and abroad. The Board of Commissioners believes that the policy will enable the Company to face challenges and changes and to continue to record good performance in various aspects, including corporate governance.

In relation to corporate governance, the Board of Commissioners supports the Board of Directors' policy to continuously improve the quality of corporate governance practices. The Board of Commissioners itself has sought to perform better supervisory and consultative functions. Throughout 2016, communication and cooperation with the Board of Directors were conducted in a coordinated and routine manner through joint meetings or through other means of communication. The Board of Commissioners has the same expectations as the Board of Directors, which is to strengthen the business continuity of the Company through the implementation of solid corporate governance.

The Board of Commissioners appreciates the Corporate Social Responsibility (CSR) policy of Nasional Re which always prioritizes the implementation of CSR activities that suit the needs of the community so as to provide an optimal impact in improving the welfare of the community, especially those living around the company.

In conclusion, the Board of Commissioners wishes to acknowledge the Board of Directors for their outstanding achievements in 2016, thanks to the support and hard work of all employees. To customers, business partners and other stakeholders, the Board of Commissioners wishes to express our gratitude for their long time trust and support.

Jakarta, 14 Februari 2017 | February 14, 2017



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/*President Commissioner*



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/
President Commissioner

Raymond Buisson, SE, CRMO, CRGP
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

Endang Tri Kuswati, SE, MM, AAIK, ANZIIF
Komisaris/
Commissioner

Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec
Komisaris Independen/
Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



Pemegang saham yang terhormat,

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan rencana jangka panjang Nasional Re 2016 – 2020. Dalam rancangan tersebut, Perusahaan sedang berada dalam periode Akselerasi Pertumbuhan Bisnis dimana diharapkan sudah memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki masa pertumbuhan yang cepat. Oleh sebab itu, kebijakan Direksi pada tahun 2016 diarahkan untuk membangun fundamental yang solid di berbagai aspek, sehingga Perusahaan dapat memacu pertumbuhannya dan mewujudkan tujuan jangka panjang Perusahaan menjadi perusahaan reasuransi terpercaya, tangguh dan terus tumbuh.

Kondisi Perekonomian Global

Perekonomian dunia di tahun 2016 dihadapkan pada situasi kurang menguntungkan dimana terlihat adanya pertumbuhan yang tidak merata di antara pusat-pusat perekonomian. Walaupun perekonomian AS telah membaik, namun sebagian besar perekonomian dunia masih melambat. Begitu juga dengan perdagangan global. Sementara itu pasar keuangan menjadi sangat volatile karena adanya guncangan politik, terutama Brexit.

Di tengah situasi kurang kondusif tersebut, Indonesia mencatat pertumbuhan GDP sebesar 5,02%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 4,88%. Hal ini didorong oleh kuatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi rumah tangga. Sementara itu, inflasi terjaga stabil pada tingkat 3,02%, lebih rendah dibandingkan dengan 3,35% pada tahun 2015.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Didukung pula dengan kebijakan ekonomi yang tepat dengan mengutamakan pertumbuhan fiskal dan tingkat defisit transaksi yang berjalan moderat.

Pemerintah Indonesia terus memacu reformasi struktural untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata sehingga dapat menekan biaya transportasi dan berujung pada penguatan kegiatan ekonomi di seluruh negeri. Pemerintah terus berupaya mengurangi subsidi serta meningkatkan arus masuk investasi asing.

Dear Shareholders,

The year 2016 marked the first year in the implementation of the long term plan of Nasional Re 2016-2020. As stipulated in the plan, the Company currently is in the period of Accelerated Business Growth where it is expected to have already built a strong foundation to enter a period of rapid growth. Therefore, the policy in 2016 is directed to build such solid fundamentals in various aspects so that it can spur the Company's growth and realize the long-term goal of the Company to become a trusted, strong, and growing reinsurance company.

Global Economic Conditions

The world economy in 2016 had to face a disadvantage situation where there was an uneven growth among the economic centers. Although the US economy begins to improve, most of the world economy is still slowing down. And so is the global trade. Meanwhile, financial markets are becoming very volatile due to political shocks, especially British Exit (Brexit).

In the midst of such less conducive situation, Indonesia recorded a growth of Gross Domestic Product (GDP) of 5.02%, higher than the previous year, which was 4.88%. This was driven by strong growth in consumption and household investment. Meanwhile, inflation maintained steady at 3.02%, lower than 3.35% in 2015.

Overall, Indonesia's economy is still resilient in facing global challenges. This shows that Indonesia basically has already had a strong economic fundamental, supported also with the right economic policy by prioritizing fiscal growth and maintaining moderate levels of transaction deficits.

The Government of Indonesia continues to spur structural reforms to accelerate equitable infrastructure development that might reduce transportation costs and lead to strengthening economic activity across the country. The government continues to reduce subsidies and increase inflows of foreign investment.

Peluang dan Tantangan

Kondisi perekonomian dalam negeri yang stabil dan relatif kuat menghadirkan peluang bagi pertumbuhan bisnis Perusahaan. Begitu pula dengan pemulihan pada harga komoditas migas dan batubara di kuartal ke 4 tahun 2016, yang akan memperkuat kinerja ekspor Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2017.

Pertumbuhan Industri Asuransi di Indonesia sepanjang 2016 juga terlihat meningkat, tercermin dari tingginya total pendapatan asuransi, baik asuransi jiwa, umum, maupun syariah. Pasar asuransi jiwa di Indonesia masih sangat besar dan perlu penanganan dari perusahaan-perusahaan yang telah memiliki kesiapan yang memadai dalam hal manajemen, SDM, produk, distribusi dan IT yang unggul.

Namun demikian, tidak adanya kepastian dalam perekonomian global membuat Direksi menyikapinya dengan penuh kehati-hatian. Strategi pertumbuhan yang dicanangkan Direksi di tahun 2016 disusun dengan memperhatikan dinamika global dan mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi.

Kinerja Perusahaan

Pada kesempatan ini, Direksi juga ingin menyampaikan kinerja Perusahaan pada tahun 2016, dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada kedua segmen usaha Perusahaan. Jumlah pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum tercatat sejumlah Rp4,44 triliun, meningkat signifikan 40,95% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp3,15 triliun. Sementara jumlah pendapatan premi segmen bruto Reasuransi Jiwa tercatat sejumlah Rp432,56 miliar atau meningkat 46,07%. Kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum terhadap pendapatan premi bruto Perusahaan adalah sebesar 91,42%.

Peningkatan pendapatan ini berujung pada peningkatan laba bersih Perusahaan. Di tahun 2016, Perusahaan mencatat perolehan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp335,61 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 33,6% jika dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, yakni Rp251,07 miliar. Peningkatan laba tersebut terutama berasal dari pertumbuhan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan beban.

Opportunities and Challenges

A stable and relatively strong domestic economic condition presents opportunities for growth in the Company's business. Similarly, the recovery in oil and gas commodity prices and coal in the fourth quarter of 2016, will strengthen the performance of Indonesian exports and support economic growth in 2017.

The growth of Insurance Industry in Indonesia throughout 2016 is also seen to increase, as reflected by the high total insurance revenue, from life insurance, general, and sharia. The life insurance market in Indonesia is still very large and needs to be handled by companies that already have adequate readiness in terms of management, human resources, products, distribution and excellent IT.

However, the lack of certainty in the global economy has made the Board of Directors be more cautions. The growth strategy proclaimed by the Board of Directors in 2016 was prepared by taking into account the global dynamics and anticipate the potential for economic downturn.

Company Performance

On this occasion, the Board of Directors also wishes to convey the Company's performance in 2016, where there was a significant increase in both business segments of the Company. The gross premium incomes of the General Reinsurance segment was Rp4.44 trillion, a significant increase of 40.95% compared to last year's Rp3.15 trillion. While the total premium income of the Life Insurance Reinsurance segment was Rp432.56 billion or increased 46.07%. The contribution of the gross premium incomes of the General Reinsurance segment to the Company's gross premium incomes was 91.42%.

This increase in revenues resulted in an increase in the Company's net incomes. In 2016, the Company recorded a profit after tax and zakat amounting to Rp335.61 billion, an increase of 33.6% compared to the previous year's gain of Rp251.07 billion. The increase in profit was mainly attributed to higher average income growth when compared to load growth.

Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dalam operasional perusahaan. Realisasi laba setelah pajak dan zakat tersebut adalah sebesar 104,9% dari target yang dibebankan kepada Direksi.

Sumber Daya Manusia

Direksi melihat bahwa untuk dapat mempertahankan pertumbuhan usaha di tengah berbagai perubahan yang terjadi begitu cepat di dalam negeri maupun di luar negeri, Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu merespons perubahan tersebut dengan baik. Itu sebabnya, kebijakan manajemen SDM Perusahaan diarahkan untuk membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dan mampu merespons tantangan-tantangan eksternal demi eksistensi serta keberlangsungan usahanya.

Peningkatan peran strategis manajemen sumber daya manusia tersebut, antara lain diwujudkan melalui kebijakan rekrutmen, penempatan, penggajian/pemberian kompensasi dan pengembangan karier yang berbasis kompetensi. Direksi telah mengarahkan Divisi SDM untuk melakukan analisis jabatan, yang ditujukan untuk menetapkan standar kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan pada semua level. Dengan demikian, Perusahaan mampu memiliki komposisi SDM yang kuat dan kompeten dalam menghadapi perubahan dan tantangan usaha.

Sejalan dengan konsep di atas, Direksi juga meminta diterapkannya strategi rekrutmen yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kompetensi dasar para calon karyawan, yang sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan

Sejalan dengan kebijakan Perusahaan selama ini, yakni senantiasa meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan, di tahun 2016 Direksi juga memastikan Perusahaan melakukan berbagai upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan juga mendorong semua unit usaha untuk juga meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan operasi mereka.

This reflects an increase in efficiency in the Company's operations. The realization of profit after tax and zakat is 104.9% of the target charged to the Board of Directors.

Human Resources

The Board of Directors sees that in order to sustain business growth amid rapid changes occurring at home and abroad, the Company needs human resources that is capable of responding to these changes properly. That is why the Company's human resources management policy is aimed at making the Company more competitive and able to respond to external challenges for the sake of its existence and business sustainability.

The enhancement of the strategic role of human resource management, among others, is manifested through the policies of recruitment, placement, compensation and career development based on competency. The Board of Directors has directed the HR Division to conduct job analysis, aimed at mapping the required competency standards for each position at all levels. Thus, the Company is capable of having a strong and competent human resources composition in the face of business changes and challenges.

In line with the above concepts, the Board of Directors also requests the implementation of appropriate, accurate and rapid recruitment strategies, while taking into account the quality and competence of the candidates, in accordance with the Company's plans.

Corporate Governance

In line with the Company's policy so far, which is constantly improving the implementation of corporate governance, in 2016 the Board of Directors also ensures that the Company makes the best efforts to improve the quality of its corporate governance practices to produce long-term and sustainable economic value. This is done at every level of the organization and operational activities of the Company. The Company also encourages all business units to also improve the quality of GCG implementation in their operating environment.

Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Manajemen tentang *Code of Conduct*, Pedoman *Good Corporate Governance*, Piagam Direksi dan Komisaris, Pedoman Transparansi dan *Disclosure*, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit dan Piagam Sekretaris Perusahaan. Berbagai pedoman tersebut membuktikan keseriusan Perusahaan dalam berupaya meningkatkan kualitas GCG. Direksi juga telah membentuk Tim Pemantau GCG yang tugasnya mengevaluasi hasil audit penilaian GCG.

Tanggung Jawab Sosial

Sebagai warga korporat yang baik, Nasional Re selalu mengedepankan pelaksanaan kegiatan CSR yang sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberi dampak yang optimal dan tidak tergantung pada alokasi dana. Seluruh kegiatan CSR yang dilaksanakan Perusahaan di tahun 2016 diharapkan akan semakin meningkatkan citra perusahaan dan membawa Perusahaan semakin dekat pada masyarakat.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tanggal 18 Juli 2016, Direktur Utama diberhentikan melalui RUPSLB karena diangkat sebagai Direktur di induk perusahaan, sehingga jabatan Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Operasi sampai dengan 31 Desember 2016. Direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Shaifie Zein atas sumbangsinya selama bertugas sebagai Presiden Direktur Nasional Re. Kami yakin di tempat yang baru, beliau juga akan membawa kontribusi yang tak ternilai bagi perkembangan perusahaan.

Apresiasi

Akhir kata, mewakili seluruh anggota Direksi Nasional Re, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya kepada perusahaan. Kami berharap di tahun mendatang, bersama-sama kita dapat meraih prestasi yang lebih gemilang.

The Company has a Management Decree on Code of Conduct, Good Corporate Governance Guidelines, Charter of Directors and Commissioners, Transparency and Disclosure Guidelines, Internal Audit Charter, Charter of Audit Committee and Charter of Corporate Secretary. These guidelines prove the seriousness of the Company in its efforts to improve the quality of GCG. The Board of Directors has also established a GCG Monitoring Team whose task is to evaluate the results of the GCG assessment audit.

Social Responsibility

As a good corporate citizen, Nasional Re always prioritizes the implementation of CSR activities that fit the needs of the community so as to provide optimal impact and not depend on the allocation of funds. All CSR activities implemented by the Company in 2016 are expected to further enhance the Company's image and bring the Company closer to the community.

Change in the Composition of the Board of Directors

On July 18, 2016, the President Director was dismissed through the EGMS since he was appointed as Director in the parent company, so the position of the President Director was concurrently held by the Director of Operations until December 31, 2016. The Board of Directors would like to thank Mr. M. Shaifie Zein for his contribution during his tenure as President Director of Nasional Re. We believe that he will also bring valuable contribution to the development of the new company he serves.

Appreciation

Finally, representing all members of the Board of Directors of Nasional Re, we would like to take this occasion to express our greatest appreciation to all employees for their hard work and dedication to the company. We hope in the coming year, together we can achieve a more brilliant achievement.

Kepada Dewan Komisaris, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas masukan dan dukungan kepada Direksi sepanjang tahun 2016.

To the Board of Commissioners, we would also like to express our greatest gratitude for the input and support to the Board of Directors throughout 2016.

Kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya, ijinkan pula kami menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan dukungan kepada perusahaan.

To customers, business partners and other stakeholders, please allow us to also express our appreciation for the trust and support to the company.

Jakarta, 14 Februari 2017 | February 14, 2017



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP

Plt. Direktur Utama dan Direktur Operasi | Caretaker President Director and Director of Operations



M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRMP, CRGP*
Direktur Utama/President Director

Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP
Direktur Operasi / Director of Operations

Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP
Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia/
Director of Finance & Human Resources

*Periode 1 Januari - 18 Juli 2016/period January 1 - July 18, 2016



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance & Human Resources

Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP**
Plt. Direktur Utama dan Direktur Operasi /
Caretaker President Director and Director of Operations

**Periode 18 Juli - 31 Desember 2016/*period July 18 - December 31, 2016*

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia 2016

Statement of the Board of Commissioners on Responsibility for the Annual Report 2016 of PT Reasuransi Nasional Indonesia

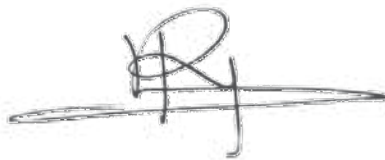
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

We the undersigned hereby declare that all information in this Annual Report 2016 of PT Reasuransi Nasional Indonesia is complete, and that we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

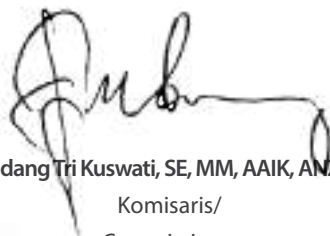
Jakarta, 14 Februari 2017 | February 14, 2017



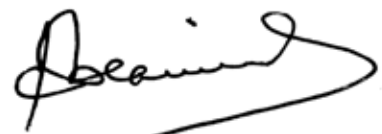
Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris Utama/*President Commissioner*



Raymond Buisson, SE, CRMO, CRGP
Komisaris Independen/
Independent Commissioner



Endang Tri Kuswati, SE, MM, AAIK, ANZIIF
Komisaris/
Commissioner



Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia 2016

Statement of the Board of Directors on Responsibility for the Annual Report 2016 of PT Reasuransi Nasional Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

We the undersigned hereby declare that all information in this Annual Report 2016 of PT Reasuransi Nasional Indonesia is complete, and that we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 14 Februari 2017 | February 14, 2017



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP
Plt. Direktur Utama dan Direktur Operasi /
Caretaker President Director and Director of Operations



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance & Human Resources





Profil Perusahaan

Company Profile



NAMA, ALAMAT DAN INFORMASI UMUM PERUSAHAAN COMPANY NAME, ADDRESS AND GENERAL INFORMATION

Nama Perusahaan PT Reasuransi Nasional Indonesia	Company Name PT Reasuransi Nasional Indonesia
Bidang Usaha Reasuransi	Line of Business Reinsurance
Pendirian Perusahaan 22 Agustus 1994	Establishment August 22, 1994
Kepemilikan <ul style="list-style-type: none">PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99,9998%Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo 0,0002%	Ownership <ul style="list-style-type: none">PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99.9998%Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo 0.0002%
Modal Dasar per 31 Desember 2016 Rp1.800.000.000.000	Authorized capital as of December 31, 2016 Rp1,800,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2016 Rp538.000.000.000	Issued and Fully Paid Capital as of December 31, 2016 Rp538,000,000,000
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2016 201 orang	Total Employees as of December 31, 2016 201 persons
Alamat Kantor Pusat: Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330. Phone: (62-21) 80642500, 3140009, 3149373 (hunting). Fax: (62-21) 3143716, 3909373, 31900430. E-mail: nasionalre@nasionalre.co.id Website: http://www.nasionalre.id	Head Office: Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330. Phone : (62-21) 80642500, 3140009, 3149373 (hunting). Fax : (62-21) 3143716, 3909373, 31900430. E-mail : nasionalre@nasionalre.co.id Website : http://www.nasionalre.id



MAKSUD DAN TUJUAN USAHA GOALS AND OBJECTIVES

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/ umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
2. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/ umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (*broker*) reasuransi.
3. Melakukan retrosesi atau reasuransi butir 1 di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

The goals and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting the government policies and programs in economy and national development in general, in particular running high quality and highly competitive reinsurance business to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles and by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either conventional or sharia.

To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:

1. Reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
2. Reinsurance for general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;
3. Retrocession or reinsurance of point 1 above to insurance and/or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers to conduct part of the reinsurance business under sharia principles by establishing a sharia unit.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN COMPANY'S BRIEF HISTORY

PT Reasuransi Nasional Indonesia, atau disingkat Nasional Re, didirikan berdasarkan akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta H. Umaran Mansjur, SH No. 12 tanggal 08 Agustus 2008 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-68917.AH.01.02 tanggal 24 September 2008, dan perubahannya yang terakhir dengan Akta Notaris H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH No. 53 tanggal 13 Juli 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan suatu unit setingkat Bagian yang dikemudian hari berkembang menjadi Divisi dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) (Persero), yang diberi nama Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha *Professional Reinsurer*. Dengan demikian, walaupun secara *de jure* Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara *de facto* Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak ASKRINDO mendapat ijin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang disamping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ASKRINDO tidak diperkenankan beroperasi sebagai asuransi maupun reasuransi sekaligus, sehingga dilakukan pemisahan menjadi satu entitas tersendiri dimana perusahaan (Nasional Re yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1994) memperoleh ijin operasi sebagai perusahaan reasuransi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Nasional Re melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan Syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi pula berdasarkan syariah Islam, sehingga dapat diadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

PT Reasuransi Nasional Indonesia, or abbreviated as Nasional Re, was established under deed No. 129 dated August 22, 1994 in the presence of Sutjipto SH, Notary in Jakarta, amended by Deed H. Umaran Mansjur, SH. 12 dated August 8, 2008 with the ratification of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter no. AHU-68917.AH.01.02 dated September 24, 2008, and the latest amendment of the Notarial Deed by H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH No. 53 dated July 13, 2015 and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decision Letter no. AHU-AH.01.03-0951082 dated July 13, 2015.

The history of the Company originated from one of departments, which later became the Division of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), namely General Reinsurance Division. This division served as a Professional reinsurer business unit. Hence, according to the law, the Company was established in 1994, but as a matter of fact, the Company has started its business since 1971, since ASKRINDO was granted the permit to operate general reinsurance business as a supporting business, in addition to their core business of Credit Insurance. With the enactment of Law No. 2 of 1992 on Insurance Business, ASKRINDO was not allowed to operate as insurance and reinsurance company concurrently, hence, spin off was undertaken in which the Company (Nasional Re which was formed on August 22, 1994) obtained the operating license as a reinsurance company in 1995 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27/KMK.17/1995 dated January 9, 1995.

On October 28, 2005, Nasional Re started Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate fast growing of Sharia based business, including Sharia-based insurance. The continuous development of Islamic insurance in Indonesia requires that the reinsurance operations base on Islamic law so that a mutually beneficial cooperation can be achieved between the two parties.

Penambahan bidang usaha Reasuransi Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia disahkan dalam Akta Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

Sejak resmi berdiri, Perusahaan mencatat perkembangan yang cukup pesat dan berhasil membangun kepercayaan publik, sebagaimana yang terlihat dari berbagai penghargaan yang diterimanya. Pada tahun 2006, Perusahaan menerima penghargaan sebagai Perusahaan Reasuransi Terbaik, dan pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan sebagai Unit Reasuransi Syariah Terbaik, kedua-duanya berdasarkan versi Majalah Investor. Sedangkan pada tahun 2016, Perusahaan menerima 4 penghargaan sekaligus, yakni:

1. Perusahaan Reasuransi dengan Kinerja Keuangan Terbaik 2016 oleh Warta Ekonomi
2. Reasuransi Terbaik 2016 oleh Majalah Investor
3. Best Reinsurance 2016 oleh Media Asuransi
4. 2nd Best Reinsurance Company 2016 oleh APPARINDO

Perusahaan memasarkan berbagai produk reasuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Pengangkutan, Rangka Kapal, Rangka Pesawat, Kredit, Surety Bond, Kredit, Satelit, Energi, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka dan Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

The expansion to Sharia reinsurance business was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia, legalised by the Notarial Deed No. 42 dated August 10, 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, acting in substitute to notary Sutjipto, SH, in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079HT.01.04.TH.2005 dated August 31, 2005.

Since officially established, the Company recorded a rapid growth and managed to build public confidence, as can be seen from the numerous awards received. In 2006, the Company was awarded as the Best Reinsurance Company and in 2008 was awarded as the Best Sharia Reinsurance Unit, both by Investor Magazine. While in 2016, the Company received four awards, namely:

1. Reinsurance Company with the Best Financial Performance in 2016 by Warta Ekonomi
2. Best Reinsurance 2016 by Investor Magazine
3. Best Reinsurance 2016 by Media Asuransi
4. 2nd Best Reinsurance Company in 2016 by APPARINDO

The Company provides a wide range of reinsurance products, among others Property, Vehicle, Engineering, Transportation, Marine Hull, Aircraft Frame, Credit, Surety Bond, Credit, Satellite, Energy, Liability, Personal Accident, Arts and Life Reinsurance, both for conventional and Sharia Reinsurance.



JEJAK LANGKAH MILESTONES

1994

Nasional Re didirikan di Jakarta sebagai anak perusahaan dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) yang menjalankan usahanya dalam bidang Reasuransi, dengan Modal Dasar awal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus Milyar Rupiah) dan Modal Disetor penuh sebesar RpRp25.000.000.000 (duapuluh lima Milyar Rupiah).

1999

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO selaku Pemegang Saham Mayoritas sebesar Rp25.000.000.000 (duapuluh lima Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp50.000.000.000 (limapuluh Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 47 tanggal 10 November 1999, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-3388 HT.01.04 tanggal 21 Februari 2000.

2000

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp15.000.000.000 (limabelas Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp65.000.000.000 (enampuluh lima Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 37 tanggal 16 Juni 2000, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-00902 HT.01.04 tanggal 18 Januari 2003.

2005

1. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor dari sebelumnya Rp65.000.000.000 (enampuluh lima Milyar Rupiah) menjadi Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-24079 HT.01.04 Th 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
2. Pada tanggal 28 Oktober 2005 Nasional Re memulai usaha Reasuransi Syariah, hal ini dilakukan untuk menampung bisnis reasuransi dengan prinsip syariah, dimana sesuai ketentuan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah harus menempatkan reasuransinya pada perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Modal Disetor unit Reasuransi Syariah perusahaan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) sebagaimana disebutkan pada butir 1.

1994

Nasional Re is established in Jakarta as a subsidiary of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) engaging in the business of reinsurance, with the initial authorized capital of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and fully paid-up capital of RpRp25,000,000,000 (twenty five billion rupiah).

1999

Additional paid-up capital from ASKRINDO as Majority Shareholder, amounting to Rp25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) so that the Company's paid-up capital increased to Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah), according to the Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 47 dated November 10, 1999, as ratified by the Decree of the Ministry of Justice of RI No. C-3388 HT.01.04 dated February 21, 2000.

2000

Additional paid-up capital from ASKRINDO amounting to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) so that the Company's fully paid capital became Rp65,000,000,000 (sixty five billion rupiah) according to the Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 37 dated June 16, 2000, as ratified by the Decree of Department of Justice No. C-00 902 HT.01.04 dated January 18, 2003.

2005

1. Additional paid-up capital from PT Askrindo, as a Shareholder amounted to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) so that the paid-up capital increased from previously Rp65,000,000,000 (sixty five billion rupiah) to Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) in accordance with the Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 42 dated August 10, 2005, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-24079 HT.01.04 Th 2005 dated August 15, 2007.
2. On October 28, 2005, Nasional Re entered into Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate the reinsurance business with Islamic principles, whereas in accordance with the provision that every sharia insurance company must put its reinsurance in its insurance company with sharia principles. Paid-in Capital of the Company's Sharia reinsurance unit amounted Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) as mentioned in point 1.

2007

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor Nasional Re dari sebelumnya Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Milyar Rupiah) menjadi Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima Milyar Rupiah), sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 108 tanggal 22 Februari 2007, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: W7-HT.01.04-4562 tanggal 15 Agustus 2007.

2011

1. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari Rp100.000.000.000 (seratus Milyar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus Milyar Rupiah), sesuai Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Departemen Hukum & HAM RI Nomor AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
2. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp53.000.000.000 (lima puluh tiga Milyar Rupiah), yang terdiri dari tanah dan gedung kantor Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima Milyar Rupiah) dan pengalihan dana cadangan umum sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah), sehingga Modal Disetor menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tigapuluh delapan Milyar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima Milyar Rupiah), sebagaimana dicatat dalam Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM Nomor: AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
3. Tanggal 01 November 2011 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating **A- (A minus)** dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

2007

Additional paid-up capital from PT Askrindo as a Shareholder amounted to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) so that the paid-up capital increased from previously Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) become Rp85,000,000,000 (eighty five billion rupiah) in accordance with the Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 108 dated February 22, 2007, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No.W 7-HT.01.04-4562 dated August 15, 2007.

2011

1. Change in the Company's authorized capital from Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) to Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah), by Notary Umaran Mansjur, SH No. 9 dated July 29, 2011, with the ratification of the Department of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-53290.AH.01.02 dated November 1, 2011.
2. Additional paid-up capital from PT Askrindo as a Shareholder amounted to Rp53,000,000,000 (fifty three billion rupiah), in the form of land and office buildings on Jl. Cikini Raya No. 99 Central Jakarta, worth Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) and the transfer of general reserve funds amounting Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah), so that the paid-up capital became Rp138,000,000,000 (one hundred thirty eight billion rupiah) in accordance with Notarial Deed of Umaran Mansjur, SH No. 9 dated July 29, 2011, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHU- 53290.AH.01.02.
3. On November 01, 2011, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained **A- (A minus)** rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia meluncurkan layanan terbarunya berupa layanan reasuransi jiwa berbasis web, yaitu www.e-lifere.com pada tanggal 08 Februari 2013.
2. e-lifeRe mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai layanan asuransi jiwa pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang menggunakan layanan web pada tanggal 08 Februari 2013.
3. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Milyar Rupiah) sehingga Modal Disetor menjadi Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 9 tanggal 03 Mei 2013, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-24996 tanggal 20 Juni 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating **A** dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

2014

1. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp150.000.000.000 (seratus limapuluh Milyar Rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga Milyar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 20 tanggal 13 Oktober 2014.
2. Tanggal 03 November 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating A (A) dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
3. Peningkatan Modal Dasar perusahaan dari Rp400.000.000.000 (empat ratus Milyar Rupiah) menjadi Rp1.800.000.000.000 (satu trilyun delapan ratus Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH Nomor 72 tanggal 17 Desember 2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.
4. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp100.000.000.000 (seratus Milyar Rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor menjadi Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga Milyar Rupiah) dari sebelumnya Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH Nomor 72 tanggal 17 Desember

2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia launched its newest webbased life reinsurance services, namely www.e-lifere.com on February 08, 2013.
2. e-lifeRe was awarded an award from the Indonesian Record Museum (MURI) as the first life insurance services in Indonesia, even in the world, to use web-based services on February 08, 2013.
3. Additional paid-up capital from PT Askrindo as Shareholder amounted to Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) so that the paid-up capital became Rp213,000,000,000 (two hundred and thirteen billion rupiah) in accordance with Notarial Deed of Umaman Mansjur, SH, No.9 dated May 03, 2013, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHUAH.01.10-24996 dated June 20, 2013.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an **A** rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia PEFINDO.

2014

1. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah) in the form of fresh money so that the Company's paid-up capital became Rp363,000,000,000 (three hundred and sixty three billion rupiah) from its previous Rp213,000,000,000 (two hundred thirteen billion rupiah), by the Deed of Notary Hadijah, SH No. 20 dated October 13, 2014.
2. On November 3, 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an A(idn) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
3. Additional authorized capital from previously Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah) to Rp1,800,000,000,000 (one trillion eight hundred billion rupiah), by the Deed of Notary Bambang Suprianto, SH No. 72 dated December 17, 2014, with the approval of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-13005.40.20.2014 dated December 17, 2014.
4. Additional paid-up capital from ASKRINDO amounted to Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) in the form of fresh money, so that the paid-up capital became Rp463,000,000,000 (four hundred and sixty three trillion rupiah) from Rp363.000.000.000 (three hundred and sixty three billion rupiah), by the Deed of Notary Bambang Suprianto, SH No. 72 dated December 17, 2014, with the

2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.

approval of the Ministry of Law and Human rights No. AHU-13005.40.20.2014 December 17, 2014.

2015

- a) Peningkatan Modal Dasar dari ASKRINDO menjadi sebesar Rp.1.800.000.000 (satu triliun delapan ratus milyar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp.400.000.000.000 (empat ratus Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN, MH Nomor 53 tanggal 13 Juli 2015 yang disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.
- b) Penambahan Modal Disetor menjadi sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan Milyar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga Milyar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN, MH Nomor 53 tanggal 13 Juli 2015 yang disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0951082 tanggal 13 Juli 2015.
- c) PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating AA-(idn)/BB(int'l) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 01 November 2016.

2015

- a) Increase in authorized capital from ASKRINDO to become Rp.1.800.000.000 (one trillion eight hundred billion rupiah) from the previous Rp.400.000.000.000 (four hundred billion rupiah) by the Deed of Notary Bambang Suprianto, SH, SpN, MH Number 53 dated July 13, 2015 was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0951082 dated July 13, 2015.
- b) Additional paid-up capital amounted to Rp538,000,000,000 (five hundred thirty eight billion rupiah) from Rp463,000,000,000 (four hundred sixty three billion rupiah) by the Deed of Notary Bambang Suprianto, SH, SpN, MH Number 53 dated July 13, 2015 was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.03-0951082 dated July 13, 2015.
- c) PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained the AA-(idn)/BB (int'l) rating from Fitch Ratings Indonesia rating agency on November 1, 2016.



KEGIATAN USAHA DAN AKTIFITAS USAHA BUSINESS ACTIVITIES

Reasuransi Umum Konvensional

Jenis-jenis produk reasuransi umum konvensional adalah *facultative reinsurance* dan *treaty reinsurance*. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:

1. Harta Benda
2. Kendaraan Bermotor
3. Pengangkutan
4. Rangka Kapal
5. Rangka Pesawat
6. Satelit
7. Energi
8. Rekayasa
9. Tanggung Gugat
10. Kecelakaan Diri
11. Kredit & Jaminan
12. Aneka

Reasuransi Jiwa Konvensional

Nasional Re juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (*individu*) maupun kelompok (*group*). Pertanggungjawaban reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri (*stand alone*) maupun sebagai tambahan (*rider*).

- Reasuransi Jiwa
 - Dengan pemeriksaan kesehatan
 - Tanpa pemeriksaan kesehatan
 - Reasuransi jiwa kredit
- Reasuransi Kecelakaan Diri
 - Meninggal dunia karena kecelakaan
 - Cacat tetap karena kecelakaan
 - Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan
- Reasuransi Kesehatan
 - Rawat Inap
 - Rawat Jalan

Reasuransi Syariah (Umum dan Jiwa)

Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional, baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun, yang membedakannya dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya *risk sharing* diantara peserta, dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Nasional Re sebagai perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (*tabarru*) dan tidak ikut menanggung risiko.

Conventional General Reinsurance

The types of product of conventional general reinsurance are facultative reinsurance and treaty reinsurance. The insurance branches are as follows:

1. Properties
2. Motor
3. Marine Cargo
4. Marine Hull
5. Aviation
6. Satellites
7. Energy
8. Engineering
9. Liability
10. Personal Accident
11. Credit & Suretyship
12. Miscellaneous

Conventional Life Reinsurance

Nasional Re also provides conventional life reinsurance capacity for local life insurance companies, including life insurance, personal accident and health, both individual and group. The reinsurance coverage is either independently (*stand alone*) or as additional (*rider*).

- Life Reinsurance
 - With medical checkup
 - Without medical checkup
 - Credit Life Reinsurance
- Personal Accident Reinsurance
 - Accidental Death
 - Accidental permanent disablement
 - Accidental Hospital Expenses
- Medical Reinsurance
 - Inpatient
 - Outpatient

Sharia Reinsurance (General and Life)

In Sharia Reinsurance, the products are the same with Conventional Reinsurance products, both for General Reinsurance and for Life Reinsurance. The difference is in the risk sharing among the participants, and there is no transfer of risk from the participants to the insurance company, or from insurance company to reinsurers. Nasional Re as the Reinsurance company in this case acts as the operator or manager of participants' fund (*tabarru*) and does not bear the risk.



VISI DAN MISI VISION AND MISSION

VISI

"Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh".

Penjelasan Visi

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka Nasional Re harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global dimana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha sertadidukung oleh ketangguhan yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

MISI

- A. Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
- B. Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
- C. Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada *stakeholders* lainnya.

Penjelasan Misi

Dengan menjadi perusahaan yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh, maka perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit keuangan negara sebagai akibat dari terserapnya premi domestik kepada reasuradur dan retrosesioneer di luar negeri.

Dengan menjadi perusahaan yang semakin dipercaya, semakin tangguh dan semakin bertumbuh pesat, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menyerap kapasitas pertanggungan asuransi dalam negeri, sehingga semakin besar pula premi yang dapat diretensi sendiri oleh reasuradur lokal.

Pernyataan Persetujuan atas Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan visi dan misi tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, sesuai dengan SK 49/KEP/DIR/IX/2014 tentang Penetapan MVVM (*Mission, Vission, Values, Meaning*) PT Reasuransi Nasional Indonesia.

VISION

"To be the most trusted, strong, and growing reinsurance Company".

Explanation

As a company that manages the financial risks of the business partners, Nasional Re should strive to be a company that is trustworthy and reliable even for business partners, especially in the global circumstances in which trust is very hard to find. To obtain a high level of trust of the business partners, the company should be strong in many areas, particularly the areas of finance, information technology, and human resources. With the high level of trust from business partners and supported by the resilience of the company, the company has a great opportunity to continue to grow from year to year.

MISSION

- A. To provide services and solutions of general and life reinsurance, both for conventional and sharia products.
- B. To provide services for the National, Regional and International markets.
- C. To provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and capacity of national insurance as well as benefits to other stakeholders.

Explanation

Becoming the most trusted, strong, and growing Company, Nasional Re can help the government reduce the national financial deficits as a result of the absorption of the domestic premium to foreign reinsurer and retrocessionaire.

By becoming more credible, more resilient, and more rapidly growing Company, the Company's ability to absorb the capacity of domestic insurance coverage gets greater, as well as greater premium can be retained by local reinsurers.

Consent Statement on Vision and Mission

The aforementioned Vision and Mission statement has been approved by the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia, in its Decree 49/KEP/DIR/IX/2014 on the Establishment of MVVM (*Mission, Vision, Values, Meaning*) of PT Reasuransi Nasional Indonesia.



NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES

Nilai-Nilai ditetapkan sebagai pedoman yang memandu sikap dan perilaku seluruh pegawai Perusahaan dalam aktifitas kesehariannya. Nilai-nilai Perusahaan dilengkapi definisi yang jelas serta panduan perilaku yang menjadi pedoman atas tindakan yang boleh (*Dos*) dan tidak boleh dilakukan (*Don'ts*) sehingga seluruh insan dalam Perusahaan memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi sesuatu hal.

Integritas

Menjunjung tinggi kebenaran, mematuhi ketentuan yang berlaku dan terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun.

Profesionalisme

Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas, mempunyai pandangan yang luas serta mengedepankan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

Teamwork

Bekerja dengan mengutamakan kerjasama tim, mengembangkan sikap saling membantu, dan saling menghargai untuk mencapai kinerja yang efektif.

Service Excellence

Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan layanan dan solusi terbaik demi terciptanya hubungan jangka panjang.

Fairness

Menghormati hak-hak orang lain serta bertindak adil memberi peluang dan kesempatan yang sama.

Values are set as guidelines that drive the attitudes and behavior of all employees of the Company in their day-to-day activities. The Company's values include clear definitions and behavior guidelines that become the directive of the Do's and Don'ts so that all employees in the Company have the same understanding towards certain issues.

Integrity

Upholding truth, in compliance with the current requirements and being open to constructive criticism.

Professionalism

Always improving skills and knowledge in performing duties, having a broad view and promoting the Company's interests above personal interests

Teamwork

Working under teamwork, developing mutual aid and mutual respect in order to achieve effective performance.

Service Excellence

The ability to understand the needs of customers by giving the best services and solutions for the creation of a long-term relationship.

Fairness

Respecting others' rights and being fair to give equal opportunities.



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS COMPOSITION

Hingga 31 Desember 2016, komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
As of December 31, 2016, the composition of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia is as follows:

No.	Pemegang Saham Shareholders	Prosentase Saham Share Percentage
1	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
2	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	0,0002%



WILAYAH OPERASI ATAU JARINGAN CABANG OPERATIONAL AREAS OR NETWORK OF BRANCHES

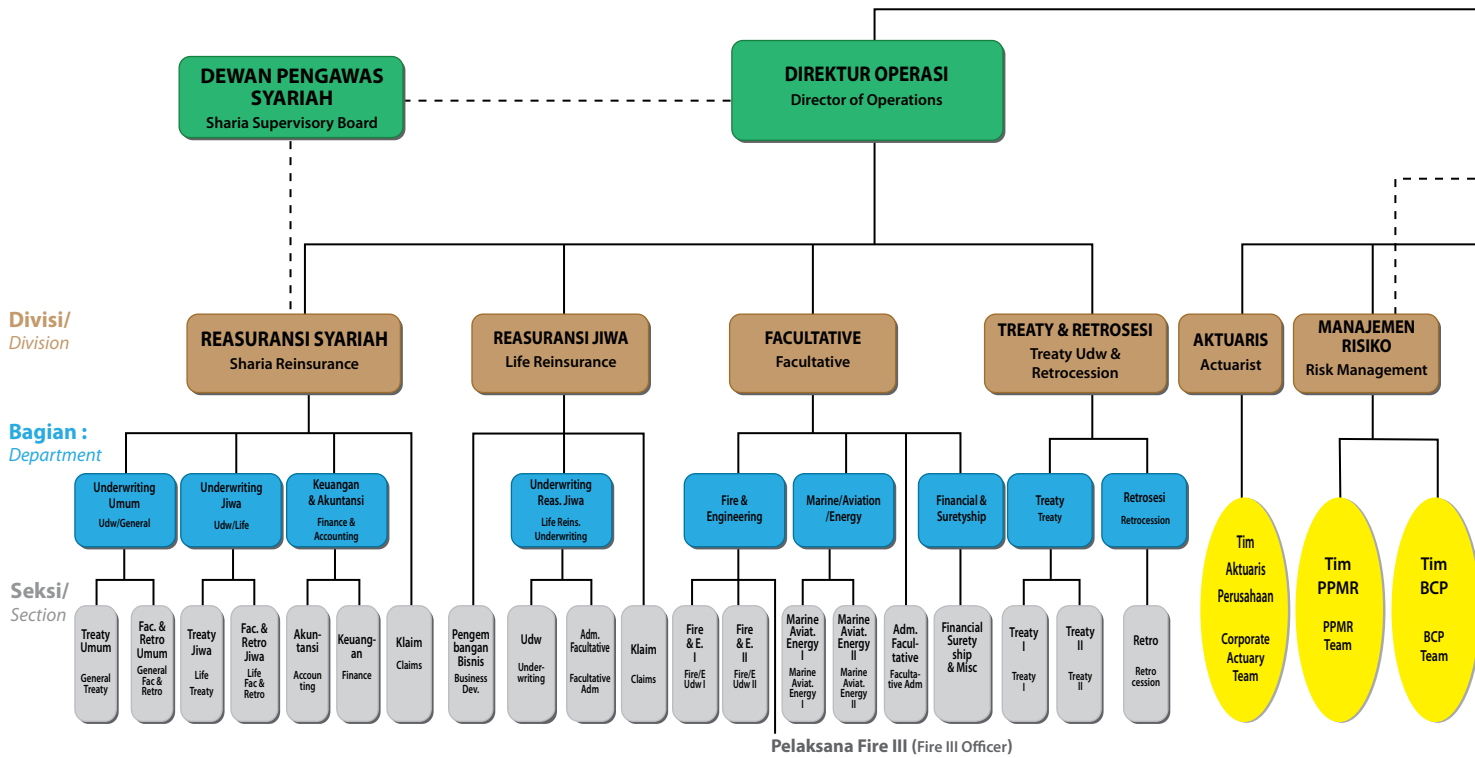
Dalam menjalankan operasinya dan sesuai kebutuhannya, Nasional Re tidak membuka kantor cabang atau jaringan, selain dari kantor pusat yang berada di Jakarta.

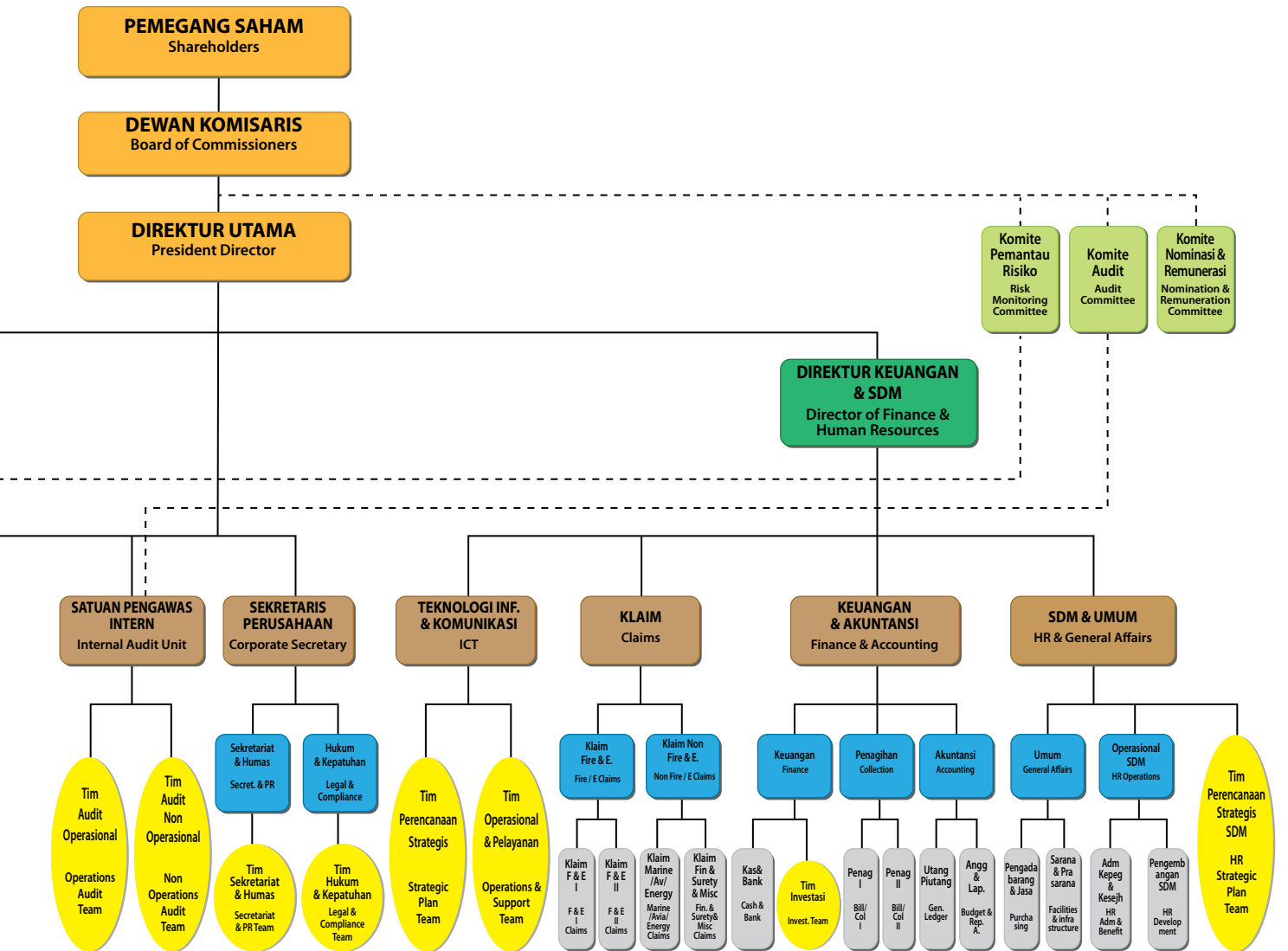
In carrying out its operations and according to its needs, Nasional Re does not open any branch offices or network, other than the headquarters in Jakarta.





STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE







IDENTITAS DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' IDENTITY



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP **Komisaris Utama/President Commissioner**

Lahir di Jakarta tanggal 26 Februari 1960. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1985, serta Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Management PPM, Jakarta tahun 2004. Berkarir di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sejak tahun 1987. Sepanjang karirnya, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Bisnis. Dipercaya menduduki sebagai Komisaris Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Juni 2010.

Born in Jakarta on February 26, 1960. He earned a Bachelor Degree from Faculty of Economics, University of Jayabaya, Jakarta in 1985, and a Master Degree from PPM School of Management, Jakarta in 2004. His career began at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in 1987. He served many strategic positions, including as Suretyship Division Head, a position which he still holds until today. He serves as President Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia since June 2010.

Endang Tri Kuswati, SE, MM, AAIK, ANZIIF **Komisaris/Commissioner**

Lahir di Pati, 24 Maret 1977. Meraih gelar Sarjana (S1) Manajemen Pemasaran serta Pasca Sarjana (S2) Manajemen Risiko di Universitas Indonesia. Berkarir di PT Asuransi Commercial Union, PT CGU Insurance, PT Aviva Insurance, dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Sepanjang karirnya, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Born in Pati on March 24, 1977. She earned a Bachelor Degree from Marketing Management and a Master Degree from Risk Management at University of Indonesia. Her career at PT Asuransi Commercial Union, PT CGU Insurance, PT Aviva Insurance, and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). She served many strategic positions, and currently as Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia.



Raymond Buisson, SE, CRMO, CRGP
**Komisaris Independen/
Independent Commissioner**

Pria, kelahiran Semarang tanggal 1 April 1960. Menempuh pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Jurusan Administrasi Keuangan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah tahun 1982, serta memperoleh gelar Strata 1 (S1) Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Mpu Tantular, Jakarta tahun 2000. Pernah bertugas pada bagian akunting dan keuangan di beberapa Perusahaan. Menjabat sebagai Direktur Jakarta Insurance Institute (2002-Juli 2010), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2004-31 Desember 2006), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2007-31 Desember 2010). Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia (Juni 2012-sekarang).

Born in Semarang on April 1, 1960. He earned his education in the Corporate Administration Expert, majoring Financial Administration from University Diponegoro, Semarang, Central Java, in 1982, and Bachelor Degree in Financial Management from Faculty of Economics of University of Mpu Tantular, Jakarta in 2000. He once served in many companies in the Accounting & Financial Division. He was the Director at Jakarta Insurance institute (2002-July 2010), Member of the Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2004- December 31, 2006), Member of Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2007- December 31, 2010). He serves as an Independent Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia (June 2012- now).

Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec
**Komisaris Independen/
Independent Commissioner**

Pria, kelahiran Tanjung Enim, 11 Desember 1957. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, S2 di Thammasat University, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Global Prima Utama (2006-2014), Ketua Dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Jogja (ketua Dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Jogja), Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Kementerian Keuangan (2011-2012), Anggota Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (2009-2012), Rektor Universitas Islam Indonesia (2006-2016). Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia (Juni 2012-sekarang).

Born in Tanjung Enim, December 11, 1957. He earned his education in Bachelor degree in Economics at Gadjah Mada University, S2 at Thammasat University, and S3 at Gadjah Mada University. He served as President Commissioner of PT Global Prima Utama (2006-2014), Chairman of Supervisory Board of Jogja Regional Bank (Chairman of Supervisory Board Regional of Jogja Bank), Assistance Team of Minister of Finance on Fiscal Decentralization Ministry of Finance (2011-2012), Member of The Board Commissioners of the National Consumer Protection (BPKN) (2009-2012), Rector of Islamic University of Indonesia (2006-2016). He serves as an Independent Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia (June 2012- now).



IDENTITAS DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' IDENTITY



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAAIJ, AIIS, CRMP, CRGP

Direktur Operasi/Director of Operations

Kelahiran Cirebon, tanggal 20 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dari Agribisnis-Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 dan meraih gelar Magister Management (Marketing) dari Universitas Mercubuana Jakarta tahun 2012. Mengawali karir di Industri Asuransi sebagai Management Trainee di PT Asuransi Ramayana, Tbk tahun 1995, dipercaya sebagai Kepala Divisi Underwriting Reasuransi tahun 2002-Agustus 2010. Bergabung dan menjabat sebagai Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Agustus 2010.

Born in Cirebon, on August 20, 1970. Earning a Bachelor degree in Agribusiness from Bogor Institute of Agriculture in 1994 and a Master in Management (Marketing) from Mercubuana University, Jakarta, in 2012. He started his career in Insurance Industry as a Management Trainee at PT Asuransi Ramayana Tbk. In 1995, He was promoted to be Head of Underwriting/Reinsurance Division in 2002-August 2010. He has been serving as Director of Operations at PT Reasuransi Nasional Indonesia since August 2010.

Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP, CRGP

Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia/ Director of Finance & Human Resources

Kelahiran Jakarta tanggal 26 Mei 1958. Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Universitas Islam Jakarta tahun 1996 dan gelar (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jakarta tahun 2001. Karir pertamanya dirintis sebagai Pegawai Pelaksana Bagian Reasuransi Kerugian PT Asuransi Kredit Indonesia tahun (1978-1979), Pelaksana Penagihan (1979-1982) dan sebagai Kepala Seksi Penagihan Reasuransi Kerugian (1982-1994). Bertugas di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian Underwriting Treaty (Januari 1995-April 2000), Diangkat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (Mei 2000-Juli 2004) dan sebagai Kepala Divisi Klaim (Agustus 2004-Agustus 2008). Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia sejak September 2008 sampai sekarang.

Born in Jakarta on May 26, 1958. He earned a Bachelor degree from University of Islam Jakarta in 1996 and Master's degree from School of Economic Studies IPWIJA, Jakarta, in 2001. He built his career at ASKRINDO as General Reinsurance Division officer (1978-1979), the Collection Officer (1979-1982) and Head of Collection Division of General Reinsurance Division (1982-1994). He was appointed as Treaty Underwriting Department Head at PT Reasuransi Nasional Indonesia (January 1995-April 2000), Finance and Accounting Division Head (May 2000-July 2004) and Claim Division Head (August 2004-August 2008). He serves as Director of Finance & Human Resources since September 2008 until now.



KEGIATAN PERUSAHAAN CORPORATE EVENTS



Turnamen Catur Nasional Re Mengundang *Cedants*, 22 Juli 2016 |
Nasional Re Chess Tournament Inviting *Cedants*, July 22, 2016



FunRun HUT Nasional Re, 20 Agustus 2016 |
Nasional Re Anniversary FunRun, August 20, 2016



CSR HUT Nasional Re ke Yayasan Thalassemia Indonesia, 22 Agustus 2016 |
Nasional Re Anniversary CSR to Thalassemia Indonesia Foundation, August 22, 2016



Turnamen Nasional Re GolfPlus, 28 Agustus 2016 |
Nasional Re GolfPlus Tournament, August 28, 2016



Turnamen Mancing Nasional Re Mengundang *Cedants*, 3 September 2016 |
Nasional Re Fishing Tournament Inviting *Cedants*, September 3, 2016



Tim Gerak Jalan Nasional Re pada AAUI Cup 2016, 18 September 2016 |
The Nasional Re Race Walking Team at AAUI Cup 2016, September 18, 2016



Outing Internal ke Bukittinggi, Sumatera Barat, 23-25 September 2016 |
Internal Outing to Bukittinggi, West Sumatera, September 23-25, 2016



Milad Divisi Reasuransi Syariah, 28 Oktober 2016 |
Anniversary of Sharia Reinsurance Division, October 28, 2016



KEPALA DIVISI DIVISION HEADS/SENIOR MANAGERS



1. Aviantono Yudihariadi P, S.Kom, AAAIK, CHRP, CRMP (Kepala Divisi SDM & Umum/HR & General Affairs Division Head)
2. Agus Supriadi, SH, MM, AAAIK, QIP, AIIS, CRMO (Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Division Head)
3. Sukmo Prayogo, B.BUS, ANZIIF (FELLOW) CIP, AIIS, CRMP (Kepala Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi/Information & Communication Technology Division Head)
4. Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMO (Kepala Divisi Treaty & Retrosesi/Treaty Underwriting & Retrocession Division Head)
5. Cendekiawan, SH, CRMO (Kepala Divisi Manajemen Risiko/Risk Management Division Head)
6. Sunarso, SE, MM, Ak, CA, AAAIK, CFP®, CSA®, CRMP, AIIS (Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi/Finance & Accounting Division Head)



7. Adam Kurniawan, S.Kom, AMII, ACII, FIIS, CRMP (Kepala Divisi Reasuransi Syariah/Sharia Reinsurance Division Head)
8. Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, CA, CRMP (Kepala Satuan Pengawas Intern/Internal Audit Unit Head)
9. Bagdja Hermawan, SH, MM (Kepala Divisi Klaim/Claims Division Head)
10. Ari Priasto, SE, IPGDI, CRMP (Kepala Divisi Reasuransi Jiwa/Life Reinsurance Division Head)
11. Nyoman Anggara, SE (Kepala Divisi Facultative/Facultative Division Head)
12. Faried Susanto, SE, AAAIJ, FSAI, AIIS, CRMP (Aktuaris Perusahaan/Corporate Actuary Division Head)

Susunan Pejabat

Middle Management

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION
1	FARIED SUSANTO, SE, AAAIJ, FSAI, AIIS, CRMP	Kepala Divisi Aktuaris Perusahaan Corporate Actuary Division Head
2	SUNARSO, SE, MM, AK, CA, AAAIK, CFP®, CSA®, CRMP, AIIS	Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Finance & Accounting Division Head
3	BAGDJA HERMAWAN, SH, MM	Kepala Divisi Klaim Claims Division Head
4	CENDEKIAWAN, SH, CRMO	Kepala Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division Head
5	ARI PRIASTO, SE, IPGDI, CRMP	Kepala Divisi Reasuransi Jiwa Life Reinsurance Division Head
6	ADAM KURNIAWAN, S.KOM, ACII, AMII, FIIS, CRMP	Kepala Divisi Reasuransi Syariah Sharia Reinsurance Division Head
7	SUBAGIO ISTIARNO, SE, MM, AK, CRMP, QIA	Kepala Divisi SPI Internal Audit Unit Head
8	AVIANTONO YUDIHARIADI P., S.KOM, AAAIK, CHRP, CRMP	Kepala Divisi SDM & Umum Human Resources & GA Division Head
9	AGUS SUPRIADI, SH, MM, AAAIK, QIP, AIIS, CRMO	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Division Head
10	SUKMO PRAYOGO, B.Bus, ANZIIF (Fellow) CIP, AIIS, CRMP	Kepala Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Information & Communication Technology Division Head
11	NYOMAN ANGGARA S., SE	Kepala Divisi Facultative Facultative Division Head
12	ERLAN RISDIYANTO, SE, ACII, AMII, CRMO	Kepala Divisi Treaty & Retrosesi Treaty & Retrocession Division Head
13	SETYO AJI NUGROHO, SE, AK, AAAIJ, CRMO	Kepala Bagian Akuntansi Accounting Department Head
14	EDDY SARWONO, SE	Kepala Bagian Keuangan Finance Department Head
15	SRI UTAMI, SE, AAAIK	Kepala Bagian Penagihan Billing & Collection Department Head
16	ELISMAN HALOMOAN T., SE	Kepala Bagian Klaim Fire/Engineering Fire/Engineering Claim Department Head
17	EKO BUDI HARTANTO, SE, AAAIK	Kepala Bagian Klaim Non Fire Non Fire Claim Department Head
18	MULKAN LUBIS, SE, AAIK, CRMO	Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko Planning Development & Risk Management (PDRM) Department Head
19	DANIA VIRJIYANTI, SE, AAAIJ	Kepala Bagian Teknik & Adm. Reasuransi Jiwa Life Reinsurance & Administration Department Head

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION
20	R. DJOKO SLAMET PRASETIYO, SE, AMII, AIIS , CRMO	Kepala Bagian Underwriting Umum Syariah Sharia General Underwriting Department Head
21	MOCHAMMAD KAMIL, SE, CSA*, CRMO	Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi Syariah Sharia Finance & Accounting Department Head
22	SHANTI NAROLITA SARI, SE, AAII, AIIS , CRMO	Kepala Bagian Underwriting Jiwa Syariah Sharia Life Underwriting Department Head
23	SRI UTOMO, SE, MM, CRMP	Kepala Bagian SPI Senior Auditor
24	ELY AGUSTINUS MAWUNTU, SE	Kepala Bagian SPI Senior Auditor
25	YUSUF MAULANA, SH, PIA	Kepala Bagian SPI Senior Auditor
26	WILFRID G.M. TAMPUBOLON, SE	Kepala Bagian SPI Senior Auditor
27	TEGUH TJAHJONO, SE, AAAIK ,CRMP, CIHRM	Kepala Bagian SDM Operasional HR Operational Department Head
28	SULIS PAHALAWIAN, SE, CSA*, CRMO	Kepala Bagian Umum Gen. Affairs Department Head
29	IGN. NUGROHO HARDO, S.PD, M.SI, CRMP	Kepala Bagian Hukum & Kepatuhan Legal & Compliance Department Head
30	DANAN SATRIA JANTI, SE	Kepala Bagian Sekretariat & Humas Secretariat & PR Department Head
31	WISHNU INDRA PRADJA, S. KOM	Kepala Bagian Operasional & Layanan TIK ICT Operations & Services Department Head
32	ALI IMRAN, S.KOM	Kepala Bagian Perencanaan & Strategi TIK ICT Planning & Strategy Department Head
33	HUSNUL KHULUQ, S.PD, M.SI	Kepala Bagian Underwriting Facultative-Fire/Engineering Fire/Engineering Facultative Underwriting Department Head
34	M. ZULFIKRI DAULAY, SE	Kepala Bagian Underwriting Facultative-Financial & Casualty Financial & Casualty Facultative Underwriting Department Head
35	OKY NIRWANA M., SE, AAAIK	Kepala Bagian Underwriting Facultative-Marine/Aviation/Energy Marine/Aviation/Energy Facultative Underwriting Department Head
36	R. ARYA SIDHARTA, ST, ACII, AAII, FIIS ,CRMP	Kepala Bagian Retrosesi Retrocession Department Head
37	CHRISTOP MARHASAK, ST, SE, AMII, AAII, ICPU	Kepala Bagian Underwriting Treaty Treaty Underwriting Department Head

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION
38	MASYHAR HISYAM WISANANDA, S.Si, ASAI	Kepala Seksi Aktuaris Perusahaan Corporate Actuary Section Head
39	HERU SUKOCO, SE, AAAIK	Kepala Seksi Anggaran Budgeting & Reporting Section Head
40	ANDRY SULISTIO NUGROHO, SE, MSI, CSA®	Kepala Seksi Investasi Investment Section Head
41	HARIS WIBISONO, SE	Kepala Seksi Investasi Investment Section Head
42	SRININGSIH, SE	Kepala Seksi Kas & Bank Cash & Bank Section Head
43	RAHMA DHANI R. M., SE	Kepala Seksi Penagihan I Billing I Section Head
44	WINDI WIJAYA, S. IP, AAAIJ	Kepala Seksi Penagihan II Billing II Section Head
45	RITA MAGDALENA S., SE	Kepala Seksi Utang Piutang Gen. Ledger Section Head
46	ENDANG SULIASWATI, A.MD, AS.K	Kepala Seksi Klaim Fire/Engineering I Fire/Engineering I Section Head
47	DINI MUSTIKASARI, SE	Kepala Seksi Klaim Fire/Engineering II Fire/Engineering II Section Head
48	I WAYAN ARTAGIRI, SE	Kepala Seksi Klaim Non Fire-Marine Non Fire-Marine Section Head
49	INDRA PERMANA, SE, AMII	Kepala Seksi Klaim Non Fire-Varia Non Fire-Miscellaneous Section Head
50	L. ROBBY WAROUW, SE, MM	Kepala Seksi BCP Business Continuity Plan Section Head
51	Y. HERMAWAN WIDIYANTO, SE	Kepala Seksi PPMR PDRM Section Head
52	DEA RAMDHANI, S.SI	Kepala Seksi PPMR PDRM Section Head
53	ANGGORO BUDI SANTOSO	Kepala Seksi Klaim Reasuransi Jiwa Life Reinsurance Claim Section Head
54	MARLINA SARI, SE, AAAIJ	Kepala Seksi Pengembangan Bisnis Jiwa Life Business Development Section Head
55	Dr. DIAN INDRIASARI	Kepala Seksi Underwriting Jiwa Life Underwriting Section Head
56	LUCKY ARYANTO, SE	Kepala Seksi Underwriting Jiwa-Admin. Life Reinsurance Admin. Section Head
57	NANI RATNASARI, SE, CSA®	Kepala Seksi Keuangan Syariah Sharia Finance Section Head
58	KURNIAWAN YULI ASMORO, SE, AK, MSI	Kepala Seksi Akuntansi Syariah Sharia Accounting Section Head
59	TUTY HIKMAWATY CHOLID, SE, AAAIJ, AAAIK	Kepala Seksi Underwriting Jiwa Syariah-Treaty Sharia-Life Treaty Underw. Section Head

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION
60	HIDAYAT, SE, AAAIJ, AIIS	Kepala Seksi Underwriting Jiwa Syariah-Facultative Sharia-Life Facultative Underw. Section Head
61	DAVID NURVANIDA, S. SI, AMII, AAIK, ACII	Kepala Seksi Underwriting Umum Syariah-Facultative Sharia- General Treaty Underw. Section Head
62	MISBAHUDDIN, SE	Kepala Seksi Underwriting Umum Syariah-Treaty Sharia- General Facultative Underw. Section Head
63	PITRI WIYANI, SE, AAAIJ, AIIS	Kepala Seksi Klaim Syariah Sharia Claims Section Head
64	DEWI ROSEMASARI, SE, MM, AK, QIA, CA	Kepala Seksi SPI Junior Auditor
65	KANISCORO MARTIN S.	Kepala Seksi SPI Junior Auditor
66	HERAWATI S. MANALU, SE	Kepala Seksi SPI Junior Auditor
67	ANGGA PERMADI, ST, CHRP	Kepala Seksi Adm. Kepegawaian & Kesejahteraan HR Admin. & Benefit Section Head
68	ADI SETIAWAN, SE	Kepala Seksi Peng. Barang & Jasa Purchasing Section Head
69	NUR EPRIL LISTIATUN	Kepala Seksi Pengembangan SDM HR Development Section Head
70	BAMBANG SETIAWAN, SE, MM, CHRP	Kepala Seksi Perencanaan Strategis SDM HR Strategic Planning Section Head
71	KRISPATI ALAMSYAH, SE	Kepala Seksi Sarana & Prasarana Facility & Infrastructure Section Head
72	LINA MARLINA, SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Secretariat & PR Section Head
73	TITIEK JUNIASIH RAHAYU, SH	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Secretariat & PR Section Head
74	INDRAWATI, SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas Secretariat & PR Section Head
75	ARIE WIBOWO, S.KOM	Kepala Seksi Operasional & Pelayanan TIK ICT Operations & Services Section Head
76	MUHAMMAD SAHAL, S.KOM	Kepala Seksi Perencanaan Strategi TIK ICT Strategic Planning Section Head
77	DRI HASKORO, S.KOM	Kepala Seksi Perencanaan Strategi TIK ICT Strategic Planning Section Head
78	LISDAWATI BERLIANA, SE	Kepala Seksi Adm. & Pengolahan Data Facultative Facult. Data Admin. & Management Section Head
79	WAHYU KURNIAWAN, SE	Kepala Seksi Underwriting Facultative-Casualty & Miscellaneous Casualty & Miscellaneous Facult. Underw. Section Head

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION
80	SARI AMALIA, S.I.KOM	Kepala Seksi Underwriting Facultative-Fire/Engineering I Fire/Engineering I Facult. Underw. Section Head
81	DONNY IRWANDI PUTRA, SE, AS	Kepala Seksi Underwriting Facultative-Fire/Engineering II Fire/Engineering II Facult. Underw. Section Head
82	I MADE DARMAWAN, S. KOM	Kepala Seksi Underwriting Facultative-Marine/Aviation/Energy I Marine/Aviation/Energy I Facult. Underw. Section Head
83	DIDIK KOSMARIYONO, SE, AS	Kepala Seksi Underwriting Facultative - Marine/Aviation/Energy II Marine/Aviation/Energy II Facult. Underw. Section Head
84	STEVEN DANIEL PARDEDE, S.SOS	Kepala Seksi Retrosesi Retrocession Section Head
85	ARIE PRASETYO, SE , AAAIK	Kepala Seksi Underwriting Treaty I Treaty I Underw. Section Head
86	YUS GUMILAR, SE	Kepala Seksi Underwriting Treaty II Treaty II Underw. Section Head



WEBSITE PERUSAHAAN

Nasional Re memiliki situs resmi korporasi, yakni <http://www.nasionalre.co.id>. Website ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan menampilkan informasi umum, informasi produk secara lengkap dan data korporat terkini. Melalui website ini para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan, sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Selain itu, website ini juga menyediakan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau melaporkan pelanggaran.

KETERANGAN MENGENAI INFORMASI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN KARENA NASIONAL RE BUKAN PERUSAHAAN PUBLIK

Nasional Re tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham manapun, oleh sebab itu ada beberapa informasi yang tidak diungkapkan karena memang tidak perlu/tidak ada yang perlu diungkapkan. Informasi itu antara lain:

- a. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi.
- b. Skema/Diagram tentang Pemegang Saham Utama dan Pengendali baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik Individu.

COMPANY WEBSITE

Nasional Re has already had a corporate official website, namely <http://www.nasionalre.co.id>. The website is available in Indonesian and English and displays general information, complete product information and the latest corporate data. Through this website, stakeholders can obtain the information they need, in accordance with the principles of transparency and disclosure. Moreover, this website also provides a means for stakeholders to submit complaints, feedback, or report of violations.

EXPLANATION ABOUT UNDISCLOSED INFORMATION SINCE NASIONAL RE IS NOT A PUBLIC COMPANY

Nasional Re is not listed on any stock exchange, and therefore there is some undisclosed information since it is not necessary to do so, namely:

- a. The number of shareholders and the percentage of ownership at end of year based on classification.
- b. Schematic / Diagram of the Main and the Controlling Shareholders, either directly or indirectly, to the Individual owners.

- c. Data Biro Administrasi Efek/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan.
- d. Data Akuntan Independen/Eksternal.
- e. Data Peningkat Efek.
- f. Data nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya.

- c. Data of Registrar / parties who administer the company's shares.
- d. Data of Independent / External Accountant.
- e. Data of Securities Rating.
- f. Name and address of the agency and / or other capital market supporting professionals.

TINJAUAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode tahun 2016 – 2020. Perusahaan masih berada pada periode I pentahapan RJPP, yaitu periode Akselerasi Pertumbuhan Bisnis. Pada tahap ini PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) diharapkan sudah memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki masa pertumbuhan yang cepat,

Upaya peningkatan market share terus dilakukan perusahaan dalam rangka optimalisasi kapasitas yang dimiliki dan ikut menekan laju defisit neraca pembayaran atau premium *flight*.

Berkenaan dengan sasaran dan strategi di atas maka ditetapkan tema RKAP tahun 2016 adalah "Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Tangguh dan Terpercaya". Tema ini merupakan bagian dari tahapan berkelanjutan atas strategi dalam RJPP tahun 2016-2020 yang secara garis besar dapat dijabarkan:

Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Tangguh

Pada tahun 2014 Nasional Re meraih posisi sebagai perusahaan reasuransi terbesar dalam pencapaian market share khususnya reasuransi umum diantara ke 4 perusahaan reasuransi domestik. Selanjutnya pencapaian tersebut ditambah dengan komitmen yang kuat dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) selaku Pemegang Saham ditunjukkan dengan adanya tambahan lagi modal disetor pada tahun 2015 sebesar Rp75 Miliar dan direncanakan adanya tambahan modal disetor pada tahun 2016 sebesar Rp75 Miliar. Dengan adanya tambahan modal disetor tersebut dan ditambah dengan kebijakan zero dividen diproyeksikan pada akhir tahun 2016 ekuitas perusahaan menjadi sebesar Rp1.449.136 juta dengan rasio RBC sebesar 205,6%, menjadikan perusahaan sebagai perusahaan

OVERVIEW OF PLAN, POLICIES AND STRATEGIES

2016 was the first year of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2016 -2020. The Company was still in the first stage of RJPP, namely Business Growth Acceleration period. At this stage, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) is expected to have a strong foundation to enter a period of rapid growth.

The Company continues to strive to improve its market share, in order to optimize its capacity and help reducing the deficit of balance of payments, or premium *flight*.

With regard to the objectives and strategies of the above, then the theme for the 2016 Company's Budget and Plan (RKAP) was "Strengthening the Company as a Strong and Reliable Domestic Reinsurance Company ". This theme is part of ongoing stages in the strategy drawn in the RJPP 2016-2020 RJPP, which can be outlined as follows:

Consolidating to Become a Strong Domestic Reinsurance Company

In 2014, Nasional Re was named as the largest reinsurance company, in terms of reinsurance market share, particularly in general reinsurance, among all four domestic reinsurance companies. This achievement was supported by PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), a shareholder, reflected from the additional paid-up capital in 2015, amounting to Rp75 billion and the planned additional paid-up capital in 2016 amounting to Rp75 billion. With that additional paid-up capital, coupled with zero dividend policy projected at the end of 2016, then the Company's equity amounted to Rp1,449,136 million with RBC ratio amounting to 205.6%, enabling the Company to be a reinsurance company to optimize its capacity while maintaining its strength.

reasuransi yang dapat mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya namun tetap menjadi perusahaan reasuransi yang tangguh.

Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Terpercaya

Peningkatan layanan reasuransi akan terus ditingkatkan baik dari sisi akseptasi maupun pembayaran klaim, di samping peningkatan pengelolaan perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menjadi faktor utama menjadikan perusahaan reasuransi domestik yang terpercaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sasaran Utama, kompetensi Inti, strategi dan kebijakan utama perusahaan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Consolidating to Become The Most Trusted Domestic Reinsurance Company

Reinsurance services will continue to be improved, in terms of acceptance and payment of claims, in addition to improving the management of the Company in order to enhance shareholders value. This is a major factor in making Nasional Re as a reliable domestic reinsurance company.

Based on the foregoing, the Company's main targets, core competencies, strategy, and major policies in 2016 can be described as follows:

SASARAN UTAMA MAIN TARGET	Pemantapan sebagai Perusahaan Reasuransi Domestik Tangguh dan Terpercaya.	Consolidating to Become a Strong and Reliable Domestic Reinsurance Company
KOMPETENSI INTI CORE COMPETENCY	Reliable partner in reinsurance solution 1. Fleksibilitas dalam <i>Terms & Conditions</i> 2. Kemampuan mengembangkan dan mendayagunakan kapasitas 3. Membangun format bisnis baru yang inovatif	Reliable partner in reinsurance solution 1. Flexibility in Terms & Conditions 2. Ability to develop and utilize capacity 3. Build a new innovative business format
STRATEGI UTAMA MAIN STRATEGY	1. Peningkatan layanan reasuransi khususnya reasuransi umum 2. Meningkatkan produktifitas melalui pembesaran portofolio <i>Facultative</i> 3. Membangun format bisnis baru yang inovatif	1. Increased reinsurance services, especially general reinsurance. 2. Increase productivity by expanding facultative portfolio 3. Build a new innovative business format
KEBIJAKAN UTAMA MAJOR POLICIES	1. Fokus pada kecepatan pelayanan dengan mempertimbangkan skala prioritas 2. Memperbesar kerjasama dengan perusahaan Asuransi yang mempunyai <i>captive market</i> 3. Diversifikasi distribusi bisnis 4. Optimalisasi Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan	1. Focus on the promptness of services by taking into account the priorities 2. Enhance cooperation with insurance companies which have a captive market 3. Diversify of business distribution 4. Optimization of organizational structure in accordance with the needs
INDIKATOR KEBERHASILAN KEY SUCCESS INDICATOR	1. EAT > Rp320 M 2. ROE > 25,57% 3. RBC konvensional / Conventional RBC: 205,62%, RBC syariah : 60,91% 4. Market Share 41,5% 5. KPKU ≥ 470 6. GCG ≥ 87 7. Corporate Rating AA (idn)/BB (Int'l)	

- Ekuitas Murni = Ekuitas Konvensional – Modal Disetor Syariah

* Pure Equity = Conventional Equity - Sharia Paid-up Capital



Strategi dimaksud adalah:

1. Peningkatan layanan
 - a. Inovasi Produk dan layanan.
 - b. *Service Excellence*.
 - c. *Customer Satisfaction & Engagement*.
 - d. Dukungan ICT terintegrasi.
 - e. Optimalisasi Organisasi.
 - f. Tata kelola perusahaan yang baik.
 - g. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
2. Peningkatan produktifitas
 - a. Memaksimalkan Volume Premi Bruto
 - b. Memaksimalkan perolehan hasil *underwriting*.
 - c. Proporsi Bisnis *Treaty* / Fakultatif.
 - d. Perolehan bisnis fakultatif pada *giant business*.
 - e. Peningkatan Pangsa Pasar.
 - f. Diversifikasi portfolio investasi.
 - g. Percepatan penagihan untuk peningkatan jumlah investasi.
3. Peningkatan kompetensi SDM

The strategies are:

1. Improve services
 - a. Product and service innovation.
 - b. Service Excellence.
 - c. Customer Satisfaction & Engagement
 - d. Integrated ICT Support
 - e. Optimization of the Organization.
 - f. Good corporate governance.
 - g. Improve customer services
2. Increase productivity
 - a. Maximize Gross Premium Volume
 - b. Maximize underwriting incomes.
 - c. Proportion of Business Treaty / Facultative.
 - d. Facultative business acquisition on giant business.
 - e. Increase Market Share.
 - f. Diversify investment portfolio
 - g. Accelerate payable collection to increase the amount of investment
3. Increase human resource competency

Kebijakan perusahaan yang ditetapkan perusahaan tahun 2016 guna mencapai hasil optimal dan meletakkan landasan yang kuat bagi perusahaan untuk tahun-tahun berikutnya:

1. Kebijakan Operasional:
 - a. Optimalisasi kapasitas reasuransi (rasio premi neto dibanding ekuitas murni >250%).
 - b. Meningkatkan kecepatan pelayanan dengan mempertimbangkan skala prioritas.
 - c. Memperbesar bisnis kerja sama dengan perusahaan asuransi dan terutama yang mempunyai *captive market*.
 - d. Menetapkan *Standard Level Guarantee* (SLG).
 - e. Diversifikasi Distribusi bisnis.
 - f. Meningkatkan kualitas akseptasi.
2. Kebijakan Non Operasional:
 - a. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja keuangan.
 - b. Peningkatan pemanfaatan ICT pada semua bidang kerja.
 - c. Melakukan transformasi budaya dengan mengembangkan konsep organisasi matrix dengan konsep remunerasi berbasis kinerja dan joint KPI.
 - d. Penempatan investasi yang memberikan return maksimal dengan prinsip kehati-hatian.
 - e. Peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi.
 - f. Peningkatan mutu pengelolaan perusahaan dengan menerapkan konsep manajemen sesuai standar umum: GCG, KPKU (Malcom Baldrige) dan *Rating*.
 - g. Pengembangan Manajemen Risiko Korporasi dan transaksional (*four eyes system*).
 - h. Optimalisasi Satuan Pengawas Intern (SPI).

The policies that were established by the Company in 2016 in order to achieve optimal results and lay a strong foundation for next year are:

1. Operational Policies:
 - a. Optimize reinsurance capacity (the ratio of net premiums to pure equity > 250%).
 - b. Increase speed of service by considering the scale of priorities.
 - c. Enhance business cooperation with insurance companies, especially those with captive market.
 - d. Establish Standard Level Guarantee (SLG).
 - e. Diversify Distribution of Business.
 - f. Improve the quality of acceptances.
2. Non-Operational Policies:
 - a. Optimize the achievement of financial performance targets.
 - b. Increase the use of ICT in all lines of business.
 - c. Transform culture by developing the concept of matrix organization with the remuneration concept based on performance and joint KPI.
 - d. Prudent placement of investment that provides maximum returns.
 - e. Increase efficiency and effectiveness of the organization.
 - f. Improve the Company's management quality by implementing appropriate management concepts according to common standards: GCG, The Assessment Criteria for Performance Excellent (KPKU-Malcom Baldrige) and Rating.
 - g. Development of Corporate Risk Management and transactional (*four eyes system*).
 - h. Optimization of the Internal Control Unit (SPI).





**Analisis & Pembahasan
Manajemen**
Management Discussion & Analysis

TINJAUAN BISNIS

Perekonomian Global 2016

Pada tahun 2016, perekonomian global masih mengalami perlambatan dan terus dibayangi oleh adanya peningkatan risiko ketidakpastian. Bank Dunia melaporkan bahwa ekonomi global tumbuh sekitar 2,3%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,7%.

Sementara itu, perekonomian negara-negara maju belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan atau perkembangan kinerja yang solid. Perkembangan politik yang terjadi di Amerika Serikat telah mempengaruhi sentimen negatif di pasar keuangan AS yang kemudian menimbulkan volatilitas pasar keuangan dunia.

Negara-negara Asia juga belum memperlihatkan pemulihan ekonomi yang solid. China, sebagai salah satu mitra bisnis utama Indonesia, pada tahun 2016 menurunkan permintaan pasokan bahan baku dari Indonesia untuk keperluan industrinya. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan turunnya kinerja ekspor Indonesia dan berpotensi akan meningkatkan defisit neraca transaksi di Indonesia, serta menekan nilai tukar Rupiah.

Walau berada di tengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu, perekonomian Indonesia pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 5,02% year on year (YoY). Hal ini antara lain didorong oleh keberhasilan program amnesti pajak, yang telah meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong penguatan Rupiah dan Indeks Komposit Indonesia (IHSG). Itu sebabnya, sepanjang tahun 2016, Rupiah menguat terhadap sebagian besar mata uang utama dunia. Sementara itu, di pasar modal, IHSG ditutup menguat pada Rp5,296.71 meningkat 15,32% dari posisi penutupan tahun 2015.

BUSINESS REVIEW

Global economy in 2016

Global economy slowed further in 2016 and continued to be overshadowed by the increase risk of uncertainty. The World Bank reported that the global economy grew by only about 2.3%, lower than that of the previous year which stood at 2.7%.

Meanwhile, the economy of the developed countries has yet shown any sign of solid recovery or solid performance growth. A negative sentiment in the US financial markets has risen up following the political developments in USA, which led to volatility in the financial markets worldwide.

Asian countries also have yet shown a solid economic recovery. In 2016, China, as one of the major business partners of Indonesia, has lowered demand for raw material supplies from Indonesia for industrial purposes. Something to be careful about since it may lead to a decline in Indonesia's export performance and potentially will increase the current account deficit in Indonesia, as well as suppress the rupiah.

Despite being in the midst of the global economic dynamics and uncertainty, Indonesia's economy in 2016 grew by 5.02% year on year (YoY). This is partly driven by the success of the tax amnesty program, which has boosted investors confidence and encouraged the strengthening of the rupiah and Indonesian Composite Index (JCI). Hence, throughout 2016 the rupiah was strengthened against most major world currencies. Meanwhile, in the capital market, the stock index was closed higher at Rp5,296.71 increasing 15.32% from the closing position in 2015.

Tinjauan Industri

Pertumbuhan Industri Asuransi Indonesia sepanjang 2016 terlihat meningkat, tercermin dari tingginya total pendapatan asuransi, baik asuransi jiwa, umum, maupun syariah. Total pendapatan industri asuransi jiwa di kuartal III-2016 meningkat sebesar Rp158,65 triliun atau naik 78,1% dibandingkan periode yang sama pada 2015. Dan dari jumlah investasi, mencapai Rp386,18 triliun, meningkat 25,7% dari tahun 2015 yang hanya mencapai Rp307,29 triliun.

Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya saluran distribusi bancassurance. Hal ini dikarenakan pemasaran melalui bancassurance relatif lebih mudah dilakukan karena target marketnya adalah nasabah perbankan memahami jasa keuangan.

Beberapa pengamat dan praktisi perasuransian melihat bahwa kerja sama bank BUMN dengan mitra strategis juga menjadi kunci pertumbuhan industri asuransi. Kerja sama dengan mitra strategis ini akan membuat kinerja asuransi semakin kuat sebab perusahaan yang bekerja sama tersebut akan semakin bertumbuh, sehat dan kuat.

Pasar asuransi jiwa di Indonesia masih sangat besar dan perlu penanganan dari perusahaan-perusahaan yang telah memiliki kesiapan yang memadai dalam hal manajemen, SDM, produk, distribusi dan IT yang unggul.

Tinjauan Kinerja Per Segmen Bisnis

Perusahaan didirikan untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank, terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya di luar perbankan. Sejalan dengan perkembangan usaha dan dinamika pasar, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian dan memasuki bidang usaha asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Industry Overview

The growth of Indonesia insurance industry was seen to rise throughout 2016, as reflected in the high total income of both life and general insurance, including conventional and sharia. Total income of the life insurance industry in the third quarter of 2016 increased by Rp158.65 trillion, up 78.1% compared to the same period in 2015. And the total investment reached Rp386.18 trillion, up 25.7% from 2015 which only reached Rp307.29 trillion.

The increase in growth was mainly bolstered by the bancassurance distribution channel. This is because marketing through bancassurance is relatively easy to do because the target market is banking customers who already understand financial services.

Some observers and practitioners of insurance saw that the cooperation between state-owned banks and strategic partners is also the key to this industrial growth. Such cooperation would strengthen the performance of insurance companies that worked together since they will keep growing, as well as be healthier and stronger.

Life insurance market in Indonesia is still very huge and needs to be managed by companies that are already prepared in terms of management, human resources, products, distribution, and IT excellence.

Business Segment Overview

The Company was established to help with the smooth and safe flows of loan from banks to medium and small scale industries and to insure risk of loans of other nonbank financial institution. In line with the development of business and market dynamic, the Company's goal and objective are changed accordingly and now are also engaging in the business of general insurance, including sharia based insurance and optimization of the Company's resources to generate profit in order to increase the value of the Company.

To achieve the objectives above, the Company carries out the following activities:

1. Provides insurance against risks of default on loans or financing, including those under Sharia principles, of debtors, mainly of small and micro entrepreneurs as well as cooperatives.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Menerima pertanggung jawaban langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya. 3. Menerima pertanggung jawaban tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar-negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya. 4. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Provides direct insurance on various risks, to domestic as well as overseas parties, either Individually or in cooperation with other insurance companies. 3. Provides indirect insurance on various risks reinsured by other domestic as well as overseas insurance companies. 4. Engages in other business activities normally earned out by insurance companies, in conformity with the prevailing legal and regulatory requirements. |
|--|---|

Secara garis besar, bisnis Nasional Re di luar segmen syariah terbagi menjadi dua segmen bisnis berikut:

1. Reasuransi Umum.
2. Reasuransi Jiwa.

Hingga saat ini segmen bisnis Reasuransi Umum memberikan kontribusi yang terbesar bagi pendapatan premi Perusahaan secara keseluruhan.

Pada tahun 2016, jumlah pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum tercatat sejumlah Rp4,44 triliun, meningkat signifikan 40,95% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp3,15 triliun. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum menyumbang 90,98% dari total pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum adalah sebesar 91,42%.

Jumlah pendapatan premi segmen bruto Reasuransi Jiwa tercatat sejumlah Rp432,56 miliar atau meningkat pesat 46,07% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp296,14 miliar. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Jiwa menyumbang 9,02% dari total pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum adalah sebesar 8,58%

Broadly speaking, the Business of Nasional Re, separated from sharia segment, is divided into two (2) business segments as follows:

1. General Reinsurance.
2. Life Reinsurance.

Until now General Reinsurance business segment provides the largest contribution to the Company's overall premium income.

In 2016, the gross premium income of General Reinsurance segment was recorded at Rp4.44 trillion, a significant increase of 40.95% compared to last year, which stood at Rp3.15 trillion. Gross premium income of General Reinsurance segment accounted for 90.98% of total gross premium income for the conventional business. While last year, the gross premium revenue of General Reinsurance segment amounted to 91.42%.

Gross premium income for Life Reinsurance segment was recorded at RpRp432.56 billion, an increase of 46.07% as compared to last year, which was recorded at Rp296.14 billion. Gross premium income of Life Reinsurance segment accounted for 9.02% of total gross premium income for the conventional business. While in the past year, the gross premium revenue of General Reinsurance segment amounted to 8.58%.

Bila diurai lebih lanjut pendapatan premi bruto untuk segmen Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa dapat dilihat pada table berikut:

Broken down further, the gross premium income for the segment of General Reinsurance and Life Reinsurance is presented in the following table:

(dalam rupiah/In rupiah)

Reasuransi Umum General Reinsurance	Realisasi 2016 Realization 2016 (1)	Target 2016 (2)	Realisasi 2015 Realization 2015 (3)	% Pertumbuhan % Growth (1:3)	% Pencapaian % Achievement (1:2)
Harta Benda Property	2.445.790.076.629	1.667.053.000.000	1.677.279.717.872	45.82	147
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	80.380.511.546	175.063.000.000	105.255.161.093	-23.63	46
Pengangkutan Marine Cargo	622.959.573.725	510.664.000.000	315.909.956.519	97.20	122
Rangka Kapal Marine Hull	171.482.064.544	202.013.000.000	137.059.783.889	25.11	85
Rangka Pesawat Aviation	6.505.779.730	40.696.000.000	16.059.783.890	-59.49	16
Satelit Satellite	1.061.800.000	-	16.552.434.234	-93.59	-
Energi Energy	70.334.078.452	56.295.000.000	44.949.535.052	56.47	125
Rekayasa Engineering	114.242.292.488	149.664.000.000	116.335.169.687	-1.80	76
Tanggung Gugat Liability	308.880.952.269	84.909.000.000	111.237.514.777	177.68	364
Kecelakaan Diri dan Kesehatan Personal Accident and Health	17.429.704.283	42.962.000.000	27.505.692.312	-36.63	41
Kredit dan Surety Bond Credit and Surety Bond	423.988.121.137	548.492.000.000	429.452.969.429	-1.27	77
Aneka Miscellaneous	181.257.212.918	274.688.000.000	173.811.356.306	4.28	66
Reasuransi Jiwa Life Reinsurance	432.558.259.088	997.500.000.000	296.140.253.544	46.07	43
Total	4.876.870.426.810	4.750.000.000.000	3.451.755.982.573	41.29	103

Berdasarkan komposisinya, segmen Harta Benda masih merupakan segmen yang memberi kontribusi paling besar, yakni sebesar 50,15% dari total pendapatan premi. Pendapatan premi bruto segmen harta benda tercatat sebesar Rp2,44 miliar, meningkat pesat 45,82% jika dibandingkan dengan pendapatan segmen harta benda tahun sebelumnya, yakni Rp1,68 miliar. Sedangkan, segmen yang memberi kontribusi paling minim adalah segmen satelit, yakni hanya 0,02%.

Aspek Pemasaran

Sebagai perusahaan reasuransi, Nasional Re tidak membuat produk-produk baru yang bisa langsung diterima oleh konsumen atau dalam hal ini adalah Tertanggung. Namun demikian, Nasional Re dapat berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan asuransi mitranya dengan cara menawarkan skema produk yang sudah ada untuk dikombinasikan dengan produk lainnya sehingga menjadi suatu produk gabungan atau suatu paket. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip reasuransi, yaitu

Based on the composition, Property segment contributed the highest, amounting to 50.15% of the total premium income. Gross premium income from property segment amounted to Rp2.44 billion, significantly grew 45.82% when compared to that of the previous year, at Rp1.68 billion. Meanwhile, segment with the least contribution was the satellite segment, which was only 0.02%.

Marketing Aspect

As a reinsurance company, Nasional Re does not create new products to be used directly by consumer, or in this case is the insured. However, Nasional Re can contribute to its partner, insurance companies, by offering schemes of existing products to be combined with other products so that it becomes a composite product or a package. This is in line with one of the principles of reinsurance, which is "follow the fortune". Reinsurance company just follows the products

“follow the fortune”, dimana perusahaan reasuransi hanya mengikuti produk-produk yang dijual oleh perusahaan asuransi. Pada prinsipnya perusahaan reasuransi memberi dukungan kapasitas untuk akseptasi produk-produk yang dipasarkan perusahaan asuransi. Sementara itu, sasaran pemasaran Nasional Re adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, baik perusahaan lokal dengan struktur permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), gabungan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing (joint venture) dan saat ini sedang dijangkau untuk melakukan pemasaran kepada perusahaan asuransi mancanegara.

Karena Nasional Re tidak bisa menjual produknya secara langsung kepada Tertanggung maka Nasional Re melakukan strategi pemasarannya dengan cara:

1. Memberikan konsultasi teknis asuransi/reasuransi,
2. Menyelenggarakan gathering dengan para mitra usaha,
3. Memberikan tutorial,
4. Menyelenggarakan seminar atau workshop, dan
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan formal dan non-formal lainnya yang bersifat menjalin hubungan yang sudah berjalan, baik hubungan bisnis maupun hubungan non-bisnis.

TINJAUAN KEUANGAN

PT Reasuransi Nasional Indonesia menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia, kecuali dinyatakan lain. Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Tahun 2016, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang mengesankan. Sebagaimana yang terlihat pada pertumbuhan total *asset* perusahaan yang meningkat sebesar 16,50% dari Rp4,12 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4,80 triliun di tahun 2016. Laba sebelum pajak juga meningkat sebesar 38,71% dari Rp295,19 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp407,57 miliar pada tahun 2016.

sold by insurance companies. In principle, the reinsurance company provide capacity support for the acceptances of products marketed by the insurance company. Nasional Re's target market is the insurance companies in Indonesia, Domestic Direct Investment Companies (PMDN), or joint venture with foreign companies and currently being explored is targeting our marketing efforts to foreign insurance companies.

Since Nasional Re can not sell its products directly to the insured, then the Company executes its marketing strategy by:

1. Providing technical consultancy on insurance/reinsurance,
2. Conducting gathering event with business partners,
3. Providing tutorials,
4. Organizing seminars or workshops and
5. Carrying out other formal and informal activities to maintain relationships, both business and non-business.

FINANCIAL REVIEW

PT Reasuransi Nasional Indonesia presents an analysis and discussion of the financial performance, in accordance with the rules set out in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) Indonesia and Accounting and Reporting Guidelines in Indonesia, unless otherwise stated. This review is based on the Consolidated Audited Financial Statements of the Company which have been audited by Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners, in accordance with the Independent Auditor's Report No. 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017 dated February 9, 2017 with the opinion that the Company's consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects.

In 2016, PT Reasuransi Nasional Indonesia successfully recorded quite an impressive growth performance, as evidenced in the growth of total assets of the company that significantly increase by 16.50% from Rp4.12 trillion in 2015 to Rp4.80 trillion in 2016. Profit before tax increased by 38.71% from Rp295.19 billion in 2015 to Rp407.57 billion in 2016.

Analisis Laba Rugi

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, Perusahaan mencatat perolehan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp335,61 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 33,6% jika dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, yakni Rp251,07 miliar. Peningkatan laba tersebut terutama berasal dari pertumbuhan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan beban. Realisasi laba setelah pajak dan zakat tersebut adalah sebesar 104,9% dari yang ditargetkan.

Income Statement Analysis

For the fiscal year ended on December 31, 2016, the Company recorded an after-tax profit and zakat amounting to Rp335.61 billion or an increase of 33.6% when compared to the previous year's achievement of Rp251.07 billion. The increase in profit mainly came from the growth of average revenue which was higher than the growth of expenses. Realization of profit after tax and zakat was 104.9% of target.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	% Pertumbuhan % Growth
Premi Bruto Gross Premium	3.451.756	4.876.870	41,3%
Premi Retrosesi Retrocession Premium	1.213.157	2.401.666	98,0%
Penurunan (Kenaikan) PYBMP Decrease (Increase) Un-Earned Premium	(62.640)	(19.851)	68,3%
Jumlah Pendapatan Premi Total Premium Revenues	2.175.960	2.455.353	12,8%
Klaim bruto Gross Claim	1.240.357	1.383.395	11,5%
Klaim Retrosesi Retrocession Claim	156.321	149.008	(4,7%)
Kenaikan (Penurunan) EKRS Decrease (Increase) Estimated Own Claim Retention	208.394	(5.521)	(102,6%)
Beban Komisi Neto Net Commission Expenses	691.396	841.946	21,8%
Beban Underwriting Lain Neto Net Other Underwriting Expenses	5.625	3.696	(34,3%)
Jumlah Beban Underwriting Total Underwriting Expenses	1.989.451	2.074.508	4,3%
Hasil Underwriting Underwriting Income	186.508	380.845	104,2%
Pendapatan Ujrah Ujrah Income	24.155	26.229	8,6%
Alokasi Surplus Dana Tabarru Allocation of Tabarru Fund Surplus	1.694	-	0%
Hasil Investasi Investment Income	185.420	155.725	(16,0%)
Beban Usaha Operating Expenses	116.399	145.070	24,6%
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	13.811	(10.157)	(173,5%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Zakat dan Pajak Income for the Year	251.073	335.323	33,6%

Pendapatan premi

Pendapatan premi selama tahun 2016 sebesar Rp2.455,35 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 12,8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp2.175,96 miliar. Pendapatan premi terdiri dari premi bruto sebesar Rp4.876,87 miliar, premi retrosesi sebesar Rp2.401,67 miliar, dan kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp19,85 miliar. Realisasi pendapatan premi tersebut adalah sebesar 79% dari yang ditargetkan.

Premium income

Premium income in 2016 amounted to Rp2,455.35 billion, or an increase of 12.8% when compared to the previous year, which amounted to Rp2,175.96 billion. Premium income consists of gross premiums amounting to Rp4,876.87 billion, retrocession premium amounting to Rp2,401.67 billion, and an increase in unearned premiums amounting to Rp19.85 billion. Realization of premium income amounted to 79% of the target.

Premi Bruto

Perolehan premi bruto tahun 2016 sebesar Rp4.876,87 miliar, naik sebesar 41,3% dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp3.451,76 miliar. Peningkatan perolehan premi bruto tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi perusahaan dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP 2016 sehingga dapat meningkatkan volume akseptasi bisnis dan disertai juga dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Realisasi pendapatan premi bruto tersebut adalah sebesar 102,7 % dari yang ditargetkan.

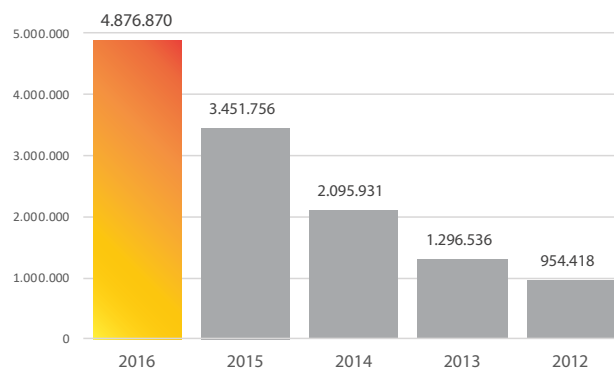
Gross Premiums

Gross premium income in 2016 amounted to Rp4,876.87 billion, or increased by 41.3% from the previous year's achievement of Rp3,451.76 billion. The increase in gross premium income was due to the Company's strategy and the work program set forth in Corporate Budget (RKAP) 2016 so as to increase the volume of business acceptance and lead to a significant economic growth. Realized gross premium income amounted to 102.7% of the target.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Class of Business	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	%Pertumbuhan %Growth
Harta Benda Property	1.677.280	2.445.790	45,8%
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	105.255	80.381	(23,6%)
Pengangkutan Marine Cargo	315.910	622.960	97,2%
Rangka Kapal Marine Hull	137.060	171.482	25,1%
Rangka Pesawat Aviation	16.552	6.506	(60,7%)
Satelit Satellite	266	1.062	298,5%
Energi Energy	44.950	70.334	56,5%
Rekayasa Engineering	116.335	114.242	(1,8%)
Tanggung Gugat Liability	111.238	308.881	177,7%
Kecelakaan Diri dan Kesehatan Personal Accident and Health	27.506	17.430	(36,6%)
Kredit dan Surety Bond Credit and Surety Bond	429.453	423.988	(1,3%)
Aneka Miscellaneous	173.811	181.257	4,3%
Jiwa Life	296.140	432.558	46,1%
Total Premi Bruto Total Gross Premium	3.451.756	4.876.870	41,3%

Dalam jutaan Rupiah/In million Rupiah



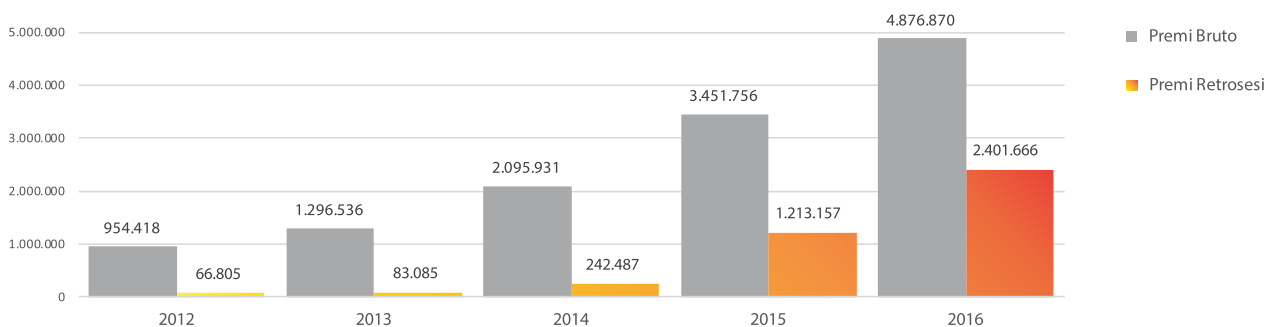
Premi Retrosesi

Premi retrosesi atau premi yang kembali direasuransikan perusahaan reasuransi mengalami peningkatan signifikan sebesar 98,0% dari semula sebesar Rp1.213,16 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp2.401,67 miliar pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena diperlukan back up retrosesi yang mencukupi atas premi-premi yang masuk yang jumlahnya cukup signifikan. Realisasi premi retrosesi tersebut adalah sebesar 224% dari yang ditargetkan.

Retrocession Premiums

Retrocession premiums, or premiums reinsured by reinsurance companies, increased by 98.0% from Rp1,213.16 billion in 2015 to Rp2,401.67 billion in 2016. This was due to the need of having an adequate back up of retrocession on premiums received by the Company, and the amount of which was quite significant. The realization of the retrocession premium was 224% of the target set.

Dalam jutaan Rupiah/In million Rupiah



Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan mengalami penurunan sebesar 68,3% dari semula sebesar Rp62,64 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp19,85 miliar pada akhir tahun 2016. Peningkatan tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan pendapatan premi yang cukup signifikan yang diperoleh perusahaan. Realisasi penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan tersebut adalah sebesar 96,51% dari yang ditargetkan.

Increase (Decrease) in Unearned Premiums

Increase (decrease) in unearned premiums is part of the premium that is not recognized as income, since the coverage is unexpired as of the end of the accounting period. Unearned premiums decreased significantly by 68.3% from Rp62.64 billion in 2015 to Rp19.85 million by the end of 2016. The decrease in unearned premiums was a consequence of a significant increase in premium income, earned by the Company. The realization of the decrease in unearned premiums amounted to 96.51% of the target.

Beban Underwriting

Beban underwriting sebesar Rp2.074,51 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 4,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp1.989,45 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp85,06 miliar atau 4,2%. Realisasi beban underwriting tersebut adalah sebesar 73,9% dari yang ditargetkan. Beban underwriting berasal dari Klaim Reasuransi sebesar Rp1.383,39 miliar, recovery claim Retrosesi sebesar Rp149.008 juta, kenaikan estimasi klaim retensi sendiri sebesar Rp5,5

Underwriting Expenses

Underwriting expenses amounted to Rp2,074.51 billion, an increase of 4.2% compared to last year's Rp1,989.45 billion, an increase of Rp85.06 billion, or 4.2%. Realization of underwriting expenses amounted to 73.9% of the target. Underwriting expenses derived from reinsurance claims of Rp1,383.39 billion, retrocession claim recovery of Rp149,008 million, an increase in estimated own retention claims of Rp5.5 billion, net commission expenses of Rp841.95 billion

miliar, Beban Komisi Netto sebesar Rp841,95 miliar dan Beban Underwriting Lain Netto sebesar Rp3,70 miliar.

Beban Klaim

Beban klaim pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.228,87 miliar, mengalami penurunan sebesar 5%, jika dibandingkan dengan tahun 2015, yakni Rp1.292,43 miliar. Beban klaim berasal dari klaim bruto yang mengalami peningkatan sebesar 11,53% dari semula Rp1.240,36 miliar menjadi Rp1.383,39 miliar, klaim retrosesi yang merupakan recovery klaim kepada pihak retrosesioner mengalami penurunan sebesar 4,7% dari semula sebesar Rp156,32 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp149,01 miliar pada akhir tahun 2016. Estimasi klaim retensi sendiri (EKRS) mengalami penurunan sebesar 202,7% dari semula sebesar Rp208,39 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp5,52 miliar pada tahun 2016.

Hasil Underwriting

Hasil underwriting yang diperoleh dalam tahun 2016 sebesar Rp380,84 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 104,2% jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp186,51 miliar. Hasil underwriting sebesar Rp380,84 miliar merupakan selisih antara pendapatan premi sebesar Rp2.455,35 miliar dengan beban underwriting sebesar Rp2.074,51 miliar. Realisasi hasil underwriting tersebut adalah sebesar 126,5% dari yang ditargetkan.

and Other Underwriting Expenses Net of Rp3.70 billion.

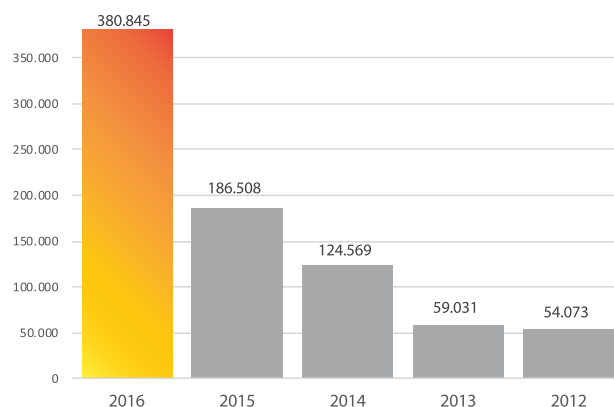
Claim Expenses

Claims expenses in 2016 amounted to Rp1,228.87 billion, decreased by 5%, when compared to 2015, namely Rp1,292.43 billion. Claim expenses derived from the gross claims which increased by 11.53% from the previous Rp1,240.36 billion to Rp1,383.39 billion, retrocession claims that was recovery claim to retrosesioner decreased by 4.7% from the beginning of Rp156,32 billion in 2015 to Rp149.01 billion at the end of 2016. Estimated own retention claims (EKRS) decreased by 202.7% from Rp208.39 billion in 2015 to Rp5.52 billion in 2016.

Underwriting Results

Underwriting Incomes in 2016 amounted to Rp380.84 billion or an increase of 104.2% compared to last year's Rp186.51 billion. Underwriting income of Rp380.84 billion represents the difference between the premium revenues of Rp2,455.35 billion with underwriting expenses of Rp2,074.51 billion. Realization of underwriting income was 126.5% of the target.

Dalam jutaan Rupiah/In million Rupiah



Pendapatan Ujrah

Pendapatan Ujrah dari Reasuransi Syariah yang diperoleh selama tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,6%, dari Rp24.155 juta menjadi Rp26.229 juta. Realisasi pendapatan Ujrah tersebut adalah sebesar 67,6% dari yang ditargetkan.

Alokasi Surplus Dana Tabarru

Alokasi surplus dana Tabarru tahun 2016 tidak dibagikan dalam rangka memperkuat cadangan dana tabarru.

Hasil Investasi

Hasil investasi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan tahun lalu, dari Rp185.420 juta menjadi Rp155.725 juta. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan hasil investasi di obligasi, saham, dan reksadana. Realisasi tersebut adalah sebesar 80,8% dari yang ditargetkan.

Beban Usaha

Beban usaha antara lain terdiri dari beban umum, beban administrasi dan beban pemasaran. Pada tahun 2016, beban usaha tercatat sebesar Rp145.070 juta, meningkat 24,6% dibandingkan tahun 2015, yakni Rp116.399 juta. Peningkatan beban usaha tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban umum, dari Rp99.646 juta menjadi Rp122.300 juta, atau meningkat 22,7%. Beban Administrasi mengalami kenaikan sebesar 15,2%, dari Rp9.804 juta menjadi Rp11.292 juta. Beban Pemasaran meningkat 17,0% dari Rp6.949 juta menjadi Rp11.479 juta.

Dalam jutaan Rupiah/In million Rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	% Pertumbuhan Growth %
Beban Pemasaran Marketing Expenses	6.949	11.479	65,2%
Beban Umum General Expenses	99.646	122.300	22,7%
Beban Administrasi Administration Expenses	9.804	11.292	15,2%
Total Beban Usaha Total Operating Expenses	116.399	145.070	24,6%

Laba Usaha

Laba usaha pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 48,5% dari Rp281,38 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp417,73 miliar pada tahun 2016. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hasil underwriting sebesar 104,3% dari Rp186,51 miliar menjadi Rp380,85 miliar di tahun 2016, sementara beban usaha pada tahun yang sama hanya meningkat 24,6%.

Ujrah Revenue

Sharia Reinsurance ujarah revenue in 2016 increased by 8.6%, from Rp24,155 million to Rp26,229 million. The realization of ujarah revenue was 67.6% of the target.

Tabarru Funds Surplus Allocation

Tabarru funds surplus allocation in 2016 was undistributed in order to strengthen reserves of tabarru funds.

Investment Incomes

The investment income in 2016 decreased by 16% compared to last year, from Rp185,420 million to Rp155,725 million. The decrease was due to lower investment returns on bonds, stocks and mutual funds. The realization amounted to 80.8% of the target.

Operating expenses

Operating expenses include general expenses, administration expenses, and marketing expenses. In 2016, operating expenses amounted to Rp145,070 million, an increase of 24.6% compared to 2015, which is Rp116,399 million. The increase in operating expenses was primarily due to an increase in general expenses, from Rp99,646 million to Rp122,300 million, an increase of 22.7%. Administration Expenses increased by 15.2%, from Rp9,804 million to Rp11,292 million. Marketing Expenses increased by 17.0% from Rp6,949 million to Rp11,479 million.

Operating Profit

Operating profit in 2016 increased by 48.5% from Rp281.38 billion in 2015 to Rp417.73 billion in 2016. The increase in operating profit was primarily due to an increase in underwriting income by 104.3% of Rp186.51 billion to Rp380.85 billion in 2016, while operating expenses in the same year only increased by 24.6%.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan (beban) lain-lain antara lain berasal dari Laba (beban) beda kurs non investasi, jasa giro, bunga piutang pegawai, laba pelepasan aset tetap, biaya bank, beban penyisihan penurunan nilai piutang serta penghasilan (beban) lainnya. Pada tahun 2016, penghasilan (beban) lain-lain tercatat negatif Rp10,16 miliar menurun 273,5% dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp13,81 miliar.

Laba Sebelum Pajak dan Zakat

Perusahaan pada tahun 2016 telah membukukan laba sebelum pajak penghasilan dan zakat sebesar Rp407,57 miliar dengan peningkatan sebesar 38,1% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp295,19 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut mengalami peningkatan karena peningkatan hasil underwriting yang cukup signifikan pada tahun 2016.

Pajak Penghasilan dan Zakat

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tariff pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan". Beban pajak penghasilan, termasuk pajak tangguhan dan zakat perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp72,25 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 63,8% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp44,12 miliar.

Laba Setelah Pajak dan Zakat

Setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan zakat, maka didapat laba setelah pajak perusahaan dan zakat pada akhir tahun 2016 sebesar Rp335,61 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 33,6% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp251,07 miliar.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Pada tahun 2016, perusahaan mencatat pertumbuhan aset dari Rp4.116,43 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp4.799,75 miliar atau meningkat 16,6%. Sedangkan liabilitas, dana tabarru dan ekuitas perusahaan sampai dengan akhir tahun 2016 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 15%, 52,3 dan 19,9% dibandingkan dengan tahun 2015.

Other Incomes (Expenses)

Other Incomes (expenses), among others derived from incomes (expenses) resulted from the gain on non-investment exchange rate, current accounts, assets' receivables interest, income from fixed assets disposal, bank charges, provision for impairment of receivables and other income (expense). In 2016, other incomes (expenses) recorded a negative Rp10.16 billion, decreased by 273.5% over the previous year of Rp13.81 billion.

Profit Before Tax and Zakat

In 2016 the Company posted a profit before tax and zakat of Rp407.57 billion, an increase of 38.1% compared to the 2015 of Rp295.19 billion. Profit before income tax increased due to significant increase in underwriting incomes in 2016.

Income Tax and Zakat

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period computed using prevailing tax rates. In accordance with SFAS No. 46 (Revised 2011) on "Income Tax". Income tax expense, including deferred tax and zakat company at the end of 2016 stood at Rp72.25 billion or an increase of 63.8% when compared to 2015 amounting to Rp44.12 billion.

Profit After Tax and Zakat

After deducted by income tax and zakat, the profit after tax and zakat at the end of 2016 amounted to Rp335.61 billion or an increase of 33.6% compared to 2015 of Rp251.07 billion.

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

In 2016, the Company recorded an asset growth from Rp4,116.43 billion in the previous year to Rp4,799.75 billion, or increased by 16.6%. Meanwhile, liabilities, tabarru funds and equity of the Company until the end of 2016 respectively increased by 15%, 52.3% and 19.9% compared to 2015.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	% Pertumbuhan Growth %
Total Aset Total Assets	4.116.426	4.799.749	16,6%
Total Liabilitas Total Liabilities	2.909.460	3.344.489	15,0%
Dana Tabarru Tabarru Fund	24.142	36.764	52,3%
Total Ekuitas Equities	1.182.824	1.418.496	19,9%

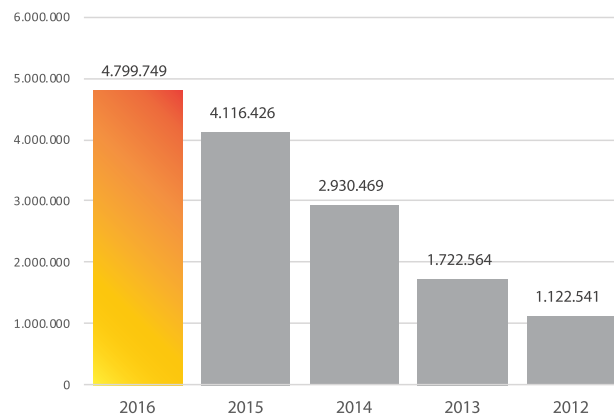
ASET

Peningkatan aset perusahaan terutama berasal dari instrumen aset retroseksi yang mengalami peningkatan signifikan selama tahun 2016 yaitu sebesar Rp354.553 juta meningkat 32,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Selain itu, instrumen investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp130.442 juta selama tahun 2016 atau meningkat sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2015.

ASSETS

The increase in the Company's assets mainly came from retrocession asset instrument which experienced a significant increase during 2016 amounting to Rp354,553 million, an increase of 32.6% compared to 2015. In addition, investment instruments also increased by Rp130,442 million during 2016, increased by 5.5% compared to 2015.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah



Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp4,58 miliar, mengalami penurunan sebesar 72,5% dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp16,63 miliar.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents at the end of 2016 stood at Rp4.58 billion, decreased by 72.5% compared to 2015 which was recorded at Rp16.63 billion.

Instrumen Investasi

Instrumen investasi perusahaan terbagi atas dana jaminan, deposito biasa, surat berharga serta penyertaan saham. Sampai dengan akhir tahun 2016, instrument investasi perusahaan mengalami peningkatan sebesar 5,5% dari semula sebesar Rp2.387,36 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp2.517,80 miliar. Secara rinci komponen investasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Investment Instruments

The Company's investment instruments are divided into collateral funds, ordinary deposits, securities, and share participation. Until the end of 2016, the Company's investment instrument increased by 5.5% from Rp2,387.36 billion in 2015 to Rp2,517.80 billion. In detail, the investment components are shown at the table below.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah

Keterangan Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	Kenaikan/ (Penurunan) Increase/ (Decrease)	% Pertumbuhan % Growth
Deposito Deposits	1.871.130	1.462.682	(408.448)	(21,8%)
Surat Berharga Securities	514.804	1.053.693	538.890	104,7%
Penyertaan Share Participaction	1.424	1.424	-	0,0%
Total Investasi Total Investment	2.387.357	2.517.799	130.442	5,5%

Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan surat berharga yang meningkat 104,7% atau secara nominal sebesar Rp538,89 miliar, sedangkan deposito mengalami penurunan sebesar 21,8% atau Rp408,45 miliar.

The increase was mainly derived from the increase in securities by 104.7% or nominally by Rp538.89 billion, while the deposits decreased by 21.8% or Rp408.45 billion.

Jika ditinjau berdasarkan komposisi dari instrument investasi, dana deposito mendominasi komposisi instrument investasi dengan komposisi sebesar 58,1% terhadap total instrument investasi tahun 2016. Komposisi dana deposito tersebut mengalami penurunan sebesar 20,3% terhadap komposisi dana deposito tahun 2015. Selanjutnya diikuti dengan komposisi surat berharga dengan komposisi sebesar 41,8% terhadap total instrument investasi tahun 2016. Komposisi surat berharga tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,3% terhadap komposisi surat berharga tahun 2015. Sedangkan untuk penyertaan saham pada akhir tahun 2016 ini memiliki komposisi sebesar 0,1% terhadap total instrument investasi.

When reviewed based on the composition of investment instruments, the deposits dominated the composition of the investment instruments by 58.1% of total investment instruments in 2016. The composition of deposits decreased by 20.3% from that of 2015. Subsequently followed by securities with a composition of 41.8% of total investment instruments in 2016. It was increased by 20.3% over the composition of securities in 2015. As for the share participation in late 2016, this has a composition of 0.1% of the total investment instrument.

Dana Jaminan

Saldo dana jaminan perusahaan pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp51,00 miliar. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2016 sebesar Rp51.00 miliar, sudah memenuhi ketentuan di atas.

Collateral Funds

The balance of the collateral funds in 2016 did not change compared to 2015, amounting to Rp51.00 billion. Insurance and reinsurance companies should have collateral fund of at least 20% bigger than own capital required and the sum of 1% of the net premium with 0.25% from the reinsurance premiums. Collateral funds as per December 31, 2016 was Rp51.00 billion and has complied with the provision above.

Deposito

Saldo deposito perusahaan pada akhir tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 21,8% dari semula sebesar Rp1.871,13 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.462,68 miliar pada akhir tahun 2016, dan secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp408,45 miliar.

Deposits

The balance of deposits of the Company at the end of 2016 decreased by 21.8% from Rp1,871.13 billion in 2015 to RpRp1,462.68 billion at the end of 2016, or nominally decreased by Rp408.45 billion.

Surat berharga

Saldo surat berharga yang dimiliki perusahaan terbagi atas saham yang diperdagangkan, obligasi yang diperdagangkan serta reksadana. Secara total, surat berharga yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.053,69 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 104,7% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp514,80 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan obligasi tersedia untuk dijual sebesar Rp355,88 miliar atau 128,6% selama tahun 2016.

Komposisi obligasi terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 60% atau mengalami kenaikan sebesar 6,3% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2015 sebesar 53,7%. Sedangkan komposisi saham yang diperdagangkan memiliki komposisi terendah sebesar 12,1% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi saham yang diperdagangkan tersebut mengalami penurunan sebesar 2,1% terhadap komposisi saham yang diperdagangkan tahun 2015 sebesar 14,2%, selanjutnya diikuti dengan komposisi reksadana dengan komposisi sebesar 27,9% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi reksadana tersebut mengalami penurunan sebesar 4,2% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2015 sebesar 32,1%.

Piutang Usaha

Piutang usaha terbagi atas piutang reasuransi serta piutang retrocesi. Piutang usaha perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp596,88 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 47,1% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp405,65 miliar.

Piutang Ujrah

Piutang ujrah perusahaan merupakan bagian pendapatan perusahaan atas *fee* dari pengelolaan dana tabarru. Pada akhir tahun 2016, piutang ujrah perusahaan tercatat sebesar Rp16,19 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 73,5% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp9.330 juta. Peningkatan piutang ujrah tersebut antara lain disebabkan karena kenaikan kontribusi dari semula Rp185,22 miliar pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp303,83 miliar atau naik sebesar 64%.

Aset Retrosesi

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesioner dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan

Marketable Securities

The Company's securities consist of traded shares, traded bonds and mutual funds. In total, the Company's marketable securities at the end of 2016 stood at Rp1,053.69 billion or an increase of 104.7% compared to the year 2015 amounting to Rp514.80 billion. The increase resulted mainly from an increase in Bonds available-for-sale of Rp355.88 billion, or 128.6% in 2016.

The composition of bonds to total securities held by the Company was 60% or an increase of 6.3% when compared with the composition of 2015 by 53.7%. While the traded shares has the lowest composition of 12.1% of total securities held by the Company. The composition of the traded shares decreased by 2.1% over the composition of traded shares in 2015 of 14.2%, followed by the composition of mutual fund by 27.9% of total securities held by the Company. The composition of mutual fund decreased by 4.2% when compared with the composition of 2015 of 32.1%.

Account Receivables

Account receivables consist of accounts reinsurance receivables and retrocession receivables. Accounts receivable at the end of 2016 was recorded at Rp596.88 billion or an increase of 47.1% compared to 2015 amounting to Rp405.65 billion.

Ujrah Receivables

Ujrah receivables are part of the Company's fee from the management of tabarru fund. At the end of 2016, the Company's ujrah receivables were Rp16.19 billion or an increase of 73.5% when compared to 2015 amounting to Rp9,330 million. Increase in ujrah receivable, among others is due to higher contribution from Rp185.22 billion in 2015 to Rp303.83 billion, an increase of 64%.

Retrocession Assets

Retrocession asset is the net retrocessionaire contractual rights value in the retrocessionaire agreement. The amount is describing part of the unearned premiums and claims

dan estimasi klaim yang menjadi hak kontraktual neto retrocesioner. Aset retrocesi perusahaan sampai dengan akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.441,20 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 32,6% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.086,65 miliar.

Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp104 juta atau mengalami penurunan sebesar 137,3% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp44 juta.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi perusahaan antara lain berasal dari kupon obligasi, bunga deposito serta bunga *deposit on call*. Saldo piutang hasil investasi perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp8.413 juta atau mengalami peningkatan sebesar 9,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp7.708 juta. Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke penerbit obligasi dan Bank mengelola deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp7.508 juta atau mengalami kenaikan sebesar 119,0% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp3.429 juta.

Aset Tetap

Aset tetap perusahaan selama tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% dari semula sebesar Rp166.447 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp172.548 juta pada akhir tahun 2016.

Aset Lain-Lain

Jumlah net aset lain-lain perusahaan sampai dengan akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.065 juta atau mengalami penurunan sebesar 74,8% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp4.226 juta.

Liabilitas

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp2.909.460 juta atau mengalami peningkatan sebesar 35,86% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp2.141.458 juta. Peningkatan liabilitas perusahaan selama

estimates that become net retrocessionaire contractual rights. The Company's retrocession assets by the end of 2016 stood at Rp1,441.20 billion or an increase of 32.6% compared to that of 2015 of Rp1,086.65 billion.

Prepaid Expenses

The balance of prepaid expenses at the end of 2016 amounted to Rp104 million or decreased by 137.3% when compared to 2015 amounting to Rp44 million.

Investment Income Receivables

The Company's receivables on investment income, among others, derived from coupon bonds, deposits interest and oncall deposits interest. The Company's investment return receivable balance at the end of 2016 recorded at Rp8,413 million or an increase of 9.1% compared to 2015 of Rp7,708 million. For receivables on investment return, the Company does not undertake any allowance for the possibilities of uncollectible and impairment of receivables value, considering the receivables are an invoice to the issuer and the Bank manages the deposits which are guaranteed in payment by wire transfer to the account of the entity.

Other Receivables

Other receivables at the end of 2016 amounted to Rp7,508 million or an increase of 119.0% when compared to 2015 amounting to Rp3,429 million.

Fixed Assets

The Company's fixed assets in 2016 slightly grew by 3.7% from Rp166,447 million in 2015 to Rp172,548 million by the end of 2015.

Other Assets

The total net of other assets of the Company until the end of 2016 stood at Rp1,065 million or increased by 74.8% compared to 2015 of Rp4,226 million.

Liabilities

As of the end of 2016, the total liabilities stood at Rp2,909,460 million or an increase of 35.86% compared to 2015 amounting to Rp2,141,458 million. This increased liability was mainly supported by the increase in estimated own retention

tahun 2016 terutama ditopang oleh peningkatan estimasi klaim retensi sendiri yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp265.800 juta serta premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp399.231 juta terhadap tahun 2015.

Utang Klaim Reasuransi

Utang klaim reasuransi terbagi atas utang klaim asuransi umum konvensional dan syariah dan utang klaim asuransi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang klaim reasuransi perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp46.318 juta atau mengalami penurunan sebesar 35,7% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp72.046 juta. Penurunan utang klaim reasuransi disebabkan oleh meningkatnya penyelesaian pembayaran klaim pada arus kas operasi pada tahun 2016 sebesar 15,1% dibanding tahun sebelumnya.

Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Estimasi klaim retensi sendiri perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.472.226 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,6% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.380.617 juta.

Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

Saldo premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Premi yang belum merupakan pendapatan perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp1.671.953 juta atau mengalami peningkatan sebesar 27,2% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp1.314.646 juta. Peningkatan premi yang belum merupakan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh segmen reasuransi umum yang meningkat sebesar 40,8% dibanding tahun lalu.

Utang Premi Retrosesi

Sebagaimana jenis utang klaim asuransi, utang premi retrosesi juga terbagi atas utang premi retrosesi umum konvensional dan syariah dan utang premi retrosesi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang premi retrosesi perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp77.729 juta atau mengalami peningkatan sebesar 40,2% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp55.438 juta. Peningkatan utang premi retrosesi terutama disebabkan oleh peningkatan premi retrosesi umum dan jiwa konvensional dengan peningkatan sebesar 98% dari tahun 2015.

claims which nominally increased by Rp265,800 million and unearned premiums for the year 2015 of Rp399,231 million.

Reinsurance Claims Payable

The reinsurance claims Payable consists of conventional and sharia general insurance claims payable and conventional and sharia life insurance claims payable. In total, the Company's reinsurance claims payable at the end of 2016 stood at Rp46,318 million or a decrease of 35.7% compared to 2015, amounting to Rp72,046 million. The decrease in reinsurance claim payables was caused by the increase in settlement of claims payment in operating cash flow in 2016, 15.1% higher compared to the previous year.

Estimated Own Retention Claims

The Company's estimated own retention claims at the end of 2016 stood at Rp1,472,226 million or an increase of 6.6% compared to 2015 amounting to Rp1,380,617 million.

Unearned Premiums

The balance of unearned premiums is part of the premiums that have not been recognized as revenue because the coverage is still running at the end of the accounting period. The Company's unearned premium by the end of 2016 stood at Rp1,671,953 million or an increase of 27.2% compared to 2015, amounting to Rp1,314,646 million. This increase was primarily due to the general reinsurance segment which increased by 40.8% from 2015.

Retrocession Premiums Payable

As in the type of insurance claims payable, retrocession premiums payable is also divided into conventional and sharia general retrocession premiums payable and conventional and sharia life retrocession premiums payable. In total, the Company's retrocession premiums payable at the end of 2016 stood at Rp77,729 million or an increase of 40.2% compared to 2015, amounting to Rp55,438 million. The increase in retrocession premiums payables was primarily due to an increase in conventional general and life retrocession premiums by 98% from 2015.

Utang Pajak dan Zakat

Utang pajak dan zakat perusahaan sampai dengan akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp14.483 juta atau mengalami penurunan sebesar 61,5% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp37.640 juta.

Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain perusahaan pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp38.327 juta. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 52,6% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp25.113 juta.

Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Berdasarkan laporan aktuarial PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial tahun 2016 beban, Aset dan liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2016 tercatat sebesar Rp23.454 juta atau mengalami penurunan sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp23.960 juta.

Dana Tabarru (Peserta)

Pada akhir tahun 2016 dana tabarru tercatat sebesar Rp36.764 juta, meningkat sebesar 52,3% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp24.142 juta.

Ekuitas

Pada akhir tahun 2016, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan sebesar 19,9% dari semula sebesar Rp1.182.824 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.418.496 juta pada akhir tahun 2016. Peningkatan ini berasal pencapaian laba setelah pajak dan zakat tahun 2016 yang sebesar Rp335.613 juta setelah dikurangi pembayaran dividen sebesar Rp100.000 juta.

Tax and Zakat Payable

The Company's tax and zakat payable as of the end of 2016 stood at Rp14,483 million or an increase of 61.5% compared to that of 2015 amounting to Rp37,640 million.

Others Payable

The Company's total other payables as of the end of 2016 stood at Rp38,327 million. This is an increase of 52.6% when compared to 2015 which was recorded at Rp25,113 million.

Post-Employment Benefits Liability

Based on the actuarial report from PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial in 2016, the assets and liabilities for post-employment benefits at the end of 2016 stood at Rp23,454 million, an increase of 2.1% compared to that of 2015, amounting to Rp23,960 million.

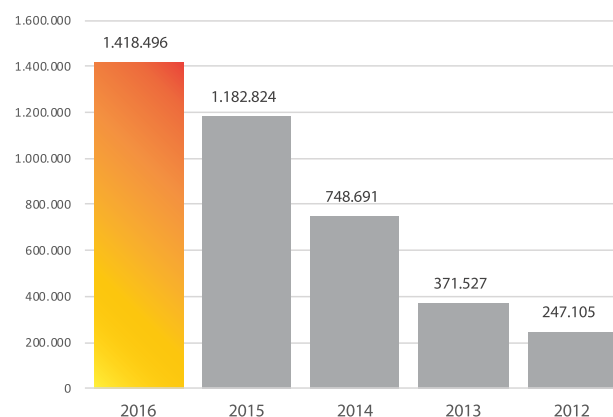
Tabarru Funds (Participant)

By the end of 2016, tabarru funds amounted to Rp36,764 million, growing by 52.3% compared to 2015 which was recorded at Rp24,142 million.

Equity

In late 2016, the Company's equity increased by 19.9% from Rp1,182,824 million in 2015 to Rp1,418,496 million by the end of 2016. The increase was due to the realization of after tax and zakat income of Rp335,613 million, net of dividend payment of Rp100,000 million.

Dalam jutaan Rupiah | In million Rupiah



Modal Disetor

Pada akhir tahun 2016, modal disetor perusahaan tercatat sebesar Rp538.000 juta atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2015.

Cadangan Umum

Pada akhir tahun 2016, terdapat peningkatan cadangan umum perusahaan sebesar 50,4% dari semula sebesar Rp300.023 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp451.095 juta pada akhir tahun 2016.

Cadangan Tujuan

Berbeda dengan cadangan umum, pada tahun 2016 perusahaan tidak melakukan penambahan terhadap cadangan tujuan perusahaan sehingga tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 sebesar Rp5.799 juta.

Komponen Ekuitas Lainnya

Komponen ekuitas lainnya terdiri dari keuntungan (kerugian) aktuarial imbalan kerja dan surplus revaluasi gedung yang masing-masing sebesar Rp(24.693) juta dan Rp109.300 juta.

Laporan Arus Kas

Posisi kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2016 sebesar Rp4.582 juta atau mengalami penurunan 72,5% dari tahun 2015 sebesar Rp16.633 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas operasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp63.533 juta atau mengalami penurunan 87,2% dari tahun 2015 sebesar Rp497.603 juta. Penurunan disebabkan oleh kenaikan arus kas untuk pembayaran klaim dan premi retroseksi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp24.416 juta atau mengalami penurunan 104,4% dari tahun 2015 sebesar Rp558.430 juta. Penurunan disebabkan oleh pencairan investasi untuk pembayaran klaim dan premi retroseksi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas pendanaan Perusahaan tahun 2016 terdiri dari pembayaran Dividen sebesar Rp100.000 juta dibanding tahun 2015 arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp75.000 juta merupakan penambahan modal.

Paid-up Capital

At the end of 2016, the Company's paid-up capital stood at Rp538,000 million, or in the same amount with that of 2015.

General Reserves

At the end of 2016, the Company's general reserves increased by 50.4% from Rp300,023 million in 2015 to Rp451,095 million in 2016.

Appropriated Reserves

In contrast to general reserves, in 2016 the Company did not add the appropriated reserves, hence it did not change from that of 2016, amounting to Rp5,799 million.

Other Components of Equity

Other components of equity consist of gains (losses) on employee benefits actuary and surplus from the revaluation of buildings, respectively were Rp(24,693) million and Rp109,300 million.

Cash Flow Statement

Cash and cash equivalents at the end of 2016 amounted to Rp4,582 million, an increase of 72.5% from 2015 amounting to Rp16,633 million.

Cash Flows From Operating Activities

Cash flow from operating activities in 2016 was recorded at Rp63,533 million, decreased by 87.2% from Rp497,603 million in 2015, due to an increase in cash flow for payment of claims and retrocession premiums.

Cash Flows from Investing Activities

Cash flows from investing activities in 2016 was recorded at Rp24,416 million, a decrease of 104.4% from Rp558,430 million in 2015, due to investment disbursement for payment of claims and retrocession premiums.

Cash Flows from Financing Activities

The Cash flow from financing activities in 2016 was Rp100,000 million from dividend payment, while in 2015 it was Rp75,000 million from additional capital.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Collection Ratio

Tingkat Kolektibilitas Piutang Collection Ratio	
Reasuransi Umum General Reinsurance	88,97%
Reasuransi Jiwa Life Reinsurance	90,47%
Retrosesi Umum General Retrocession	81,10%
Retrosesi Jiwa Life Retrocession	85,33%

Struktur Modal

Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

Struktur Modal Capital Structure	
Modal Disetor Paid Up Capital	538.000
Cadangan Umum General Reserves	451.095
Cadangan Tujuan Appropriated Reserves	5.799
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	335.613
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	87.989

Modal Disetor

Paid-Up Capital

Modal Disetor Paid-Up Capital	
Kepemilikan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) / Owned by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	99,9998%
Kepemilikan YDKK Askrindo / Owned by YDKK Askrindo	0,0002 %

Ketaatan Sebagai Wajib Pajak

Tax Compliance

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

Ketaatan Sebagai Wajib Pajak Tax Compliance	
PPh 21 Income Tax 21	13.759
PPh 23 Income Tax 23	83
PPh 4 ayat 2 Income Tax 4 verse 2	82
PPh 25 Income Tax 25	52.722
PPh 21 Final Income Tax 21 Final	68

Prospek Usaha

Target perusahaan untuk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Business Prospect

Following is the Company's target in 2017:

Dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Keterangan Description	Anggaran 2017 Budget 2017
Premi Bruto / Gross Premium	6.235.000
Premi Retro / Retro Premium	2.000.298
Klaim Bruto / Gross Claim	2.008.020
Beban Komisi Neto / Net Commission Expenses	1.278.608
Hasil Underwriting / Underwriting Income	2.074.508
Pendapatan Ujroh / Ujroh Income	27.449
Alokasi Surplus Dana Tabarru / Tabarru Funds Surplus Allocation	7.371
Hasil Investasi / Investment Income	277.790
Beban Usaha / Operating Expenses	189.222
Penghasilan (beban) lain-lain / Other Incomes (Expenses)	2.268
Laba Sebelum Pajak dan Zakat / Profit before Tax and Zakat	557.795
Pajak / Taxes	105.953
Laba Setelah Pajak dan Zakat / Profit after Tax and Zakat	451.843
Investasi / Investment	44.995
Aset / Assets	6.836.802
Kewajiban / Liabilities	5.066.172
Dana Tabarru / Tabarru Funds	38.981
Ekuitas / Equities	1.731.649

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Struktur Modal

Modal telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 538.000 (lima ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah), yang berasal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), sebanyak 537.999 lembar saham dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrido, sebanyak 1 lembar saham.

Komitmen untuk Investasi Belanja Barang Modal

Pada tahun 2016, Nasional Re tidak memiliki komitmen apapun untuk investasi belanja barang modal.

ANALYSIS OF SOLVENCY

Capital Structure

Authorized and fully paid-up capital was 538,000 (five hundred and thirty eight thousand) shares with a nominal value totaling Rp538,000,000,000 (five hundred and thirty-eight billion rupiah), a total of 537,999 shares owned by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), and 1 share owned by Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrido (YDKK Askrido).

Commitments for Capital Expenditure

In 2016, Nasional Re has no material commitments for capital expenditure.

Aset yang Dijaminkan

Pada tahun 2016, Nasional Re sama sekali tidak memiliki *Aset yang Dijaminkan*.

Transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan

Sepanjang tahun 2016 tidak terjadi transaksi penting dalam jumlah signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja atau arah perusahaan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya

Sepanjang tahun 2016 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi kinerja atau arah perusahaan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir dan dampaknya terhadap laporan keuangan

Sepanjang tahun 2016 tidak ada perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi kinerja atau arah perusahaan.

Ketaatan sebagai Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak, Nasional Re senantiasa menjalankan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPN, dan Pajak Daerah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap setiap objek kena pajak.

Pledged Assets

In 2016, Nasional Re has no pledged assets.

Other Material Transactions with Significant Amount

Throughout 2016, no material transaction occurred in significant quantities which could affect performance or direction of the Company.

Changes in the Laws and Regulations with Significant Impact on the Company

Throughout 2016, there was no change in the laws and legislations that could affect the performance or direction of the Company.

Changes in accounting policies applied by the Company in the last financial year and their impact on the financial statements

Throughout 2016, there was no change in Accounting policies applied by the Company in the last fiscal year that may affect the performance or direction of the Company.

Tax Compliance

As a taxpayer, Nasional Re always fulfils its duty well, among other things, paying Corporate Income Tax (Income), VAT and Local Taxes in accordance with the tax regulations, as well as withholds and collects each taxable object.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Mengingat sifat bisnis Perusahaan yang berkaitan erat dengan kepercayaan nasabah dan pelayanan, maka Perusahaan membutuhkan talenta, integritas dan profesionalisme yang tinggi dari SDM yang dimilikinya. Itu sebabnya, Perusahaan selalu menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang baik terhadap aset SDM sebagai landasan untuk meningkatkan pencapaian Perusahaan dan menuju terwujudnya visi perusahaan.

Karena SDM memainkan peran yang begitu fundamental bagi Perusahaan, Perusahaan melalui Divisi SDM & Umum berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan dan mengacu pada rencana strategis Perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui beragam program pelatihan dan pendidikan yang dirancang sesuai kebutuhan terkini dan mengikuti perkembangan dunia usaha.

Perencanaan dan Pengembangan SDM

Berbagai perubahan yang terjadi di tingkat regional, nasional maupun global, yang berlangsung begitu cepat harus dapat direspon oleh perusahaan dengan melakukan perubahan-perubahan strategis yang sesuai. Untuk dapat merespon perubahan tersebut dengan baik, peran sumber daya manusia menjadi semakin strategis karena merupakan satu-satunya sumber daya yang paling aktif dan adaptif. Peran manajemen sumber daya manusia tersebut ditingkatkan agar perusahaan menjadi lebih kompetitif dan mampu merespon tantangan-tantangan eksternal demi eksistensi serta keberlangsungannya.

Peningkatan peran strategis manajemen sumber daya manusia tersebut diwujudkan melalui kebijakan rekrutmen, penempatan, penggajian/pemberian kompensasi dan pengembangan karier yang berbasis kompetensi. Perusahaan melakukan analisis jabatan yang ditujukan untuk menetapkan standar kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan pada semua level. Berdasarkan standar kompetensi

BUSINESS SUPPORT REVIEW

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Given the nature of the Company's business that depends on customers' trust and services, the Company requires highly talented, integrity, and professional Human Resources. That is why the Company has always underlined the importance of having proper management of human assets as a foundation for improving the achievement of the Company towards the realization of its vision.

Since HR plays a role so fundamentally to the Company, then the Company through Human Resources & General Division is committed to continuing to improve the quality of human resources in a sustainable manner and refers to the Company's strategic plans, both short term and long term. Such commitment is implemented through a variety of educational and training programs tailored to the current needs and following the development of the business world.

Human Resources Planning and Development

The various changes that occurred in regional, national, and global level, which took place so quickly should be responded by the Company by undertaking strategic changes accordingly. In order to be able to properly respond to such changes, the role of human resources becomes increasingly strategic since it is the most active and adaptive resource a company has. Then the role of human resource management shall be improved for the company to be more competitive and able to respond external challenges and maintain its existence and business continuity.

Increasing the strategic role of human resource management is realized through the policy of recruitment, placement, remuneration / compensation and competency-based career development. The Company conducts job analysis aimed to establish competency standards required by any positions at all levels. Based on the said competency standards, the Company makes a decision in appointing or dismissing a

tersebut, Perusahaan mengambil keputusan dalam memilih atau memberhentikan seseorang dalam suatu jabatan.

Selama ini kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Perusahaan yang didasarkan pada konsep human capital excellence dimulai sejak proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian hingga program kesejahteraan karyawan dan pengelolaan hubungan industrial. Dengan menerapkan konsep *human capital excellence*, Perusahaan mampu membangun SDM yang kompeten di industrinya sehingga akan meningkatkan daya saing Perusahaan.

Kebijakan Rekrutmen

Sejalan dengan konsep di atas, Perusahaan menerapkan strategi rekrutmen yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kompetensi dasar para calon karyawan. Pelaksanakan proses rekrutmen senantiasa dimulai dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebutuhan penambahan pegawai, baik kebutuhan saat ini maupun prediksi kebutuhan masa depan. Dengan demikian diharapkan Perusahaan mampu memiliki *pool* calon-calon karyawan dengan potensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Selama 2016, telah melakukan rekrutmen sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) pegawai baru, yang ditempatkan pada divisi-divisi sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| a. Divisi Sekretaris Perusahaan | : 1 pegawai |
| b. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi | : 2 pegawai |
| c. Divisi Keuangan & Akuntansi | : 3 pegawai |
| d. Divisi Klaim | : 4 pegawai |
| e. Divisi Reasuransi Jiwa | : 1 pegawai |
| f. Divisi SDM & Umum | : 1 pegawai |
| g. Divisi Reasuransi Syariah | : 4 pegawai |
| h. Divisi <i>Facultative</i> | : 5 pegawai |
| i. Divisi <i>Treaty</i> & Retrosesi | : 3 pegawai |

Strategi rekrutmen yang diterapkan Perusahaan mencakup:

- Iklan di media massa, namun sudah dikurangi porsi nya
- Iklan di internet melalui jobstreet dan jobsdb
- Kunjungan ke kampus-kampus

person from an office.

Throughout this time, the Company's policy of human resource management and development is based on the concept of human capital excellence, which began since recruitment, through selection, training, assessment process, until employee benefit program and management of industrial relations. By applying this concept, the Company is able to build competent human resources in the industry, and thus increase its competitive edge.

Recruitment Policy

In line with the above concept, the Company has determined the appropriate, accurate and fast recruitment strategy, by still regarding the quality and basic competence of the candidates. Recruitment process always begins with analysis on the needs for additional employee(s), either for current needs or for anticipating future needs. Hence, the Company can have a pool of potential candidates of employee with basic competence in accordance with the Company's plan.

In 2016, the Company recruited 24 (twenty four) new employees, which are placed in the following divisions:

- | | |
|--|---------------|
| a. Corporate Secretary Division | : 1 employee |
| b. ICT Division | : 2 employees |
| c. Finance & Accounting Division | : 3 employees |
| d. Claim Division | : 4 employees |
| e. Life Reinsurance Division | : 1 employees |
| f. HR & General Affairs Division | : 1 employee |
| g. Sharia Reinsurance Division | : 4 employees |
| h. <i>Facultative</i> Division | : 5 employees |
| i. <i>Treaty</i> & Retrocession Division | : 3 employees |

The Company implements recruitment strategies that include:

- Placement of ad on mass media, but the portion has been reduced
- Placement of ad on the internet through jobstreet and jobsdb
- Visits to campuses

Proses rekrutmen antara lain terdiri dari:

- Wawancara, dapat dilakukan oleh:
 - a) Kepala Bagian SDM/Kepala Divisi SDM & Umum dan atau Kepala Bagian/Kepala Divisi Unit Pengguna (User)
 - b) Tim Assessor (yang terdiri dari minimal 2 orang Pejabat setingkat Kepala Divisi yang ditunjuk oleh perusahaan)
 - c) Direksi (bila diperlukan)
- Psikotest: dilakukan oleh lembaga/konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan
- Tes Kesehatan: dilakukan oleh Rumah Sakit/instansi yang ditunjuk oleh Perusahaan
- Laporan ke Direksi

Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme

Seluruh karyawan Perusahaan diarahkan dan diberi kesempatan penuh untuk menjadi insan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh, dan bersaing secara sehat sehingga secara bersama-sama mampu menjadi daya dorong bagi kemajuan Perusahaan.

Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Selama ini program pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja dilakukan oleh Perusahaan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik.

Total investasi untuk pelatihan sebesar Rp.7.326.956.575,- atau sekitar 6,85% dari Beban Pegawai.

The recruitment process comprises:

- Interviews, conducted by:
 - a) Head of HR Departement/ Head of HR & General Affairs Division and/or Head of Department/Division (User).
 - b) The interviewer Team (consisting of at least 2 (two) officials of Division Head level designated by the company.
 - c) The Board of Directors (if necessary).
- Psycho-test: carried out by the agency / consultant appointed by the Company.
- Health Test: conducted by the hospital / institution appointed by the Company.
- Report to the Board of Directors.

Competence and Professionalism Development

All employees at Nasional Re are encouraged and given a full opportunity to develop themselves by learning, growing, and competing fairly so that all together can be the driving force for the progress of the Company.

In order to achieve this end, the Company continuously provides trainings and competence development program for workers to have the skills and competencies needed to address business challenges, in the present and the future. So far, all educational, trainings and development programs are conducted by the Company continuously in a carefully planned manner.

Total investment for training amounted to Rp.7,326,956,575 or about 6.85% of Employee Expenses.

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Sepanjang 2016

Program pendidikan dan latihan untuk peningkatan kualitas SDM terus digiatkan, dan dalam tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dengan mengikutsertakan pegawai pada kursus dan seminar asuransi ataupun bidang lainnya, diantaranya :

Employee Competency Enhancement activities Throughout 2016

Educations and training programs for improving the quality of human resources continue to be intensified, and in 2016 educational activities have been implemented by involving employees in courses and seminars of insurance or other fields, including:

1.	Pelatihan Counducting Annual Business Impact Analysis, yg diselenggarakan oleh Reksis Consulting.	Training on Conducting Annual Business Impact Analysis, held by Reksis Consulting.
2.	Pelatihan Koreksi Fiskal & Penyusunan SPT PPh badan, yg diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Formasi.	Training on Fiscal Correction & Preparation of Tax Return of Corporate Income Tax, held by Lembaga Manajemen Formasi.
3.	W/S Risk Based Internal Audit Focusing on What Matters, yg diselenggarakan oleh GDb Events Pte Ltd.	Workshop on Risk Based Internal Audit Focusing on What Matters, held by GDb Events Pte Ltd.
4.	W/S Bedah Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) & Sharing Experience mengenai Risk and Loss Survey Asuransi kebakaran, yg diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha.	Workshop on Study of Indonesian Fire Insurance Standard Policy (PSAKI) & Sharing Experience on Risk and Loss Survey for Fire Insurance, held by Widya Dharma Artha.
5.	Seminar Pembangunan SDM Aktuaria di industri Asuransi, yg diselenggarakan oleh DAI.	Seminar on Development of Actuarial Human Resources in Insurance industry, held by DAI.
6.	W/S Risk Presentation Penyusunan Laporan Survey Risiko yang baik agar diterima dalam pendapatan reasuransi secara facultative, yg diselenggarakan oleh PSM Consulting.	Workshop on Risk Presentation Preparation of a good Risk Survey Report to be received in facultative reinsurance income, held by PSM Consulting.
7.	Asia Conference on Big Data & Analytics for Insurance, yg diselenggarakan oleh Asia Insurance Review, bertempat di Singapore.	Asia Conference on Big Data & Analytics for Insurance, held by Asia Insurance Review, in Singapore.
8.	Training Legal Drafting & Writing, yg diselenggarakan oleh PT Synergis Global Performa.	Training on Legal Drafting & Writing, held by PT Synergis Global Performa.
9.	Pelatihan Trend Bisnis & Industri ICT 2016, yg diselenggarakan oleh Sharing Vision.	Trend of Business & Industry ICT 2016, held by Sharing Vision.
10.	Pelatihan & uji Certified Risk Management Officer (CRMO), yg diselenggarakan oleh PT RAP – LSPMR.	Training & test for Certified Risk Management Officer (CRMO), held by PT RAP – LSPMR.
11.	W/S Pricing Produk Asuransi Jiwa, yg diselenggarakan oleh LPMA STMA Trisakti.	Workshop on Pricing for Life Insurance Product, held by LPMA STMA Trisakti.
12.	Tutorial Ujian AAMAI subyek 101 (Praktek Asuransi) dan subyek 102 (Hukum dan Asuransi) yg diselenggarakan di Nasional Re dengan peserta Internal dan Eksternal (cedant).	Tutorial for the Examination of AAMAI subject 101 (Insurance Practices) and subject 102 (Law and Insurance) held by Nasional Re attended by Internal and External (cedant).

13.	Undangan Legal And Compliance Forum, yg diselenggarakan oleh AAJI.	Invitation to Legal And Compliance Forum, held by AAJI.
14.	Sosialisasi POJK No.28/POJK/05/2015, yg diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Socialization of POJK No. 28/POJK/05/2015, held by Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
15.	W/S Become An Excel Expert, yg diselenggarakan oleh PT Intipesan Pariwara.	Workshop on Become An Excel Expert, held by PT Intipesan Pariwara.
16.	Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial, yg diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).	Managerial-Level Internal Audit Training, held by Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
17.	Training Fundamental IT Audit for Internal Auditor, yg diselenggarakan oleh PT Andalan Teknologi Inovasi.	Training Fundamental IT Audit for Internal Auditor, held by PT Andalan Teknologi Inovasi.
18.	Pelatihan Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar, gelombang I, yg diselenggarakan oleh AASI.	Certification Training of Sharia Insurance Expertise, Basic Level, Batch I, held by AASI.
19.	Pelatihan Pengadaan Teknologi Informasi bersertifikasi – Certified IT Procurement Expert (CITPE), yg diselenggarakan oleh Sharing Vision.	Certified Information Technology Procurement Training – Certified IT Procurement Expert (CITPE), held by Sharing Vision.
20.	Training & uji Certified Internal Human Resource Manager (CIHRM), yg diselenggarakan oleh FDB Events Pte Ltd, bertempat di Singapore.	Training & test for Certified Internal Human Resource Manager (CIHRM), held by FDB Events Pte Ltd, in Singapore.
21.	Undangan 4th Asia Insurance Brokers Summit, yg diselenggarakan oleh Apparindo.	Invitation to 4th Asia Insurance Brokers Summit, held by Apparindo.
22.	Sosialisasi Program Retrosesi th 2016, yg diselenggarakan oleh Nasional Re	Socialization of Retrocession Program 2016, held by Nasional Re
23.	Training Foundation Course in Risk Management, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII).	Training on Foundation Course in Risk Management, held by The Malaysian Insurance Institute (MII).
24.	11th Asia Conference on Healthcare and Health Insurance, yg diselenggarakan oleh Asia Insurance Review, bertempat di Singapore.	11th Asia Conference on Healthcare and Health Insurance, held by Asia Insurance Review, in Singapore.
25.	Reasuransi Gathering 2016 Tour Beijing China, yg diselenggarakan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia, bertempat di Beijing China.	Reinsurance Gathering 2016 Tour Beijing China, held by PT Asuransi Kredit Indonesia, in Beijing China.
26.	Training Initial Introduction to marine, hull, cargo, liability insurance and P & I, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training on Initial Introduction to marine, hull, cargo, liability insurance and P & I, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
27.	Training Introduction to Engineering Insurance, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.	Training on the Introduction to Engineering Insurance, held by The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.
28.	W/S Model Penyelesaian sengketa pertahanan perusahaan, yg diselenggarakan oleh PT Indotama.	Workshop on Model of Settlement of Corporate Dispute, held by PT Indotama.
29.	W/S Teknik Metode Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yg diselenggarakan oleh WK Consulting.	Workshop on Method of Preparing Self-Estimating Pricing (HPS), held by WK Consulting.

30.	Training Technical Reinsurance Accounts, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training Technical Reinsurance Accounts, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
31.	Seminar market Outlook 2016 & Strategi investasi fixed income Asuransi Umum menyikapi POJK No. 1 th. 2016, yg diselenggarakan oleh AAUI.	Seminar on market Outlook 2016 & Fixed income investment strategy for General Insurance in respond to POJK No. 1 th. 2016, held by AAUI.
32.	Pelatihan & uji sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP), yg diselenggarakan oleh PT RAP – LSPMR.	Training & certification test for Certified Risk Management Professional (CRMP), held by PT RAP – LSPMR.
33.	Training Reinsurance contract treaty wordings, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training Reinsurance contract treaty wordings, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
34.	Training Underwriting & Claims Aspects of work injury compensation Insurance, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training Underwriting & Claims Aspects of work injury compensation Insurance, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
35.	Training Visiting World Class Data Center Equinix, yg diselenggarakan oleh PT Sharing Vision, di Singapore.	Training Visiting World Class Data Center Equinix, held by PT Sharing Vision, di Singapore.
36.	Training A Focus on The Fundamentals of Security, yg diselenggarakan STECIS The Trade Credit Insurance & Surety Academy, di Netherland.	Training A Focus on The Fundamentals of Security, held by STECIS The Trade Credit Insurance & Surety Academy, di Netherland.
37.	Training Property Business Interruption Back to fundamentals, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training Property Business Interruption Back to fundamentals, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
38.	Training Certified Advanced Personal Assistants (PA), yg diselenggarakan oleh Green Forest International Limited, di Dubai.	Training Certified Advanced Personal Assistants (PA), held by Green Forest International Limited, in Dubai.
39.	Training A Practical Understanding of CAR & EAR Insurance, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training A Practical Understanding of CAR & EAR Insurance, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
40.	Undangan wisuda QIA & seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2016, yg diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA), di Bali.	Invitation to Graduation of QIA & national seminar on Internal Audit (SNIA) 2016, held by Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA), in Bali.
41.	Training Intermediate course in Marine Cargo Insurance, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.	Training Intermediate course in Marine Cargo Insurance, held by The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.
42.	W/S Subsidiary Governance Hubungan Induk dengan Anak perusahaan & Tata Kelola Terintegrasi, yg diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).	Workshop on Subsidiary Governance Parent Company Relationship with Subsidiaries & Integrated Governance, held by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
43.	In House Training ISO 22301:2012 Business continuity Management System, yg diselenggarakan oleh Nasional Re dan Reksis Consulting di Nasional Re.	In House Training ISO 22301:2012 Business continuity Management System, held by Nasional Re dan Reksis Consulting di Nasional Re.

44.	Seminar UIB Asia's 3D/2N Market Seminar, yg diselenggarakan oleh UIB, bertempat di Penang Malaysia.	Seminar on UIB Asia's 3D/2N Market Seminar, held by UIB, in Penang Malaysia.
45.	Seminar MRR Life Seminar 2016 (MRRL 2016), yg diselenggarakan oleh Munich Re Retakaful, bertempat di Langkawi Malaysia.	Seminar on MRR Life Seminar 2016 (MRRL 2016), held by Munich Re Retakaful, in Langkawi Malaysia.
46.	Seminar Innovation & Disruption 2016 What new technology Means for Insurance, yg diselenggarakan oleh Guy Carpenter, bertempat di Yogyakarta.	Seminar on Innovation & Disruption 2016 What new technology Means for Insurance, held by Guy Carpenter, in Yogyakarta.
47.	Training Underwriting Directors & Officers Liability Insurance And Professional Indemnity Insurance, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training for Underwriting Directors & Officers Liability Insurance And Professional Indemnity Insurance, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
48.	Training Reinsurance In Practice, yg diselenggarakan oleh Guy Carpenter & Company Ltd, bertempat di London UK.	Training Reinsurance in Practice, held by Guy Carpenter & Company Ltd, in London UK.
49.	Training Intermediate Course in Fire Insurance Claims, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.	Training Intermediate Course in Fire Insurance Claims, held by The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.
50.	Wisuda & Seminar gelar profesi, yg diselenggarakan oleh PAMJAKI, bertempat di Bali.	Graduation & Seminar for professional degree, held by PAMJAKI, in Bali.
51.	Training Clash Between Online Business & Offline Business, yg diselenggarakan oleh PT Sharing Vision, di Bandung Jabar.	Training Class Between Online Business & Offline Business, held by PT Sharing Vision, in Bandung.
52.	Training Credit and Bond Reinsurance, yg diselenggarakan oleh Atradius Re, bertempat di Dublin Ireland.	Training on Credit and Bond Reinsurance, held by Atradius Re, in Dublin Ireland.
53.	Undangan Assesment LSP Asuransi Syariah Assesment LSP Asuransi Syariah, diselenggarakan oleh AASI.	Invitation of Assesment for LSP Asuransi Syariah, held by AASI.
54.	Training Global Liability Insurance Programmes Understanding The Risk & Exposure, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Global Liability Insurance Program Training Understanding The Risk & Exposure, organized by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
55.	Training Advanced Financial Lines Insurance, yg diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.	Training Advanced Financial Lines Insurance, held by Singapore College of Insurance (SCI) Singapore.
56.	W/S Corporate Secretary Global, yg diselenggarakan oleh Tiara Consultant, di Bandung Jabar.	Workshop of Global Corporate Secretary, held by Tiara Consultant, in Bandung Jabar.
57.	Seminar Managing Cashflow, yg diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Formasi.	Seminar on Managing Cashflow, held by Lembaga Manajemen Formasi.
58.	Training Intermediate Course in Reinsurance and Retakaful, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.	Training Intermediate Course in Reinsurance and Retakaful, held by The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.
59.	Pelatihan Assesor KPKU BUMN, yg diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB).	Training for Assesor of KPKU BUMN, held by Forum Ekselen BUMN (FEB).

60.	Underwriting Gathering, yg diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).	Underwriting Gathering, held by Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
61.	Training Introduction to Reinsurance, yg diselenggarakan oleh The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.	Training Introduction to Reinsurance, held by The Malaysian Insurance Institute (MII) Malaysia.
62.	Melaksanakan program pengembangan / Training Financial Lines Basics (21-22 Juli 2016 Singapore + Cedant)	Training Financial Lines Basics (21-22 July 2016 Singapore + Cedant)
63.	Environmental Liability (13 Juli 2016 Singapore + Cedant)	Environmental Liability (13 July 2016 Singapore + Cedant)
64.	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance : Proportional treaty reinsurance (18-19 Juli 2016 Singapore + Cedant)	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance: Proportional treaty reinsurance (18-19 July 2016 Singapore + Cedant)
65.	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance : Non-Proportional treaty reinsurance (22-23 Juli 2016 Singapore) dan On The Job Training di kantor ARB Singapore	The Nuts & Bolts of treaty reinsurance: Non-Proportional treaty reinsurance (22-23 July 2016 Singapore) and On The Job Training at the office of ARB Singapore
66.	Reinsurance PLUS (1-3 Agustus 2016 Singapore + Cedant)	Reinsurance PLUS (1-3 August 2016 Singapore + Cedant)
67.	Upstream & offshore energy Insurance – An advanced (2-4 Agustus 2016 Singapore + Cedant)	Upstream & offshore energy Insurance – An advanced (2-4 August 2016 Singapore + Cedant)
68.	Marine cargo Insurance underwriting – applying knowledge where it matters (15-16 Agustus 2016 Singapore + Cedant)	Marine cargo Insurance underwriting – applying knowledge where it matters (15-16 August 2016 Singapore + Cedant)
69.	Marine Insurance Act & Implications on Marine Claims (30-31 Agustus 2016 Singapore bersama Cedants)	Marine Insurance Act & Implications on Marine Claims (30-31 August 2016 in Singapore with Cedants)
70.	Intermediate Course in Reinsurance Accounting (2-3 Agustus 2016 Malaysia)	Intermediate Course in Reinsurance Accounting (2-3 August 2016 Malaysia)
71.	Meta Risk & ERM (13-15 Juli 2016 Hong Kong)	Meta Risk & ERM (13-15 July 2016 Hong Kong)
72.	Marine & Energy (20-22 Juli 2016 Singapore)	Marine & Energy (20-22 July 2016 Singapore)
73.	Marine cargo Ins. Underwriting (15-16 Agustus 2016 + Cedant)	Marine cargo Ins. Underwriting (15-16 August 2016 + Cedant)
74.	International Association Auditor Internal (24-27 Agustus 2016 Bangkok)	International Association Auditor Internal (24-27 August 2016 Bangkok)
75.	Asia Marine & Energy Seminar 2016 (29-31 Agustus 2016 Singapore)	Asia Marine & Energy Seminar 2016 (29-31 August 2016 Singapore)
76.	Marine Ins ACT and Implication on marine claims (30-31 Agustus 2016 Singapore + Cedant)	Marine Ins ACT and Implication on marine claims (30-31 August 2016 Singapore + Cedant)
77.	UIB Reinsurance seminar (6-9 September 2016 London)	UIB Reinsurance seminar (6-9 September 2016 London)
78.	Fundamentals of Oil & Gas Exploration and Production (5-8 September 2016 London + Cedant)	Fundamentals of Oil & Gas Exploration and Production (5-8 September 2016 London + Cedant)
79.	General Overview of Life Ins. Operation (5-6 September 2016 Malaysia + Cedant)	General Overview of Life Ins. Operation (5-6 September 2016 Malaysia + Cedant)
80.	The ASEA 2016 (13-16 September 2016 Jepang)	The ASEA 2016 (13-16 September 2016 Jepang)

81.	Workshop/Seminar yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga dalam negeri.	Workshop/Seminar held by domestic institutions.
82.	Selain itu kegiatan In House Training Bahasa Inggris yang dilakukan secara rutin setiap hari Jumat bagi Pegawai sebanyak 2 kelas.	In House Training on English held regularly on Friday for employee, in 2 classes.
83.	Melakukan kegiatan seminar tentang Risk management bekerja sama dengan LSPMR Management Risiko dengan Tema “Menilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Organisasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 & 28 Juli 2016 di Aula Lt. 4 PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan peserta Internal diantaranya Pemegang Gelar CRMP/CRGP di perusahaan sebanyak 18 orang, OJK sebanyak 5 orang dan peserta dari Cedant sebanyak 20 orang.	Seminar on Risk management in collaboration with LSPMR Management Risiko under the theme of “Assessing Maturity Level of Organization Risk Management Implementation” held on 27 & 28 July 2016 at the Hall Fl. 4 PT Reasuransi Nasional Indonesia, among others attended by Internal employee holder of CRMP/CRGP degree 18 persons, OJK employee of 5 persons and Cedant of 20 persons.
84.	Liability Adequacy Test yang diselenggarakan bekerjasama dengan KIS Konsultan Aktuaria pada tanggal 10 Agustus 2016.	Liability Adequacy Test held in collaboration with KIS Konsultan Aktuaria on 10 August 2016.
85.	Sosialisasi Tax Amnesty untuk seluruh pegawai bekerjasama dengan Dinas Perpajakan, yang diselenggarakan pada tanggal 10 September 2016.	Socialization on Tax Amnesty for all employee, by Tax Office, on 10 September 2016.
86.	Tutorial peserta internal dan eksternal untuk subyek 101 dan 102 persiapan ujian AAMAI September 2016, yang diselenggarakan secara keseluruhan pada tanggal 8 Agustus–16 September 2016.	Tutorial for internal dan eksternal attendee on subject No. 101 and 102 for the preparation of AAMAI Test September 2016, held on 8 August– 16 September 2016.
87.	The 8th Indonesia HR Summit, yang diselenggarakan oleh PT Multi Taruna Sejati	The 8th Indonesia HR Summit, held by PT Multi Taruna Sejati
88.	Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Ajun, yang diselenggarakan oleh AASI	Certification of Sharia Insurance Expertise, Adjunct Level, held by AASI
89.	Program REPO bagi Industri Asuransi Jiwa, yang diselenggarakan oleh AAJI	REPO Program for Life Insurance, held by AAJI
90.	Training BOND MARKET ESSENTIALS, yang diselenggarakan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, bertempat di Korea	Training on BOND MARKET ESSENTIALS, held by PT Penilai Harga Efek Indonesia, in Korea
91.	Princing Produk Asuransi Kesehatan, yang diselenggarakan oleh LPMA STMA – Trisakti	Pricing for Health Insurance Products, held by LPMA STMA – Trisakti
92.	28th East Asian Insurance Congres, yang diselenggarakan oleh EAIC, bertempat di Macau, China	28th East Asian Insurance Congres, held by EAIC, in Macau, China
93.	Peningkatan kapasitas dan ketahanan Industri Asuransi, yang diselenggarakan oleh	Increase of capacity and resilience of Insurance Industry, held by PT. Reasuransi Mainpark Indonesia
94.	PT Reasuransi Mainpark Indonesia	Quality and Proper Property Risk Survey, held by PSM Consulting
95.	Property Risk Survey Berkualitas dan Benar, yang diselenggarakan oleh PSM Consulting	Fraudulence : Detection, Investigation & Prevention in Life & Health Insurance, held by ASA Infomega

96.	Frodulence : Deteksi, Investigasi & Pencegahan Dalam Asuransi Jiwa & Kesehatan, yang diselenggarakan oleh ASA Infomega	Frodulence: Detection, Investigation & Prevention in Life & Health Insurance, organized by ASA Infomega
97.	Tantangan Profesionalisme, yang diselenggarakan oleh PAI	Challenge on Profesionalism, held by PAI
98.	Aktuaria Industri Asuransi Umum dan Reasuransi, yang diselenggarakan oleh AAUI	Actuary of General Insurance and Reinsurance Industry, held by AAUI
99.	Board and Executive Development Program For Insurance Batch XIII, yang diselenggarakan oleh ISEA	Board and Executive Development Program For Insurance Batch XIII, held by ISEA
100.	Sosialisasi SE OJK No.10/SEOJK.05/2016, yang diselenggarakan oleh OJK	Socialization of SE OJK No.10/SEOJK.05/2016, held by OJK
101.	Indonesia Human Capital Summit, yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia	Indonesia Human Capital Summit, held by Forum Human Capital Indonesia
102.	22nd Indonesia Rendezvous 2016, yang diselenggarakan oleh AAUI	22nd Indonesia Rendezvous 2016, held by AAUI
103.	Pengadaan Teknologi Informasi 2017: How Low Can You Go ? yang diselenggarakan oleh Sharing Vision	Procurement of Information Technology 2017: How Low Can You Go?, held by Sharing Vision
104.	Metode Perumusan Self Regulation Pengadaan Barang & Jasa Perusahaan, yang diselenggarakan oleh Indotama	Method of Formulation of Self Regulation on the Procurement of Goods & Services Company, held by Indotama
105.	Data Center Professional, yang diselenggarakan oleh PT Silikon Asia	Data Center Professional, held by PT. Silikon Asia
106.	Linear Project, yang diselenggarakan oleh SCOR Reinsurance Asia – Pacific Pte Ltd	Linear Project, held by SCOR Reinsurance Asia – Pacific Pte Ltd
107.	Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial, yang diselenggarakan oleh Mairodi Mandiri Sejahtera	Labor Law & Industrial Relations, held by Mairodi Mandiri Sejahtera
108.	Underwriting and Claims Aspect Of Work Injury Compensation Insurance, yang diselenggarakan oleh SCI Singapore	Underwriting and Claims Aspect Of Work Injury Compensation Insurance, held by SCI Singapore
109.	Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar, yang diselenggarakan oleh AASI	Certification Program of Basic Sharia Insurance Expertise, held by AASI
110.	Strategi Pemasaran Produk di Industrial Jasa Keuangan Syariah, yang diselenggarakan oleh OJK	Product Marketing Strategy in Sharia Financial Services Industry, held by OJK
111.	Akuntansi Keuangan Syariah, yang diselenggarakan oleh LPAI	Sharia Financial Accounting, held by LPAI
112.	Meningkatkan Daya Saing BUMN di era pasar bebas : Tantangan dan Peluang Holding BUMN, yang diselenggarakan oleh FKSPI	Increasing the Competitiveness of SOEs in the era of the free market: Challenges and Opportunities of SOEs Holding, FKSPI
113.	Pricing for General Insurance Product Using Statistical Tools, yang diselenggarakan oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia	Pricing for General Insurance Product Using Statistical Tools, held by PT. Reasuransi Nasional Indonesia

114.	Petty Cash Management, yang diselenggarakan oleh PT Expertindo Training and Consulting	Petty Cash Management, held by PT. Expertindo Training and Consulting
115.	Customer Gathering 2016, yang diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri, bertempat di Hong Kong	Customer Gathering 2016, held by PT. Bank Mandiri, in Hong Kong
116.	Myanmar Insurance Summit, yang diselenggarakan oleh ARB Singapore, bertempat di Myanmar	Myanmar Insurance Summit, held by ARB Singapore, in Myanmar
117.	Certified IT Procurement Expert, yang diselenggarakan PT Sharing Vision	Certified IT Procurement Expert, held by PT. Sharing Vision
118.	Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Ajun, yang diselenggarakan oleh AASI	Program Certification of Sharia Insurance Expertise, Level of Adjunct, held by AASI
119.	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko & Tata Cara Pengisian Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko, yang diselenggarakan oleh WDA	Risk Management Implementation Guidelines & Procedures for Filling in Reports on Self-Assessment Results of Risk Management Implementation, held by WDA
120.	Sharing Experience Membangun Manajemen Risiko Korporat & Penyusunan Key Risk Indicator, yang diselenggarakan oleh WDA	Sharing Experience Building Corporate Risk Management & Preparing Key Risk Indicator, held by WDA
121.	Asuransi Oil and Gas, yang diselenggarakan oleh LPAI	Oil and Gas Insurance, held by LPAI
122.	Sell – Off Emerging Market Threat or Opportunity?, yang diselenggarakan oleh PT Mandiri Sekuritas	Sell – Off Emerging Market Threat or Opportunity?, held by PT. Mandiri Sekuritas
123.	Bedah Polis Asuransi Marine Cargo, yang diselenggarakan oleh LPAI	Studi on Marine Cargo Insurance Policy, held by LPAI
124.	Seminar dan Member Gathering AASI 2016, yang diselenggarakan oleh AASI	Seminar and Member Gathering of AASI 2016, held by AASI
125.	Pelatihan Management Development Program (MDP) A - Batch II, yang secara keseluruhan diselenggarakan pd tgl. 11-12 Nopember dan 17,18,19 Nopember 2016.	Training on Management Development Program (MDP) A - Batch II, in overall held on 11-12 November and 17, 18, 19 November 2016.
126.	Sosialisasi Tax Amnesty, yang diselenggarakan Oleh Dinas Perpajakan pada tanggal 19 September 2016 di Aula Lt. 4 Nasional Re.	Sosialisasi Tax Amnesty, held by Tax Office on 19 September 2016 at the Hall, Lt. 4 Nasional Re.
127.	Kegiatan Management Development Program (MDP), dengan mengundang Kepala Divisi & Kepala Bagian untuk mengikuti penjelasan tentang MDP Program dari Konsultan pada tgl. 8 November 2016, di Lt. 4 Nasional Re.	Management Development Program (MDP), attended by Head of Division & Department, regarding socialization on MDP Program from Consultant on 8 November 2016, at Nasional Re, Fl. 4.
128.	Inhouse Training K3 “Basic HSE (Health, Safety & Environment)” yg diselenggarakan oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia bekerjasama dg PT PhitagorasGlobal Duta, pada tgl. 15 Desember 2016 di Lt. 4.	Inhouse Training K3 “Basic HSE (Health, Safety & Environment)” held by PT. Reasuransi Nasional Indonesia in collaboration with PT. Phitagoras Global Duta, on 15 December 2016.

Pengembangan Karir dan Kesetaraan Kesempatan

Nasional Re mendukung pengembangan karir bagi seluruh karyawannya melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik, sejak proses rekrutmen, maupun dalam program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

Proses evaluasi kinerja pegawai melalui beberapa tahapan yang antara lain terdiri dari :

- Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 5 (lima) tahun
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk periode 1 (satu) tahun
- Menyusun Key Performance Indicator (KPI) perusahaan yang kemudian diturunkan masing-masing unit kerja untuk kemudian dibuat dalam Performance Appraisal (PA) masing-masing Pegawai.

Yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian seluruh pegawai dan unit kerja untuk melakukan atau menyusun target-target di tahun selanjutnya.

Pegawai yang di tahun 2016 mendapat promosi dan rotasi/ mutasi :

- Pegawai yang promosi sejumlah: 12 pegawai
- Pegawai yang rotasi / mutasi sejumlah: 13 pegawai

Total pegawai yang promosi dan rotasi / mutasi sejumlah: 25 pegawai

Strategi Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Remunerasi merupakan imbalan kerja dari perusahaan bagi karyawan yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pension, dan lain sebagainya. Dalam menyusun strategi remunerasinya, Nasional Re mempertimbangkan berbagai hal selain kemampuan perusahaan. Salah satu yang utama adalah kinerja karyawan. Dengan menerapkan strategi remunerasi berbasis kinerja, Perusahaan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga pertumbuhan, dan

Career Development and Equal Opportunity

Nasional Re supports career development for all employees through the implementation of well planned trainings. In addition, the Company also provides opportunities and equal rights for all workers, regardless of ethnic, religion, race, class, gender, and physical condition, from the beginning of the recruitment process, as well as in the competence and skills development programs and well established career path and competitive remuneration.

Employee performance evaluation process was conducted through several stages, among others, consisting of:

- Preparing the Company's Long-Term Plan (RJPP) for a period of 5 (five) years
- Preparing a Work Plan and Budget (RKAP) for a period of 1 (one) year
- Preparing Key Performance Indicator (KPI) of the Company to be derived to each work unit then included in the Performance Appraisal (PA) of each Employee.

As follow-up of the performance evaluation result, the Company evaluates the achievement of all employees and work units in order to prepare or set targets for the next year.

Employees who received promotion and rotation / mutation in 2016:

- Employee promotion: 12 employees
- Employee rotation / mutation: 13 employees

Total employees being promoted and rotated / mutated: 25 employees

Remuneration and Employee Benefits Strategy

Remuneration is the benefit of employees of the company for employees to wages and salaries and allowances fixed, fees, incentives, bonuses for achievement, severance, pension and so forth. In preparing the remuneration strategy, Nasional Re consider various things other than the ability of the Company. One of the main ones is the performance of the employee. By implementing performance-based remuneration strategy, the Company is able to improve productivity, maintain growth and strengthen its position

memperkuat posisinya di tengah persaingan usaha. Strategi ini juga diterapkan untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki Perusahaan.

in the middle of the competition. This strategy is also applied to retain the best employees of the Company.

Remunerasi juga terkait dengan kesejahteraan karyawan dan bagi Perusahaan hal ini merupakan hal yang paling esensial dalam pengembangan SDM. Perusahaan memberikan perhatian khusus dalam masalah kesejahteraan karyawan serta terus melakukan peningkatan dari tahun ke tahun.

Remuneration is also related to the welfare of employees, and the Company recognizes that this is the most essential aspect in the development of human resources. The Company pays attention to employee welfare issues and continuously improves them.

Kebijakan Remunerasi yang diterapkan perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014. Dengan demikian, seluruh pegawai mendapatkan tingkat kesejahteraan yang memadai dan dengan demikian menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

Remuneration policy applied by the Company refers to the Law No. 13 of 2013 on Labour and the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014. Thus, all employees can enjoy a proper standard of living and help promoting comfort working environment.

Peningkatan terhadap fasilitas kesehatan yang diterima oleh seluruh pegawai maupun Direksi yaitu :

Improvement of health benefits received by all employees and the Board of Directors, namely is:

- a) Mengikutsertakan pada Asuransi Kesehatan Program BPJS Kesehatan dari Pemerintah
- b) Mengikutsertakan pada Asuransi Kesehatan Komersial yaitu, Asuransi Manulife baik program rawat inap maupun rawat jalan
- c) Selain itu terdapat peningkatan penerimaan kesejahteraan pegawai pegawai di tahun 2016 yaitu sebesar 14% dari penerimaan di tahun 2015.

- a) Enrolling in the Health Insurance Program of BPJS Health from Government
- b) Enrolling in Commercial Health Insurance, ie Manulife Insurance, both inpatient and outpatient programs
- c) In addition, there was a 14% improvement in employee welfare in 2016 compared to 2015.

Yang diterima oleh pegawai tetap dan pegawai kontrak :

Received by permanent and non-permanent employees:

Tunjangan Pegawai Tetap Permanent Employee Benefits	Tunjangan Pegawai Kontrak Non-Permanent Employee Benefits
Tunjangan Kesehatan Health benefits	Tunjangan Kesehatan Health benefits
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri allowance	Tunjangan Cuti (setelah masa kerja 1 (satu) tahun Leave Allowance (after 1 (one) year working)
Tunjangan Hari Tua (THT)/Pensiun Old Age Benefit (ENT) / Pension	Tunjangan Hari Raya Idul Fitri allowance
Tunjangan Cuti Leave Allowance	
Tunjangan Pakaian Clothes Allowance	
Tunjangan Pendidikan Education Benefits	
Tunjangan Merit Prestasi Merit Achievement Benefits	
Jasa Produksi dan Insentif Production and Incentive Services	

Pengelolaan Hubungan Industrial

Industrial Relations Management

Nasional Re menerapkan sistem manajemen human assets yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak

Nasional Re implements the human asset management system based on the principles of openness, fairness, motivational and free from bias due to differences in ethnicity, origin, gender, religion and origin of birth, as well

terkait dengan kinerja. Selain dari itu Nasional Re juga mengakui hak pekerja untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja yang berpedoman pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perusahaan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain daripada itu, Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Untuk itu segenap jajaran perusahaan baik Direksi, manajemen dan pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Perusahaan melaksanakan beberapa hal mengenai pekerja dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pekerja;
2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
4. Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pekerja;
6. Memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat sesuai peraturan perundang yang berlaku, serta melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja;
7. Menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen Perusahaan;
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pekerja;
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;

as the things that are not related to performance. Aside from those, Nasional Re also recognizes the right of employees to be involved in organization/union in accordance with the provisions of the applicable legislation.

The Company continuously coaches and develops its employees based on the Corporate Culture, Corporate Policies on employment, Principal Regulations of Personnel and Organization. The Company also guarantees that the aforementioned regulations are in accordance with the standards of Good Corporate Governance. In addition, the Company is fully aware of the dynamic changes in the business environment.

To that end, all levels of the Company, the Board of Directors, management, and employees will always strive to establish partnerships in order to support each other in achieving mutual goals and progress. The Company will constantly strive to improve the quality of management and its employees in order to perform efficiently and effectively. The Company carries out some issues on employees and industrial relations, among others:

1. Managing the works excellently to motivate and empower workers;
2. Ensuring that the remuneration scheme received by the employees, in general in accordance with the rules, and comparable and competitive with similar industries;
3. Providing opportunities for employees to participate in education and training in line with the competencies and needs of the Company;
4. Increasing the employees discipline to comply with the rules and policies established;
5. Implementing a fair reward and punishment in accordance with the employees' achievement or error;
6. Providing employees the rights to have freedom of association, according to the prevailing laws and regulations and protect the right of employees to join or not join the Labor Union.
7. Making the Collective Labour Agreement (CLA) as the Company's commitment;
8. Providing employees with conducive and safe working conditions;
9. Providing post-employment rights in accordance with the applicable regulations;

10. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
11. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
12. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan.

Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap perusahaan. Kewajiban pekerja terhadap Perusahaan antara lain:

1. Setiap pekerja wajib mentaati PKB, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan;
2. Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
3. Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pekerja wajib menjaga harta milik dan nama baik perusahaan;
5. Setiap pekerja yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan.

Pertemuan antara wakil manajemen dan Serikat Pekerja (SP) pada tahun 2016 dilakukan pada tanggal 27 April 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 dengan agenda evaluasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tidak ada perselisihan ketenagakerjaan pada tahun 2016.

Selain itu dilakukan juga pemeriksaan rutin ketenagakerjaan oleh Disnaker dengan hasil memenuhi prasyarat ketenagakerjaan dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di tahun 2016.

Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki 201 karyawan dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, D3, S1 dan S2. Berdasarkan jabatan komposisi berjenjang mulai dari Pegawai Dasar, Pelaksana, Kepala Seksi, Kepala Bagian, dan Kepala Divisi.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan, usia dengan status pegawai tetap selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:

10. Referring to the Collective Labour Agreement (CLA) in terms of the welfare of the employees, fair competition, provision of working facilities, and infrastructure;
11. Implementing Collective Labour Agreement (CLA) consistently;
12. Placing Labour Union as a partner of the Company.

Employees also have a range of obligations that must be fulfilled, among others are:

1. All employees are required to comply with CLA, Corporate Values and all Company regulations.
2. All employees are required to prioritize the interests of the Company that relate directly or indirectly with their responsibilities.
3. All employees are required to exert their best efforts in carrying out their assigned duties.
4. All employees are required to maintain the property and reputation of the Company.
5. All employees who became supervisors are required to develop subordinate staff and provide exemplary.

The meeting between the Management and representatives from the trade union (SP) in 2016 was held on 27 April 2016 and 12 August 2016 with the agenda of evaluation of Joint Agreement (PKB) and discussing matters relating to employment. There was no employment dispute in 2016.

In addition, there is also a routine labor inspection conducted by the Manpower Office, and the results complied with the labor requirements of the provisions and laws applicable in 2016.

Employee Composition

As of December 31, 2016, the Company had 201 employees with education levels ranging from elementary school, junior high school, senior high school, Under Graduate, Bachelor and Masters' degree. Based on the position, the composition ranges from Temporary Employees, Clerks, Officers, Section Heads, Department Heads and Division Heads.

Composition of employees by occupation, education, age and status of permanent employee can be seen below:

Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pegawai

Composition of Employees by Education

(per 31 Desember 2016 | per December 31, 2016)

No	Jabatan Position	Jenjang Pendidikan Education												Jumlah Total	
		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD		2015	2016
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
1	Kepala Divisi Head of Division	5	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-	12	12	
2	Kepala Bagian Head of Department	4	5	19	17	-	-	-	-	-	-	-	23	23	
3	Kepala Seksi Head of Section	5	5	40	43	3	3	-	-	-	-	-	48	51	
4	Pelaksana Duty Officer	1	2	64	75	3	2	1	1	-	-	-	69	79	
5	Pegawai Dasar Clerk	-	-	-	-	-	11	14	3	-	1	1	15	15	
6	Pegawai Kontrak Non-Permanent Employee	1	-	11	-	7	2	4	19	-	-	-	23	21	
Jumlah / Total		16	17	141	142	13	7	16	34	3	-	1	1	190	201

Note:

S2 : Master's Degree

S1 : Bachelor Degree

D3 : Undergraduate

SLTA : Senior High School

SLTP : Junior High School

SD : Elementary School

Data pegawai Nasional Re berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of Employees by Gender

(per 31 Desember 2016 | per December 31, 2016)

No	Jabatan Position	2015			2016		
		Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
1	Kepala Divisi Head of Division	11	1	12	11	1	12
2	Kepala Bagian Head of Department	20	3	23	21	2	23
3	Kepala Seksi Head of Section	34	14	48	34	17	51
4	Pelaksana Duty Officer	32	37	69	38	41	79
5	Pegawai Dasar Clerk	15	-	15	15	-	15
6	Pegawai Kontrak Non-Permanent Employee	11	12	23	10	11	21
SUBTOTAL		123	67	190	129	72	201
GRANDTOTAL		190			201		

Data pegawai Nasional Re berdasarkan umur pegawai

Composition of Employees by Age

(per 31 Desember 2016 | per December 31, 2016)

No	Jabatan Position	20 s/d 24 tahun years old	25 s/d 29 tahun years old	30 s/d 34 tahun years old	35 s/d 39 tahun years old	40 s/d 44 tahun years old	45 s/d 49 tahun years old	50 s/d 54 tahun years old	55 tahun ke atas years old	TOTAL
1	Kepala Divisi Head of Division					3	5	4		12
2	Kepala Bagian Head of Department				2	5	7	7	2	23
3	Kepala Seksi Head of Section		2	12	14	13	4	6		51
4	Pelaksana Duty Officer	10	45	6	6	6	5	1		79
5	Pegawai Dasar Clerk				3	7		5		15
6	Pegawai Kontrak Non-Permanent Employee	8	12	1						21
SUBTOTAL		18	59	19	25	34	21	23	2	201
GRANDTOTAL										201

Sum Turn Over of Employee per 31 Dec.2016

PEGAWAI | EMPLOYEE
PER 31 DESEMBER 2015 | PER DECEMBER 31, 2015 190

PEGAWAI KELUAR PER 2016 |
EMPLOYEE RESIGN PER 2016 13

Kontrak Berakhir | Contract Expires 5

Mengundurkan Diri | Resign 4

Meninggal Dunia | Deceased 1

Pensiun | Retired 3

177

REKRUITMEN PEGAWAI | EMPLOYEE RECRUITMENT 2016 24

PEGAWAI | EMPLOYEE PER 31 DES 2016 201

Komposisi Tenaga Ahli

Sampai dengan bulan Desember 2016, perusahaan memiliki 201 orang pegawai (tidak termasuk Direksi), dan 64 di antaranya telah menyandang gelar profesi, baik ajun ahli maupun ahli asuransi, yaitu:

No	Keahlian Expertise	Jumlah Total	
		Dec-15	Dec-16
1	Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZIIIF)	1	1
2	Associate of the Chartered Insurance Institute (ACII)	4	4
3	Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK) Fellow of Indonesia General Insurance	5	5
4	Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) Fellow of Indonesia Life Insurance	1	1
5	Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK) Associate of Indonesia General Insurance	10	12
6	Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ) Associate of Indonesia Life Insurance	11	11
7	Fellow of The Society of Actuaries of Indonesia (FSAI)	1	1
8	Associate of the Malaysian Insurance Institute (AMII)	8	7
9	Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS)	2	2
10	Associate of Islamic Insurance Society (AIIS)	9	9
11	International Post Graduate Diploma in Insurance (IPGDI)	1	1
12	Professional Internal Audit (PIA)	2	1
13	Associate of the Society of Actuaries of Indonesia (ASAI)	1	1
14	Wakil Manajer Investasi (WMI) Assistant Investment Manager	1	1
15	Akuntan Accountant	3	3
16	Ajun Ahli Asuransi Kesehatan (AAAK) Associate of Health Insurance	2	2
17	Qualified Internal Auditor (QIA)		2
Jumlah / Total		62	64

The Composition of Experts

As of Desember 2016, the Company had 201 employees (excluding Directors) and 64 of which have professional titles, both adjunct experts and insurance experts, namely:

Evaluasi Kinerja Karyawan

Proses evaluasi kinerja karyawan melalui beberapa tahapan yang antara lain terdiri dari:

- Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 5 (lima) tahun
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk periode 1 (satu) tahun
- Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) perusahaan yang kemudian diturunkan masing-masing unit kerja untuk kemudian dibuat dalam *Performance Appraisal* (PA) masing-masing Pegawai.

Yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian seluruh karyawan dan unit kerja untuk melakukan atau menyusun target-target di tahun selanjutnya.

Employee Performance Evaluation

The processes of evaluating the performance of employees through several stages are, among others:

- Prepare the Company Long-Term Plan (RJPP) for a period of 5 (five) years
- Prepare a Work Plan and Budget (RKAP) for a period of 1 (one) year
- Prepare the Key Performance Indicator (KPI) of the Company which is then derived to each work unit to be used for Performance Appraisal (PA) of each Employee.

Following up results from the performance evaluation is evaluating the achievement of all employees and work units in performing or setting the targets for the next year.

Dampak Keuangan Pengelolaan SDM

Financial Impact from HR Management

Tabel produktivitas perusahaan, khususnya dalam 2 (dua) tahun terakhir
Productivity Table in the Last 2 (two) years

	2015	2016
Laba Bersih Perusahaan / The Company's Net Income	251.073.000.000	335.613.000.000
Jumlah karyawan (orang) / Total employee (person)	190	201
Rasio Produktivitas / Productivity Ratio	1.321.436.842	1.669.716.418

Total Investasi untuk pengembangan SDM sebesar Rp7.326.956.575 atau sekitar 6,85% dari Beban Pegawai.

Total Investment for human resource development amounted to Rp7,326,956,575 or about 6.85% of Employee Expenses.

PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK)

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT (ICT)

Kebijakan Pengembangan TIK

Sebagai infrastruktur strategis, Perusahaan menempatkan fokus tersendiri terhadap pengembangan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi. Upaya pengembangan yang dilakukan berfokus pada dukungan sistem Teknologi Informasi & Komunikasi yang dapat menghadirkan proses bisnis serta layanan yang cepat, akurat dan efisien serta mendorong inovasi-inovasi secara berkelanjutan.

ICT Development Policy

As a strategic infrastructure, the Company places special focus on the development of Information and Communication Technology aspects. The development was focused on the support of Information & Communication Technology system that can deliver fast, accurate and efficient business processes and services as well as drive innovation on an ongoing basis.

Dukungan Teknologi Informasi & Komunikasi tersebut diterapkan baik untuk menghasilkan produk baru maupun untuk mengoptimalkan proyek yang telah berjalan sehingga dapat memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Karena itu, Perusahaan telah menyiapkan desain serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi yang meliputi:

IT support is used during the creation of new products or when optimizing the existing project so as to provide satisfaction and added value for customers and stakeholders. Therefore, the Company has prepared the design and management of information technology in an integrated manner that includes:

1. **Availability**, ketersediaan layanan infrastruktur TIK yang terbebas dari gangguan;
2. **Scalability**, kemampuan untuk menampung peningkatan beban kerja layanan TIK;
3. **Security**, pengamanan integritas data dari ancaman pencurian, pengubahan dan penghapusan, baik yang dilakukan melalui jaringan, maupun akses langsung ke fasilitas fisik TIK;
4. **Serviceability**, kemudahan untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dari kerusakan; dan

1. **Availability**, which is the availability of ICT infrastructure services free from interference;
2. **Scalability**, or the ability to accommodate the increased workload of ICT services;
3. **Security**, safeguarding the integrity of the data from the threat of theft, alteration and deletion, whether done through the network, or direct access to physical ICT facilities;
4. **Serviceability**, the ease to perform maintenance including repair of the damage; and

5. **Manageability**, kemudahan dalam pengelolaan, termasuk administrasi dan pengoperasiannya.

Pengembangan SDM Bidang TIK

Selain mengembangkan program dan aplikasi, serta melakukan upgrading peralatan infrastruktur TIK secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi, Perusahaan juga melaksanakan program pengembangan SDM bidang TIK, yakni melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan Divisi TIK. Peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan melalui pemberian berbagai training yang relevan termasuk pendidikan aplikasi, program sertifikasi keahlian, manajemen risiko di bidang TIK, hingga tahap programmer bagi pengembangan fitur-fitur aplikasi.

Satuan Kerja Teknologi Informasi & Komunikasi

Satuan kerja pada Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari 14 orang dengan komposisi pendidikan S1 sebanyak 14 orang, yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Divisi, 1 orang Kepala Bagian Perencanaan Strategi dan Operasional & Layanan, 2 orang tim System Architect, 3 orang tim DBA & Quality Assurance, 3 orang tim Helpdesk dan 4 orang tim System Development.

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi

Roadmap Sistem Informasi

Secara ringkas, roadmap implementasi arsitektur sistem informasi yang dipetakan berdasarkan tema pada masing-masing fase dijelaskan pada gambar berikut:

Keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh strategi yang dipakai untuk merealisasi atau mengimplementasikannya. Strategi ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat urgensi kegiatan, kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan sumber dana serta pertimbangan lainnya yang relevan. Atas dasar tersebut disusun strategi implementasi program kerja untuk Nasional Re.

5. **Manageability**, or the ease in managing, including the administration and operation.

Human Resource Development in ICT

In addition to developing programs and applications, as well as upgrading its ICT infrastructure equipment on a regular basis, according to the needs and technological developments, the Company also implements development programs for human resources in ICT sector, namely by improving the competence and professionalism of the employees of the ICT Division. The development of HR competencies is conducted through the provision of various relevant training programs, including application training, skills certification program, ICT risk management and programmer for the development of application features.

Information and Communication Technology (ICT) Unit

Information and Communication Technology unit is part of the Division of Information and Communication Technology consisting of 14 persons, with the composition of 14 employees, consisting of 1 Division Head/Senior Manager, 1 Head of Strategic Planning and Operational & Service Department, 2 employees of System Architect Team, 3 employees of DBA & Quality Assurance Team, 3 employees of Helpdesk Team and 4 employees of System Development Team.

Roadmap for Development of Information and Communication Technology

Information System Roadmap

In short, the roadmap of architecture implementation information systems, mapped based on the theme of each phase, is described in the following image:

The success of an activity is strongly depending on the strategy used to realize or implement it. This strategy is influenced by several factors such as the level of urgency of such activity, organizational readiness, availability of resources, and availability of funding sources and other relevant considerations. The Company develops its work program based on such understanding.



Strategi Implementasi TI berdasarkan Fase

Strategi implementasi dikelompokkan menjadi beberapa tahap yang akan dikerjakan dalam kurun waktu lima tahun yang terdiri dari Tahap *Comparative*, Tahap *Competitive*, dan Tahap *Expansive*. Penjelasan strategi pengembangan teknologi informasi di Nasional Re adalah sebagai berikut:

IT Implementation Strategy by Phase

Implementation strategy is grouped into several phases that will last within a period of five years, consisting of Comparative Stage, Competitive Stage, and Expansive Stage. Explanation on the information technology development strategy at Nasional Re is as follows:

	Fase / Phase I Comparative	Fase II Competitive	Fase III Expansive
Tujuan Objective	<p>Mempertahankan operasional yang telah berjalan dengan baik, mempersiapkan segala kebutuhan TIK yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk menjalankan dan meningkatkan operasinya secara baik. Periode ini diisi dengan program identifikasi kebutuhan TIK yang telah dipenuhi dan yang belum dipenuhi, perencanaan TIK untuk meningkatkan kemampuan operasional perusahaan, dan pengembangan aplikasi TIK untuk memenuhi kebutuhan <i>Core Business</i> perusahaan</p> <p>Maintain well-functioning operations, prepare all ICT needed by the Company to run and improve its operations properly. This period is filled with identification on ICT needs that have and have not been met, ICT planning to improve the Company's operational capability, and the development of ICT applications to meet the needs of its Core Business.</p>	<p>Mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan TIK untuk memenangkan kompetisi pada bisnis Re-asuransi di Indonesia. Pada periode ini aplikasi TIK yang dimiliki harus telah sama atau lebih baik dari yang dimiliki oleh kompetitor. Aplikasi TIK yang dimiliki harus dikembangkan untuk mendukung tercapainya competitive advantage oleh perusahaan melalui kegiatan Inovasi, pertumbuhan, <i>Cost leadership</i>, <i>Differentiation</i>, dan <i>Alliance</i> yang mungkin dilakukan</p> <p>Prepare everything ICT needs to win the competition on Reinsurance business in Indonesia. In this period, the ICT applications applied by the Company must have been equal or better than those owned by the competitors. ICT applications owned must be developed to support the achievement of the Company's competitive advantage through innovation, growth, Cost leadership, differentiation, and any possible Alliance.</p>	<p>Periode persiapan ke tingkat Expansive, yang bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan TIK untuk mendukung ekspansi organisasi, melaksanakan pengembangan aplikasi TIK untuk mendukung ekspansi perusahaan ke wilayah regional. Program kerja yang dilaksanakan harus berisi kebijakan dan aplikasi yang mendukung tujuan diatas, diantaranya menerapkan prinsip dan fungsionalitas yang sesuai dengan industry best practices di bidang Reasuransi, dan menerapkan <i>good IT governance</i></p> <p>The preparatory period to Expansive phase, which aims to prepare ICT needs to support organizational expansion, implement ICT application development to support the Company's expansion into regional level. The work program to be implemented should contain policies and applications that support the above objectives, including applying principles and functionality in accordance with the best practices of Reinsurance industry, and implement good IT governance</p>

	Fase / Phase I Comparative	Fase II Competitive	Fase III Expansive
Sasaran / Target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan saat ini yang bersifat mendesak untuk mempertahankan kinerja organisasi. 2. Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan kondisi operasional sistem saat ini. 3. Meningkatkan level tata kelola teknologi informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Meeting current needs that are urgent for maintaining organizational performance. 2. Implementation of inventory and mapping the current operational condition of the system. 3. Increasing the level of information technology governance 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kinerja organisasi dan menjadi perusahaan reasuransi terdepan di Indonesia. 2. Memiliki core system yang sudah standar dan dijadikan referensi bagi perusahaan reasuransi lainnya 3. Terlaksananya penyiapan kebutuhan SDM dan infrastruktur untuk operasional unit bisnis 4. Menciptakan inovasi – inovasi disisi teknologi informasi untuk meng-otomatisasi proses bisnis <ol style="list-style-type: none"> 1. Maintaining the performance of the organization and becoming the leading reinsurance company in Indonesia. 2. Having a core system that has been standardized and used as a reference for other reinsurance companies 3. Implementation of human resource and infrastructure requirements for business unit operations 4. Creating innovations on information technology to automate business processes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan dapat bersaing di wilayah regional dengan dukungan teknologi informasi 2. Memenuhi dan melengkapi kebijakan tata kelola TI sesuai dengan standard best practice 3. Menyiapkan layanan yang excellence untuk meningkatkan kepuasan klien 4. Integrasi sistem dalam level yang lebih luas dengan induk perusahaan (ASKRINDO) untuk memenuhi kebutuhan bisnis <ol style="list-style-type: none"> 1. The Company is able to compete in regional areas with the support of information technology 2. Complying with and completing the IT governance policies in accordance with best practice standards 3. Setting up excellence service to improve client satisfaction 4 System Integration in a broader level with the parent company (ASKRINDO) to meet business needs
Program Sistem Informasi / Information System Program	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis dan Sistem Aplikasi Seluruh unit bisnis - Pemuktahiran <i>Business Continuity Management</i> - Integrasi <i>Database</i> <ul style="list-style-type: none"> - Improvement and development of business processes and Application Systems for all business units - Business Continuity Management Update - Database Integration 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Aplikasi <i>Reinsurace Slip Facultative</i> dan <i>Treaty</i> - Peningkatan kemampuan <i>Entry Data</i> - Standarisasi prosedur dan format penawaran <i>Cedant</i> - Pengembangan <i>Document Management System</i> - Percepatan penyelesaian klaim melalui pemanfaatan TIK <ul style="list-style-type: none"> - Development of Reinsurace Slip Facultative and Treaty Application - Increasing Entry Data capability - Standardizing procedures and Cedant offering format - Development of Document Management System - Accelerating the settlement of claims through the utilization of ICT 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>DECISION SUPPORT SYSTEM</i> untuk unit Bisnis - Pembangunan Portal Nasional Re Berbasis Web - Implementasi DWS (Data Ware House) PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan Askrindo - Studi banding / Benchmarking <ul style="list-style-type: none"> - Development of DECISION SUPPORT SYSTEM for Business unit - Development of Nasional Re Web-Based Portal - Implementation of DWS (Data Ware House) of PT. Reasuransi Nasional Indonesia and Askrindo - Comparative studies / Benchmarking

	Fase / Phase I Comparative	Fase II Competitive	Fase III Expansive
Program Teknologi Informasi / Information Technology Program	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>Corporate Email</i> untuk seluruh unit Bisnis - Pengembangan keamanan infrastruktur (<i>ICT Security</i>) - Kajian ICT terkait <i>spin-off</i> Divisi Reasuransi Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi Kodefikasi. - Sinkronisasi Sistem IT Perusahaan dengan Mitra kerja - Program Digitalisasi Dokumen - Kebijakan Arsitektur Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggabungan Data Center dengan ASKRINDO - Data Center Merger with ASKRINDO
	<ul style="list-style-type: none"> - Development of Corporate Email for all Business units - Development of infrastructure security (ICT Security) - Review on ICT related to spin off of the Islamic Reinsurance Division 	<ul style="list-style-type: none"> - Standardization of Codefication. - Synchronizing the Company IT System with Partners - Document Digitalization Program - Information Architecture Policy 	

Masing-masing program pada setiap fase mencerminkan sasaran Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi dukungan TIK terhadap sasaran bisnis. Fase pertama, yaitu program peningkatan nilai tambah data dan informasi memiliki beberapa tujuan teknis, diantaranya memanfaatkan data yang belum termanfaatkan secara optimal, meningkatkan utilisasi data, dan mengolah data mentah yang tersedia untuk dapat dijadikan informasi atau *knowledge* yang lebih bernilai untuk kebutuhan bisnis.

Each program in each phase reflects the goals of the Division of Information and Communication Technology in order to improve the optimization of ICT support towards business goals. The first phase, which is a program of increasing value added data and information has several technical objectives, such as utilizing data that has not yet been utilized optimally, improving data utilization, and processing available raw data to be used as information or knowledge which is more valuable for business needs.

Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi

Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi sebagian besar mencakup kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan ini disesuaikan dengan roadmap sistem informasi & komunikasi yang telah diuraikan di atas. Kegiatan pengadaan dan upgrade ini dapat dilihat pada gambar Roadmap Teknologi Informasi & Komunikasi berikut ini:

Roadmap of Information and Communication Technology

Information and communication technology roadmap is mostly about procurement activities. This procurement activity is tailored to the roadmap information system described above. This procurement activities and upgrades can be seen in the following Image of Information and Communication Technology Roadmap.

No	Arahan Program / Direction of Program
1	Program Kerja Penyempurnaan Data Informasi UDW Facultative Facultative UDW Information Data Improvement Program
2	Program Kajian Standarisasi Kodefikasi Codification Standardization Review
3	Program Pembangunan Aplikasi PP MR PP MR Application Development Program
4	Program Pembangunan Aplikasi R/I Facultative R / I Facultative Application Development Program
5	Program Pengembangan Aplikasi R/I Treaty R / I Treaty Application Development Program
6	Program Penambahan Fungsi Early Warning pada Aplikasi SDM-Umum Adding Early Warning Function to HR-General Affairs Application
7	Program Pengembangan Aplikasi SPI SPI Application Development Program

No	Arahan Program / Direction of Program
8	Program Penyempurnaan Sistem Aplikasi Penagihan Billing Application System Enhancement Program
9	Program Sinkronisasi Sistem IT Perusahaan dengan mitra kerja Synchronizing the Company's IT System with partners
10	Program Implementasi DWS Nasional Re – ASKRINDO DWS Implementation Program Nasional Re-ASKRINDO
11	Program Kerja Rekrutmen SDM HR Recruitment Program
12	Program Re-evaluasi dan Peningkatan Kemampuan Entry Data Re-evaluation and Data Entry Enhancement Program
13	Program Pemutakhiran ICT Knowledge ICT Knowledge Update Program
14	Program Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur Ke Depan Infrastructure Future Need Planning Program
15	Program Standarisasi Manajemen Konfigurasi Sistem TI IT System Configuration Management Standardization
16	Program Kebijakan Standarisasi Prosedur dan Format Dokumen Penawaran Cedant Standardization of Procedure Policy and Cedant Offering Document Format
17	Program Kajian Penyusunan rencana Kebutuhan TI terkait Ekspansi Bisnis Review on Preparation of IT Plan related to Business Expansion
18	Program Sosialisasi Pemanfaatan TI secara Berkala Socialization of IT Utilization Periodically
19	Program Kebijakan Layanan Kontinyu (Continue Service) Continuing Service Policy Program
20	Program Penyusunan Prosedur Manage Service Preparation of Managing Service Procedures
21	Program Manajemen Kinerja dan Kapasitas Sistem TI Performance Management and IT System Capacity
22	Program Penyusunan Metodologi SDLC SDLC Methodology Development Program
23	Program Penyusunan Standarisasi Pelatihan TI IT Training Standardization Development Program
24	Program Pemeliharaan Lisensi Licensee Maintenance Program

Kegiatan pemeliharaan kabel dan maintenance PC dan printer merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan roadmap sistem informasi sehingga tidak terlihat pada gambar di atas. Kegiatan pemeliharaan kabel dan maintenance PC dan printer seyogyanya merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan.

Manajemen Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung program-program kerja yang terkait dengan pengembangan arsitektur sistem maupun teknologi informasi & komunikasi, dibutuhkan organisasi TIK yang ideal sesuai dengan acuan best practice pengelolaan TIK.

Tahap awal dari pembenahan manajemen dan tata kelola TIK adalah dengan merancang kebijakan sebagai payung hukum

Cable, PC, and printer maintenance activities are activities that are not directly related to information system roadmap ,so it is not presented in the image. Cable, PC, and printer maintenance activities should be an ongoing routine activity.

ICT Management

In support of the work programs related to the development of the system architecture and information technology, an ideal ICT organization is needed, referring to the best practices of ICT management.

The early stages of revamping Management and ICT governance are to prepare policy as its legal umbrella for



dalam pelaksanaan pengembangan maupun pengelolaan terhadap seluruh proses dalam daur hidup TIK. Kebijakan ini selayaknya juga menaungi seluruh aspek TIK, mulai dari manajemen informasi, aplikasi, infrastruktur pendukung, hingga manajemen organisasi TIK itu sendiri. Sehingga diharapkan segala kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaa TIK yang tentunya melibatkan unit kerja lain memiliki suatu acuan induk atau pedoman yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Beberapa standar atau best practice dapat diadopsi untuk perancangan IT Policy ini, diantaranya COBIT 4.1 dan IT Infrastructure Library untuk Manajemen proses khusus pada infrastruktur.

Tahap berikutnya setelah disahkannya IT Policy PT Reasuransi Nasional Indonesia yang merupakan perancangan kebijakan keamanan informasi, yang konsepnya merujuk dari pedoman standar keamanan informasi sesuai best practice, seperti ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pembenahan proses dalam pengelolaan TIK dapat pula diturunkan dari IT Policy yang telah didefinisikan. Beberapa proses yang perlu ditingkatkan maturitasnya melalui pembakuan prosedur antara lain adalah identifikasi solusi bagi otomasi proses bisnis dan prosedur sosialisasi beserta mekanisme relasional antara TIK dan Bisnis.

the development and management of the entire process in the life cycle of ICT. This policy should also overshadow all aspects of ICT, ranging from information management, applications, support infrastructure, to IT Management organization itself. It is expected that all the activities for IT development and management that would involve other units have a parent reference or guidelines agreed upon and adhered together.

Some standards or best practices can be adopted to design the ICT Policy, including COBIT 4.1 and the IT Infrastructure Library for special process Management on the infrastructure.

The next stage, following the ratification of Nasional Re-Wide ICT Policy is designing the concept of information security policy, based on the ICT Policy and referring to the best practices of security standards of information, such as ISO/IEC 27001 on Information Security Management systems.

Revamping the processes in ICT management can also be based on the defined ICT Policy. Some processes, in which maturities need to be improved through standardization of procedures, include identifying solutions for business process automation and socialization procedures, as well as relational mechanism between ICT and the business.



Kegiatan penyesuaian fungsi organisasi terhadap kebutuhan arsitektur sistem/teknologi informasi dapat dilaksanakan secara fleksibel. Fungsi-fungsi yang ada dapat menempel ke masing-masing personil yang telah ada di dalam struktur organisasi melalui pemberian kegiatan pelatihan atau penambahan kompetensi apabila penambahan jumlah personil tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Program Pengembangan Aplikasi

Sebagai salah satu perusahaan reasuransi, yang mempunyai misi memberikan kapasitas reasuransi maka perusahaan berperan serta dalam menyediakan kapasitas reasuransi Umum dan Jiwa baik jenis Konvensional maupun Syariah.

Untuk keperluan itulah perusahaan memiliki modul-modul penting (*Core Business*) sebagai berikut:

1. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Syariah;
2. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Syariah;
3. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Konvensional;
4. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Konvensional;
5. Modul Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Modul Akuntansi & Keuangan.

The alignment of functions of organization and the system architecture/information technology is brought about in a flexible manner. Existing functions can be attached to each of existing personnel in the organizational structure through provision of additional training or competence, in the event that additional personnel is not possible.

Application Development Program

As one of the reinsurance companies which has the mission of providing reinsurance capacity, Nasional Re takes part in providing reinsurance capacity of both types of General and Life of both Conventional and Sharia.

For that purpose, the Company has the following important modules for core business:

1. Sharia General Reinsurance Application Module
2. Sharia Life Reinsurance Application Module
3. Conventional General Reinsurance Application Module
4. Conventional Life Reinsurance Application Module
5. Human Resource (HR) Module
6. Accounting & Finance Module.

Di samping program *core business*, Perusahaan memiliki modul-modul aplikasi pendukung seperti:

1. Help Desk
2. Sunfish
3. Treaty Decision Support System
4. Treaty Decision Support System Syariah
5. Facultative Accumulation Control
6. Manajemen Risiko Apps
7. Ceding Performance
8. KPI (Key Performance Indicator)
9. Knowledge Management System
10. Early Warning System
11. Room and Car Reservation
12. Corporate Secretary Schedule
13. Approval Facultative
14. Klaim Support System
15. Asset Management
16. License Management

Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi

Untuk mendukung berjalan baiknya operasional perusahaan, berbagai upaya telah diusahakan, termasuk melengkapi peralatan dan infrastruktur terkait Teknologi Informasi & Komunikasi secara memadai. Infrastruktur ini meliputi:

1. Perangkat Keras;
2. Perangkat Lunak;
3. Jaringan Komunikasi Data;
4. Voice Over Internet Protocol;
5. Keamanan Data.

Berikut ini adalah bagan infrastruktur teknologi informasi Nasional Re.

In addition to core business programs, the Company has supporting application modules, such as:

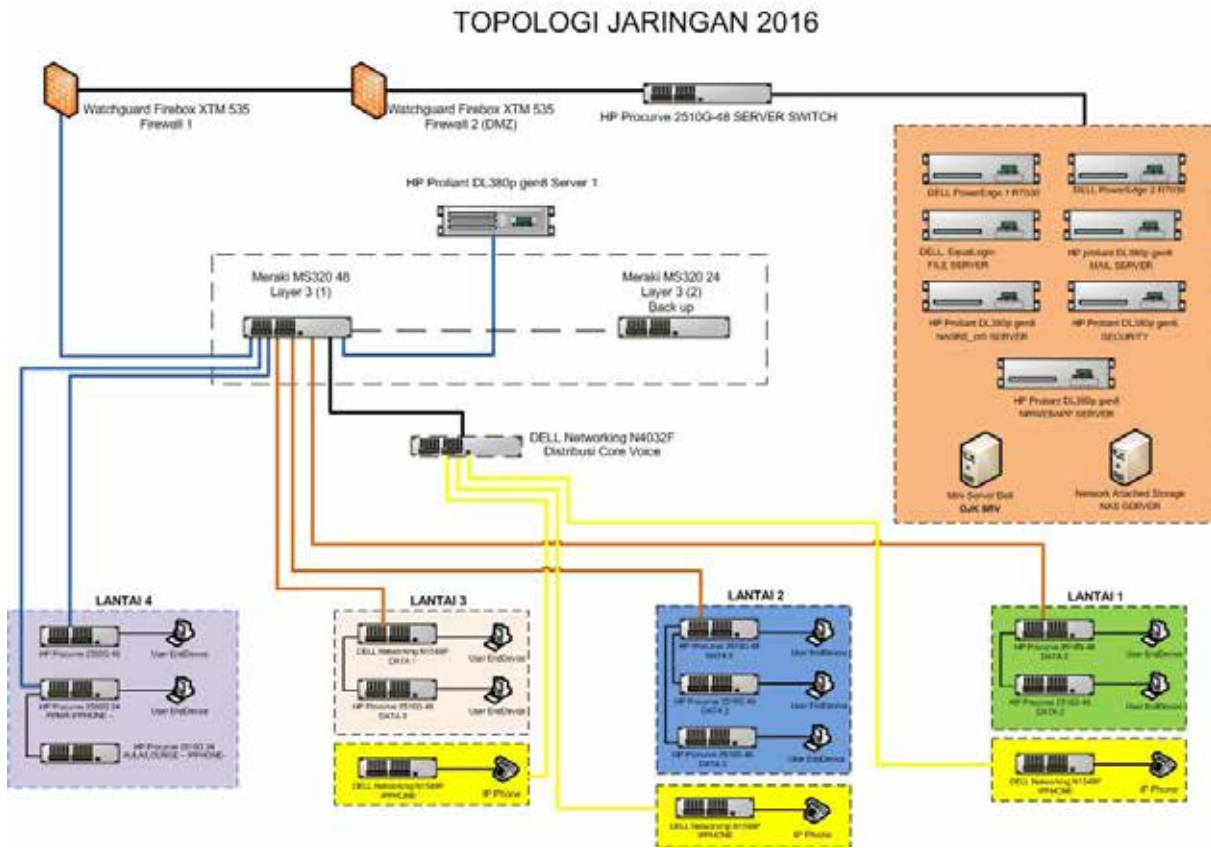
1. Help Desk
2. Sunfish
3. Treaty Decision Support System
4. Treaty Decision Support System Syariah
5. Facultative Accumulation Control
6. Apps Risk Management
7. Ceding Performance
8. KPI (Key Performance Indicator)
9. Knowledge Management System
10. Early Warning System
11. Room and Car Reservation
12. Corporate Secretary Schedule
13. Approval Facultative
14. Claim Support System
15. Asset Management
16. License Management

Information & Communication Technology Infrastructure

To support the Company's operations, various efforts have been made, including adequately completing the equipment and infrastructure of information technology. This infrastructure includes:

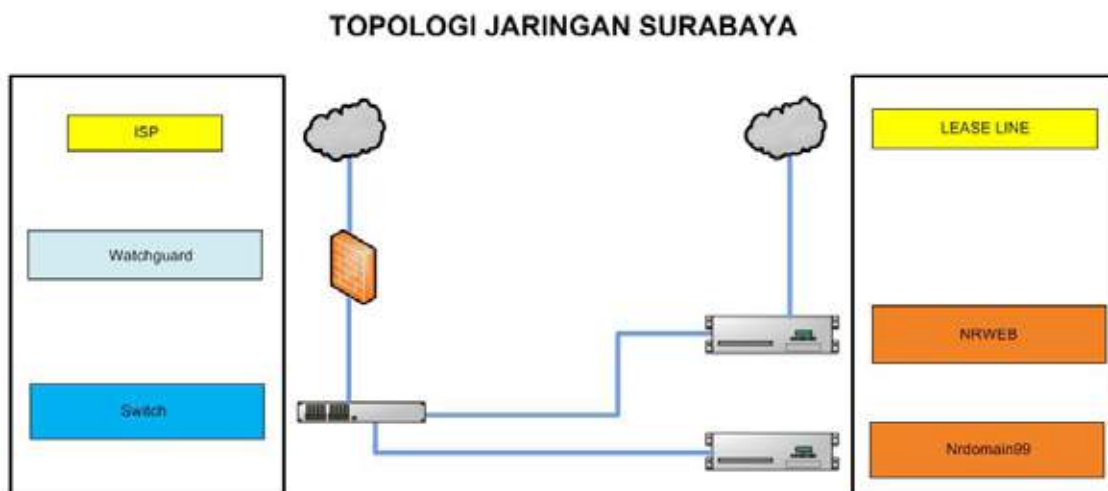
1. Hardware;
2. Software;
3. Data Communication Networks;
4. Voice Over Internet Protocol;
5. Data Security.

Following is the chart of the Company's information technology infrastructure.



Gambar Topologi DRC Site Surabaya

Topology of DRC Site Surabaya



IP Phone

IP Phone adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Cara kerjanya adalah sinyal analog diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket – paket data secara real time. PT Reasuransi Nasional Indonesia sudah menerapkan teknologi IP Phone dalam hal teknologi komunikasinya, dimana di perusahaan terdapat 125 buah perangkat IP Phone yang terpasang terdiri dari:

- 4 perangkat tipe 9951
- 11 perangkat tipe 8945
- 109 perangkat tipe 7811
- 1 perangkat tipe SX20

Teknologi IP Phone ini diimplementasikan di perusahaan dengan dimulainya proses instalasi pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 27 November 2015, kemudian dilanjutkan proses migrasi dari telepon analog ke IP Phone pada tanggal 4 Desember 2015 dan setelah tahap ini adalah tahap penyesuaian dari penggunaan telepon analog ke IP Phone.

Manfaat dari teknologi IP Phone ini adalah:

1. Dapat melakukan *Conference Call* antar *extension internal* dalam perusahaan
2. Dapat melakukan *Video Conference* dengan menggunakan perangkat SX 20, baik antar perangkat IP Phone maupun dengan perangkat *Video Conference* milik mitra bisnis bahkan di luar negeri selama mereka menggunakan jenis produk yang sama atau sejenis.
3. Kualitas suara yang lebih jernih tanpa ada suara gangguan.
4. Biaya dalam penggunaan IP Phone dapat terlihat.
5. Penggunaan jabber pada perangkat smartphone dapat memindahkan perangkat IP Phone ke dalam smartphone yang sudah dipasang aplikasi jabber sehingga dapat mempermudah kinerjanya yang mobilitas.

IP Phone

IP Phone is a technology that bases on internet media to provide remote voice communication directly. It converts analog signals into digital data and is transmitted over the network in the form of data packets in real time. PT Reasuransi Nasional Indonesia has implemented IP Phone technology in terms of communication technology, where the Company has already had 125 units of IP Phone installed, consisting of:

- 4 units type 9951
- 11 units type 8945
- 109 units type 7811
- 1 units type SX20

The IP Phone technology is implemented in the Company with the commencement of the installation process from October 28 to November 27, 2015, then continued with migration process from analog phone to IP Phone on December 4, 2015 and after this phase is the adjustment phase from analog phone to IP Phone .

The benefits of this IP Phone technology are:

1. Facilitating Conference Call between internal extension within the company
2. Facilitating Video Conference using SX 20 devices, either between IP Phone devices or with Video Conference devices owned by business partners, even abroad, as long as they use the same or similar type of product.
3. Better sound quality without any noise disturbance.
4. Expenses in using IP Phone that can be displayed.
5. The use of jabber on smartphone devices can transfer IP Phone devices into smartphones that have been installed with jabber application to facilitate mobility performance.

Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Tata Kelola TIK berorientasi pada pelaksanaan proses kerja dan bukan pada hasil proses kerja, sehingga menuntut adanya pengelolaan dan pelaksanaan proses kerja yang lengkap dan terintegrasi. Tingkat kematangan dalam Tata Kelola TIK yang semakin tinggi akan tercermin pada pengelolaan TIK yang berorientasi pada upaya Preventif dan Proaktif, Risiko TIK yang terkendali, dan menghindari terjadinya masalah yang sama berulang kali serta dapat memberikan jaminan mutu yang lebih konsisten dalam jangka panjang.

Terdapat empat proses dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagai berikut:

- A. Proses Kerja Pengelolaan Tingkat Layanan
PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam menjalankan proses kerja pengelolaan tingkat layanan yang sistematis dan terintegrasi masih melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar dapat mendorong terjadinya tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada semua tingkat layanan. Hal ini dimaksudkan supaya pengukuran tingkat layanan yang diberikan kepada pengguna dapat dilakukan lebih lengkap dan akurat.
- B. Proses Kerja Pengembangan Solusi Berbasis TIK
Dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Solusi Berbasis TIK dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengujian *System Test*, *User Acceptance Test* dan pendekatan *IT Project Management* secara formal, lengkap, dan sistematis.
- C. Proses Kerja Pengelolaan *Help Desk*
User selaku pengguna layanan TIK membuat request berkaitan dengan layanan TIK yang diinginkan untuk membantu memperlancar proses kerjanya dan mengirimnya ke *Help Desk*. Atas dasar *request* tersebut *Help Desk* mendistribusikan kepada *System Architect*, *Quality Assurance*, atau *System Development*, maupun *Help Desk*. *Help Desk* memonitor penyelesaian pekerjaan tersebut sampai diterima dan sesuai dengan keinginan user.

Information Communication and Technology (ICT) Governance

The ICT Governance is a process-oriented rather than result oriented, thus demands a complete and integrated management and execution. A higher level of maturity of ICT Governance will be reflected in an ICT management that is oriented towards Preventive and Proactive efforts, under controlled ICT Risk and preventing the same problems from recurring and able to deliver a more consistent quality assurance in the long run.

There are four processes in the implementation of ICT Governance as follows:

- A. Level of Service Management Working Process
In carrying out a systematic and integrated Level of Service Management Working Process, PT Reasuransi Nasional Indonesia is still conducting ongoing improvement in order to promote the level of service that can suit the users' demand at all levels. It is intended to make the measurement on the level of service provided to the user that can be conducted more completely and accurately.
- B. ICT-Based Solutions Development Working Process
In the development and refinement of IT Based Solutions application is done by using the evaluating mechanism of System Test, User Acceptance Test and IT Project Management approach in a formal, complete, and systematic way.
- C. Help Desk Management Working Process
User of IT service makes a request related to the desired ICT services to help expedite the work process and send it to the Help Desk. Based on the request, the Help Desk staff distributes the task to the IT System Architect, DBA, or the System Development and Help Desk staff to supervise the completion of the work until accepted and in accordance with users' request.

Dengan diterapkannya sistem pelayanan melalui satu pintu secara sistematis dan terintegrasi oleh *Help Desk* tersebut, diharapkan pelayanan kepada *user* akan membuat semua permintaan pelayanan akan tercatat dengan baik dan penyelesaian pekerjaan akan termonitor dengan baik. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan semua permintaan layanan akan diselesaikan secara lengkap dan terukur serta sudah diselesaikan dengan tepat waktu.

D. Proses Kerja Pengelolaan Konfigurasi TIK

PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam melakukan pengelolaan konfigurasi Teknologi Informasi & Komunikasi dengan membuat dokumentasi terhadap Aplikasi Bisnis, Data Base, Sistem Operasi, Versi software, Versi hardware, dan Infrastruktur

With the implementation of one-stop service system in a systematic and integrated management by the Help Desk, all users' requests will be recorded, and the completion of the work will be monitored. This policy is implemented to ensure that all requests will be completed in full, scalable, and timely manner.

D. ICT Configuration Management Working Process

To manage the configuration of IT, PT Reasuransi Nasional Indonesia creates documentation of Business Applications, Database, Operating System, software version, hardware version, and Infrastructure.





**Laporan Tata Kelola
Perusahaan**
Corporate Governance Report

PENDAHULUAN

Selama ini, berbagai inisiatif dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan telah dilakukan Nasional Re dalam rangka membangun dasar yang kuat dalam tata kelola perusahaan, karena bagi kami, Tata Kelola Perusahaan (GCG) merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan. Hal inilah yang mendorong Nasional Re untuk berkomitmen senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan penerapan prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya. Perusahaan juga mendorong semua unit usaha untuk juga meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan operasi mereka.

Pernyataan Komitmen

Sebagai bukti kuatnya komitmen Nasional Re dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan telah menerbitkan Surat Keputusan Manajemen tentang *Code of Conduct*, *Pedoman Good Corporate Governance*, *Piagam Direksi dan Komisaris*, *Pedoman Transparansi dan Disclosure*, *Piagam Internal Audit*, *Piagam Komite Audit* dan *Piagam Sekretaris Perusahaan*.

Berbagai pedoman tersebut bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai tuntutan pasar dan praktik-praktik terbaik dalam industri asuransi, dimana penyempurnaannya berdasarkan hasil dari penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG. Perusahaan juga telah membentuk Tim Pemantau GCG yang tugasnya mengevaluasi hasil audit penilaian GCG.

Nasional Re telah memiliki Panduan GCG Perusahaan yang disesuaikan dengan konsep PMK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk Perusahaan Perasuransian, yang telah diedarkan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan GCG

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan, Nasional Re mengacu pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan regulator, antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

PREFACE

From time to time, various initiatives in improving corporate governance has been taken by Nasional Re in order to build a strong foundation in implementing corporate governance since, for us, Good Corporate Governance is a mechanism that regulates the management of the Company in generating longterm economic value in a sustainable manner. It encourages Nasional Re to commit to continuously developing and improving the implementation of corporate governance principles at all levels of the organization and its operations. The Company also encourages all of its business units to also improve the quality of Good Corporate Governance implementation in their operating environment.

Statement of Commitment

As evidence of the strong commitment of Nasional Re in applying the principles of good corporate governance, the Company issues a Management Decree regarding the Code of Conduct, Good Corporate Governance Guidelines, Charter of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Guidelines of Transparency and Disclosure, Internal Audit Charter, Audit Committee Charter and the Charter of the Corporate Secretary.

Those guidelines are dynamic in nature and are constantly evolving according to market demands and best practices in the insurance industry, and are perfected based on self-assessment results on the implementation of Good Corporate Governance. The Company also forms a Good Corporate Governance monitoring team and is tasked to evaluate the result of Good Corporate Governance audit.

Nasional Re has established its GCG Guideline tailored to the concept of PMK on Good Corporate Governance for Insurance Companies, having been circulated to gain input from various parties in order to improve it.

Legal Basis for the Implementation of Good Corporate Governance Policies

In preparing the guidelines for the implementation of corporate governance, Nasional Re refers to the guidelines issued by various institutions and regulators, among others, Regulation of the Minister of SOES No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance

Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peraturan nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Pedoman tersebut telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan perundangan lain yang terkait, yakni Undang-Undang No. 40 tentang Perusahaan Terbatas, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Nasional Re tidak memiliki peraturan yang mengharuskan pejabatnya menyampaikan laporan harta kekayaan (LHKPN) hingga level 2 di bawah Direksi dan penyampaian Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung gerakan anti korupsi, terdapat peraturan internal yang mewajibkan karyawan untuk melaporkan hal-hal terkait gratifikasi kepada Direksi.

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah:

1. Mencapai sasaran usaha Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Menjadikan organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan kewenangannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).
5. Optimalisasi nilai perusahaan bagi Pemegang Saham maupun Pemangku kepentingan lainnya.
6. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

at State-Owned Enterprises (SOEs), Regulation No. PER-09/MBU/2012 on amendments to the regulations of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011, the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No.2/ POJK. 05/2014 on Good Corporate Governance for Insurance Company, as well as the Guidelines of Good Corporate Governance Indonesia by the National Committee on Governance (NCG). These guidelines are in accordance with the rules contained in other relevant legislations, namely Law No. 40 of the Limited Company, regulations from the Financial Services Authority (FSA) and the Articles of Association of the company

Guideline on State Apparatus Asset Reporting

Nasional Re does not implement particular regulation mandating the Executives to submit State Apparatus Assets Reporting (LHKPN) to the Second Level below the Board of Directors and Gratification Report to Corruption Eradication Commission (KPK). Hence, as part of our commitment to supporting anticorruption initiative, the Company has implemented an internal regulation which requires that the employees report gratification-related issues to the Board of Directors.

Objectives of Corporate Governance

Objectives of Good Corporate Governance Implementation in the Company, among others:

1. To achieve the Company's business target through a management based on Good Corporate Governance principle.
2. To empower function and independency of each Company's organ.
3. To encourage the Company's organ in making decision and exercising their authority based on high moral value and compliance with law and regulation.
4. To implement Corporate Social Responsibility to the society.
5. To optimize corporate values for the Shareholders and other Stakeholders.
6. To increase the Company's competitiveness both in national and international level.

Struktur dan Hubungan Tata Kelola Perusahaan

Organ Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola secara efektif. Masing-masing Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Perusahaan membentuk struktur GCG yang berfungsi untuk memastikan implementasi GCG di seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan. Struktur inti GCG adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Organ-organ ini berperan untuk memastikan pelaksanaan prinsip GCG yang baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis. Masing-masing komponen memiliki kewenangan tersendiri dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Agar implementasi GCG di Perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan pedoman-pedoman atau aturan tertulis yang memuat tentang kebijakan dan praktek GCG, atau biasa disebut sebagai *soft structure*, serta pengaturan-pengaturan lainnya agar Perusahaan dapat tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etis. Karena implementasi GCG bukan merupakan hal yang sederhana maka pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik dan terukur. Hal ini dicapai dengan menyusun *roadmap* penerapan GCG.

Tujuan penyusunan *roadmap* penerapan GCG di Perusahaan adalah untuk menumbuhkan komitmen manajemen dalam menerapkan GCG secara konsisten dan terukur, serta untuk penyempurnaan *soft structure* GCG. Penyempurnaan *soft structure* ini akan meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga segenap kepentingan *stakeholders*.

Semenjak dibangun dan diterapkannya GCG di lingkungan Nasional Re, Direksi telah menetapkan Kerangka Pembangunan dan Penerapan GCG dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2005-2009, periode 2009-2013 dan periode 2013-2017. Secara berkala Perusahaan

Structure And Relationship of Corporate Governance

Organ of the Company plays a very important role in the effective implementation of corporate governance. Each organ of the Company shall perform its functions based on the principles of independence in carrying out the duties, functions, and responsibilities for the benefit of the Company, in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and the legislation in force. For this reason the Company has established a corporate governance structure that serves to ensure the implementation of Good Corporate Governance in all operational and strategic activities of the Company. Good Corporate Governance core structure is the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors. These organs play a role to ensure the implementation of the principles of good corporate governance in all operational and strategic activities. Each component has its own authority and works independently to fulfill the functions, roles and responsibilities.

Corporate Governance Implementation Roadmap

In order to properly execute the Good Corporate Governance implementation in the Company, written manuals or guidelines are needed disclosing Good Corporate Governance policy and practices, or known as soft structure, as well as other relevant regulations that the Company always complies with prevailing Law as well as sound and ethical corporate principle. Good Corporate Governance Implementation is not a simple aspect to be done that has to have adequate planning and measure. This will be achieved by formulating Good Corporate Governance implementation roadmap.

Objective of the Good Corporate Governance implementation roadmap preparation is to foster the management's commitment to implementing Good Corporate Governance in consistent and measured manners, as well as to improve Good Corporate Governance. The soft structure improvement will improve the management's responsibility in maintaining the stakeholders' interest.

Ever since the establishment and implementation of Good Corporate Governance in Nasional Re, the Board of Directors has assigned Good Corporate Governance Development and Implementation Framework on the Company's Long-Term Plan for 2005-2009, 2009-2013 and 2013-2017. The

melakukan penilaian GCG untuk melihat seberapa jauh perkembangannya.

Company regularly undertakes Good Corporate Governance assessment to oversee the progress of the Good Corporate Governance practice.

	Versi OJK (ISEA)*	Versi BUMN
2012	85,36	73,00
2013	90,04	-
2014	90,64	83,08
2015	91,37	85,58*
2016	91,84	88,93

*Self Assessment

OJK = Otoritas Jasa Keuangan/Financial Service Authority

ISEA = Indonesia Senior Executives Association

BUMN = Badan Usaha Milik Negara/State Owned Enterprise

URAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah penjelasan maupun usulan keputusan disampaikan sesuai dengan tata tertib Rapat yang dibagikan kepada peserta Rapat pada saat registrasi dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai. Dalam RUPST keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui perhitungan suara mayoritas yang hadir dalam rapat.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan laporan tahunan; Persetujuan proyeksi laporan keuangan; Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Persetujuan penggunaan Laba Bersih perusahaan.

Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Selain itu terdapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

DESCRIPTION OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (GMS)

In each agenda of the GMS, the shareholders have the opportunity to ask questions after the explanation and proposal of resolution in accordance with the procedure of the meeting that is distributed to participants during registration and has been approved by the attending shareholders prior to the discussion of the agenda of the meeting. During GMS, resolutions shall be made by unanimous consensus of the meeting or based on voting mechanism.

General Meetings of Shareholders (GMS) held by the Company include several discussions on: Annual Report approval, financial report projection approval, Budget Plan (RKAP) approval, and approving distribution of the Company's Net Profit.

Discussion on recommendations proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholders representing 1/10 (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights under a requirement that records of respective party has to be received by the Board of Directors before Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) announcement date. In addition, the Company also holds Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) at any time according to the Company's needs.

Ketentuan

1. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS maka RUPS dapat mengambil keputusan dengan suara bulat.
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah;
 - b. Dewan Komisaris.
3. Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa diajukan melalui surat tercatat, disertai alasan-alasannya, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir;
 - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perusahaan.
4. Surat tercatat sebagaimana butir 3 di atas disampaikan oleh Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
5. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau;
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
8. RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 5 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

Procedure

1. If the GMS is attended and/or represented by Shareholders, and all Shareholders approve the GMS implementation, then the GMS is authorized to take legitimate resolution.
2. Implementation of Annual and/or Extraordinary GMS can be done under proposal from:
 - a. One or more Shareholders representing 1/10 (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights;
 - b. Board of Commissioners.
3. Proposal to implement Annual and/or Extraordinary GMS under registered letter, attached with the reasons, including but not limited on following conditions:
 - a. Board of Directors does not hold Annual GMS according to prevailing regulation;
 - b. Service term of Board of Directors and/or Board of Commissioners will be ended;
 - c. The Board of Directors fails or faces conflict of interest with the Company.
4. The registered letter as mentioned in point 3 is presented by the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners.
5. The Board of Directors announces GMS invitation in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS implementation proposal is accepted.
6. If the Board of Directors does not deliver GMS invitation:
 - a. GMS proposal from the Shareholders is repropose to the Board of Commissioners, or;
 - b. The Board of Commissioners announces separate GMS invitation.
7. The Board of Commissioners shall perform the calling of General Meeting of Shareholders in 15 (fifteen) days at the latest after the GMS proposal is received.
8. GMS held by the Board of Directors is based on GMS invitation as stated on point 5 that only discusses several issues related with the reason declared in point 3 as well as other agenda deemed necessary by the Board of Directors.

9. RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 6b dan butir 7 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas.
 10. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang 15 (lima belas) hari sebagaimana butir 5 dan butir 7, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perusahaan.
 11. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 12. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
 13. Dalam pemanggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
 14. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan/materi sesuai butir 13 kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
 15. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan dalam butir 11, 12 dan 13, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
 16. Dalam setiap RUPS, risalah wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 17. Tandatangan sebagaimana butir 16 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
 18. Risalah RUPS memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk perbedaan pendapat/*dissenting opinion* jika ada).
 19. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.
 20. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan
9. General Meeting of Shareholders held by the Board of Commissioners is based on the summon to the General Meeting of Shareholders according to items 6b and 7 above only to discuss the issues related to the reasons as stated in point 3.
 10. Should the Board of Directors or Board of Commissioners fail to call for GMS during 15 (fifteen) days period as stated in point 5 and 7, then the Shareholders who requests the GMS can make the call by itself upon permission from the Chairman of the State Court at the Company domicile.
 11. The invitation to GMS should be delivered not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS by excluding the date of the summon and the date of the meeting.
 12. GMS invitation is delivered through registered mail and/or advertisement in newspaper.
 13. The GMS invitation should mention the date, time, venue and agenda to be discussed of the meeting attached with an announcement that the agenda that will be discussed in the GMS is available in the Company's office since the GMS invitation to the GMS implementation date.
 14. The Company should provide copy of the agenda/material according to point 13 to the Shareholders free of charge, if requested.
 15. In the event that the invitation is not in accordance with the provisions in points 11, 12 and 13, the resolution of GMS shall remain valid if the GMS is attended by all shareholders with valid voting rights and the resolution is unanimously agreed.
 16. In every GMS, the Minutes of Meetings have to be made and signed by Meeting Chair and at least 1 (one) shareholder is appointed from the GMS participant.
 17. The signature, as stated in point 16, is not required if the GMS minutes of meetings are made through notarial deeds.
 18. The Minutes of Meetings disclose every aspect discussed and decided (including any dissenting opinion).
 19. The GMS can be held if at least attended or represented by 51% (fifty one percent) of the shares with legal voting rights, except stated different under Law and/or Articles of Association.
 20. The shareholders, either directly or represented with letter of attorney, are entitled to attend the GMS and

menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

21. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
22. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
23. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

use their voting rights according to the amount of their shares.

22. Every resolution is agreed under collective consensus principle.
22. If the collective consensus is failed to be achieved, the resolution is considered legitimate if has been approved by more than 1/2 (one per two/half) of voting submitted, except stated different in Articles of Association.
23. If the recommendation contains more than 2 (two) alternatives, and voting result does not come up with 1 (one) alternative supported by more than 1/2 (one per two/half) of the voting submitted, another voting will be carried on 2 (two) alternatives with most voting that one of the recommendations will be voted with more than 1/2 (one per two/half) of total voting submitted by the Shareholders and also might take legitimate resolution without implementing physical GMS, by the mechanism that all of Shareholders have approved on the recommendation under written statement and signed the statement. The resolution taken in respective way has equal force with a legitimate resolution taken in the GMS.

Pokok-Pokok Keputusan RUPS dan RUPSLB tahun 2016

1. RUPS tanggal 18 Februari 2016 tentang Pengesahan Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun Buku 2015
2. RUPSLB tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia
3. RUPSLB tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia
4. RUPSLB tanggal 18 Juli 2016 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia
5. RUPSLB tanggal 28 September 2016 tentang Penetapan Penarikan Dividen PT Reasuransi Nasional Indonesia Laba Tahun Buku 2015
6. RUPSLB tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia

Conclusions of GMS and EGMS 2016

1. GMS dated February 18, 2016 on Ratification of the Annual Report of PT Reasuransi Nasional Indonesia Book Year 2015
2. EGMS dated February 9, 2016 on Appointment of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia
3. EGMS dated February 17, 2016 on Appointment of Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia
4. EGMS dated July 18, 2016 concerning Dismissal of President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia
5. EGMS dated September 28, 2016 on Stipulation of Dividend Withdrawal of PT Reasuransi Nasional Indonesia Profit Book Year 2015
6. EGMS dated December 23, 2016 on the Determination of Executor of Actions (Caretaker) President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi RUPS 2015

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 menghasilkan beberapa arahan untuk ditindaklanjuti selama tahun 2016.

Berkaitan dengan target usaha yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, Direksi diminta untuk:

- Memaksimalkan kapasitas terpakai sesuai proyeksi besaran ekuitas pada akhir tahun dan rencana tambahan modal disetor.
- Meningkatkan produktivitas *underwriting yield* masing-masing *Class of Business* (CoB), terutama untuk CoB yang memiliki *underwriting yield* yang masih rendah.
- Mengutamakan pencapaian hasil *underwriting* yang optimal, dengan senantiasa menerapkan prinsip selektifitas dan *prudent underwriting* serta mengarahkan bisnis ke struktur portofolio dengan tingkat risiko yang lebih menguntungkan.
- Secara terus menerus berupaya meningkatkan dan mengembangkan portfolio bisnis fakultatif dengan tetap memperhatikan aspek *prudent underwriting* dalam pemilihan jenis bisnis.

Kapasitas terpakai yang dimiliki perusahaan dioptimalkan dalam rangka peningkatan pendapatan premi dan mendukung program pemerintah untuk menekan defisit neraca pembayaran, dimana target premi bruto tahun 2016 dapat terlampaui dengan perusahaan mencoba masuk pada *giant business* secara bertahap untuk mendapatkan bisnis yang lebih besar di masa mendatang. Namun upaya maksimal tersebut hanya mencapai rasio premi netto dibandingkan ekuitas murni sebesar 147,5%. Hal ini disebabkan pada tahun 2016, beban retrosesi sebesar 224% dari anggarannya dalam rangka mengamankan *giant business*.

Peningkatan *Underwriting yield* masing-masing *Class of Business* (CoB) telah dilakukan upaya yang maksimal, dimana dengan *prudent underwriting* terus-menerus dilakukan perusahaan, walaupun masih terdapat minus *underwriting* pada CoB *Energy* dan *Engineering* (Rekayasa). Begitupun terdapat perkembangan yang cukup signifikan, dimana pada tahun-tahun lalu CoB *fire* dan *jiwa* yang selalu minus

Follow Up on Recommendation from the GMS 2015

The General Meeting of Shareholders (RUPS) on the Ratification of Work Plan and Corporate Budget (RKAP) of 2016 resulted in several directives to be followed up during 2016.

Regarding the business targets stated in the Work Plan and Budget (RKAP) of 2016, the Board of Directors is required to:

- Maximize the amount of utilized capacity in accordance with the projections of equity at the end of the year and the plan for additional paid-in capital.
- Improve the productivity of *underwriting yield* of each *Class of Business* (COB), especially those bearing low *underwriting yield*.
- Prioritize the achievement of optimal *underwriting yield*, by continually applying the principles of selectivity and *prudent underwriting* and directing the business to portfolio structure with a more favorable risk level.
- Continue to work to improve and develop facultative business portfolio while maintaining *prudent underwriting* aspects in choosing the type of business.

The Company's utilized capacity will be optimized in order to increase premium income and support government programs to reduce the balance of payments deficit, in which the target of gross premium in 2016 could be exceeded by trying to engage to *giant business* as the initial stage to gain much larger business in the future. But these efforts only reached a ratio of net premiums compared to pure equity of 147.5%. This is due in 2016, retrocessional expenses were 224% of its budget to secure *giant business*.

The increase of *Underwriting yield* of each *Class of Business* (CoB) was achieved by maximum effort, in which *prudent underwriting* was continuously conducted by the Company, although there was still minus *underwriting* at CoB *Energy* and *Engineering*. Likewise there is a significant development, where in the past years CoB *fire* and *life* were always minus or surplus with a thin figure, this time for CoB *Fire* to get

atau surplus dengan angka yang tipis, kali ini untuk CoB Fire mendapatkan hasil underwriting sebesar Rp170.332 juta dan CoB Jiwa mendapatkan hasil underwriting sebesar Rp80.831 juta.

Dalam pelaksanaan operasionalnya tetap dilakukan secara prudent underwriting agar pencapaian hasil underwriting dapat lebih optimal, dan pada tahun 2016 pencapaian hasil underwriting sebesar 126,5% dari targetnya.

Direksi juga diminta untuk terus berupaya memperoleh skim retrocesi yang sesuai dengan profil risiko yang dihadapi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Premi retrocesi tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu realisasinya sebesar 224% dari anggarannya dan bila dibandingkan premi retrocesi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 100%. Kenaikan tersebut disebabkan karena diperlukannya *back up* retrocesi terhadap akseptasi *giant business* yang selama ini belum diserap oleh perusahaan reasuransi domestik.

Direksi diminta untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan melalui penerapan manajemen risiko berbasis *Four Eyes Principles* untuk *Transactional Risk Management* dan *Enterprise Risk Management* (ERM) serta penguatan Satuan Pengawasan Internal. Untuk itu, dalam upaya peningkatan pengendalian internal, perusahaan telah menerapkan manajemen risiko berbasis ERM di semua lini kegiatan perusahaan, untuk *four eyes principle* telah dibentuk komite-komite diantaranya komite investasi, komite manajemen risiko dan komite akseptasi, komite penyelesaian klaim dan komite lainnya, di samping penguatan SDM pada Satuan Pengawasan Internal dan koordinasi yang intensif dengan Satuan Pengawasan Internal induk perusahaan.

Direksi diminta untuk terus menjaga dan meningkatkan Rasio Pencapaian Solvabilitas/*Risk Based Capital* (RBC). Peningkatan kualitas aset dan manajemen *balance sheet* terus dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian rasio RBC, dan pada tahun 2015 perusahaan memperoleh rasio RBC Konvensional sebesar 168,1% dan pada tahun 2016 masih dapat dijaga dengan pencapaian rasio sebesar 163,9% walaupun pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran dividen sebesar Rp100 Milyar, untuk pencapaian solvabilitas Syariah mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 40,9% dan pada tahun 2016 hanya mencapai 36,1%.

Direksi diminta terus mengembangkan inovasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja dan

underwriting incomes of Rp170,332 million and CoB Life gained underwriting income of Rp80,831 million.

Operation is conducted by upholding prudent underwriting in order to achieve more optimal underwriting incomes, and in 2016 the achievement of underwriting incomes of 126.5% of its target.

The Board of Directors is also required to continue to seek a retrocession scheme that fits the risk profile faced by PT Reasuransi Nasional Indonesia. Retrocession premiums in 2016 experienced a very significant increase of realization, namely 224% of budget and when compared to 2015, retrocession premiums increased by 100%. The increase was due to the need for retrocession back up towards the acceptance of giant business which has not been absorbed by domestic reinsurance companies.

The Board of Directors is required to improve the Company's internal control through the implementation of risk management based on Four Eyes Principles for Transactional Risk Management and Enterprise Risk Management (ERM) and strengthening Internal Control Unit. Therefore, to enhance internal control, the Company implemented ERM based risk management in all lines of activities, to apply four eyes principle, committees were established, such as investment committee, risk management committee and acceptance committee, claims settlement committee and other committees, as well as strengthening human resources in Internal Control Unit and intensive coordination with the parent company's internal supervisory unit.

The Board of Directors is required to continue maintaining and improving Solvability Ratio / Risk Based Capital (RBC) Ratio. Improvement on asset quality and balance sheet management is continuously conducted to increase the achievement of RBC ratio, and by 2015 the Company has gained a conventional RBC ratio of 168.1% and in 2016 can still be maintained with an achievement ratio of 163.9% although in 2016 the Company paid dividend of Rp100 billion, Sharia solvency decreased in 2015 by 40.9% and in 2016 only reached 36.1%.

The Board of Directors is required to continue to innovate in order to maintain the sustainability of performance growth

meningkatkan peran Teknologi Informasi (TI) dalam proses pengambilan keputusan dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Eksekutif sehingga dapat menunjang pelayanan yang optimal kepada customer/pengguna jasa.

Dalam usaha memberikan informasi yang akurat, cepat dan komprehensif kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan, peran Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) telah membuat manajemen bank data yaitu *Management Information System (MIS)* yang berisi Laporan Produksi Teknik baik Premi maupun Klaim dan Laporan Keuangan.

Bank data (MIS) dimaksud dapat diakses melalui aplikasi *Business Intelligence (Tableau)* dan aplikasi yang dibuat sendiri oleh perusahaan dengan berbasis web seperti: *Ceding Performance, Treaty Decision Support System* dll.

Pengembangan yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan hal tersebut di atas, yakni agar dapat menunjang operasional perusahaan yang lebih optimal dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada cedant melalui:

- **Pengembangan DMS (Document Management System)**
Pengembangan DMS ini dibutuhkan untuk menghasilkan data atau informasi yang lebih komprehensif, lebih menjamin keakuratannya dan dapat disajikan lebih cepat. Melalui proses pemilihan/seleksi brand maupun produk yang ketat akhirnya dipilihlah brand M-Files dari Microsoft.
- **Pengembangan Claim Portal:**
Pengembangan Claim Portal bertujuan untuk memudahkan mitra bisnis (cedant) dalam memonitor status dari tuntutan klaimnya. Cedant dapat mengakses aplikasi ini untuk mengetahui perkembangan dari proses penanganan klaimnya yang dilakukan perusahaan
- **Pemasangan DNS Server di Disaster Recovery Centre (DRC) site**
Pemasangan DNS Server dilakukan untuk meningkatkan kemampuan DRC Site perusahaan.
- **Penambahan perangkat/sistem keamanan jaringan Firewall di Data Centre Surabaya**
Penambahan perangkat/sistem keamanan jaringan *Firewall* ini bertujuan untuk penyempurnaan operasional *Disaster Recovery Centre (DRC) site*.

and enhance the role of Information Technology (IT) in the decision making process by developing the Management Information System and Executive Information System to support the optimal service to the customer / service user.

In the effort to provide accurate, fast, and comprehensive information to management in decision making process, Information Technology & Communication (ICT) role has prepared data bank management, namely Management Information System (MIS) containing Technical Production Report, including Premium or Claim and Financial Report.

The data bank (MIS) can be accessed through Business Intelligence (Tableau) applications and in-house web based applications such as Ceding Performance, Treaty Decision Support System, etc.

The development has been done to optimize and develop the above, that is in order to support the Company to have more optimal operations and improve better service to the cedant through:

- **Development of DMS (Document Management System)**
The development of this DMS is needed to produce more comprehensive data or information, to better guarantee its accuracy and can be presented more quickly. Through the process of tight selection of brands and products M-Files brand from Microsoft was chosen.
- **Claim Portal Development:**
Claim Portal Development aims to facilitate business partners (cedant) in monitoring the status of its claims. Cedant can access this application to find out the progress of its claim handling process.
- **Installation of DNS Server on Disaster Recovery Center (DRC) site**
DNS Server installation is done to improve the company's DRC Site capabilities.
- **Addition of Firewall network security device / system in Data Center Surabaya**
Addition of network security devices / systems Firewall aims to improve operational Disaster Recovery Center (DRC) site.

Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia, Direksi diminta untuk:

- a. Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbasis korporasi (group perusahaan).
- b. Menerapkan konsep remunerasi berbasis kinerja dan penerapan *joint Key Performance Indicators* (KPI) untuk menjaga soliditas organisasi.
- c. Mengembangkan program pelatihan secara fokus dan berkesinambungan untuk menunjang pengembangan karier karyawan.

Perusahaan tengah menyiapkan HR Blue Print yang berbasis korporasi (group perusahaan), di antaranya pada tahun 2015 dan 2016 perusahaan telah mengirimkan pejabat setingkat Kadiv, Kabag dan Kasi untuk mengisi kebutuhan personil di perusahaan induk.

Dalam rangka penyempurnaan di dalam penerapan konsep remunerasi berbasis kinerja, Perusahaan dengan dibantu oleh konsultan telah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran terhadap Struktur Organisasi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan Unit Kerja dibantu oleh Konsultan HR. Di samping itu, Perusahaan juga melakukan *Up date* (pemutakhiran) terhadap seluruh *Job Description* yang ada pada seluruh Unit Kerja dan *Job Grading* yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan *Salary Structure*. Selanjutnya perusahaan juga menerapkan joint KPI dalam rangka menjaga soliditas organisasi dan peningkatan kinerja di seluruh unit.

Dengan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016, Direksi diminta komitmennya:

- a. Merealisasi anggaran perusahaan dengan selalu menaati prosedur dan mengacu pada program kerja serta anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan secara keseluruhan terhadap strategi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pengukuran efektivitas langkah/strategi yang telah ditetapkan untuk dilakukan langkah evaluasi.

Manajemen senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai prosedur dan mengacu pada program kerja serta anggaran yang telah ditetapkan serta untuk pencapaian target yang telah ditetapkan selalu melaksanakan secara keseluruhan terhadap strategi dan program kerja yang telah ditetapkan dan mengukur efektifitas atas strategi yang telah ditetapkan.

In terms of Human Resource management, the Board of Directors is required to:

- a. Conduct corporate-based human resource management (HR).
- b. Apply the concept of performance-based remuneration and implementation of joint Key Performance Indicators (KPI) to maintain organizational solidity.
- c. Develop a focused and sustainable training program to support employee career development.

The Company is preparing a corporate-based HR Blue Print (enterprise group), among which in 2015 and 2016 the Company has sent officials at the level of Head of Division, Head of Department and Head of Section to fill the needs of personnel in the parent company.

To enhance the application of the concept of performance based remuneration, the Company is supported by consultants who undertake evaluation and updating of the existing organization structure, to be adapted to the needs of the Company and the work unit. In addition, the Company also up-dated all existing Job Description in the whole Units and Job Grading to be used as the basis for preparing Salary Structure. Furthermore, the Company also implemented joint KPI in order to maintain the solidity of the organization and improving performance across the units.

With the ratification of the Work Plan and Budget (RKAP) 2016, the Board of Directors is requested to commit to:

- a. Realizing the Company's budget by always duly complying the procedure and referring to the work program and budget that have been set.
- b. Implementing overall strategy and work program as specified in the work plan and budget.
- c. Assessing the effectiveness of measures / strategies for evaluation.

The Management continues to implement activities according to the procedure and refer to the work program and budget, and in achieving the targets by always implementing the strategy and work program and assess the effectiveness of the strategy that has been set up.

Anggaran pendapatan merupakan target minimal yang harus diupayakan pencapaiannya secara maksimal oleh segenap jajaran perusahaan, sedangkan anggaran biaya merupakan alokasi maksimal yang harus diupayakan seefisien mungkin dalam realisasinya sehingga target laba perusahaan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan selama tahun 2016 telah diupayakan agar selalu efektif dan efisien sehingga beban yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut sesuai dengan keperluan dan kebutuhan, sehingga tujuan serta sasaran perusahaan dapat tercapai. Dimana pada tahun 2016, realisasi terhadap anggaran pendapatan dapat terlampaui dan realisasi terhadap anggaran biaya masih di bawah anggaran yang telah ditetapkan.

Direksi diminta oleh Pemegang Saham untuk membuat kajian dan menyampaikan dalam surat tersendiri kepada Pemegang Saham terkait rencana penambahan modal disetor senilai Rp75.000.000.000 pada tahun 2016. Mengingat tambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000.000 pada tahun 2016 tidak jadi dilaksanakan, maka Perusahaan belum menyampaikan kajian kepada Pemegang Saham.

Direksi diminta untuk senantiasa mengkaji ulang, melengkapi, dan menyempurnakan seluruh Sistem dan pedoman operasional perusahaan, dengan memperhatikan aspek manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Direksi diminta untuk berkoordinasi dengan induk perusahaan untuk keselarasan pengembangan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko, Audit Internal, Pedoman Akuntansi, Investasi, mutu pengelolaan perusahaan (KPKU & GCG), dan hal lain yang dipandang perlu.

Melalui berbagai forum baik TI, SDM, Manajemen Risiko, Audit Internal, Akuntansi dan Investasi, mutu pengelolaan perusahaan telah dilakukan synergi dan pertemuan yang berkelanjutan antara perusahaan dengan Askrindo Group dalam rangka keselarasan didalam pengembangannya.

Budgeted income is the minimum target that should be pursued to the fullest by all employees of the Company, while the budget expenses are the maximum allocation to be pursued as efficiently as possible in the realization so that the profit target that has been set can be achieved.

The Company's business activities in 2016 were always conducted in the utmost effective and efficient way so that the expenses incurred for all of these activities were in accordance with the purposes and needs so that the Company's goals and objectives can be achieved. Where in 2016, the realization of the revenue budget can be exceeded and the realization of the budget cost is still below the budget that has been set.

Regarding the plan for additional paid-up capital of Rp75 billion in 2016; the Board of Directors was required to complete the study and submit in a separate letter to shareholders. Considering that the additional paid-in capital of Rp75,000,000,000 in 2016 was not executed, then the Company has not submitted the review to the Shareholders.

The Board of Directors is required to constantly review, complement, and enhance the entire system and guidelines for the operational of the Company, by duly adhering to risk management and the principles of Good Corporate Governance .

The Board of Directors is required to coordinate with the parent company to align the development of Information Technology, Human Resources, Risk Management, Internal Audit, Accounting Guidance, Investment, quality management of the company (KPKU & GCG), and other matters deemed necessary.

Through various forums, whether IT, HR, Risk Management, Internal Audit, Accounting and Investment, quality management company, then synergi and continuous meeting between companies with Askrindo Group, was conducted for alignment in its development.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Acuan Hukum

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mewajibkan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Sesuai UU tersebut, tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, serta memberi masukan terkait kedua hal tersebut. Dewan Komisaris Nasional Re secara bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan perusahaan. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Piagam Dewan Komisaris

Nasional Re telah menyusun Piagam Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai panduan kerja bagi Dewan Komisaris, yang disatukan ke dalam *Board Manual* Untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan atas manajemen yang dijalankan Direksi Perusahaan, serta memberi nasihat serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis serta memastikan bahwa GCG dan praktik pengelolaan risiko diimplementasi secara efektif di seluruh lingkup kegiatan operasional Perusahaan.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS yang meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

DESCRIPTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Legal Basis

The Law No. 40 of 2007 on Limited Company (“UUPT”) requires that all Companies established under Indonesian Law have a Board of Commissioners. Pursuant to that Law, duty of the Board of Commissioners is to supervise the management and policy made by the Company’s management and to provide recommendation on both aspects. Board of Commissioners of Nasional Re is in charge to carry monitoring function and consultancy function according to prevailing law, on behalf of the Company’s interest and complies with corporate policy framework. The Law No. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprise, particularly stated in Article 28 point (3) required that serving period of Board of Commissioners is 5 (five) years and may be reappointed for another 1 (one) serving period.

Board of Commissioners' Charter

Nasional Re has prepared the Board of Commissioners charter as working guideline for the Board of Commissioners, attached in the Board Manual for Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board.

Duties and Responsibilities

According to law, the Board of Commissioners is responsible for carrying out the supervisory duties concerning the management activities conducted by the Board of Directors, as well as providing advices and monitoring and evaluating the implementation of strategic policies and ensuring that good corporate governance and risk management practices have been implemented effectively across the entire scope of operation.

The authority of the Board of Commissioners is based on the Articles of Association and resolutions of the AGMS, which include the following duties and responsibilities:

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out managerial duty;
2. Observing and reviewing as well as signing Long-Term Plan and Budget Plan prepared by the Board of Directors, according to the Articles of Association.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
 5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
 6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
 8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 9. Membentuk Komite Audit.
 10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
 11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 12. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
 13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.
3. Providing advice and recommendation to the GMS regarding Long-Term Plan and Budget Plan concerning reason of the Board of Commissioners for signing Long-Term Plan and Budget Plan.
 4. Keeping updated on the progress of the Company's activity, providing advice and recommendation to the GMS regarding every issue considered necessary on the Company's management.
 5. Immediately reporting to the GMS in case the Company's performance tends to decline.
 6. Observing and reviewing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report.
 7. Providing an explanation, recommendation and advice to the GMS regarding the Annual Report, if proposed.
 8. Preparing annual working program to be included in the Company's Budget Plan.
 9. Establishing Audit Committee.
 10. Proposing Public Accountant to the GMS.
 11. Preparing Board of Commissioner's Minutes of Meetings and documenting the copy.
 12. Delivering report to the Company regarding his and/or her families' shares of ownership in this or other companies.
 13. Providing report to GMS regarding audit duty done during the latest fiscal year.
 14. Undertaking other responsibilities in relation with monitoring and advisory duties, as not violating Law, Articles of Association and/or GMS resolution.

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas atas tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris menyiapkan laporan tugas pengawasan atas peran pengawasan yang dilakukan selama satu tahun buku untuk dilaporkan kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPST. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS.

As embodiment of accountability of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners prepares report on the implementation of its supervisory duties to be reported to shareholders and to be approved by the Annual GMS. This is also in line with GCG principles, mainly accountability principle. In addition, performance of the Board of Commissioners has to be evaluated based on performance appraisal elements stated in KPI of the Board of Commissioners to be later presented in the GMS.

Wewenang

Setiap anggota Dewan Komisaris Nasional Re, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
2. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
3. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan.
4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan.
6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
7. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
8. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
11. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
15. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

Authority

Every member of Board of Commissioners in Nasional Re, has an authority both individually and collegially regarding the duty and responsibility implementation, among others:

1. Checking books, letters and other corporate important documents.
2. Checking the Company's cash for verification and other assignments related with monitoring activity.
3. Checking the Company's assets or inventory.
4. Entering yard, building and office owned or occupied by the Company.
5. Proposing an explanation from the Board of Directors and/or other Executives under the Board of Directors regarding every issue mainly related with the Company's management.
6. Proposing the Board of Directors and/or other Executives with a consent from the Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting.
7. Asking explanation on every policy and action done or to be implemented by the Board of Directors.
8. Dismissing member of BOD according to provision stated in Articles of Association.
9. Establishing committee, if considered necessary, by concerning the Company's capabilities.
10. Hiring the Expert for certain aspects and time period on Company's expenses, if considered necessary.
11. Performing management activity in certain condition and period according to provision stated in Articles of Association.
12. Exercising other authorities as long as not violating the Laws, Articles of Association and/or GMS Resolution.
13. Attending Board of Directors meetings and providing comment on matters discussed.
14. Executing other supervisory authority, provided that not in the contrary to prevailing rules and the Articles of Association and or Resolution from the GMS.
15. Appointing and dismissing Secretary of the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas

Komisaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satunya bertindak sebagai Komisaris Utama merangkap anggota, seorang Komisaris dan satu orang Komisaris Independen. Komisaris memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara kolegial.

Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 01 Juni 2015, anggota Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia sampai dengan 17 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama | President Commissioner
 Komisaris | Commissioner
 Komisaris Independen | Independent Commissioner

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 17 Februari 2016, anggota Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama | President Commissioner : Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP
 Komisaris | Commissioner : Endang Tri Kuswati, SE, MM, AAIK, ANZIIF
 Komisaris Independen | Independent Commissioner : Raymond Buisson, SE, CRMO, CRGP
 Komisaris Independen | Independent Commissioner : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Nasional Re telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016, yaitu:

- (1) Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Komisaris Independen.

Separation of Duty

The Board of Commissioners consists of 3 (three) members, namely one President Commissioner concurrently serves as member, one commissioner and one independent commissioner. The commissioners have appropriate educational background and experience to carry out their duties and responsibilities to oversee the implementation of BOD duties in managing the Company. The BOC performs their duties collegially.

Board of Commissioners Composition

Pursuant to the Resolution of the Extraordinary General Shareholders Meeting (EGMS) of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated June 1, 2015, members of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of February 17, 2016 were as follows:

: Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP
 : Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS
 : Raymond Buisson, SE

Pursuant to the Resolution of the Extraordinary General Shareholders Meeting (EGMS) of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated February 17, 2016, members of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2016 were as follows:

: Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP
 : Endang Tri Kuswati, SE, MM, AAIK, ANZIIF
 : Raymond Buisson, SE, CRMO, CRGP
 : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

The number and composition of the Board of Commissioners of Nasional Re have been in conformity with the provisions of Article 19 of the Financial Services Authority (POJK) Regulation no. 73/POJK.05/2016, namely:

- (1) The Company is required to have a Board of Commissioners with at least 3 (three) members.
- (2) At least half of the total members of the Board of Commissioners of Insurance Companies and Sharia Insurance Companies as referred to in paragraph (1) shall be Independent Commissioners.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG.

Nasional Re mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki saham di perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Pernyataan Integritas

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG.

Nasional Re mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak mempunyai saham di perusahaan lain.

Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris Nasional Re yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

All members of the Board of Commissioners have the integrity, competence and adequate financial reputation and meet the provisions of the Limited Company Act and the principles of corporate governance.

Nasional Re requires the BOC to disclose its ownership, either in the Company or in other companies domiciled in and outside the country in a report which must be renewed annually. All members of the Board of Commissioners who serves currently have no shares in other companies.

The Board of Commissioners of the Company does not take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities as determined by the GMS.

All of Board of Commissioners members are domiciled in Indonesia.

Statement of Integrity

All members of the Board of Commissioners have the integrity, competence and adequate financial reputation and meet the provisions of the Limited Company Act and the principles of corporate governance.

Nasional Re requires the BOC to disclose its ownership, either in the Company or in other companies domiciled in and outside the country in a report which must be renewed annually. All members of the Board of Commissioners currently serving have no shares in other companies.

The Board of Commissioners of the Company does not take and / or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities as determined by the GMS. No member of the Nasional Re Commissioner who concurrently serves as a Commissioner, Board of Directors or Executive Officer of another company that is contrary to the law.

Pernyataan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Nasional Re telah mencerminkan keberagaman baik dari sisi kompetensi, edukasi, maupun pengalaman yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebaik mungkin.

01 Januari 2016 sampai 17 Februari 2016

No	Nama Name	Jabatan Saat Ini Current Position	Jabatan Sebelumnya Previous Position	Pendidikan Education
1.	Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	S-1 Bachelor Degree
2.	Sulaeman	Komisaris Commissioner	-	S-2 Master Degree
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	S-1 Bachelor Degree

Statement of Diversity of Composition of the Board of Commissioners

The Composition of Nasional Re Board of Commissioners has reflected unity both from competency, education or experience aspect to support the implementation of Board of Commissioners' function in duty.

01 January 2016 to 17 February 2016

17 Februari 2016 sampai 31 Desember 2016

No	Nama Name	Jabatan Saat Ini Current Position	Jabatan Sebelumnya Previous Position	Pendidikan Education
1.	Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	S-1 Bachelor Degree
2.	Endang Trikuswati	Komisaris Commissioner	-	S-2 Master Degree
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	S-1 Bachelor Degree
4.	Edy Suandi Hamid	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	S-3 Doctoral Degree

17 February 2016 to 31 December 2016

Pernyataan Independensi Komisaris

Sebagai perwujudan dari upaya menjaga independensi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah menunjuk seorang Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selain itu, adanya Komisaris Independen dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih objektif dan fair, yang mampu menjaga kesetimbangan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Seorang Komisaris Independen harus mampu menghindari benturan kepentingan dan mampu bertindak independen, tidak mempunyai kepentingan lain yang berbenturan dan dapat mengganggu

Statement of Independence of the Commissioners

As the realization of an effort to maintain independency of Board of Commissioners monitoring function implementation, the Company has appointed an Independent Commissioner, who has no financial, managerial, share ownership and or family relationship to the second degree with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders in a commitment which might interfere ability to act independently. In addition, Independent Commissioner is also assumed to establish more objective and fair working environment, to balance the interest of stakeholders and other stakeholders. An Independent Commissioner has to prevent conflict of interest and having an ability to act independently, without conflict of interest which may constraint independent and critical duty implementation both in commitment with Board

kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.

Rangkap Jabatan Komisaris

Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris Nasional Re yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Untuk tahun buku 2016, Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja dan *Key Performance Indicators* (KPI) sesuai amanah yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011. Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris untuk Tahun 2016 tersebut antara lain Dewan Komisaris akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan
Menyusun Rencana Kerja, Anggaran serta KPI Tahun 2016, yang menjadi bagian dari RKAP Tahun 2016: satu kali, 1 Dokumen.
2. Aspek Pengawasan dan *Monitoring*
 - a. Melakukan *Review* dan Analisa Laporan Keuangan Bulanan: 12 dokumen.
 - b. Melakukan *Review* dan Tanggapan RKAP Tahun 2016: satu kali, 1 Dokumen.
 - c. Rapat Internal Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dengan Direksi: 12 kali.
 - d. Memberikan nasehat/saran kepada Direksi yang mencakup 6 bidang, yaitu:
 - 1) Underwriting : 1 rekomendasi.
 - 2) Keuangan & Investasi : 1 rekomendasi.
 - 3) SDM & Umum : 1 rekomendasi.
 - 4) Pengendalian Internal : 1 rekomendasi.
 - 5) Teknologi Informasi : 1 rekomendasi.
3. Aspek Pelaporan
 - a. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS, terdiri dari:
 - 1) Surat tanggapan atas Laporan Tahunan tahun 2015: 1 surat.
 - Surat tanggapan atas kinerja Triwulanan: 3 surat.

of Commissioners and in the relationship with the Board of Directors.

Board of Commissioners' Dual Position

No member of the Board of Commissioners holds concurrent position as Commissioner, Director, or Executive Officer at another company that is contrary to legislation

Implementation of Board of Commissioners' Duty

For the fiscal year 2016, the Board of Commissioners has formulated the Work Plan and Key Performance Indicators (KPI) in accordance with the mandate contained in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number: PER-01 / MBU / 2011. Work Plan and KPI of Board of Commissioners for the year 2016, among others, the Board of Commissioners will do the following:

1. Aspect of Planning
Preparing Work Plan, Budget and KPI for 2016, which become part of RKAP 2016: once, 1 Document.
2. Aspect of Supervision and Monitoring
 - a. Reviewing and Analyzing Monthly Financial Statements: 12 documents.
 - b. Reviewing and Responding RKAP 2016: once, 1 Document.
 - c. Internal Meeting of Board of Commissioners and Board of Commissioners with Directors: 12 times.
 - d. Providing advice to the Board of Directors covering 6 areas, namely:
 - 1) Underwriting : 1 recommendation.
 - 2) Finance & Investment : 1 recommendation.
 - 3) HR & General Affairs : 1 recommendation.
 - 4) Internal Control : 1 recommendation.
 - 5) Information Technology : 1 recommendation.
3. Aspect of Reporting
 - a. Submit report/opinion/advice to Shareholders/GMS, consisting of:
 - 1) Response Letter to Annual Report 2015: 1 letter.
 - Response Letter to Quarterly performance: 3 letters.

- Laporan khusus atau rekomendasi lainnya kepada Pemegang Saham (disampaikan jika ada hal penting/harus dilaporkan): 1 surat
 - 2) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan 2015: 1 Laporan.
4. Aspek Dinamis
- 1) Peningkatan Kompetensi: 5 kali
 - 2) Realisasi KPI Korporasi (Aspek Keuangan, Operasional dan Dinamis): target skor 85.
- Special report or another recommendation to Shareholders (submitted if important/should be reported): 1 letter
 - 2) Submit reports on the execution of the duties of the Board of Commissioners as part of the 2015 Annual Report: 1 Report.
4. Dynamic Aspect
- 1) Competence development: 5 times
 - 2) Realization of KPI Corporate (Financial, Operational and Dynamic Aspect): target score 85.

Berpedoman pada program kerja dan Key Performance Indicators (KPI) serta mengacu pada tugas-tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan ini Dewan Komisaris melaporkan kegiatan selama tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris untuk Tahun 2016; dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan September 2015. Rencana Kerja dan Anggaran serta *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris untuk tahun 2016 yang telah disusun menjadi bagian dari RKAP tahun 2016 dan telah disampaikan serta disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
- Melakukan *review* dan analisis kinerja / perkembangan perusahaan bulanan.
Review dan analisis terhadap kinerja perusahaan selama tahun 2016 dilaksanakan melalui analisis Laporan Keuangan bulanan tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu untuk Januari sampai dengan Desember 2016; serta evaluasi secara triwulanan. Berdasarkan hasil *review* dan analisis atas laporan-laporan periodik tersebut, Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan/ arahan kepada Direksi, baik yang terkait dengan aspek operasional, non operasional maupun aspek tata kelola dan pengendalian internal.
- Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris
Pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dijalankan Direksi dilakukan melalui rapat bulanan Dewan Komisaris. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 17 (tujuh belas) kali; terdiri dari rapat koordinasi dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali; dan rapat internal

Based on the work program and Key Performance Indicators (KPI) and referring to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners reports on activities during 2016 with details as follows:

- Preparing Work Plan and Budget and KPI
The Board of Commissioners has implemented the Work Plan and Budget and Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners for 2016; And the activities have been implemented in September 2015. The Work Plan and Budget and Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners in 2016 have been compiled to become part of the Corporate Budget Plan 2016 and have been submitted and ratified by the Shareholders through the GMS.
- Performing reviews and analysis of the company's performance / development on a monthly basis.
Review and analysis of the company's performance during 2016 is implemented through monthly Financial Statement analysis in 2016, 12 (twelve) times, ie between January and December 2016; As well as quarterly evaluations. Based on the review and analysis of these periodic reports, the Board of Commissioners provides input to the Board of Directors, whether related to operational, non-operational, or governance and internal control.
- Conducting Board of Commissioners' Meetings
The supervision of the Board of Commissioners on the policies of the Board of Directors in managing the company is conducted through the Board of Commissioners' monthly meeting. During 2016, the Board of Commissioners has conducted 17 (seventeen) coordination meetings; Consisting of 12 (twelve) coordination meetings with the Board of Directors; And 5

Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan koordinasi, baik yang menyangkut evaluasi atas realisasi/ pelaksanaan RKAP yang telah ditetapkan dalam RUPS maupun peristiwa-peristiwa/hal-hal penting lainnya yang sedang dan akan dihadapi perusahaan. Hasil rapat bulanan tersebut tertuang dalam notulen rapat dan terhadap hasil keputusan rapat setiap bulan dievaluasi perkembangannya oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga dapat dimonitor progres tindak lanjutnya. Pelaksanaan koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, tidak hanya dalam lingkup rapat bulanan, namun apabila dipandang perlu, secara informal dapat dilakukan pada forum-forum lainnya.

- Melakukan Pengawasan dan Perkembangan atas Kegiatan Perusahaan

Selain melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan juga melibatkan/menugaskan Komite-komite yang berfungsi sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk melakukan review secara aktif terhadap kegiatan operasional dan perkembangan Perusahaan. Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan masukan-masukan maupun rekomendasi kepada Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tertulis. Terhadap masukan dan rekomendasi dari Komite Audit dibahas oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

- Memberikan nasihat /masukan/ pengarahan kepada Direksi

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat/ masukan/ pengarahan kepada Direksi terhadap 5 bidang, yaitu:

- a. Underwriting : 11 rekomendasi
- b. Keuangan & Investasi : 10 rekomendasi
- c. SDM & Umum : 5 rekomendasi
- d. Pengendalian Internal : 7 rekomendasi
- e. Teknologi Informasi : 1 rekomendasi
- Jumlah : 34 rekomendasi

Masukan/pengarahan Dewan Komisaris tersebut antara lain agar Direksi terus berupaya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan/target perusahaan sesuai RKAP, yakni: meningkatkan kinerja hasil underwriting per class of business

(five) internal meetings of the Board of Commissioners. In the meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors conduct coordination, both concerning the evaluation of the realization / implementation of the RKAP as set out in the GMS, as well as other important events / matters that are being and will be faced by the company. The results of such monthly meetings are recorded in the minutes of the meeting and the result of the meeting decision is evaluated on a monthly basis by the Board of Commissioners and the Board of Directors so that follow-up progress can be monitored. Implementation of the coordination of the Board of Commissioners and the Board of Directors is not only through monthly meetings, but also from other informal forums when considered necessary.

- Supervising and Developing the Company's Activities

In addition to meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, in performing its oversight duties, the Board of Commissioners also involves / assigns the Committees, which function as the supporting organ of the Board of Commissioners. These committees are the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, which are actively reviewing the operational and development activities of the Company. The Audit Committee and the Risk Oversight Committee have submitted inputs and recommendations to the Board of Commissioners, either directly or in writing. The inputs and recommendations of the Audit Committee are discussed by the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors.

- Providing advice / input / direction to the Board of Directors

In 2016, the Board of Commissioners has provided advice to the Board of Directors on 5 (five) areas:

- a. Underwriting : 11 Recommendations
- b. Finance & Investment : 10 Recommendations
- c. HR & General Affairs : 5 Recommendations
- d. Internal Control : 7 Recommendations
- e. Information Technology : 1 Recommendation
- Total Recommendations : 34

The inputs/directives of the Board of Commissioners, among others, for the Board of Directors to continue to work and commit to achieve the goals / targets of the company in accordance with the RKAP, namely: enhancing

(CoB) untuk Reasuransi Konvensional maupun Syariah, pengendalian *Claim Ratio*, efektivitas penagihan piutang premi reasuransi, penempatan Investasi yang aman dan menghasilkan return yang optimal, pengendalian biaya, pengembangan struktur organisasi, pengembangan teknologi informasi (TI) untuk mendukung operasional & pengambilan keputusan; serta efektivitas penerapan pengendalian intern melalui peningkatan peran Satuan Pengawasan Internal, efektivitas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapan Manajemen Risiko.

- Menyampaikan laporan / pendapat / saran kepada Pemegang Saham / RUPS
Sampai dengan Triwulan IV tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham / RUPS tentang tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Tahunan tahun 2015, Laporan Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan untuk Triwulan I, II, dan III tahun 2016 serta tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP tahun 2016. Dalam penyampaian surat tanggapan dimaksud, Dewan Komisaris senantiasa menyertakan saran-saran dan pendapat kepada Direksi maupun Pemegang Saham.
Dalam tahun 2016 terjadi kondisi terdapat kekosongan posisi jabatan Direktur Utama Perusahaan. Untuk menghindari terjadinya kekosongan manajemen, Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, telah menunjuk salah satu Direktur Perusahaan, yakni Direktur Operasi untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Direktur Utama sampai dengan adanya penunjukan secara definitif Direktur Utama oleh Pemegang Saham. Penunjukan Direktur Operasi sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan sebagaimana surat Dewan Komisaris Nomor: 30/DK/NR/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
- Menyampaikan Laporan Tentang Tugas Pengawasan Kepada Pemegang Saham
Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Tahun 2016 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2016, dan telah disahkan oleh RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2016.
- Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
Untuk program peningkatan kompetensi, Dewan Komisaris selama tahun 2016 telah mengikuti program seminar/*workshop* sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

the performance of underwriting per class of business (CoB) for Conventional and Sharia Reinsurance, Claim Ratio control, effectiveness of reinsurance premium receivables collection, safe placement of investment and generating optimal return, cost control, organizational structure development, IT) to support operational & decision making; As well as the effectiveness of the implementation of internal control through the enhancement of the role of the Internal Supervisory Unit, the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the implementation of Risk Management.

- Submitting reports / opinions / suggestions to Shareholders/ GMS
Up to the 4th Quarter of 2016, the Board of Commissioners has submitted reports to Shareholders / GMS regarding the response of the Board of Commissioners to the Annual Report of 2015, Report of Board of Commissioners' Responses to Company Performance for Quarter I, II and III 2016 and BoC's response to RKAP Year 2016. In submitting the letter of response, the Board of Commissioners always includes suggestions and opinions to the Board of Directors and Shareholders. In 2016, there was a vacancy in the position of President Director of the company. To avoid any management vacancy, the Board of Commissioners, in accordance with the Company's Articles of Association, has appointed one of the Company's Directors, the Director of Operations to perform the duties as Caretaker President Director up to the definitive appointment of the President Director by the Shareholder. Appointment of Director of Operations as Caretaker President Director of the Company was based on the decree of the Board of Commissioners Number: 30/DK/NR/VII/2016 dated July 19, 2016.
- Submitting Report on the Oversight Duty to Shareholders
The Board of Commissioners has submitted report on the Implementation of Oversight Duty and KPI of the Board of Commissioners of 2016 which is an integral part of the 2016 Annual Report, and has been ratified by the GMS concerning the Approval of Annual Report and Endorsement of 2016 Book Year 2016 Annual Report.
- Introduction and Competency Improvement Program
In 2016, the Board of Commissioners has attended 4 (four) seminars / workshops for the improvement of competence:

1. *Workshop: Subsidiary Governance Hubungan Induk dengan Anak Perusahaan & Tata Kelola Terintegrasi.*
2. *Workshop: Peran Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka Pengawasan Aktif Dewan Komisaris*
3. *Workshop: 22nd Indonesia Rendezvous*
4. *Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IV: Creating Sustainability Through Enterprise Risk Management.*

- **Lain-Lain**

Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris senantiasa mendukung dan mendorong Direksi untuk selalu mengupayakan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, internalisasi nilai-nilai/budaya perusahaan, penerapan remunerasi pegawai yang berbasis kinerja, melakukan penilaian kinerja perusahaan berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU); serta pemeringkatan/rating perusahaan.

1. *Workshop: Subsidiary Governance Relationship between parent entity with subsidiary & Integrated Governance.*
2. *Workshop: Role of Remuneration and Nomination Committee in the framework of Active Supervision of Board of Commissioners*
3. *Workshop: 22nd Indonesia Rendezvous*
4. *National Conference on Risk Management Professionals IV: Creating Sustainability Through Enterprise Risk Management.*

- **Others**

To improve the management of the company, the Board of Commissioners continuously supports and encourages the Board of Directors to always strive to realize the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) implementation, Internal Control System, Risk Management, internalization of corporate values / culture, performance based remuneration, Conduct assessment on the Company performance based on Superior Performance Measurement Criteria (KPKU); As well as rating of the Company.

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit setiap bulan sekali. Dewan Komisaris berhak mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diupayakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, dalam hal tidak tercapai mufakat melalui musyawarah, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Panduan Kerja Dewan Komisaris, agenda dan materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung. Hal ini agar Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi atau bila perlu untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat dilaksanakan.

Board of Commissioners Meeting Procedure

Board of Commissioners commences meeting at least one every month. The Board of Commissioner might also invite the Board of Directors to attend the meeting. The Board of Commissioners meeting is declared legitimate and illegible to take bounding decision if attended or represented by more than half of Board of Commissioners' members. Every resolution is taken under collective consensus principle. Hence, if collective consensus fails to be achieved, the meeting decision will be taken considering the most voting. Every Meeting's decision is binding all of Board of Commissioners' members.

According to the Board of Commissioners' Board Manual, the meeting agenda and material have to be delivered to the Board of Commissioners at least 3 (three) working days before the meeting. This purpose is that the Board of Commissioners has an opportunity to observe additional information before the meeting is started.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit

Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit antara lain membahas evaluasi terhadap hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan *review* atas Struktur Organisasi Perusahaan dan berbagai permasalahan yang lain.

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 100%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	% Kehadiran % Attendance
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	25	100
Endang Trikuswati	Komisaris Commissioner	25	100
Raymond Buisson	Komisaris Independen Independent Commissioner	25	100
Edy Suandi Hamid	Komisaris Independen Independent Commissioner	25	100

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 88,87%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	92,8 %
Endang Tri Kuswati*	Komisaris Commissioner	11	8	72,73 %
Raymond Buisson	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100 %
Edy Suandi Hamid*	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	5	45,45 %
M. Shaifie Zein**	Direktur Utama President Director	6	6	100 %
Edhie Mulyono	Direktur Operasi Plt. Direktur Utama Operation Director	14	14	100 %
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	14	14	100 %

*diangkat sebagai Komisaris berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Februari 2016 dan dinotariatkan dalam Akta

Board of Commissioners' Meeting

Board of Commissioners Internal Meeting with Audit Committee

Board of Commissioners' Internal Meeting or with Audit Committee among others discusses the evaluation of the Company's performance target, business development and review on Organization Structure and other issues.

In 2016, The Board of Commissioners held 25 (twenty five) Board of Commissioners' Internal Meeting or with Audit Committee with 100% attendance level. Detail of the attendance is as follows:

BOC Meeting with the Board of Directors

Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors, among others, discussed the results of the Company's performance, business development and other issues. During 2016 the Board of Commissioners held a Board Meeting with the Board of Directors as many as 14 (fourteen) meetings with an average attendance rate of 88.87%. Details of attendance is as follows:

* appointed as Commissioner based on the Extraordinary Stockholders' General Meeting held on February 17, 2016

Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN, MH No. 24 tanggal 16 Maret 2016 yang disahkan oleh Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0032095 tanggal 16 Maret 2016

**Diberhentikan dari jabatan Direktur Utama berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Juli 2016 sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN, MH No. 24 tanggal 27 Maret 2017 yang disahkan oleh Kemenkumham RI dengan No. AHU-AH.01.03-0125017 tanggal 06 April 2017

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris lainnya

Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas fungsi Pengendalian Manajemen Risiko dan Implementasi GCG di Perusahaan. Pada tahun 2016, Dewan Komisaris telah menjalankan kedua fungsi tersebut dengan baik.

Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Secara ringkas, pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun 2016 disajikan pada Matrik Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai berikut:

and was annotated in Notarial Deed No. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH. 24 dated March 16, 2016 which was legalized by Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0032095 dated March 16, 2016

** Dismissed from the position of President Director based on the Extraordinary GMS dated July 18, 2016 pursuant to Notarial Deed by Bambang Suprianto, SH, SpN, MH. No. 24 dated March 27, 2017 passed by Kemenkumham RI with No. AHU-AH.01.03-0125017 dated. April 06, 2017

Other Board of Commissioners Duties

Other than above activities, the Board of Commissioners is also responsible for conducting the function of risk management transfer and GCG implementation. In 2016, the Board of Commissioners has performed both functions well.

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners

In summary, the implementation of supervisory duties that have been carried out by the Board of Commissioners during 2016 is presented in the Key Performance Indicators Matrix (KPI) as follows:

REALISASI KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI) DEWAN KOMISARIS PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA PRIODE JANUARI - DESEMBER 2016
REALIZATION OF THE KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA PERIOD OF JANUARY - DECEMBER 2016

NO	KRITERIA/ASPEK Criteria/Aspect	SATUAN Unit	TARGET	BOBOT Weight	REALISASI Realization	NILAI Score
I	ASPEK PERENCANAAN / Planning Aspect			5		5,00
	Menyampaikan program kerja anggaran & KPI Dekom tahun 2016 yang menjadi bagian dari RKAP 2016 Submitting the work program & KPI of BOC in 2016, as part of RKAP 2016	Jml Dok / Number of Doc	1	5	1	5,00
II	ASPEK PENGAWASAN & MONITORING / ASPECT OF SUPERVISION & MONITORING			46,5		37,50
	1. Review dan analisis laporan berkala terdiri / Review and analysis of periodic reports, comprises::					
	Melakukan analisis laporan keuangan bulanan / Conduct monthly financial statement analysis	Jml Dok/ Number of Doc	12	5	12	5,00
	- Menyampaikan Surat Tanggapan terhadap RKAP 2016 / Submit Response Letter on the 2016 RKAP	Jml Dok / Number of Doc	1	2,5	1	2,50
	2. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Meeting	Kali Times	12	5	17	5,00
	3. Memberikan arahan/nasihat kepada Direksi Provide direction / advice to the Board of Directors					
	1) Underwriting	Jml Saran Number of Suggestion	1	11	2	5,00
	2) Keuangan & Investasi Finance & Investment	Jml Saran / Number of Suggestion	1	10	3	5,00
	3) SDM & Umum HR & General Affairs	Jml Saran / Number of Suggestion	1	5	3	5,00
	4) Pengendalian Internal Internal Control	Jml Saran / Number of Suggestion	1	7	5	5,00
	5) Teknologi Informasi Information Technology	Jml Saran / Number of Suggestion	1	1	3	5,00
III	ASPEK PELAPORAN / Aspect of Reporting			17,5		17,50
	1. Menyampaikan laporan/pendapat saran kepada Pemegang Saham Submit report/opinion/suggestion to shareholders					
	- Surat Tanggapan atas Laporan Tahunan tahun 2016 Respond Letter on Annual Report 2016	Jml Saran / Number of Suggestion	1	2,5	1	2,50
	- Surat tanggapan kinerja Triwulan Respond Letter on Quarter Report	Jml Saran / Number of Suggestion	3	5	3	5,00
	- laporan khusus atau rekomendasi kepada Pemegang Saham (disampaikan jika ada hal penting harus dilaporkan) Special Report or Recommendation to Shareholders (submitted if deemed necessary)	Jml Saran / Number of Suggestion	1	5	1	5,00

NO	KRITERIA/ASPEK Criteria/Aspect	SATUAN Unit	TARGET	BOBOT Weight	REALISASI Realization	NILAI Score
	2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dekom, yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan 2015 Submit report on the implementation of BOC duties as part of 2015 Annual Report	Jml Saran / Number of Suggestion	1	5	1	5,00
IV	ASPEK DINAMIS Aspect of Dynamic			40		40,00
	1. peningkatan Kompetensi Competence Building	Kali Times	4	5	4	5,00
	2. realisasi KPI Korporasi Realization of KPI Corporate	Kali Times	85	35	90,5	35,00
	JUMLAH Total			109		100,00

Prosedur Penetapan dan Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dimana selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam RUPS, dimana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016

Remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang dibayarkan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp4.029.694.451 untuk Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, sebagai berikut:

Procedure for Determination of Remuneration of Directors and Commissioners

The determination of Board of Commissioners' remuneration refers to Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 where the recommendation is addressed and approved in the GMS, where the realization has considered Board of Directors and Board of Commissioners' KPI achievement.

Board of Commissioners' Remuneration in 2016

Board of Commissioners' remuneration includes salary and allowance and incentives paid in 2016 amounting to Rp4,029,694,451 for member of the Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners' Competency Development Program

In 2016, the Board of Commissioners has participated in various training, conference, seminar or workshop.

Nama Name	Jabatan Position	Workshop/training/seminar	Penyelenggara Organizer	Tempat Venue
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama / President Commissioner	- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IV National Conference of Risk Management Professional IV	LSPMR - PT RAP Indonesia	Lombok
		- Workshop Subsidiary Governance Hubungan Induk dengan Anak Perusahaan & Tata Kelola Terintegrasi Workshop on Subsidiary Governance, Relationship between Parent Entity with Subsidiaries & Integrated Governance	KNKG	Yogyakarta
Endang Tri Kuswati	Komisaris / Commissioner	- Seminar Pricing for General Insurance Products Using Statistical Tools Seminar on Pricing for General Insurance Products Using Statistical Tools	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Jakarta

Nama Name	Jabatan Position	Workshop/training/seminar	Penyelenggara Organizer	Tempat Venue
Raymond Buisson	Komisaris Independ. / Independent Commissioner	- Workshop Peran Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam Rangka Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Workshop on the Role of Remuneration and Nomination Committee relating to Active Supervision of the Board of Commissioners	Risk Management Indonesia (RMI)	Bandung
		- 22nd Indonesia Rendezvous	AAUI	Bali
		- Workshop Subsidiary Governance Hubungan induk dengan anak perusahaan & tata kelola terintegrasi Workshop on Subsidiary Governance, Relationship between Parent Entity with Subsidiaries & Integrated Governance	KNKG	Yogyakarta
		- Risk Based Internal Auditing (RBIA)	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Jakarta
Edy Suandi Hamid		- Risk Based Internal Auditing (RBIA)	PT Reasuransi Nasional Indonesia	Jakarta



Bambang Sumarsono

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Lahir di Rembang, 29 Agustus 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1995. Bambang memulai karir sebagai Pelaksana bagian Pertanggungjawaban pada tahun 1996. Sejak Februari 2010 hingga saat ini menjabat Kepala Bagian Investasi pada Divisi Keuangan dan Investasi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Born in Rembang, August 29, 1971. Graduated with a Bachelor degree from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Diponegoro, Semarang in 1995. He started his career as Executive at Insurance Department in 1996. Since February 2010 to present, he serves as Head of Investment Unit at the Division of Finance and Investment of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

URAIAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Acuan Hukum

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Nasional Re senantiasa mengacu pada UU dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*, serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan

DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's organ which has a full authorization and responsibility for the management of the Company, for the interest of the Company, in accordance with the intention and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside of the court of law in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable law.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Each member of the BOD carries out tasks and makes decisions in accordance with each role and responsibility. However, in discharging their duties of managing the Company, the Board of Directors' collectively accountable to the GMS. Accountability of Directors to the GMS is the embodiment of accountability in the management of the Company in upholding the GCG principles.

The assessment on the Board of Directors performance is performed by the Board of Commissioners, either individually or collectively, based on the elements of assessment of BOD. The assessment was conducted at the end of the fiscal year. The results of the assessment of BOD's performance are submitted by BOC in the GMS.

Legal Reference

Besides the Articles of Association, in discharging their duties and responsibilities, the Board of Directors of Nasional Re always refers to the law and regulations, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Company.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises.
3. The Indonesian Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.

In addition, the duties and responsibilities of the Board of Directors also refer to various policies of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority and other regulatory authorities.

As required by law, the Board of Directors shall meet the requirements of integrity, competence and pass the fit and proper test, as well as have good character and morals, never been declared bankrupt or causing a company to go bankrupt within the last 5 (five) years during the term as the

pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi.

Seluruh anggota Direksi Nasional Re telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

Piagam Direksi

Aktivitas dan tindakan Direksi dalam mengelola perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan. Di luar apa yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum tersebut di atas, maka dilakukan prosedur kerja yang tetap menjunjung prinsip akuntabilitas berdasarkan kesepakatan, persetujuan dan pengaturan antar sesama anggota Direksi. Hal ini dicantumkan dalam Piagam Direksi atau *Board Manual*.

Piagam Direksi disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, merampingkan proses birokrasi dalam administrasi, dan mendukung peningkatan kinerja Direksi. Piagam ini juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan hubungan kelembagaan, yang artinya senantiasa berlandaskan pada suatu mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Director(s) or Commissioner(s). In addition, the Director(s) has never been found guilty of a criminal act in the financial sector within the last 5 (five) years prior to the appointment as Director(s).

All members of the Board of Directors of Nasional Re have complied with all the provisions mentioned above.

Board of Directors' Charter

All activities and actions undertaken by the Board of Directors (BOD), in managing the company, are stipulated in the Articles of Association, as well as in the laws and regulations. In the case of activities and actions in the management of the Company that are not governed by our Articles of Association or the provisions of the law, procedures are held by supporting the principle of accountability through consensus, agreement and/or rules between the members of the BOD. This is stipulated in the BOD Charter or Board Manual.

BOD Charter is prepared with the objective of enhancing efficiency and effectiveness of decision making process, reducing bureaucracy in the administration of the Company's management and supporting improvements in performance. This charter also governs the working relationship between the BOD and the BOC, which is an institutional relationship meaning that it is based on countable management and supervisory mechanisms in accordance with the prevailing provisions.

Collegial Authorities and Duties of the Board of Directors

As set forth in the legislation, Articles of Association and/or resolutions of the GMS, in discharging its duties, the Board of Directors has the authority as follows:

1. Establish the Company's management policies.
2. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to decide on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court of justice.
3. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more of the Company's employees, either individually or collegially to represent the Company in and out of court of justice.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan. 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Manage employment provision, including salary, pension or retirement benefit and other benefits for employees that are beyond the obligations as required by the law must obtain prior approval from the GMS. 5. Appoint and dismiss employee based on the Company's rules and applicable legislation. 6. Appoint and dismiss the corporate secretary. 7. Perform any actions related to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with the other parties and/or other party with the Company, as well as representing the Company on and off the court of justice, with restrictions as stipulated in the legislation, Articles of Association and /or resolution of the GMS . |
|--|--|

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusan piutang.

The duties of the Board of Directors are as follows:

- a. Pursue and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the intention and purpose.
- b. Prepare Long Term Plans, Work Plan & Budget and their amendment and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the GMS.
- c. Provide explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan & Budget.
- d. Prepare Shareholder Register, Special Register and Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Directors' Meeting.
- e. Prepare Annual Report as a form of responsibility of managing the Company, along with the financial statements as referred to in the Law on Corporate Documents.
- f. Prepare Financial Statements based on the applicable Accounting Standards and submit them to the Public Accountant to be audited.
- g. Submit the Annual Report, along with the Financial Statement to the GMS for approval and ratification, along with report on the rights of the Company not recorded in the books as a result of write-off of receivables.

- h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
 - i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
 - k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
 - l. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
 - m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 - n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 - o. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 - p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
 - q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Provide explanation to GMS regarding the Annual Report.
 - i. Submit the Balance Sheet and Income Statement, which have been approved by the GMS to the Minister of Justice and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation.
 - j. Report the changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Justice and Human Rights.
 - k. Maintain the Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of AGMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents of the Company.
 - l. Keep at the domicile of the Company: Shareholders' Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents of the company and other documents.
 - m. Develop Accounting system in accordance with Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially on the management, recording, archiving and monitoring.
 - n. Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or the Shareholders.
 - o. Establish the Company's organizational structure, complete with the details and duties.
 - p. Provide an explanation about everything asked or requested by the Board of Commissioners and Shareholders.
 - q. Perform other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and the provision determined by the GMS in accordance with the applicable legislation.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Jumlah anggota Direksi Nasional Re berjumlah 3 (tiga) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 2 (dua) orang Direktur. Sesuai struktur organisasi perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh RUPS, adalah sebagai berikut:

Scope and Responsibility of Each Director

Nasional Re BOD consists of 3 (three) members, led by a President Director and 2 (two) other Directors. In accordance with the Company's organizational structure, the division of tasks among the members of the Board of Directors appointed by the General Meeting of Shareholders, is as follows:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Direktur Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. 2. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 3. Divisi Sekretaris Perusahaan. 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. <p>b. Direktur Operasi</p> <p>Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Underwriting Fakultatif (UF). 2. Divisi Underwriting Treaty & Retrosesi (UTR). 3. Divisi Reasuransi Jiwa. 4. Divisi Reasuransi Syariah. <p>c. Direktur Keuangan dan SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keuangan & Akuntansi 2. Divisi Sumber Daya Manusia & Umum 3. Divisi Klaim. 4. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). | <p>a. President Director</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinate the establishment and implementation of the Company's management policy. For certain actions, pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners. 2. Oversee Division of Information & Communication Technology (ICT). 3. Oversee Division of Corporate Secretary. 4. Internal Audit Unit (IAU) is directly responsible to the President Director. <p>b. Director of Operations</p> <p>Directly supervise several units of work, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Underwriting Facultative Division (UF). 2. Underwriting Treaty & Retrocession Division (UTR). 3. Life Reinsurance Division. 4. Sharia Reinsurance Division. <p>c. Director of Finance and Human Resources</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finance & Accounting Division 2. Human Resources & General Division 3. Claims Division. 4. Information & Communication Technology Division (ICT). |
|--|--|

Penunjukan Direktur Pengganti

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a) Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Penjabat Direktur Utama.
- b) Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpedoman pada hasil assessment oleh konsultan eksternal dan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani *fit & proper test*.

Alternate Director

In the event that a member of the Board of Directors is absent, then the alternate Director is determined as follows:

- a) In the absence of the President Director, he/she should make an official written note to appoint alternate director, to perform the duties, powers and responsibilities as Caretaker President Director.
- b) In the absence of the sector Director, the said Director should make an official written note on the delegation of the duties and responsibilities to President Director or other Directors.

Director Succession Policy

In principle, the Board of Directors submits the candidate to be nominated as his successor, based on the assessment from external consultants and assessment from the Board of Commissioners and Board of Directors. Subsequently, the Board of Directors proposes to the Shareholders to

Namun demikian, Pemegang Saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personil yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

Komposisi Direksi

Saat ini Direksi Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang yang seluruhnya telah lolos fit and proper test. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Berikut ini menampilkan susunan Direksi Perusahaan:

Period: 01 January 2016 to 18 July 2016

1. Direktur Utama:
M. Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CRMP®, CRGP
2. Direktur Operasi:
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRMP®, CRGP
3. Direktur Keuangan & SDM
Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP®, CRGP

Period: 18 July 2016 to 31 December 2016

1. Direktur Operasi merangkap Plt. Direktur Utama:
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRMP®, CRGP
2. Direktur Keuangan & SDM/
Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP®, CRGP

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi Nasional Re diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas, dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan. Direksi Nasional Re menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi.

Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

- Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

undergo fit and proper test. However, shareholders reserve full authority to decide personnel that is qualified, worthy and credible to be appointed as Directors.

Board of Directors Composition

Currently, the Company's Board Directors comprises 3 (three) members, all of whom have passed the fit and proper test. Each member of the Board of Directors has adequate competence and experience to perform its respective duties.

Following is the composition of the Company's Board of Directors:

Period: 01 January 2016 to 18 July 2016

1. President Director:
M. Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CRMP®, CRGP
2. Director of Operations:
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRMP®, CRGP
3. Director of Finance & Human Resources
Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP®, CRGP

Period: 18 July 2016 to 31 December 2016

1. Director of Operations concurrently as Caretaker President Director:
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRMP®, CRGP
2. Director of Finance & HR /:
Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®, CRMP®, CRGP

Statement of Director's Independence

The Board of Directors of Nasional Re is required to always maintain its independence in performing its task and should not be influenced by pressures from any party and should act independently in the interests of the Company. The Board of Directors Nasional Re signed a statement of non-dual functions when officially appointed as the Board of Directors.

For that purpose, the Company has established the following requirements:

- In addition to the Board of Directors, any other party is prohibited from conducting or intervening in the management of the Company.
- Directors should be able to take decisions objectively, without conflict of interest and free of any pressure from any party.
- Directors are prohibited from conducting activities that could interfere with its independence in managing the Company.

- Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- The Board of Directors shall sign the Integrity Pact as a commitment to the Board of Directors in carrying out the activities of the Company that may cause a conflict of interest.

Rapat Direksi

Rapat Internal Direksi

Selama tahun 2016 Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 95,51%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
M. Shaifie Zein	Direktur Utama President Director	19	17	89.47 %
Edhie Mulyono	Direktur Operasi Director of Operations	34	33	97.05 %
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	34	34	100 %

Meeting of the Board of Directors

Internal Meeting of the Board of Directors

In 2016, the Board of Directors convened 34 (thirty four) times with average attendance rate of 95.51%. Details of attendance are as follows:

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris

Dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2016 Direksi mengadakan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 88,87%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others, discusses about the Company's performance, business development and other issues. In 2016 the Board of Directors held joint meeting with the Board of Commissioners for 14 (fourteen) times with an average attendance rate of 88.87%. Details of attendance are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rinaro Pramudiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100 %
Sulaeman*	Komisaris Commissioner	3	3	100 %
Endang Tri Kuswati**	Komisaris Commissioner	11	8	72,73 %
Raymond Buisson	Komisaris Independen Independent Commissioner	14	14	100 %
Edy Suandi Hamid**	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	5	45,45 %
M. Shaifie Zein***	Direktur Utama President Director	6	6	100 %
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/ Plt. Direktur Utama Director of Operations	14	14	100 %
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	14	14	100 %

* sampai 17 February 2016 | until February 17, 2016

** sejak 17 February 2016 | effective from February 17, 2016

*** sampai 18 Juli 2016 | until July 18, 2016

Tata Tertib Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan dan tata tertib sebagai berikut:

a. Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun.
2. Direksi dapat mengundang staf perusahaan untuk hadir dalam Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
 - i. Seorang atau lebih anggota Direksi; dan/atau
 - ii. Permintaan Direksi; dan/atau
 - iii. Permintaan tertulis dari Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Direksi dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh dari jumlah Direksi.

b. Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan/kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain.

c. Undangan Rapat

1. Undangan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan.
2. Undangan Rapat Direksi disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
3. Undangan Rapat Direksi yang menghadirkan pihak lain dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
4. Undangan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Undangan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (misal: SMS, BBM, surat email, dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan.
6. Seluruh Direksi diharapkan dapat hadir dalam setiap Rapat Direksi. Apabila berhalangan, seorang anggota

Rules and Procedures of the Meeting of the Board of Directors

Board of Directors' meeting is held with the provisions and rules as follows:

a. Meeting Schedule

1. The Board of Directors' Meeting is held at least 24 (twenty four) times a year.
2. The Board of Directors may invite the Company's staff to attend the meeting of the Board of Directors.
3. The Board of Directors may hold meetings outside of regular schedule, if deemed necessary by:
 - i. One or more members of the Board of Directors; and/or
 - ii. Request of the Board of Directors; and/or
 - iii. Written request of the Commissioner or the Majority Shareholder by mentioning things that will be discussed.
4. Meeting of the Board of Directors is declared valid if attended by more than half of the Board of Directors.

b. Meeting Venue

Meeting of the Board of Directors may be held at the domicile of company's business activities, or elsewhere.

c. Meeting invitation

1. Invitation to Meeting of the Board of Directors is made in writing by the Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary.
2. The Board of Directors' Meeting Invitation should be delivered at the latest 3 (three) days before the meeting date, or sooner if needed, excluding the date of the invitation and the meeting date.
3. For Meeting of the Board of Directors attended by other party, invitation should be delivered by Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary within a period of at least 2 (two) working days before the meeting date.
4. Invitation of Meeting of the Board of Directors shall include the agenda, date, time and place of the meeting.
5. Invitation of the Board of Directors' Meeting can be submitted via electronic means (eg, SMS, BBM, email letters and other electronic means) so that the invitation of meeting agenda can be promptly delivered.
6. All members of the Board of Directors are expected to attend each meeting of the Board of Directors. In the

Direksi dapat memberi kuasa kepada anggota Direksi lainnya, cukup dengan disposisi, dan seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili satu orang anggota Direksi lainnya.

d. Pimpinan Rapat

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
4. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang usianya tertua bertindak sebagai pimpinan rapat.

e. Agenda dan Materi Rapat

1. Materi rapat Direksi disusun berdasarkan masukan dari masing-masing anggota Direksi, dan dapat ditambahkan materi dari hasil Rapat Kepala Divisi yang harus diputuskan dalam Rapat Direksi.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai materi Rapat Direksi meliputi:
 - 1) Materi radir adalah yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan.
 - 2) Evaluasi atas keputusan Rapat Direksi sebelumnya.
 - 3) Materi rapat diberikan sebelum tanggal rapat bagi anggota Direksi untuk mempelajarinya.

f. Agenda dan Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan agenda rapat susulan tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
2. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan

event that a member of the Board of Directors is unable to attend the meeting, he/she may authorize other members of the Board of Directors, with a disposition and a member of the Board of Directors may only represent one member of the Board of Directors.

d. Chairman of the Meeting

1. Meeting of the Board of Directors is chaired by the President Director.
2. In the absence of the President Director, Board of Directors meeting is chaired by a member of the Board appointed by the President Director.
3. In the event President Director does not make the appointment, then the most long-serving member of the Board of Directors acts as chairman of the Board of Directors' Meeting.
4. In the event that the most long-serving member of the Board of Directors is more than 1 (one) person, then the oldest member of the Board of Directors acts as chairman of the meeting.

e. Meeting Agenda and Materials

1. Meeting materials are prepared based on input from each member of the Board of Directors and can include the material of Meetings of Head of Division, which should be decided in the meeting of the Board of Directors.
2. The Board of Directors' Meeting materials can include the following:
 - 1) Materials that are strategic and require immediate decisions.
 - 2) Evaluation on the decision of the previous Board of Directors' Meeting.
 - 3) Materials should be provided before the date of the meeting for members of the Board of Directors to learn.

f. Additional Agenda and Supplementary Meeting

In the event that additional meeting agenda is proposed when the meeting will soon take place, then the following provisions apply:

1. Proposed supplementary agenda of the meeting shall be equipped with adequate material.
2. Supplementary meeting agenda must be approved by all members of the Board of Directors attending the meeting. To that end, members of the Board of Directors unable to attend the meeting should

atas agenda rapat susulan tersebut.

3. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda rapat susulan tersebut diserahkan pada keputusan rapat.

g. Pengambilan keputusan

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.
4. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Direksi dibuat dengan suara terbanyak.
5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan suara tertutup.
6. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan disposisi tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
10. Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan

be contacted for approval or rejection of the supplementary meeting agenda.

3. If members of the Board of Directors unable to attend the meeting can not be reached within a reasonable time, then the approval of the subsequent meeting agenda is up to the decision of the meeting.

g. Decision-Making

1. All decisions of the Board of Directors are taken in a meeting of the Board of Directors.
2. The decision may also be taken outside the meeting of the Board of Directors, as long as all members of the Board of Directors agree on the manner and matter to be decided.
3. All meeting resolutions are adopted by consensus.
4. If the meeting fails to reach consensus, the Board of Directors meeting decisions are made by majority vote.
5. If the number consenting and dissenting votes is equal, the Meeting Chair determines the final decision, with regard to the provisions regarding accountability, except when it concerns person, the decision is made in a close voting.
6. In the event that there are more than 2 (two) alternatives of proposal and voting fail to reach a decision with number of vote cast more than $\frac{1}{2}$ (half) of total vote cast, then voting should be reconducted over two proposals that jointly gain votes more than $\frac{1}{2}$ (half) of total votes casted.
7. Each member of the Board of Directors is entitled to have 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for member of the Board of Directors represented.
8. Members of the Board of Directors who are not present confer a power of attorney to be represented at such Meeting by other member of the Board of Directors, with a written disposition given for that purpose.
9. A Board of Directors' Meeting is duly convened and entitled to adopt binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (half) of the Board of Directors' members are present.
10. In terms of additional meeting agenda, the Board of Directors' meeting is not entitled to make a decision unless all members of the Board of Directors or his

menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.

authorized representative, present and approve the addition of the meeting agenda.

h. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat bukan berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.
3. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali anggota Direksi yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

i. Risalah Rapat

- Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah atau Notulen Rapat.
- Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, dan dilengkapi dengan daftar hadir.
- Risalah Asli Rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan, sedangkan Direksi menyimpan salinannya.
- Risalah rapat Direksi harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rapat.

h. Dissenting Opinion

The provision for Dissenting Opinion is as follows:

1. A minute of meeting must state any dissenting opinion/comment made by the Directors, along with reasons of dissenting opinion.
2. Dissenting Opinion does not mean giving the right to the said members of the Board of Directors not to implement the resolution of the meeting. Despite the differences of opinion, all members of the Board of Directors is still obliged to follow and implement the decision of the meeting.
3. The Board of Directors are jointly and severally liable for negligent act in discharging their duties for the benefit and interest of the Company, unless the member of the Board of Directors who has dissenting opinion can prove that he/she has taken action to prevent the continuation of such losses.
4. Dissenting opinion included in the resolution and minutes of meetings can serve as evidence that the said member of the Board of Directors has taken action to prevent such losses, by stating a dissenting opinion towards the resolution of the meeting. This means that the said members of the Board of Directors can be freed from the liabilities resulted from the losses incurred or continued, as a result of the implementation of the resolution of the meeting.

i. Minutes of Meeting

- Each BOD meeting must have minutes of meeting.
- Minutes of meeting are signed by the Meeting Chair and all members of BOD and is equipped with list of attendance.
- Corporate Secretary, or Acting Corporate Secretary, shall keep the original minutes of meeting, while BOD keeps the copy.
- Minutes of meeting should be completed within 2 (two) days after meeting.

- Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
 1. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan;
 2. Daftar hadir;
 3. Permasalahan yang dibahas;
 4. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
 5. Proses pengambilan keputusan;
 6. Keputusan yang ditetapkan; dan
 7. *Dissenting opinion* jika ada.
- Minutes of meeting should describe the events of the meeting, including:
 1. The event, place, date and time of the meeting;
 2. List of attendance;
 3. The agenda;
 4. The opinion stated during the meeting, especially in addressing strategic or material issues, including who express their opinions;
 5. The process of decision-making;
 6. Decisions adopted; and
 7. Dissenting opinion if any.

j. Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat

1. Atas setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi maka tindak lanjut pelaksanaannya harus dievaluasi.
2. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan secara periodik, dan terhadap keputusan rapat yang telah diambil pada waktu sebelumnya wajib dilakukan evaluasi tindak lanjutnya pada kesempatan pelaksanaan rapat berikutnya.
3. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan dengan membuat matriks yang memuat hasil keputusan rapat, jangka waktu tindak lanjut, *Person In Charge* (PIC) dan hasil tindak lanjut.

j. Evaluation on the Follow-up of Resolution

1. Each follow-up to the decision of Directors meeting should be evaluated.
2. Evaluation on the follow-up of meeting resolution is conducted periodically and to the resolution taken previously, a follow-up evaluation must be conducted during the next meeting.
3. Evaluation of the follow-up of meeting resolution is made by creating a matrix that contains the resolution of the meeting, the follow-up period, Person In Charge (PIC) and the results of follow-up.

Program Orientasi dan Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Program Pengenalan

Informasi dasar perusahaan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat, meliputi:

1. Informasi atau pengetahuan internal:
 - a. Sejarah perusahaan.
 - b. Visi, Misi, Nilai-Nilai perusahaan serta sasaran perusahaan.
 - c. Struktur organisasi dan kerangka kerjanya, termasuk infrastruktur yang dimiliki perusahaan.
 - d. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
 - e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
 - f. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan.
 - g. Perkembangan kinerja perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Orientation Program and Competency Enhancement Program for Board of Directors

Induction Program

Company's Basic information for the new members of the Board of Directors and /or Board of Commissioners, includes:

1. Internal Information or knowledge:
 - a. The history of the company.
 - b. Vision, Mission, Values and the objectives of the Company.
 - c. The organizational structure and framework, including the Company's infrastructure.
 - d. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - e. The Company's Long-Term Plan (RJPP).
 - f. Work Plan and Budget (RKAP) of the current year.
 - g. The Company's performance within the last 5 (five) years.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Proses bisnis dan jenis produk perusahaan. i. Manajemen risiko perusahaan. j. Kebijakan perusahaan. k. Fungsi audit internal dan eksternal. l. Informasi lainnya yang relevan. <p>2. Informasi atau pengetahuan eksternal berkaitan dengan kegiatan perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan eksternal yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, dll. b. Posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, pemasok, mitra usaha dan <i>stakeholders</i> lain. c. Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya. d. Undang-undang dan peraturan terkait. e. Informasi eksternal yang relevan. <p>3. Salinan dokumen yang disampaikan kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang baru menjabat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris. b. Anggaran Dasar. c. Laporan Tahunan tahun terakhir. d. RJP dan kontrak manajemen terakhir. e. Jadwal dan agenda rapat. f. Risalah rapat. g. Struktur organisasi dan uraian kerja. h. Laporan audit internal dan eksternal. i. Undang-undang dan peraturan lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> h. The business process and products. i. Corporate risk management. j. Corporate policies. k. Internal and external audit function. l. Other relevant information. <p>2. External information or knowledge relating to the activities of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. External development that includes political, economic, social, technological, etc. b. The position of the Company compared with competitors, suppliers, business partners and other stakeholders. c. The relationship and obligations with regulators and other relevant agencies. d. Relevant Laws and regulations. e. Relevant external information. <p>3. Copies of documents submitted to the new members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners. b. Articles of Association. c. Last year Annual Report. d. Long term business plan and last management contract. e. Meeting schedule and agenda. f. Minutes of the meeting. g. The organizational structure and job descriptions. h. The internal and external audit reports. i. Other laws and regulations. |
|--|--|

Selama tahun 2016, Direksi mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

In 2016, the Board of Directors also attended various training programs, conferences, seminars or workshops, as follows:

Hubungan Afiliasi dengan Direksi lainnya

Affiliate relationship with other Directors

Seluruh anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan Nasional Re. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,

All members of the Board of Directors (BOD) and families do not own shares in companies affiliated with Nasional Re. All members of the Board of Directors has no family relationship with another member of BOD or of the Board of Commissioners and has no family relationship to the third degree either vertically or horizontally to the side or relationship by marriage. Thus, the Board of Directors may carry out their duties and responsibilities independently

mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Pada tanggal 2 Juli 2016, secara sendiri-sendiri anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas Penerapan dan pernyataan tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Penilaian Kinerja Direksi

Setiap tahun Direksi menandatangani kontrak Manajemen/*Key Performance Indicator* dengan Pemegang Saham yang menyebutkan sasaran-sasaran yang harus dicapai selama setahun. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun oleh RUPS, dengan mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicator*.

Untuk tahun 2016 realisasi sasaran strategis/program kerja Direksi telah memperoleh skor 95,49%, sebagaimana tabel di bawah ini:

and without conflict of interest between the interests of personal, family and relatives, other office or group, with the interests of the Company.

On July 2, 2016, the members of the Board of Directors individually signed the Integrity of Implementation Pact and the statement has no share in any other company.

BOD Performance Appraisal

Each year, member of the Board of Directors (BOD) signed Management contract with shareholders, which outlined the goals to be achieved during the year. Assessment on the performance of the Board of Directors is prepared by the Board of Commissioners and by the AGM, with reference to the achievement of key performance indicators (KPI).

In 2016, the realization of strategic objectives/ work program of BOD scored 95.49% as shown in the table below:

NO.	INDIKATOR / INDICATOR	SATUAN / UNITS	FORMULA	BOBOT / WEIGHT	TARGET Tahun 2016 TARGET	Realisasi / REALIZATION	Nilai / VALUE	Nilai Tertimbang / WEIGHTED VALUE
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	a. Earning After Tax (EAT)	Rp.	Tercapai sesuai RKAP Achieved according to RKAP	10	320 Milyar / Billion	336 Milyar / Billion	105.00	10.00
	b. Return on Equity	%	(Laba Setelah Pajak/Rata-rata Ekuitas) x 100% (Profit after Tax/Average Equities) x 100%	10	25.57%	25.80%	100.91	10.00
	c. Risk Based Capital (RBC)	%	Kekayaan yang diperkenankan-Jumlah Kewajiban Admitted Asset – Total Liabilities	7	Konvensional / Conventional : 205,62%	163.93%	79.66	5.58
			Batas tingkat solvabilitas Minimum Minimum Solvency		Syariah: 60,91%	36.05%	80.53	-
	d. Return On Asset	%	(Laba Sebelum Pajak/Rata-rata Aset) x 100% (Profit Before Tax / Average Assets) x 100%	5	8.49%	9.14%	107.68	5.00
	a. Pertumbuhan Market Share / Market Share Growth	%		5	3.31%	3.96%	119.64	5.00

NO.	INDIKATOR / INDICATOR	SATUAN / UNITS	FORMULA	BOBOT / WEIGHT	TARGET Tahun 2016 TARGET	Realisasi / REALIZATION	Nilai / VALUE	Nilai Tertimbang / WEIGHTED VALUE
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	b. Optimalisasi Kapasitas Konvensional / B. Optimization of Conventional Capacity	%	Premi Netto Net Premium	5	251.22%	132.19%	52.62	2.63
			Ekuitas Murni Pure Equities (Ekuitas Konvensional dikurangi Modal disetor Syariah) Conventional Equities deducted by of Sharia Paid-in Capital					
			Total Bobot Keuangan Total Weight Of Finance	42				38.21
	a. Customer Engagement	index	Hasil Survey keterikatan Pelanggan Result from the Survey on Customer Engagement	5	75	74.43	99.24	4.96
	b. Customer Satisfaction	index	Hasil Survey kepuasan Pelanggan Result from the Survey on Customer Satisfaction	5	75	88.75	118.33	5.00
			Total Bobot Fokus Pelanggan	10				9.96
			Total Weight Of Customer Focus					
	a. Loss Ratio	%	Klaim Netto + EKRS Net Claim + EORC (Estimated Own Retention Claim) Premi Netto Net Premium	5	60.2%	37.1%	162.50	5.00
	b. Pertumbuhan premi / Premium Growth	%	Premi Bruto (n) - Premi Bruto (n-1) Gross Premium (n) - Gross Premium (n-1) Gross Premium (n-1)	5	35.9%	41.3%	114.86	5.00
	c. Underwriting Result	%	Hasil Underwriting Bersih Net Underwriting Result Premi Bruto Gross Premium	5	6.34%	7.81%	123.17	5.00

NO.	INDIKATOR / INDICATOR	SATUAN / UNITS	FORMULA	BOBOT / WEIGHT	TARGET Tahun 2016 TARGET	Realisasi / REALIZATION	Nilai / VALUE	Nilai Tertimbang / WEIGHTED VALUE
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	d. Yield On Investment	%	Hasil Investasi Investment Yield Rata-rata Investasi Average Investment	5	7.00%	6.50%	92.86	4.64
Total Bobot Efektifitas Produk Dan Proses				20				19.64
Total Weight Of Effectiveness Of Product And Process								
FOKUS TENAGA KERJA FOCUS ON EMPLOYEE								
	Produktifitas Pegawai Employee Productivity	Rp juta / Pegawai Rp Million / Employee	Laba Setelah Pajak Profit After Tax Rata-rata Jumlah Pegawai (tetap dan kontrak) Average Number of Employees (permanent and non-permanent)	5	Rp.1,633juta / million	Rp.1,670 juta / million	102.27	5.00
	Employee Engagement		Total Nilai Keterikatan Pegawai Total Score of Employee Engagement Jumlah responden Number of Respondent	5	75	83.85	111.80	5.00
Total Bobot Fokus Tenaga Kerja				10				10.00
Total Weight Of Focus On Employee								
	Skor KPKU KPKU Score	Skor Score	Hasil assesment KPKU KPKU Assessment Result	6	470	474.75	101.01	6.00
	Skor GCG GCG Score	Skor Score	Hasil assesment GCG GCG Assessment Result	6	87	85.58	98.37	5.90
	Maturity Level Manajemen Risiko Risk Management Maturity Level	Skor Score	Hasil Assesment Manajemen Risiko Risk Management Assessment Result	6	3.0	2.9	96.33	5.78
Total Bobot Kepemimpinan				18				17.68
Total Weight Of Leadership								
Total Bobot				100				95.49
Total Weight								

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan Remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dimana selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam RUPS, dimana untuk realisasinya dengan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Direksi Tahun 2016

Remunerasi Direksi meliputi gaji, tunjangan pakaian, tunjangan hari raya, dan tantiem yang telah dibayarkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rp7.013.028.266.

Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi Nasional Re per 31 Desember 2016 telah mencerminkan keberagaman dalam hal pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kompetensi sehingga seluruh anggota Direksi dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin.

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) maupun auditor ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan pengawas dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan PT Reasuransi Nasional Indonesia termasuk laporan keuangan berkala. Proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

Procedures for the Determination of BOD Remuneration

The Determination of BOD Remuneration refers to the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014, and is submitted to be decided in GMS, with the realization of which considers the KPI of BOC and BOD.

Remuneration of the Board of Directors in 2016

Remuneration, including salary, allowances and others that were paid in 2016, amounted to Rp7,013,028,266.

Diversity of Composition of the Board of Directors

The Composition of the Board of Directors of Nasional Re per December 31, 2016 has reflected the diversity in terms of experience, educational background and competency so that all members of the Board of Directors can support each other in performing their duties and obligations as well as possible.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was formed to strengthen the supervisory functions of the Board of Commissioners and increase public confidence in the management of the Company.

Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the duties and responsibilities as follows:

1. Assess the audit activities and results, conducted by the Internal Audit Unit (IAU) and the external auditors, in order to prevent the occurrence of supervisory and reporting that do not meet the standards .
2. Provide recommendations for the improvement of the Company's management control system and its implementation.
3. Ensure a satisfactory review procedures upon information issued by PT Reasuransi Nasional Indonesia including periodic financial statements. Projection/*forecast* and other financial information to be submitted to the Shareholders.

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan perundangundangan yang berlaku.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Untuk dapat menduduki posisi sebagai anggota Komite Audit maka kandidat harus memenuhi prasyarat berikut ini:

- a. Memiliki pengetahuan memadai mengenai industri asuransi termasuk segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit.
- c. Mampu berkomunikasi efektif.
- d. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi
- e. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- f. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
- g. Memiliki pemahaman tentang konsep *auditing*.
- h. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit.

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Nasional Re. Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan Perusahaan sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan Perusahaan.

4. Identify issues that require the attention of the Board of Commissioners.
5. Discharge other duties assigned by the Board of Commissioners, to the extent that all are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association and the applicable legislation.

Educational Qualification and Employment History of Audit Committee Members

To assume the position as a member of the Audit Committee, the candidate must meet the following requirements:

- a. Possessing adequate knowledge on the insurance industry, including all rules and regulations.
- b. Possessing education and employment backgrounds in the sector of financial reporting or auditing.
- c. Able to communicate effectively.
- d. Having a good character, ethics and professional responsibility.
- e. Possessing adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG).
- f. Possessing adequate understanding of the risk concept and risk management in business activities as well as internal control.
- g. Possessing an understanding of the concept of auditing.
- h. Listed as a member of professional organization of Audit Committee.

Independence of the Audit Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Audit Committee are independent parties without any financial, management and family ties to the third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the Nasional Re. Members of the Audit Committee do not have the authority to design, lead and control the Company prior to serving as a member of Audit Committee and are not former head or employee of public accounting firm that examined the books of the Company.

Susunan Komite Audit

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Raymond Buisson	Ketua Chief
2.	Helmiansyah	Anggota Member
3.	Adi Kusumasmara	Anggota Member

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 12 (dua belas) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam *Charter* komite Audit.

Kegiatan Komite Audit 2016

1. Melakukan *review* kepada masing-masing Bidang didalam perusahaan melalui laporan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Intern (SPI).
2. Melakukan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan "*reward and punishment*" kepada karyawan.
3. Melakukan pengawasan atas laporan tindak lanjut atas pemeriksaan.
4. Melakukan *review* kinerja Bidang Operasional, Investasi, Akuntansi dan Keuangan, Organisasi dan SDM, Bidang lainnya.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketaatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepatuhan GCG.
6. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap peningkatan fungsi SPI.
7. Melakukan rapat kerja dengan SPI secara keberlanjutan.
8. Peningkatan fungsi SPI.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perusahaan, serta membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan Direksi serta membantu

Composition of the Audit Committee

Audit Committee Meeting

The Audit Committee member attended meeting at least 12 (twelve) times a year as stipulated in the Charter of the Audit Committee.

Activities of Audit Committee 2016

1. Reviewing each sector of the Company through audit report prepared by Internal Audit Unit (IAU).
2. Providing recommendations to the Board of Directors regarding "reward and punishment" for employees.
3. Supervising the follow-up report of the audit.
4. Reviewing the performance of Operation, Investment, Accounting and Finance, Organization and Human Resources and Other Sectors.
5. Evaluating the compliance with applicable laws and regulations, and evaluate the implementation of GCG compliance.
6. Evaluating and recommending the improvement of the IAU function.
7. Conducting work meeting with IAU continuously.
8. Improving the IAU function.

THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility of preparing the selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Commissioners, Directors and other executives, as well as preparing the system for assessment and providing recommendations on the number of BOC and BOD

menyusun sistem penggajian, memberikan tunjangan, fasilitas lainnya dan memantau pelaksanaannya.

Komite ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab mencari calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemegang Saham.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam penentuan anggota komite nominasi dan remunerasi, Perusahaan tidak mempunyai kualifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan anggota komite, namun memprioritaskan pengalaman kerja dari kandidat.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Nasional Re.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan SK Dekom No. Kep.08/DK/NR/V/2016

and assisting the establishment of the payroll system, provision of allowances, other facilities and monitoring the execution.

The Committee also has the duty and responsibility of searching candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reported to the Board of Commissioners, who will submit it to shareholders for their consideration.

Qualification of Education and Employment History of Member of Nomination and Remuneration Committee

In selecting members of the Nomination and Remuneration Committee, the Company does not have recure certain educational qualifications, but rather prioritizes candidates with experience.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Nomination and Remuneration Committee are independent parties without any financial, management and family ties to the third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/ or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the Nasional Re.

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Based on Decree No. Dekom. Kep.08/DK/NR/V/2016

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Raymond Buisson	Ketua Chief
2.	Edy Suandi Hamid	Anggota Member
3.	Endang Tri Kuswati	Anggota Member

KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam menjalankan fungsi pengawasannya Dewan Komisaris juga dibantu komite-komite berikut:

Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai efektifitas Manajemen Risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil perusahaan. Selain itu juga memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan, serta memantau pelaksanaannya.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Kebijakan Risiko

Anggota Komite Kebijakan Risiko memiliki sertifikasi manajemen risiko dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan mempunyai pengalaman yang memadai di bidang manajemen risiko.

Independensi Komite Kebijakan Risiko

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Kebijakan Risiko tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Nasional Re.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Besides the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee, In discharging its duties of supervision, the Board of Commissioners is assisted by the following committees:

The Risk Policy Committee

The Risk Policy Committee has the duty and responsibility for assisting the Board of Commissioners in reviewing the risk management system developed by the Board of Directors, assessing its effectiveness and risk tolerance that can be taken by the Company.

Duties and Responsibilities

Risk Monitoring Committee has the duties and responsibilities of assisting the Board of Commissioner in assessing the risk management system prepared by the Board of Directors, as well as assessing the effectiveness of risk management. The Committee also monitors the implementation of risk management prepared by the Board of Directors, as well as assessing the risk preference tolerance. The committee periodically runs the monitoring on implementation of the risk management by BOD and all staff.

Educational Qualifications and Employment History of Risk Policy Committee Members

Members of the Risk Policy Committee hold risk management certification from the Risk Management Profession Certification Institute (LSPMR) and have sufficient experience in risk management.

Independence of the Risk Policy Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Risk Monitoring Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the Nasional Re.

Rapat Komite

Komite Kebijakan Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko.

Meeting of the Committee

The Risk Policy Committee convenes meeting at least 4 (four) times a year as stipulated in the Risk Management Guidelines.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK Dekom No. Kep.07/DK/NR/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

Composition of the Risk Monitoring Committee

Based on Decree No. Dekom. Kep.07/DK/NR/V/2016 dated May 24, 2016.

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Edy Suandi Hamid	Ketua Chief
2.	Raymond Buisson	Anggota Member
3.	Ricardo Pardede	Anggota Member

Komite Kebijakan Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab

Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan *Good Corporate Governance* secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi, dan memantau pelaksanaannya serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*).

Corporate Governance Committee

Duties and responsibilities

Assisting the Board of Commissioner in reviewing the Good Corporate Governance policy thoroughly, which has been prepared by the Board of Directors, and also monitoring the implementation and assessing the consistency of its application, including those relating to Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance

Dalam penentuan anggota Komite Kebijakan Corporate Governance, Perusahaan tidak mempunyai kualifikasi khusus terkait latar belakang pendidikan calon anggota komite, namun para kandidat harus pernah mengikuti pelatihan tentang GCG.

Educational Qualification and Employment History of Corporate Governance Committee Members

In selecting members of Corporate Governance Committee, the candidate is not required to have certain qualifications, regarding educational background, but the candidate shall have been trained on GCG implementation.

Independensi Komite Kebijakan Corporate Governance

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite *Corporate Governance* tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai

Independence of the Corporate Governance Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Corporate Governance Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation

Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Nasional Re.

with or business relation with the Nasional Re.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi.

Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan

Mengacu pada peraturan Bapepam IX.I.4 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara, pada dasarnya tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

- 1) Mengelola strategi komunikasi untuk membangun citra perusahaan.
- 2) Mewakili perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3) Menginformasikan kinerja perusahaan dan *corporate action* kepada pihak yang membutuhkan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Mengelola mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan perusahaan.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat direksi, rapat direksi dengan komisaris, rapat kinerja perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta keprotokolan Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 22/KEP/DIR/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 mengenai Penetapan Sekretaris Perusahaan, bahwa Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Direktur Keuangan dan SDM sedangkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Kepala Divisi SDM & Umum.

Dalam perjalanannya, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 56/KEP/DIR/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 mengenai Struktur Organisasi Perusahaan, Perusahaan telah membentuk unit Bagian Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan, yang hingga saat

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is responsible for formulating the policies, planning and control of corporate communications, institutional relations, investor relations, as well as the secretariat of the Board of Directors.

Legal Basis for the Appointment and Terms of Office

Referring to Bapepam Rules IX.I.4 about the formation of the Corporate Secretary and the Decree of Minister of SOEs No.: KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises, basically Corporate Secretary duties include:

- 1) Managing communication strategy in order to build corporate image.
- 2) Representing the Company in communicating the Company's activities to all stakeholders.
- 3) Providing information on the Company's performance and corporate action for the interest of other parties and stakeholders.
- 4) Managing information disclosure mechanism, internally and externally, in accordance with the interests of the Company.
- 5) Coordinating BOD internal meeting, BOD meeting with BOC, meeting on the Company's performance and the General Meeting of Shareholders, as well as the protocol and secretarial administration of the Board of Directors.

As per Board of Directors Decree No. 22/KEP/DIR/V/2013 dated May 15, 2013 regarding the Establishment of the Corporate Secretary, the Corporate Secretary responsibility was held by the Director of Finance and HR whereas the execution of the Corporate Secretary function was performed by the HR & General Affairs Division Head.

In the course of time, in accordance with the Directors' Decree No. 56/KEP/DIR/XII/2013 dated December 18, 2013 on the Organizational Structure, the Company has established a Corporate Secretariat Department under the coordination of Corporate Secretary, the function of which is still assumed by

ini masih dijabat oleh Direktur Keuangan & SDM berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 tanggal 03 Januari 2014. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEP/DIR/III/2014 tentang Mutasi dan Rotasi Pejabat/Pegawai sejak tanggal 17 Maret 2014.

Director of Finance & HR, by virtue of BOD Decree No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 dated January 03, 2014. Furthermore, for daily activities Head of Corporate Secretariat Unit is assigned to become Acting Corporate Secretary based on the BOD Decree No. 09/KEP/DIR/ III/2014 on Employee Rotation as per March 17, 2014.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2016

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
JANUARI JANUARY	
6 Januari	Penyampaian Surat Pemberitahuan Struktur Organisasi Baru kepada Seluruh Mitra Usaha Submission of Notice of New Organization Structure to All Partners
8 Januari	Penyampaian Risalah Rapat Pimpinan tgl 31 Desember 2015 Submission of Minutes of the Leaders Meeting on 31 December 2015
13 Januari	Penyampaian Draft Usulan Nama Jabatan Personil dan email corporate Submission of Proposal Draft of Name, Position of the Personnel and corporate email
19 Januari	Penyampaian SE AAJI No.13/PRI/AAJI/I/2016 tentang Minuta & Materi Presentasi COO Forum Submission of SE AAJI No.13/PRI/AAJI/I/2016 on Minuta & COO Presentation Materials Forum
	Menghadiri Undangan ASKRINDO dalam rangka Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Attending ASKRINDO's invitation in the Implementation of Integrated Governance
20 Januari	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tanggal 18 Januari 2016 Preparation of Minutes of the Board of Directors' Meeting on January 18, 2016
	Usulan Penunjukan Kepala Divisi Kehumasan & Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan Proposing Appointment of Head of Division of Public Relations & Compliance as Corporate Secretary
	Usulan Pembentukan Tim Self Assesment GCG PT. Reasuransi Nasional Indonesia Proposing the Establishment of GCG Self Assessment Team of PT. Reasuransi Nasional Indonesia
22 Januari	Penyampaian Draft Risalah Rapat Direksi & Dewan Komisaris tgl 23 November 2016 dan 23 Desember 2016 Submission of Draft of Minutes of Meeting of Board of Directors & Board of Commissioners dated November 23, 2016 and December 23, 2016
25 Januari	Penyampaian copy Surat Dekom No.03/DK/NR/I/2016 tentang Masa Tugas sebagai Anggota Komite Audit Submission of copy of Letter of Decree No.03/DK/NR/I/2016 on the Term of Duty as Member of Audit Committee
	Penyampaian SK Direksi No. 04/KEP/DIR/I/2016 tentang Pembentukan Tim Self - Assessment GCG Tahun 2015 Submission of Directors Decree No. 04/KEP/DIR/I/2016 on the Establishment of GCG Self-Assessment Team of 2015
26 Januari	Dokumen Surat AAUI No.16/AAUI/16 perihal Konfirmasi Gross Premi Perusahaan untuk luran <i>Sliding Scale</i> tahun 2016 Document Letter AAUI No.16 AAUI/16 on the Confirmation of Gross Premium of the Company for Sliding Scale Contribution in 2016
	Pembuatan SK Direksi No.04/KEP/DIR/I/2016 tentang Pembentukan Tim Self - Assesment GCG Preparation of Decree of the Board of Directors No.04/KEP/DIR/I/2016 on the Establishment of GCG Self-Assessment Team
	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 25 Januari 2016 Preparation of Minutes of Board of Directors' Meeting on 25 January 2016
28-29 Januari	Mengikuti Seminar Legal Drafting & Writing Following Legal Drafting & Writing Seminars
FEBRUARI FEBRUARY	
2 Februari	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 2 Februari 2016 Preparation of minutes of Board of Directors Meeting on 2 February 2016

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
3 Februari	Menghadiri Undangan Diklat Lanjutan PPA & K Attending the Invitation for Advanced Training by PPA & K
	Penyampaian Dokumen Surat OJK S-99/NB.211/2016 perihal Pelaksanaan Rekomendasi Submission of Document Letter OJK S-99/NB.211/2016 regarding Implementation of Recommendations
5 Februari	Menghadiri undangan Sosialisasi POJK No.28/POJK-05/2015 Attending the invitation for Socialization of POJK No.28/POJK-05/2015
	Penyampaian Surat ASKRINDO tentang Pengisian Jabatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan PT Aksrindo Submission of ASKRINDO Letter on Position of Directors and Commissioners of PT Aksrindo
9 Februari	RUPSLB tentang Pengangkatan Direksi Nasional Re EGMS on Appointment of National Directors Re
	Menghadiri Undangan Legal & Compliance Forum AAJI Attending AAJI Legal & Compliance Invitation Forum
	Menghadiri Undangan Sosialisasi POJK No.28/POJK.05.2015 Attending Invitation on the Socialization of POJK No.28/POJK.05.2015
	Laporan Tahunan Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia Annual Report of Independent Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia
	Pembuatan Surat Undangan Rapat Teknis No. 093/DIR/NR/II/2016 Preparation of Letter of invitation for Technical Meeting no. 093/DIR/NR/II/2016
10 Februari	Pembuatan Undangan Nasional Re Golf Gathering Tahun 2016 Preparing National Invitation Re Golf Gathering 2016
15 Februari	Undangan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Invitation for General Meeting of Shareholders (GMS)
16 Februari	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 15 Februari 2016 Preparation of the minutes of the Board of Directors' Meeting on February 15, 2016
17 Februari	RUPSLB tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Nasional Re EGMS on Appointment of National Board of Commissioners Re
	Pembuatan surat No.080/DIR/NR/II/2016 tentang Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Making Letter No.08 /DIR/NR / II 2016 on Invitation of General Meeting of Shareholders (GMS)
14 Februari	Penyelenggaraan Golf antara Mantan Komisaris dan Direksi Nasional Re Organizing Golf event between Former Commissioner and National Directors Re
18 Februari	Penyelenggaraan RUPS tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perhitungan Tahun Buku 2015 Implementation of the General Meeting of Shareholders on Ratification of the 2015 Annual Report
19 Februari	Penyampaian surat No.s-119/NB.223/2015 dari OJK kepada Direksi Submission of letter No.s-119/NB.223/2015 from OJK to the Board of Directors
23 Februari	Penyampaian Risalah Rapat Direksi & Dewan Komisaris tanggal 21 Januari 2016 Submission of Minutes of Meeting of Board of Directors & Board of Commissioners dated January 21, 2016
26 Februari	Penyampaian Surat No.127/DIR/NR/II/2016 tentang Laporan Pelaksanaan Self Assesment GCG 2015 kepada OJK Submission of Letter No.127/DIR /NR/II/2016 on GCG Self Assessment Implementation Report 2015 to OJK
	Penyampaian Surat No. 128/DIR/NR/II/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik kepada OJK Submission of Letter no. 128 /DIR/NR/II/2016 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance to OJK
MARET MARCH	
2 Maret	Penyampaian Dokumen Kertas Kerja Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direksi. Submission of Working Paper of Compliance Function Implementation to Director.
	Menghadiri Penyerahan Award 2nd Best Reinsurance Company In 2016 Attending the Handing over of the 2nd Best Reinsurance Company Award In 2016
4 Maret	Penyampaian draft SPK Jasa Hukum Submission of draft of Legal Contracts
11 Maret	Memo tentang Kajian Struktur Organisasi Memos on Organizational Structure Review

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
14 Maret	Laporan Penilaian Tingkat Risiko melalui SIRIBAS.OJK.GO.ID Risk Rating Report through SIRIBAS.OJK.GO.ID
15 Maret	Proses Iklan HUT Reliance Capital Management Processing the ad for Reliance Capital Management Anniversary
18 Maret	Pembuatan surat No.167/DIR/NR/III/2016 tentang Undangan Outing Cedants ke Jepang Making letter No.167 / DIR / NR / III / 2016 on Outing Cedants Invitation to Japan
21 Maret	Proses Bantuan CSR Mata Air Foundation BPUN Rp. 20.000.000,- The Process of CSR donation for Mata Air Foundation BPUN of Rp. 20.000.000, - Pembuatan draft Risalah Rapat Direksi tgl 14 Maret 2016 Preparation of draft of Minutes of Board of Directors Meeting on 14 March 2016
22 Maret	Pembuatan draft Risalah Rapat Direksi tanggal 21 Maret 2016 Preparation of draft Minutes of Board of Directors Meeting on March 21, 2016
31 Maret	Penyelenggaraan Sekretariat IPR Implementation of IPR Secretariat
APRIL APRIL	
1 April	Penyelesaian Akta Notaris No.13, tgl 8 Maret 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direksi dan Akta No.24, tgl 16 Maret 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Komisaris Settlement of Deed No. 13 dated March 8, 2016 concerning the Extension of the term of office of the Board of Directors and Deed No.24, dated March 16, 2016 regarding the extension of the term of office of the Board of Commissioners
5 April	Memorandum No.01/DIR/IV/2016 perihal Action Plan Korporat Triwulan Tahun 2016 Memorandum No.01 / DIR / IV / 2016 regarding Corporate Action Plan of the Quarter of 2016 Pembuatan Memo No: 32/SekPer/IV/2016 perihal Penunjukan Ketua Panitia Events Perusahaan Tahun 2016 Preparing Memo No: 32 / SekPer / IV / 2016 regarding Appointment of Chairman of Company Events Committee Year 2016
7 April	Proses CSR Rp. 50.000.000,- untuk Ponpes Nashrul Ummah Kudus - Jawa Tengah Processing CSR donation of Rp50,000,000, - for Ponpes Nashrul Ummah Kudus - Central Java
8 April	Penyampaian Copy Surat OJK No.S-586/NB.III/2016 tgl 11 Maret 2016 Perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia Submission of Copy of Letter of OJK No.S-586 / NB.III / 2016 dated March 11, 2016 Subject to Assessment of Ability and Precision for PT Reasuransi Nasional Indonesia as Main Party Laporan Pelaksanaan Edukasi melalui PEDULI.OJK.GO.ID Education Implementation Report through PEDULI.OJK.GO.ID
11 April	Pembuatan surat No. 261/DIR/NR/IV/2016 tentang Hasil Penilaian F&P OJK dari Ibu Endang TK dan Bp. Edy Suandi H. Making letter no. 261 / DIR / NR / IV / 2016 on the Results of FSA F&P Assessment of Ibu Endang TK and Bp. Edy Suandi H.
12 April	Masukan terhadap Materi Piagam Tata Kelola Terintegrasi per 12 April 2016 Input for the Material of Integrated Governance Charter as of 12 April 2016
14 April	Penyampaian SK Pembentukan Tim Counterpart Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Sistem Bussines Continuity Management/Plan (BCM/P) PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun 2016 Submission of Decree on the establishment of Counterpart Team for the Preparation of Policy and Guidance of Business Continuity Management / Plan (BCM / P) of PT Reasuransi Nasional Indonesia 2016
18 April	Pembuatan draft Risalah Rapat Direksi tgl 11 April 2016 Preparation of the draft of Minutes of the Board of Directors' Meeting on 11 April 2016
19 April	Pembuatan Memo Sekper tgl 19 April 2016 tentang Notulen Rapat Umum Anggota Pertanggung Jawaban Pengurus AAUI Thn 2015 tgl 16 Maret 2016 Making Corsec Memo dated 19 April 2016 on Minutes of the General Meeting of Member for Accountability of the Board of Management of AAUI 2015 dated March 16, 2016 Penyampaian Copy Surat No: 261/DIR/NR/2016 Perihal Hasil Penilaian Kemampuan & Kepatutan Anggota Direksi & Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia Submission of Copy of Letter No: 261 / DIR / NR / 2016 on the Assessment of Ability & Possessions Results of Board of Directors & Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
20 April	Dokumen Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Valuasi Cadangan Teknis PT Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial Document of Cooperation Agreement on the valuation of PT Reasuransi Nasional Indonesia's Technical Reserve Reservation with PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial Memorandum Proposal Training Dasar-dasar Aktuarial per 20 April 2016 (Panitia Training Aktuarial) Memorandum of Actuary's Basic Training Proposal as of April 20, 2016 (Actuarial Training Committee)
24 April	Penyelenggara IPR Golf Gathering Organizing IPR Golf Gathering
26 April	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 18 April 2016 Preparation of Minutes of Board of Directors' Meeting on 18 April 2016
29 April	Penyampaian draft Risalah Rapat Direksi & Dewan Komisaris tgl 23 Februari 2016 Submission of draft of Minutes of Meeting of Board of Directors & Board of Commissioners dated February 23, 2016
MEI MAY	
2 Mei	Melengkapi Kuesioner Howden untuk Divisi UTR Completing the Howden Questionnaire for the UTR Division Pembuatan surat No:315/DIR/NR/V/2016 perihal 60th Anniversary ACA (Kesan-Kesan tentang ACA) Making of letter No: 315 / DIR / NR / V / 2016 regarding 60th Anniversary ACA (Impression of ACA) Pembuatan draft SPK Workshop Syariah Preparation of draft SPK Sharia Workshop
9 Mei	Penyampaian Draft Risalah Rapat Direksi tgl 9 Mei 2016 Submission of Draft of Minutes of Board of Directors Meeting on 9 May 2016 Dokumen Award pada Indonesia Business Professional and Education Award Tahun 2016 Document Award at Indonesia Business Professional and Education Award Year 2016
10 Mei	Perihal Undangan Workshop & Sarasehan Nasional Re Syariah 2016 Invitation to Workshop & National Workshop of Re Shariah 2016 Invitation Perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Extension of Certificate of Domicile of the Company
11 Mei	Proses Keanggotaan Corporate Strategic Partner ISEA Processing the Membership at ISEA's Corporate Strategic Partner
12 Mei	Pembuatan Undangan Workshop & Sarasehan Nasional Re Syariah Making Invitation to Workshop & National Workshop of Re Shariah Undangan Workshop & Corporate Secretary Global Invitation to Global Workshop & Corporate Secretary
16 Mei	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 16 Mei 2016 The preparation of the minutes of the Board of Directors' Meeting on May 16, 2016
17 Mei	Perihal Sponsorship Insurance Award 2016 About Sponsorship Insurance Award 2016 Review Kepatuhan Compliance Review
18 Mei	Permohonan Partisipasi Sponsorship Gathering Event Applying for Sponsorship of Gathering Menghadiri Indonesia Business Professional & Education Award 2016 Attending Indonesia Business Professional & Education Award 2016 Sponsorship Turnament Golf Charity PPBI 2016 Sponsorship for the Tournament Golf Charity PPBI 2016
20 Mei	Undangan Memberikan Pemahaman Mengenai Nilai Budaya Korporasi Invitation for Explaining the Value of Corporate Culture
23 Mei	Penyelesaian Iuran DSN MUI Settlement of DSN MUI Contribution Menghadiri International Award for Excellence & Leadership 2016 Attending International Award for Excellence & Leadership 2016 Penyampaian draft Risalah Rapat Direksi & Dewan Komisaris tgl 28 April 2016 Submission of drafted Minutes of Meeting of Board of Directors & Board of Commissioners dated 28 April 2016

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
24 Mei	Permohonan Ijin Prinsip Outing Pegawai Tahun 2016 dari Panitia Outing Internal Applying for Permit for Employee Outing in 2016 from Internal Outing Committee
27 Mei	Penyampaian Buku Executive Summary Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2015 & Laporan Akhir Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2015 Submission of Executive Summary Book of Customer Satisfaction Survey 2015 & Final Report of Customer Satisfaction Survey 2015
31 Mei	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tanggal 23 Mei dan tanggal 30 Mei 2016 Preparation of Board of Directors' Minutes of Meeting of May 23 and May 30, 2016 Sponsorship Rp. 50 juta untuk "1st North Sumatera International Choir Competition 2016" Sponsorship Rp. 50 million for "1st North Sumatera International Choir Competition 2016"

JUNI | JUNE

2 Juni	Memorandum No.52/Sekper/VI/2016 Perihal Pengadaan Mobil ambulance sebagai CSR Nasional Re Memorandum No.52/Sekper /VI/ 2016 concerning Procurement of ambulance Car as Nasional Re CSR Menghadiri Best Reinsurance 2016 Award versi Media Asuransi Attending Best Reinsurance 2016 Award version Media Asuransi
6 Juni	Pembuatan surat No:329/DIR/NR/VI/2016 perihal Perpanjangan Domisili Perusahaan Establishment of letter No: 329 / DIR / NR / VI / 2016 regarding Renewal of Company Domicile
7 Juni	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 6 Juni 2016 Preparation of Board of Directors' Minute of Meeting of June 6, 2016 Proposal Penyelenggaraan HUT Nasional Re tgl 22 Agustus 2016 Proposal of Nasional Re Anniversary event on August 22, 2016
8 Juni	Perihal Proposal Bantuan Dana dan bingkisan ramadhan dari DPP. Yaskat Proposal for Funding Assistance and Ramadhan Gift for DPP. Yaskat
10 Juni	Pembuatan Risalah Rapat Kepala Divisi tgl 19 Mei 2016 Making Minutes of Head of Division Meeting dated May 19, 2016
15 Juni	Distribusi Risalah Rapat Direksi tgl 6 Juni 2016 Distribution of Minutes of Board of Directors Meeting on 6 June 2016
17 Juni	Pembuatan surat No:399/DIR/NR/VI/2016 perihal Permohonan Menjual/Menghapus Aset Bergerak Perusahaan Making of Letter No: 399/DIR/NR/VI/2016 concerning Application to Sell / write off the Company's Movable Asset
27 Juni	Registrasi Annual Report Award 2015 Registering for Annual Report Award 2015 Pembuatan Addendum Surat Keputusan Direksi Nasre No: 12/KEP/DIR/NR/2016 Making Addendum of Decree of Director Nasre No: 12 / KEP / DIR / NR / 2016
28 Juni	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tanggal 27 Juni 2016 Preparation of Minutes of Board of Directors' Meeting dated June 27, 2016 Pembuatan surat No: 422/DIR/NR/VI/2016 tentang Tanggapan atas Surat No. 052 kepada PT FARM The making of letter No: 422 / DIR / NR / VI / 2016 concerning Response to Letter No. 052 to PT FARM
29 Juni	Undangan Buka Puasa tanggal 30 Juni 2016 Fast Breaking Invitation to be held on June 30, 2016 Menghadiri Best Insurance 2016 Award versi Majalah Investor Attending Best Insurance 2016 Award by Investor Magazine
30 Juni	Upload Annual Report 2016 pada website perusahaan Uploading Annual Report 2016 on company website Penyelenggaraan Sekretariat IPR Implementation of IPR Secretariat

JULI | JULY

1 Juli	Proses Sponsorship HUT ACA ACA Anniversary Sponsorship process
11 Juli	Proposal Iklan Kemitraan HUT Nasional Re dan Pembuatan surat No. 455/DIR/NR/VII/2016 tentang Iklan Kemitraan HUT Nasional Re Proposals for Partnership Advertising for Anniversary Nasional Re and Making letter no. 455 / DIR / NR / VII / 2016 on Partnership Advertising for Nasional Re Anniversary

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
12 Juli	Sponsorship HUT ke 29 PT Asuransi Bhakti Bayangkara Sponsorship for the 29th anniversary of PT Asuransi Bhakti Bayangkara
13 Juli	Pembuatan surat No: 456/DIR/NR/VII/2016 tentang Pernyataan Direktur Utama Nasional Re Making of letter No: 456 / DIR / NR / VII / 2016 regarding Statement of President Director of Nasional Re Pembuatan surat No: 457/DIR/NR/VII/2016 tentang Pengunduran Diri Direktur Utama Nasional Re Making letter No: 457 / DIR / NR / VII / 2016 on Resignation of President Director of Nasional Re
14 Juli	Proses Sponsorship Outing Divisi Reasuransi Asei Processing the Sponsorship for Outing of Asei Reinsurance Division Proses Iklan Kemitraan HUT ACA Rp35.000.000 Partners Ads Processing for ACA Anniversary worth Rp35,000,000
15 Juli	Laporan Self Assessment Edukasi dan Perlindungan Konsumen Self Assessment Education and Consumer Protection Report Laporan Self Assessment Pelayanan dan Penyelesaian Keluhan Pelanggan melalui PEDULI.OJK.GO.ID Self Assessment Report of Customer Service and Complaints Settlement through PEDULI.OJK.GO.ID
18 Juli	RUPSLB tentang Pemberhentian Direktur Utama Nasional Re EGMS about Dismissal of President Director of Nasional Re Penyampaian Laporan Q1 dan Q2 tahun 2016 kepada AAUI (online) Submission of Q1 and Q2 Report 2016 to AAUI (online)
19 Juli	Penyampaian surat No: 456/DIR/NR/VII/2016 tentang Pengunduran Diri Direktur Utama Nasional Re Submission of letter No: 456 / DIR / NR / VII / 2016 on Resignation of President Director of Nasional Re Pemberitahuan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi (Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan & SDM) kepada Mitra Usaha Notice of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors (Caretaker President Director and Director of Finance & HR) to Business Partners Sponsorship Lucky Draw untuk Binagriya Rp. 16 juta Sponsorship Lucky Draw for Binagriya Rp. 16 million
20 Juli	Proposal Pelaksanaan Turnamen Catur Nasional Re ke-8 Proposal for the implementation of the 8th Nasional Re Chess Tournament
21 Juli	Sponsorship MES Premier Charity Golf Tournament Rp75 juta Sponsorship MES Premier Charity Golf Tournament amounting to Rp75 million
29 Juli	Sponsorship Turnamen Golf ISEI tahun 2015 Sponsorship ISEI Golf Tournament 2015
AGUSTUS AUGUST	
2 Agustus	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 1 Agustus 2016 Preparation of Minutes of Meeting of Board of Directors dated 1 August 2016 Iklan Kemitraan HUT Ke-60 Asuransi Ramayana Rp58,5 juta Partnership Ads for the 60th Anniversary of Ramayana Insurance amounting to Rp58.5 million Pembuatan Surat No: 505/DIR/NR/VIII/2016 perihal Gratitute Making of Letter No: 505 / DIR / NR / VIII / 2016 regarding Gratitude Update rating perusahaan oleh Fitch Company update by Fitch
8 Agustus	Pembuatan draft Risalah Rapat Direksi tgl 8 Agustus 2016 Preparation of draft of Minutes of Board of Directors Meeting dated August 8, 2016 Sponsorship Finance & Accounting Net Working AAUI Rp5 juta Sponsorship Finance & Accounting Net Working AAUI amounting to Rp5 million
9 Agustus	Pelaksanaan CSR Ke Yayasan Kanker Anak Kasih Indonesia Implementation of CSR to Cancer Foundation Anak Kasih Indonesia Pengisian data untuk Reasuransi Syariah dalam rangka nominasi Best Syariah Award Completion of data for Sharia Reinsurance in the framework of Best Syariah Award nomination
19 Agustus	Pembuatan surat No. 562/DIR/NR/VIII/2016 tentang Plt. Direktur Utama dan Direktur Keuangan & SDM kepada OJK Making letter no. 562 / DIR / NR / VIII / 2016 concerning Caretaker President Director and Director of Finance & HR to OJK

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
22 Agustus	<p>Pelaksanaan CSR Nasional Re Rumah Anak Yatim Rawasari Implementation of Nasional Re CSR to Rumah Yatim Anak Rawasari (Orphanage)</p> <p>Pelaksanaan HUT Nasional Re Ke-22 Implementation of the 22nd Nasional Re Anniversary</p> <p>Pelaksanaan CSR Nasional Re ke Yayasan Thalassaemia Rp100 juta Implementation of Nasional Re CSR to Thalassemia Foundation amounting to Rp100 million</p>
23 Agustus	<p>Perihal surat OJK No:05-733/NB/211/2016 tgl 1 Agustus 2016 tentang Pengisian Self Assesment Edukasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2016 Letter OJK No: 05-733 / NB / 211/2016 dated August 1, 2016 on Filling Self Assessment Education and Consumer Protection 2016</p>
25 Agustus	<p>Penyerahan Ambulance dalam rangka CSR dengan Yayasan Masjid Al Makmur Cikini Submission of Ambulance as CSR for Al Makmur Cikini Mosque Foundation</p> <p>Berita Acara/ Pelaksanaan CSR Ke Masjid Al' Makmur Cikini (1 unit ambulance) Minutes of Implementation of CSR to Masjid Al 'Makmur Cikini (1 unit ambulance)</p>
26 Agustus	<p>Pengkinian Data untuk PT Batavia Prosperindo A.M Data Updating for PT Batavia Prosperindo A.M</p>
28 Agustus	<p>Pelaksanaan Turnamen Nasional Re Golf Plus Implementation of the National Tournament Re Golf Plus</p>
30 Agustus	<p>Pembuatan surat No. 594/DIR/NR/VIII/2016 tentang Invoice Sponsorship MES kepada Askrindo dan Askrindo Syariah Making letter no. 594 / DIR / NR / VIII / 2016 concerning MES Invoice Sponsorship to Askrindo and Askrindo Syariah</p>
SEPTEMBER SEPTEMBER	
2 September	<p>CSR berupa Sponsorship (Gunung Salak) paket Silver Rp25 juta CSR in the form of Sponsorship (Mount Salak) Silver package Rp25 million</p>
3 September	<p>Pelaksanaan Turnamen Mancing Nasional Re tahun 2016 Implementation of the National Fishing Tournament Re 2016</p>
5 September	<p>Sponsorship Agenda Kerja Askrindo Rp12 juta kepada Koperasi Askrindo Sponsorship for Askrindo Work Agenda of Rp12 million to Askrindo Cooperative</p>
6 September	<p>Draft risalah rapat direksi tgl 5 September 2016 Draft of minutes of Board of Directors' meeting on September 5, 2016</p>
8 September	<p>Proposal 2nd Aspan Insurance Summit Proposal of 2nd Aspan Insurance Summit</p> <p>Proses Sponsorship Rp7 juta untuk Family Gathering FLRe dengan mitra usaha Processing Sponsorship of Rp7 million for FLRe Family Gathering with business partners</p>
13 September	<p>Pembuatan Kalendar Nasional Re tahun 2017 The Making of National Re Calendar 2017</p> <p>Pembuatan surat No. 626/DIR/NR/IX/2016 tentang Undangan RUPSLB perihal Penarikan Dividen Nasional Re Tahun Buku 2015 Making letter no. 626 / DIR / NR / IX / 2016 regarding the EGMS Invitation concerning Withdrawal of Nasional Re Dividend for the Book Year 2015</p>
14 September	<p>Laporan Akhir Kegiatan Iklan Kemitraan HUT Nasional Re dari CAD Final Report of joint Advertisement for Nasional Re Anniversary from CAD</p>
16 September	<p>Sponsor Iklan Bersama HUT ke-2 Jamkrindo Syariah Rp5 juta Sponsorship joint Advertisement for the 2nd Anniversary of Jamkrindo Syariah Rp5 million</p>
21 September	<p>Iklan Kemitraan Asuransi Asei Rp13 juta Join ads for Asei Insurance Rp13 million</p>
22 September	<p>Pembuatan Risalah Rapat Direksi & Dewan Komisaris tgl 10 Agustus 2016 Preparation of Minutes of Meeting of Board of Directors & Board of Commissioners dated August 10, 2016</p> <p>Iklan Bersama Indonesia Re Rp26 juta Joint Ads Indonesia Re Rp26 million</p>
23 - 25 Sept	<p>Pelaksanaan Outing Pegawai Nasional Re Ke Sumatera Barat 2016 Implementation of Nasional Re Employee Outing to West Sumatera 2016</p>

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
28 September	RUPSLB tentang Penetapan Penarikan Dividen Dari Laba Nasional Re Tahun Buku 2015 EGMS regarding Stipulation of Dividend Withdrawal from Nasional Re Profit of Book Year 2015
29 September	Menghadiri Penyerahan Award Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2016 versi Warta Ekonomi Attending Award of Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2016 Warta Ekonomi version
30 September	Penyelenggaraan Sekretariat IPR Implementation of IPR Secretariat
OKTOBER OCTOBER	
3 Oktober	Sponsorship Rapat Umum Anggota APPARINDO Sponsorship of APPARINDO General Meeting
5 Oktober	Penyampaian Risalah Rapat Direksi tgl 3 Oktober 2016 Submission of Minutes of Meeting of Board of Directors dated 3 October 2016
10 Oktober	CSR Mushola AL-Ikhlas Rp. 10 juta CSR Mushola AL-Ikhlas Rp. 10 million
	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Training Aktuaris tgl 26 Mei 2016 Submission of Accountability Report on Actuarial Training on May 26, 2016
12 Oktober	Sponsorship Insurance Day Rp. 30 juta Sponsorship Insurance Day Rp. 30 million
18 Oktober	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 17 Oktober 2016 The preparation of the Minutes of the Board of Directors' Meeting of 17 October 2016
	Sponsorship Media Asuransi - Seminar Insurance outlook 2017 Sponsorship Media Asuransi - Seminar Insurance outlook 2017
19 Oktober	Proses Sponsorship China Taiping Insurance Processing Sponsorship for China Taiping Insurance
21 Oktober	Proposal Iklan Bersama HUT PT Asuransi Bumida Join ads Proposal of PT Asuransi Bumida Anniversary
	Proposal Iklan Bersama HUT PT Asuransi Jasaraharja Putera Rp12 juta Join ads Proposal of PT Asuransi Jasaraharja Putera Rp12 million
24 Oktober	Penyampaian surat OJK No. S-991/NB.211/2016 tgl 19 Oktober 2016 Submission of letter OJK No. S-991 / NB.211 / 2016 dated October 19, 2016
NOVEMBER NOVEMBER	
1 November	Sponsorship ASEAN Insurance Summit 2016 senilai USD 2.500 Sponsorship of ASEAN Insurance Summit 2016 worth USD 2,500
2 November	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 31 Oktober 2016 Making the Minutes of the Board of Directors' Meeting on 31 October 2016
	Pembuatan SK No:48/KEP/DIR/XI/2016 tentang Pembentukan Tim KPKU Nasional Re Making Decree No: 48 / KEP / DIR / XI / 2016 on the Establishment of Nasional Re Counterpart Team of Criteria for Excellence Performance
3 November	Sponsorship untuk Bosowa Insurance ke 17 berupa 2 unit TV LED 32 inch Sponsorship for Bosowa Insurance to 17 units of 2 LED TVs 32 inch
	Penyelenggaraan Sekretariat IPR bersama Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Implementation of IPR Secretariat with Head of Finance & Accounting Division
4 November	Sponsorship TV LED 40-50 Rp. 5-10 juta untuk PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Sponsorship LED TV 40-50 Rp. 5-10 million for PT Asuransi Tugu Kresna Pratama

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
7 November	<p>Sponsorship Iklan bersama HUT PT Berdikari Insurance Rp14 juta Ad Sponsorship with PT Berdikari Insurance Anniversary Rp14 million</p> <p>Registrasi Peserta Asean Insurance Summit 2016 Registration of Asean Insurance Summit 2016</p> <p>Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 7 November 2016 Preparation of Minutes of Board of Directors' Meeting dated November 7, 2016</p> <p>Memo No.100/Sekper/X/2016 tentang Seragam Nasional Re tgl 8 November 2016 Memo No.100 / Sekper / X / 2016 on Nasional Re Uniforms on 8 November 2016</p> <p>Memo 101/Sekper/XI/2016 tentang Tanggapan Atas Kontrak Kerja Sama Memo 101 / Sekper / XI / 2016 on Responses to Cooperation Contracts</p>
8 November	<p>Memo 102/Sekper/XI/2016 tentang Optimalisasi Jasa Konsultan Hukum Memo 102 / Sekper / XI / 2016 on Optimization of Legal Consultant Services</p> <p>Pembuatan surat No: 741/DIR/NR/XI/2016 perihal Permohonan Sewa Sebagian Kecil Ruang Kantor Askrindo Cab. Bandung Making of letter No: 741 / DIR / NR / XI / 2016 concerning Application of Lease of a Small Part Office Space Askrindo Bandung Branch</p>
10 November	<p>Memo No:103/Sekper/XI/2016 tentang Edaran AAJI tentang Pemblokiran Akun Terduga Terorisme Memo No: 103 / Sekper / XI / 2016 regarding AAJI Circular on Block Account Suspected Terrorism</p>
11 November	<p>Penyampaian Laporan Q3 tahun 2016 kepada AAUI (online) Submission of Q3 Report 2016 to AAUI (online)</p>
15 November	<p>Undangan Insurance Outlook 2017 dari Media Asuransi Invitation to Insurance Outlook 2017 from Media Insurance</p>
17 November	<p>Penyampaian draft presentasi tgl 25 Nov 2016 dalam rangka Company Visit oleh mahasiswa STMA Trisakti Submission of draft presentation on 25 Nov 2016 in the framework of Company Visit by STMA Trisakti students</p>
21 November	<p>Pembuatan SK No:50/KEP/DIR/XI/2016 tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Pelanggan Nasional Re Making Decree No: 50 / KEP / DIR / XI / 2016 on Establishing a Nasional Re Customer Satisfaction Survey Team</p> <p>Sponsorship HUT JP (Family gathering) Lucky draw 1 Unit motor honda beat Rp15 juta Sponsorship for JP Anniversary (Family gathering) Lucky draw 1 Unit Honda beat motorcycle Rp15 million</p>
25 November	<p>Sponsorship HUT Askrida lucky draw 1 unit motor honda beat & TV LED 50 inch Sponsorship of Askrida Anniversary lucky draw 1 unit Honda beat motor & 50 inch LED TV</p> <p>Sponsorship Employee Gathering PT Eka Lloyd TV 22 inch Sponsorship for Employee Gathering PT Eka Lloyd TV 22 inch</p>
28 November	<p>Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Rapat IPR tgl 4 Desember 2016 Creation of Budget Accountability Report IPR Meeting on 4 December 2016</p> <p>Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 28 November 2016 Making Minutes of Board of Directors' Meeting on 28 November 2016</p>
30 November	<p>Pembuatan surat no. 794/DIR/NR/XI/2016 perihal Dana IPR kepada Marein, Tugu Re dan Indonesia Re Making letter no. 794 / DIR / NR / XI / 2016 concerning IPR fund to Marein, Tugu Re and Indonesia Re</p>
DESEMBER DECEMBER	
6 Desember	<p>Sponsorship Insurance Friendly Golf tournament & Gathering tahun 2016 Rp. 30 juta Sponsorship for Insurance Friendly Golf tournament & Gathering 2016 Rp. 30 million</p>
7 Desember	<p>Sponsorship APARI Turnamen Golf 2016 Rp. 10 juta Sponsorship for APARI Golf Tournament 2016 Rp. 10 million</p>
9 Desember	<p>Risalah Rapat Dewan Komisaris tgl 16 Nov 2016 Minutes of Board of Commissioners' Meeting dated 16 Nov 2016</p> <p>Sponsorship Perayaan Festival Maulid Internasional Rp15 juta Sponsorship for International Maulid Festival Celebration Rp15 million</p> <p>Penyampaian Risalah Rapat Kadiv tgl 5 Des 2016 Submission of Minutes of the Kadiv Meeting dated 5 Dec 2016</p>

TANGGAL DATE	KETERANGAN / DESCRIPTION
13 Desember	Pembuatan Addendum SK No:48/KEP/DIR/XI/2016 tentang Pembentukan Tim KPKU Nasional Re Making Addendum of Decree No: 48 / KEP / DIR / XI / 2016 on the Establishment of Nasional Re Counterpart Team of Criteria for Excellence Performance Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 13 Desember 2016 Creating Minutes of Board of Directors' Meeting on 13 December 2016 Sponsorship Seminar Gathering Member AASI Rp15 juta Sponsorship for Seminar Gathering Member AASI Rp15 million
16 Desember	Sponsorship Iklan bersama HUT Maipark Rp. 13 juta Sponsorship Ads with HUT Maipark Rp. 13 million
19 Desember	Sponsorship Iklan Bersama HUT Jiwasraya Rp6,500.000 Joint Ads for the Anniversary Jiwasraya Rp6,500,000 Menghadiri rapat PRN di Indonesia Re Attending PRN meeting in Indonesia Re
20 Desember	Proses luran Anggota Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) tahun 2017 Processing Membership fee in the Indonesian Mediation and Arbitration Board (BMAI) in 2017 Menghadiri rapat PRN di Nasional Re Attending PRN meeting at Nasional Re
22 Desember	Sponsorship Iklan Bersama PT Asuransi Reliance Indonesia Rp14 juta Joint Sponsorship for PT Asurasnsi Reliance Indonesia Rp14 million
23 Desember	RUPSLB tentang Penetapan Plt. Direktur Utama EGMS about Appointment of Caretaker President Director Menghadiri rapat PRN di Indonesia Re Attending PRN meeting in Indonesia Re
27 Desember	CSR Rp. 25 juta untuk perbaikan jalan – Tangerang CSR of Rp. 25 million for road repairs - Tangerang
28 Desember	Pembuatan Risalah Rapat Direksi tgl 27 Desember 2016 Preparation of Minutes of Board of Directors Meeting on 27 December 2016 Sponsorship PT As Bumiputera Rp15 juta Sponsorship for PT Asuransi Bumiputera Rp15 million Pembuatan SK Direksi No. 54/KEP/DIR/XII/2016 tentang Komite Bussines Continuty Management Nasional Re Preparation of Directors Decree No. 54 / KEP / DIR / XII / 2016 on the Bussines Continuty Management Committee of Nasional Re
30 Desember	Penyelenggaraan Sekretariat IPR Implementation of IPR Secretariat

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk membantu kelancaran tugasnya, Direksi dibantu oleh sejumlah komite yaitu:

Komite Penyelesaian Klaim

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Penyelesaian Klaim bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan penyelesaian klaim yang disampaikan oleh Divisi Reasuransi Jiwa, Divisi Reasuransi Syariah, dan Divisi Klaim dalam rangka penyelesaian klaim.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To help the Board of Directors in discharging their duties, a number of Committees are established, namely:

Claims Settlement Committee

Duties and Responsibilities

Claims Settlement Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposed settlement of the claims submitted by the Life Reinsurance Division, Sharia Reinsurance Division and Claims Division for the settlement of claims.

Melakukan *review* terhadap setiap usulan penyelesaian klaim yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan penyelesaian klaim yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

Dalam hal Anggota Komite Penyelesaian Klaim tidak berada di tempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi Anggota Komite Penyelesaian Klaim dapat langsung disampaikan kepada Direksi.

Conducting review of any proposed settlement of claims in accordance with the authority and provisions of the settlement of claim which is the authority of the Board of Directors, based on common transaction limits and with reference to the standard operation procedures.

The Committee shall accomplish the duties in no later than 2 (two) working days after the proposal is received completely.

In the case that the Claims Settlement Committee Member is not in place due to outside task, leave or absence due to any reason, at least 2 (two) recommendations of the Claims Settlement Committee Member can be directly submitted to the Board of Directors.

Susunan Pengurus

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Aviantono Yudihariadi	Koordinator Coordinator
2.	Noeman Tohepaly	Anggota Member
3.	R. Arya Sidharta	Anggota Member

Composition of the Claims Settlement Committee

Komite Akseptasi Underwriting

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Akseptasi *Underwriting* bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan akseptasi khusus yang disampaikan oleh Divisi *Underwriting Facultative*, Divisi *Treaty* dan Retrosesi, Divisi Reasuransi Jiwa dan Divisi Reasuransi Syariah dalam rangka memutuskan akseptasi yang akan dilakukan.

Selain itu juga bertugas melakukan review terhadap setiap usulan akseptasi yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan akseptasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

Underwriting Acceptance Committee

Duties and Responsibilities

The Underwriting Acceptance Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors on the results of the analysis on the proposal of specific acceptances submitted by the Facultative Division, Division of Treaty and Retrocession, Division of Life Reinsurance and Sharia Reinsurance Division in order to decide on the acceptance policy.

The committee is also assigned to review each proposal on acceptances in accordance with the authority and provisions of acceptances which are the authority of the Board of Directors, based on the limits of common transaction and with reference to the standards and procedures for specified operation.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely.

Susunan Pengurus

Composition

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Sukmo Prayogo	Koordinator Coordinator
2.	R. Joko Slamet P.	Anggota Member
3.	Mulkan Lubis	Anggota Member

Komite Kebijakan Investasi

Investment Policy Committee

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan arahan investasi perusahaan.

Duties and Responsibilities

The Investment policy Committee is responsible for assisting BOD in formulating the policy and directive for the Company's investment.

Membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan.

Assisting BOD in monitoring the execution of investment policy and directive.

Melakukan kebijakan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan terhadap pelaksanaan kebijakan dan arahan investasi yang telah ditetapkan.

Performing a periodic evaluation policy every 3 (three) months on the implementation of policies and directive of investment.

Susunan Pengurus

Composition

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	M. Shaifie Zein	Koordinator Coordinator
2.	Rusdianto	Anggota Member
3.	Andrie Prasetyo	Anggota Member
4.	Y. Hermawan W.	Anggota Member

Komite Investasi

Investment Committee

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang disampaikan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi dalam rangka memutuskan pelaksanaan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi. Melakukan *review* terhadap setiap usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada pedoman investasi yang ditetapkan.

Duties and Responsibilities

The Investment Committee is in charge of providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposal of placement, extension or withdrawal of investment submitted by the Division of Finance and Accounting in order to decide the implementation of the placement, extension or withdrawal of investment . Conducting review on each of proposal of placement, extension or withdrawal is the authority of the Board of Directors, based on the common transaction limits and with reference to the investment guidelines.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap. Dalam hal Anggota Komite Investasi tidak berada ditempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang kurangnya 2 (dua) rekomendasi Anggota Komite Investasi dapat langsung disampaikan kepada Direksi.

Susunan Pengurus

No.	Nama Anggota Komite	Jabatan Komite
1.	M. Shaife Zein	Ketua
2.	Rusdianto	Anggota
3.	Faried Susanto	Anggota
4.	Andrie Prasetyo	Anggota
5.	Ari Priasto	Anggota

Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu manajemen dalam menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan.

Susunan Pengurus

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	M. Shaife Zein	Ketua Chief
2.	Aviantoro	Anggota Member
3.	Yuse Nuryuliasari	Anggota Member
4.	R. Arya Sidharta	Anggota Member
5.	Bramantyo	Anggota Member

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Struktur dan Kedudukan SPI

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala divisi dan strukturnya berada langsung di bawah Direktur Utama. Jumlah pegawai SPI posisi per 31 Desember 2016 ada 7 (tujuh) orang termasuk Kepala SPI, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely. In the event that a member of the Investment Committee is not in place due to business trip, on leave or unable to attend for any reason, then at least 2 (two) recommendations of Investment Committee Members can be submitted directly to the Board of Directors.

Composition

Risk Management Committee

Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee is responsible for assisting management in handling possible risks in the company.

Composition

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

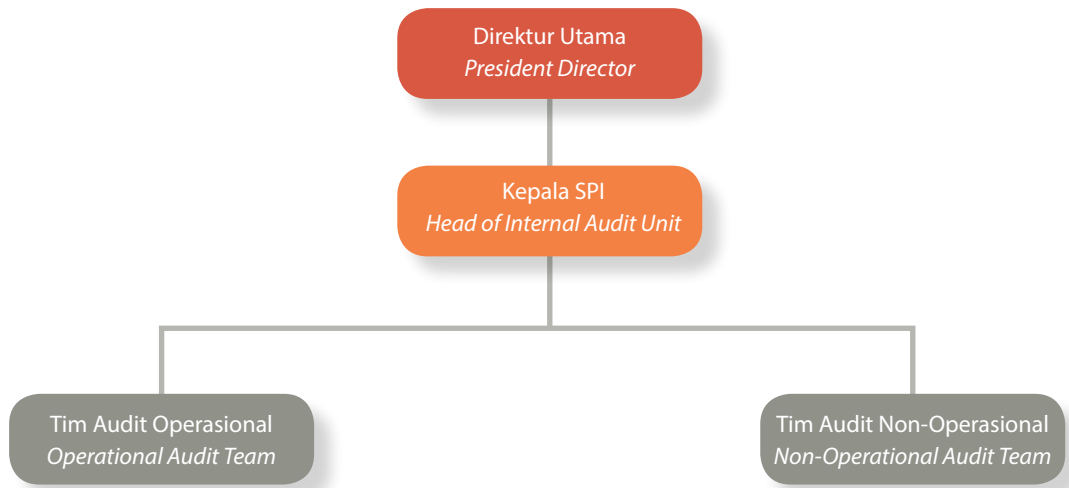
Structure and Position of IAU

Internal Audit Unit (IAU) is chaired by a head of division who reports directly to the President Director. The number of employees of the IAU, as of December 31, 2016 was 7 (seven) members, including the Head of Internal Audit, with a variety of educational backgrounds.

Kepala SPI sesuai SK Direksi No. 27/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 terhitung per 1 Juli 2012 dijabat oleh Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, *Chartered Accountant*. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam SPI (*Internal Audit Charter*) seorang kepala SPI harus memenuhi kualifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 diutamakan jurusan akuntansi, memiliki sertifikasi gelar profesi dan/atau berpengalaman di bidang internal audit serta memiliki pengetahuan di bidang perasuransian.
2. Apabila kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka Kepala SPI harus memiliki pengalaman di bidang operasional perusahaan.

Sesuai Piagam SPI disebutkan bahwa tujuan SPI adalah meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional, serta meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam struktur organisasi perusahaan, unit SPI digambarkan sebagai berikut:



Wewenang SPI

Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya, Kepala dan Staf SPI diberi wewenang penuh untuk:

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang lingkup audit dan mengaplikasikan semua teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.

Based on BOD Decree No.27/KEP/DIR/VI/2012, dated June 29, 2012, IAU is chaired by Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, Chartered Accountant, CRMP In accordance with the provisions set forth in the Internal Audit Charter, Head of IAU must meet the qualifications as follows:

1. Possessing a minimum educational background of Bachelor Degree preferably majoring in accounting, professional certification and/or experience in the sector of internal auditing, as well as having knowledge of insurance.
2. If the said requirement is not met, then the Head of Internal Audit should have experience in the areas of company operations.

As stipulated in its Charter, IAU's goal is to increase the value and improve operational performance, as well as render effective risk management and Good Corporate Governance. In the organizational structure of the company, IAU is described as follows:

The Authority of IAU

In discharging their duties and obligations, the Head and Staff of IAU are fully authorized to:

1. Allocate resources, scheduling, choose the object of inspection, define the scope of audit and apply all the techniques deemed necessary to achieve the objectives of the audit.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki akses tanpa batas terhadap semua fungsi, catatan, harta milik (asset) dan pegawai. 3. Memiliki akses langsung untuk kapan saja berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan <i>auditor</i> eksternal (Kantor Akuntan Publik (KAP)) / regulator. 5. Memperoleh data dan penjelasan terkait dengan tugasnya dari semua satuan kerja yang diaudit, dan dapat meminta jasa bantuan lainnya dari narasumber professional. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Have unlimited access to all functions, records, property (assets) and employee. 3. Have a direct access to communicate with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee, at any time. 4. Coordinate its activities with the activities of the external auditors of Public Accounting Firm (KAP)/regulator. 5. Obtain the data and explanations related to their duties from all units to be audited and may request other services from professional sources. |
|---|--|

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana *audit internal* tahunan (Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)).
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,
- c. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, manajemen risiko dan kegiatan perusahaan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua unit (*auditee*).
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SPI.
- i. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) – Perihal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016, laporan kegiatan Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kerja Pengawasan:
2. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut
3. Realisasi Pendidikan
4. *In House Training* (Internal SPI)

Duties and Responsibilities

- a. Prepare and implement annual internal audit plan (Annual Audit Work Program (PKAT)).
- b. Test and evaluate the implementation and internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy.
- c. Conduct audit and assess the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, risk management and other corporate activities.
- d. Provide suggestions for improvements and objective information about the activities to be audited, on all units (auditee).
- e. Make the audit report and submit a follow-up report on the implementation of the findings and improvements that have been suggested.
- f. Monitor, analyze and report the implementation of the follow-up of findings and improvements that have been suggested.
- g. Work closely with the Audit Committee.
- h. Develop a program to evaluate the quality of the Internal Audit activities.
- i. Conduct special audit if deemed necessary.

As stipulated in the Work Plan & Budget (RKAP)- Regarding the Annual Monitoring Work Program (PKPT) 2015, the activities of the Internal Audit Unit are as follows:

1. Planning and Realization of Audit Duties.
2. Planning and Realization of Follow Up
3. Realization of Education
4. In House Training (Internal IAU)

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SPI

Dalam Piagam SPI butir II.2 tentang Organisasi disebutkan bahwa Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Review dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Pada setiap kali akan dimulai suatu audit, auditor wajib mereview dan menilai keadaan sistem pengendalian intern obyek yang diaudit (unit kerja) sebagai dasar:

1. Untuk menentukan luasnya prosedur audit dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan serta penyusunan prosedur audit.
2. Untuk memberikan saran-saran perbaikan/rekomendasi kepada manajemen.
3. Sistem pengendalian intern seperti telah dijelaskan sebelumnya meliputi review atas hal-hal yang menyangkut:
 - Lingkungan Pengendalian
 - Penilaian Risiko
 - Aktivitas Pengendalian
 - Informasi dan Komunikasi
 - Pemantauan.

Tahap-Tahap Review Dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengumpulan data dan informasi
Kumpulkan data mengenai sistem pengendalian intern antara lain dengan jalan mempelajari manual yang ada, mempelajari operasi yang sesungguhnya dan mengadakan wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berkepentingan.
2. Penelaahan
Siapkan catatan tertulis mengenai sistem pengendalian intern melalui media sebagai berikut:
 - 1) Daftar pertanyaan tentang pengendalian intern.
 - 2) Bagan Arus (*Flow-Chart*).

Daftar dilengkapi dengan uraian tertulis (*narrative*). Untuk auditor yang belum biasa menggunakan bagan arus dapat dijalankan sebaliknya, yaitu membuat gambaran garis besar secara tertulis dan kemudian dilengkapi dengan bagan arus.

The Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit

As stipulated In the IAU Charter point II.2 regarding the Organization, Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Review and Assessment of Internal Control Systems

In the beginning of every audit, the auditor shall review and assess the state of the internal control system of the audit object (unit) as a basis:

1. To determine the scope of the audit procedures and the depth of the audit to be performed, as well as the preparation of audit procedures.
2. To provide suggestions for improvement/recommendations to management.
3. The system of internal control, as previously described, includes a review of matters relating to:
 - Control Environment
 - Risk Assessment
 - Control Activity
 - Information and Communication
 - Monitoring

Stages of Review and Assessment of Internal Control Systems.

1. Collecting data and information
Collecting data on the internal control system, among others, by studying the existing manual, learning the actual operations and conducting interview with the officials concerned.
2. Reviewing
Preparing a written record of the internal control system through the media as follows:
 - 1) List the question of internal control.
 - 2) Flow Chart

Auditors who have not been accustomed to using the flow chart can use the other way around, by preparing a written outline and then fitted with a flow chart.



Ketua SPI

Head of Internal Audit Unit

Subagio Istiarno, Kepala SPI/Head of Internal Audit Unit

Lahir di Solo, 4 November 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE Swadaya, Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan pendidikan S2 untuk S2- STIE IPWI, Program Studi Manajemen Keuangan STIE IPWI, Jakarta pada tahun 2000. Beliau juga memperoleh pendidikan profesi yaitu: Akuntan – PPAk Universitas Indonesia (2004) dengan Register Negara No.D- 38.373 tgl 13-7-2004; dan Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Subagio ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan SK Direksi No.10/2012 tanggal 1 Juli 2012.

Subagio Istiarno, born in Solo on November 4, 1962. Graduated with a Bachelor degree in Economics majoring in Accounting from STIE Swadaya, Jakarta in 1994. Graduated with a Master degree for S2-STIE IPWI, Financial Management Program of STIE IPWI, Jakarta in 2000. He also obtained a professional education of: Accountant-PPAk University of Indonesia (2004) with State Registers No.D- 38.373 dated 13-7-2004; and Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Having been appointed as Head of Internal Audit based on the Board of Directors Decree No.10/2012 dated July 1, 2012.

AUDITOR EKSTERNAL

Penunjukan Auditor Eksternal

Sesuai butir 3 keputusan RUPS terhadap laporan tahunan 2015 tanggal 6 Maret 2016 diputuskan bahwa penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk general audit tahun buku 2016 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan KAP yang akan melakukan general audit laporan keuangan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tahun buku 2016.

Berdasarkan surat Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tanggal 15 Mei 2016 perihal penunjukkan KAP SMR sebagai pelaksana audit umum laporan keuangan tahun 2016 PT Askrindo (Persero) dan anak perusahaan disebutkan bahwa KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) telah ditetapkan sebagai pelaksana audit umum laporan keuangan tahun 2016 untuk PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia beserta anak perusahaannya.

Kriteria Penunjukan

Penunjukan KAP Soejatna, Mulyana & Rekan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan telah melalui tahapan proses seleksi yang berdasarkan kriteria berikut:

1. Berpengalaman sebagai auditor lembaga keuangan non-bank.
2. Memahami regulasi lembaga keuangan non-bank di Indonesia, serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Memahami produk asuransi/reasuransi.
4. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Imbalan Jasa

KAP SOEJATNA, MULYANA & REKAN yang ditunjuk oleh Perusahaan telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu. KAP juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperganjikan sebelumnya.

Jumlah imbalan jasa yang diberikan Perusahaan kepada KAP tersebut adalah sebesar Rp122.650.000,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang

EXTERNAL AUDITOR

Appointment of External Auditor

In accordance with the item 3 of the GMS resolutions on the 2015 annual report dated March 6, 2016, it was decided that the appointment of Public Accountant Firm (KAP) for the general audit of fiscal year 2016 will be determined later by taking into account the same KAP that will conduct general audit of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia for the fiscal year 2016.

Based on the letter of the Board of Directors of PT Asuransi Kredit Indonesia dated May 15, 2016 regarding the appointment of KAP SMR as the general auditor of the 2016 financial statements of PT Askrindo (Persero) and its subsidiaries, KAP Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) has been designated as executor of general audit on the 2016 financial report of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia and its subsidiaries.

Criteria for Appointment

The appointment of KAP Soejatna, Mulyana & Rekan, refers to the applicable legislation and has been through stages of selection process based on the following criteria:

1. Experienced as auditor of non-bank financial institutions.
2. Understanding the regulation of non-bank financial institutions in Indonesia, as well as other relevant regulations.
3. Understanding insurance/reinsurance.
4. Experienced and knowledgeable about risk management.

Fees

KAP Soejatna, Mulyana & Partners, appointed by the Company, has submitted the audit results and management letter to the Company in a timely manner. KAP has also committed their work independently and met the criteria agreed beforehand.

Total fee for the KAP services rendered to the Company amounted to Rp122,650,000,- (one hundred twenty two million six hundred fifty thousand rupiah) including VAT at 10% (ten percent) and other related taxes. There are no other

terkait. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan selain jasa *financial auditing*.

services provided in addition to financial auditing services.

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Konsep Pengelolaan Risiko Perusahaan

Situasi lingkungan eksternal dan internal Perusahaan yang mengalami perubahan dengan pesat telah menimbulkan risiko yang semakin kompleks bagi kegiatan usaha Perusahaan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi lingkungan pengendalian, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal.

Bagi Perusahaan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola Perusahaan mengenai kemungkinan kerugian Perusahaan di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Perusahaan, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Perusahaan serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan.

Bagi regulator, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan yang dapat mempengaruhi permodalan Perusahaan dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan atas Perusahaan.

Esensi dan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perusahaan.

Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran dan kompleksitas usaha perasuransian,

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

The Concept Of Enterprise Risk Management

Rapid changes in the Company's external and internal environment pose increasingly complex risks for the Company's operations and hence increases the need for the practice of sound corporate governance (GCG) and the application of risk management which includes the control environment, policies, procedures and risk limits, process of identification, measurement, monitoring, information systems and risk management and internal control systems.

For the Company, the application of risk management increases shareholder's value, provides overview to the management about the possible loss of the Company in the future, improves methods and systematic decision making process based on the availability of information used as the basis for a more accurate measurement of the Company's performance and to assess the risks inherent in the instruments or the Company's business, as well as creates a strong risk management infrastructure in order to improve the competitiveness of the Company.

For regulator, the application of risk management will facilitate an assessment of the potential losses faced by the Company that may affect the Company's capital and as one of the basis of assessment in setting strategy and oversight of the Company's focus.

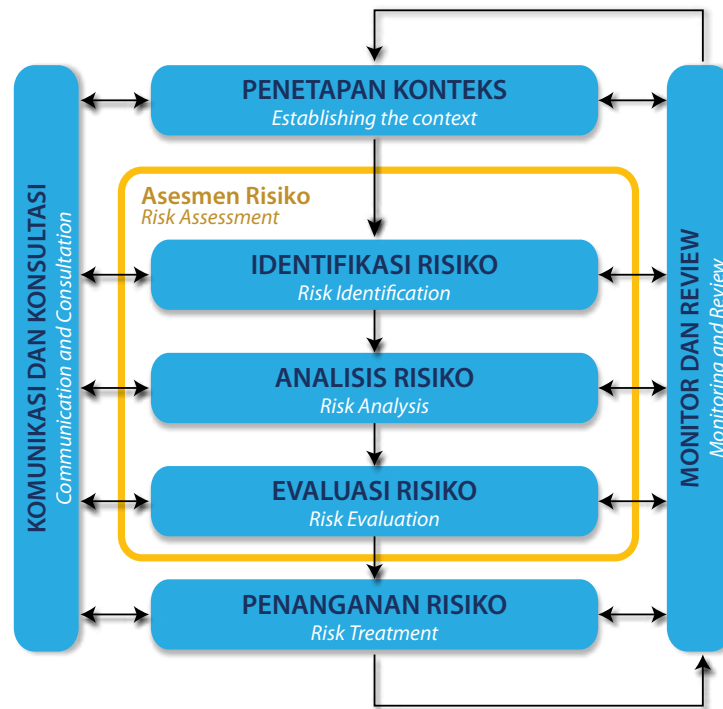
The essence in the implementation of risk management is the adequacy of procedures and methodologies of risk management so that the Company's operations can still be controlled (*manageable*) within the acceptable boundary/limit and is profitable.

However, given the differences in market conditions and the structure, size and complexity of the insurance

maka tidak terdapat sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh perusahaan sehingga setiap perusahaan harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada masing-masing perusahaan. Risiko dalam konteks Perusahaan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif maupun positif terhadap pendapatan dan permodalan Perusahaan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Perusahaan harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang masih mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan meskipun telah dikendalikan (*residual risks*), termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

business, there is no such a thing as the universal system of risk management for all companies so that each company has to develop its risk management system in accordance with the functions and organization. Risk is a potential occurrence, both predictable (*anticipated*) or unexpected (*unanticipated*) which can bring positive or negative impact on the Company's earnings and capital. To be able to apply the risk management process in the early stage, the Company shall accurately identify the risks by studying the existing risk (*inherent risks*) and potential risk arising from the activities of the Company, despite the fact that the control system is in place (*residual risks*), including risk from related companies and other affiliates.





Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Perusahaan perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Perusahaan mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga Perusahaan dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha dimaksud.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan Perusahaan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam Perusahaan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perusahaan melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya.

After accurately identifying the risks, then the Company shall conduct measurement, monitoring and risk control. Risk measurement is intended to enable the Company to calculate the risk exposure inherent in its business activities to predict the impact on capital that should be maintained in order to support the business activities.

Meanwhile, in order to carry out the monitoring of risk, the Company shall conduct an evaluation on the risk exposure, especially the material risks and /or risks that can impact on the Company's capital. Monitoring results, including evaluation on risk exposure, was reported in a timely, accurate and informative manner to be used by the decision-maker, including the required follow-up. Furthermore, based on the monitoring results, the Company mitigates the risks, among others, by additional capital, hedging and other risk mitigation techniques.

Perusahaan telah memastikan bahwa semua potensi risiko Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dimitigasi dampaknya sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan stratejik yang dilakukan dalam suatu proses yang disebut proses *Enterprise Risk Management (ERM) System*.

Kerangka pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan Sistem Informasi Manajemen, pengukuran dan pemantauan risiko, dan berbagai kebijakan, prosedur, limit transaksi, acuan, serta beberapa perangkat bantu pengelolaan risiko lainnya. Kerangka pengelolaan risiko Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sedang dilakukan pembangunannya, yang nantinya akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektifitasnya sesuai standar yang berlaku. Penerapan ERM System dilakukan Perusahaan dipicu oleh kesadaran akan kebutuhan pengelolaan Perusahaan secara lebih baik.

Langkah-langkah Pengelolaan Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko di PT Reasuransi Nasional Indonesia mengadopsi standar *ISO 31000:2009 Risk Management – International Standard*. Di dalam melakukan *assessment*, PT Reasuransi Nasional Indonesia menggunakan metode *Risk and Control Self Assessment (RCSA)* di dalam penilaian risiko dan kontrol perusahaan. Beberapa keunggulan yang menjadi alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *risk awareness* di seluruh perusahaan, karena melibatkan seluruh fungsi dan seluruh *level*.
2. Meningkatkan *risk ownership* bagi mereka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan operasional.
3. Mengintegrasikan sudut pandang dari sisi operasional dan *top management*.
4. Mampu mengeluarkan dan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan kolektif.
5. Terstruktur dan terdokumentasi.
6. Merupakan sebuah metode yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengkaji seluruh risiko dan control perusahaan.

Tahapan Penyusunan ERM System dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko (*risk identification*)

The Company has ensured that the potential risks have been identified, analyzed, evaluated and mitigated, to prevent them from hindering the achievement of its strategic objectives, which was done using Enterprise Risk Management (ERM) system.

The Company's risk management framework includes active supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors, adequate Management Information Systems, risk measurement and monitoring and a variety of policies, procedures, transaction limits, references, as well as several other risk management means. The Company's risk management framework in the long term is stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) construction being carried out, to be evaluated periodically to ensure its effectiveness in accordance with the applicable standards. The application of ERM system is triggered by the awareness of the need to have better management.

Enterprise/Corporate Risk Management Moves

The risk management process at PT Reasuransi Nasional Indonesia adopts the ISO standard 31000:2009 Risk Management-International Standard. PT Reasuransi Nasional Indonesia adopts Risk and Control Self Assessment (RCSA) for assessing risk and control. Some of the advantages of this method are as follows:

1. Increasing risk awareness throughout the Company because it involves all functions and all levels.
2. Increasing risk ownership for those who are responsible for carrying out the operations.
3. Integrating viewpoint of the operational side and top management.
4. Capable of extracting and utilizing the collective knowledge and insights.
5. Structured and documented.
6. Representing a comprehensive method to identify and assess risks and controls throughout the company.

The stages of Drafting the ERM System can be described as follows:

1. Risk identification

2. Analisis risiko (risk analysis) dan evaluasi risiko (risk evaluation)
3. Melakukan penanganan risiko (risk treatment).
4. Melakukan pemantauan risiko (risk monitoring) dan pelaporan risiko (*risk reporting*)

2. Risk analysis and risk evaluation.
3. Risk treatment.
4. Risk monitoring and risk reporting.

Profil Risiko Dan Mitigasi Risiko

Risiko Underwriting

Risiko underwriting adalah risiko kerugian yang timbul karena ketidaksesuaian antara pendapatan *underwriting* dengan beban underwriting. Tergolong dalam risiko ini adalah: *underwriting*, penetapan cadangan (*reserve*), klaim, dan retrosesi (tidak termasuk risiko *default*).

Eksposur risiko Perusahaan terkait risiko *underwriting* dapat disebabkan oleh penetapan harga (*pricing*) yang tidak optimal dan atau karena meningkatnya frekuensi klaim pada tingkat yang tidak wajar atau karena adanya bencana alam luar biasa besar seperti gempa bumi, tsunami dan atau oleh adanya kejadian luar biasa seperti serangan teroris.

Mitigasi Risiko:

1. Melakukan perencanaan dan pemantauan proses *underwriting* yang cermat;
2. Menerapkan penetapan limit risiko maksimum dan eksposur katastrofik maksimum (secara agregat);
3. Penetapan limit kewenangan underwriting per kontrak;
4. Pemilihan dan penilaian risiko dan penetapan harga yang tepat oleh underwriters dengan memperhatikan ketentuan Regulator terkait;
5. Pengembangan pemodelan skenario kerugian (*loss scenario modelling*);
6. Review aktuarial internal oleh tim yang independen;
7. Penetapan dan pemantauan program retrosesi secara optimum.

Risiko Default

Risiko Default adalah risiko kerugian jika pihak lain (*counterparty*) gagal memenuhi kewajibannya atau gagal melaksanakan kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak lain yang dimaksud adalah mitra retrosesi, broker, ceding, mitra kerja investasi dan lain-lain.

Mitigasi Risiko:

1. Proses seleksi dan pemeringkatan ceding dan mitra retrosesi;

Risk Profile And Risk Mitigation

Underwriting Risk

Underwriting risk is the risk of losses arising from mismatch between income and expenses deriving from underwriting. Fallen into this category of risk are: underwriting, determination of reserves, claims and retrocession (not including the risk of default).

The Company's risk exposures related to underwriting risk may result from unoptimal pricing or increased claims frequency at unusual level or due to large natural disasters such as earthquakes, tsunamis and or extraordinary events such as the attack of terrorists.

Risk Mitigation:

1. Planning and monitoring prudent underwriting process;
2. Applying the maximum risk limits and maximum catastrophe exposure (in the aggregate);
3. Defining Underwriting authority limits per contract;
4. Selection and risk assessment and appropriate pricing by the underwriters to the provisions of relevant regulators;
5. Loss scenario modeling development;
6. Internal actuarial review by an independent team;
7. Setting and monitoring retrocession program at its optimum way.

Default Risk

Default risk is the risk of loss if another party (*counterparty*) fails to meet its obligations or fails to carry out such obligations in accordance with predetermined time. Another party here is the retrocession partners, brokers, ceding, investment partners and others.

Risk Mitigation:

1. Selecting and rating the ceding and retrocession partners;

2. Pengembangan profil risiko terkini dari ceding dan mitra retrocesi, dengan memahami tingkat sensitivitas mereka terhadap tekanan faktor-faktor luar biasa;
 3. Pengendalian atas eksposur *default* dengan analisis kemampuan para *counterparty* untuk membayar (memenuhi kewajiban mereka), baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai skenario;
 4. Setiap triwulanan, Direksi memperoleh hasil analisis kinerja kolektabilitas, profitabilitas dan transaksi dengan mitra kerja dalam bentuk laporan *collection ratio*. Apabila perlu, kerjasama dengan mitra kerja harus ditinjau kembali dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah terganggunya kondisi keuangan Perusahaan.
 5. Satuan kerja bagian penagihan melakukan *review* secara triwulanan guna menetapkan atau memuktahirkan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang meliputi klasifikasi eksposur risiko default, dan mencatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsip dokumen terkait kinerja ceding dan mitra kerja.
 6. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi terjadinya konsentrasi risiko dalam portofolio ceding dan transaksi lain berisiko default.
 7. Program penjadwalan kembali pembayaran piutang;
2. Developing current risk profile of the ceding and retrocession partners, by understanding their sensitivities towards pressure from extraordinary factors;
 3. Controlling default exposure by analyzing counterparty ability to pay (their obligations), both historically and in the future, based on historical financial growth and cashflow projections with various scenarios;
 4. Each quarter, the Board of Directors obtain analytical results on collectability, profitability and transactions with partners in the form of collection ratio report. If deemed necessary, the cooperation with partners shall be reviewed and all necessary corrective actions should be taken to prevent disruption of the Company's financial condition.
 5. Collection Unit conducts review on a quarterly basis in order to establish or update the collectibility or quality of transactions, including the default risk exposure and recorded as an integral part of the archive of documents related to the performance of ceding and partners.
 6. Possessing information systems that enables the Board of Directors to identify concentration of risk in the portfolio and other transactions ceding default risk.
 7. Rescheduling debt payment program;

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang muncul karena adanya fluktuasi nilai atau pendapatan dari aset, suku bunga, dan valuta asing atau adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan (*adverse movement*).

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan yakni kegiatan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk saham/obligasi dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga lainnya.

Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan investasi yang jelas, termasuk limit dan prosedur pengambilan keputusan investasi;
2. Pemilihan dan pemeringkatan manajer investasi eksternal (MI); Penerapan manajemen portofolio dengan diversifikasi instrument investasi sesuai ketentuan regulasi dan dalam batas-batas *risk-appetite* perusahaan;

Market Risk

Market risk is the risk arising from the fluctuations in the value of assets or income, interest rates and foreign exchange, or the movement of market variables and the Company's portfolio, which could harm the Company (*adverse movement*).

Market Risk is among others included in the functional activity of the Company in marketable securities including stocks/bonds and investments in money market and participation in other institutions .

Risk Mitigation:

1. Applying clear investment policy, including limits and investment decision-making procedures;
2. Selecting and rating the external investment managers (MI); Applying portfolio management with a diversified investment instruments in accordance with regulations and within the limits of the Company's risk-appetite;

3. Pemantauan pergerakan pasar secara *real-time* dan penetapan *limit cut lost* atas aset-aset yang ditangani sendiri maupun yang ditangani manajer investasi eksternal (MI);
4. Satuan kerja terkait mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar.
5. Melakukan diversifikasi investasi dengan komposisi optimum dalam batas-batas sesuai ketentuan regulasi.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul karena ketidakcukupan sumber daya finansial Perusahaan untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo, antara lain adalah:

- a. Risiko Likuiditas Pasar.
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan sulit untuk menutup posisi tertentu dengan harga pasar sebelumnya karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memungkinkan;
- b. Risiko Likuiditas Pendanaan.
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan tidak memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas *underwriting*, investasi dan penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang (jika suatu waktu Perusahaan menerbitkannya).

Mitigasi Risiko:

1. Memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis mengenai pengelolaan likuiditas. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja terkait atau yang berhubungan dengan pengeluaran/penerimaan kas baik dalam Rupiah maupun dalam valas dan satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia.
2. Memiliki kebijakan likuiditas dan pendanaan yang menetapkan kewenangan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab atas investasi untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan mitra kerja yang dapat dipercaya (*eligible counterpart*).
3. Kebijakan likuiditas juga harus mencakup penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas dan harus mencegah ketergantungan Perusahaan terhadap satu atau beberapa instrumen, *counterparty*, atau segmen pasar tertentu.
4. Satuan kerja keuangan memberi perhatian terhadap arus kas yang tidak terduga dan tidak diharapkan.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that arises due to insufficient financial resources to meet the Company's obligations at maturity, among others are:

- a. Market Liquidity Risk.
The risk arising when the Company finds difficulty in closing a particular position with the previous market price due to the market liquidity conditions that do not allow to;
- b. Funding Liquidity Risk.
The risk arising when the Company fails to obtain certain amount of funds to meet obligations at maturity. Liquidity risk can be attached to underwriting activities, investment and fund placement and financing activities and the issuance of debt securities (should the company issue it).

Risk Mitigation:

1. Having a clear, written policy on the liquidity management, the policy is communicated to all units linked or associated with the expenditure /cash receipts either in Rupiah or foreign currency and unit that manages human resources.
2. Having a liquidity policy and funding that determines the authority assigned to the work units responsible for the investment to determine the market, instruments and transactions with reliable partners (*eligible counterpart*).
3. Liquidity policy should also include the handling of risks of liquidity concentration and should prevent the Company from being dependent on one or more instruments, counterparty, or a particular market segment.
4. Financial work unit gives attention to unpredictable and unexpected cash flows.

5. Penerapan *cost-control* secara efektif di Perusahaan;
6. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas harus dapat menghasilkan berbagai bentuk informasi dan laporan yang akurat dan tepat mengenai kondisi likuiditas, *maturity profile*, dan *projected cash flow* berdasarkan hasil analisis saat ini dan perkiraan yang akan datang.
7. Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan ketat terhadap atas pengelolaan likuiditas karena hal ini sangat penting. Kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya sisi operasional dan finansial Perusahaan namun terutama reputasi Perusahaan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena kegagalan dan kelemahan proses internal, orang, dan sistem di Perusahaan serta adanya peristiwa-peristiwa eksternal yang gagal diantisipasi oleh Perusahaan, termasuk tindak kriminal oleh pihak eksternal, perubahan regulasi yang tidak terantisipasi dengan baik.

Risiko operasional yang dihadapi oleh Nasional Re pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan, seperti kegiatan *underwriting*, investasi, operasional dan layanan pembayaran klaim, *trading*, pendanaan, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan Perusahaan untuk melakukan transaksi yang bernilai tambah. Komponen penting risiko operasional antara lain:

1. Kemampuan kegiatan operasional dipengaruhi oleh adanya kerusakan infra struktur, bencana alam, serta bentuk gangguan teknis lainnya yang dapat menurunkan kemampuan kegiatan operasional Perusahaan;
2. Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar atas kegagalan operasional. Risiko yang ditimbulkan antara lain berkaitan dengan *human error*, rendahnya integritas dan profesionalisme, rendahnya kerjasama dan konflik karyawan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, serta rendahnya budaya pengendalian.
3. Pelaksanaan Transaksi, Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terkait erat dengan risiko penyelesaian

Operational Risk

Operational risk is the risk arising due to failures and weaknesses in internal processes, people and systems in the Company, as well as due to the Company's failure to anticipate external occurrence, including crime committed by external party, unanticipated regulatory changes.

Operational risks were faced by the Nasional Re in each functional activity of the Company, such as underwriting activity, investment, operational and claims payment services, trading, finance, information technology and human resource management.

Operational risk could lead to financial losses, directly or indirectly and the potential of losing opportunity to earn profit due to the incapability of the Company to perform value-added transactions. The essential component of operational risk is listed below:

1. Operating activity capability can be affected by infrastructure damage, natural cataclysm and other forms of technical problems which degrade the corporate operating activity capability.
2. Human Resources, one of the components that gives the largest contribution to the failure of operations. Risks posed among others are related to human error, lack of integrity and professionalism, lack of cooperation and conflict employees, lack of knowledge and skills, as well as low control culture.
3. Execution of transaction, risks related to the execution of transactions are closely related to transaction settlement

transaksi antara lain pembuatan kontrak dan administrasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan (*dispute*).

4. Rekonsiliasi data Akunting, Proses rekonsiliasi data transaksi berperan penting dalam upaya melindungi Perusahaan terhadap risiko kerugian yang disebabkan eksposur keuangan yang tidak atau belum dibukukan.

Mitigasi Risiko:

1. Pelaksanaan *Control Self-Assessment* (CSA) secara teratur oleh para manajer dan karyawan serta tim kerja;
2. Pengembangan kerjasama baik dalam bentuk kemitraan dan atau *outsourcing* dengan pihak lain guna meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam aspek-aspek tertentu yang lemah atau yang bukan merupakan kompetensi utama perusahaan;
3. Pengasuransian aset-aset Perusahaan dengan biaya yang paling *cost-effective*;
4. Pengembangan matriks kebutuhan dan peningkatan kompetensi karyawan dan manajer, sistem, dan proses secara menyeluruh;
5. Penerapan rating perusahaan dari lembaga pemeringkat yang diakui;
6. Peninjauan dan pemuktahiran prosedur (SOP) secara teratur;
7. Pencadangan dana talangan untuk kerugian operasional. Dana talangan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan selebihnya dialihkan ke pihak lain dalam bentuk asuransi.

Risiko Strategik

Risiko Strategik yang dihadapi oleh Nasional Re adalah risiko yang terkait dengan ketepatan strategi bisnis dan kebijakan strategik perusahaan disebabkan adanya perubahan lingkungan eksternal Perusahaan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan social, teknologi, dan lingkungan alam (*nature*).

Mitigasi Risiko:

1. Menetapkan rencana strategik (*corporate plan*) secara tertulis berjangka waktu 5 tahun, mencakup aspek-aspek seperti tujuan usaha, pertumbuhan usaha, pangsa pasar, pendapatan, produk dan aktivitas baru, termasuk alokasi sumber daya untuk melaksanakan kebijakan atau strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

risk, among others, contracting and administration with potential disputes.

4. Accounting data reconciliation, process of reconciliation of transaction data plays an important role in efforts to protect the Company against losses caused by the financial exposure that is not or has not been recorded.

Risk Mitigation

1. Implementing Control Self-Assessment (CSA) on a regular basis, by managers and employees and work teams;
2. Building cooperation in the form of partnerships and or outsourced to external parties in order to increase the ability of the Company in certain aspects, which are not the Company's strength nor its core competencies;
3. Protecting the Company's assets with the most cost effective insurance;
4. Developing the matrix of needs and improvement of the competence of employees and managers, systems and processes as a whole;
5. Implementing corporate rating from recognized rating agencies;
6. Reviewing and updating the procedures (SOP) on a regular basis;
7. Providing allowances for operational losses in accordance with the ability of the Company and the remainder was transferred to another party in the form of insurance.

Strategic Risk

Strategic risk faced by the Nasional Re is the risk associated with the accuracy of the company's business strategy and strategic policies, in coping with the changes in the external environment both now and in the future. External environment encompasses the political environment, economic environment, social environment, technology and the natural environment (*nature*).

Risk Mitigation:

1. Set up a strategic plan (*corporate plan*) in writing for a term of 5 years, covering aspects such as business goals, business growth, market share, revenue, products and activities, including the allocation of resources to implement the policy or strategy to achieve those objectives.

2. Rencana strategik ditetapkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Komisaris. Direksi yang membawahi beberapa aktivitas fungsional yang berbeda harus memastikan bahwa tidak terdapat benturan tujuan dan memastikan bahwa para pejabat dan pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi telah memahami dan melaksanakan rencana strategik tersebut.
 3. Penetapan prosedur dan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau kemajuan dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
 4. Satuan kerja manajemen risiko atau satuan kerja lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola risiko strategik melakukan analisis dan melaporkan laporan aktual dibandingkan dengan target kepada Direksi secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. Dan apabila terjadi hambatan pencapaian target, Perusahaan melakukan Identifikasi faktor-faktor penyebab internal dan eksternal yang menghambat pencapaian tersebut.
 5. Apabila terjadi hambatan karena masalah internal, Perusahaan harus melaksanakan penilaian faktor-faktor tersebut, menyusun rencana tindakan dan melakukan koordinasi secara internal mengenai pelaksanaan tindakan korektif atau penyesuaian target. Dalam hal ini, Direksi terlibat dalam proses penilaian kembali dan penyesuaian target tersebut.
2. The strategic plan is set by the Board of Directors and approved by the Commissioner. The Board of Directors is in charge of several different functional activities to ensure that there is no conflicting goals and ensuring that the Company's officers and employees at every level of the organization understand and implement the strategic plan.
 3. Establish procedures and financial control process that aims to monitor progress towards targets and to ensure that the risks taken are still within tolerable limits.
 4. Risk management unit or other work units which are given the authority and responsibility to manage strategic risk shall perform analysis and report to the Board of Directors the realization compared with the target on a regular basis according to the needs of the Company. Should there be a hindrance in achieving targets, the Company shall Identify the internal and external factors causing that hindrance.
 5. In the event that there is resistance due to internal problems, the Company must carry out an assessment of these factors, develop a plan of action and coordinate internally on the implementation of corrective action or adjustment of the target. In this case, the Board of Directors is engaged in a process of re-assessment and adjustment of the target.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan operasional Perusahaan yang menimbulkan publikasi negatif atau persepsi negatif di antara para stakeholders terhadap Perusahaan. Risiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan volume usaha atau peningkatan biaya kehumasan.

Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan tertulis dan transparan sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepentingan pihak stakeholders dan publik dengan cara mengungkapkan kinerja keuangan Perusahaan, serta jasa dan produk yang ditawarkan, profesionalisme serta etika usaha Perusahaan;
2. Menjaga hubungan baik dengan media dan melakukan pemantauan berita/publikasi yang bersifat negatif di pasar termasuk arus dan jaringan informasi atau berita tersebut;

Reputation Risk

Reputation risk is the risk caused by the Company's operational activities that cause negative publicity or negative perception among the stakeholders of the Company. Reputation risk can lead to a decrease in revenue and business volume or an increase in the cost of public relations.

Risk Mitigation

1. The existence of written and transparent policies in line with the applicable regulations for the interests of stakeholders and the public by making the Company's financial performance, as well as services and products offered, professionalism and ethics of the Company;
2. Maintaining good relations with the media and news monitoring /negative publicity in the market including current news and information network or such;

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perusahaan gagal mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Komitmen dan Peran Aktif Komisaris dan Direksi dalam Manajemen Risiko

Direksi Nasional Re dengan persetujuan Komisaris menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang tercantum di dalam pedoman Manajemen Risiko.

Peran dan tanggung jawab Komisaris, meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;

Compliance Risk

Compliance risk is the risk caused by the Company's failure to comply with or implement laws and regulations and other applicable regulations. In practice compliance risk is inherent in the Company's risk related to legislation and other applicable regulations.

Commitment and Active Role of the Commissioners and Directors in Risk Management

The Board of Directors of Nasional Re with the approval of the Board of Commissioners determines clear authority and responsibility at every level of position, related to risk management in the Company, as stipulated in the Risk Management guidelines.

Roles and responsibilities of the Board of Commissioners, include:

1. Approve and evaluate the risk management policies, conducted at least once a year or more in the event of changes in the factors affecting the Company's business activities significantly;
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors in the implementation of risk management policies mentioned above, at least on a quarterly basis;
3. Evaluate and determine the request or suggestion coming from the Board of Directors relating to transactions or business activities that go beyond the authority of the Board of Directors to decide and hence require approval from the Board of Commissioners.

Roles and responsibilities of the Board of Directors include:

- Formulate policies and strategies for risk management in writing and include the establishment and approval of a comprehensive overall risk limits, per type of risk and per functional activity (operations) of the Company. Formulation of policies and risk management strategies is performed at least once a year or more in the event of a change in the factors affecting the Company's business significantly;

- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku;
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
- Memastikan bahwa satuan kerja manajemen risiko memiliki sumber daya, wibawa, kompetensi dan independensi yang memadai untuk memantau, mengevaluasi dan memvalidasi penerapan proses manajemen risiko oleh satuan-satuan kerja operasional di dalam Perusahaan yang melakukan dan menyelesaikan transaksi-transaksi usaha;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai kebutuhan Perusahaan, untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.
- Be Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by the Company as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on the report submitted by the risk management unit and delivery of accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis;
- Evaluate and decide on transactions exceeding the authority of officials below the level of the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with internal policies and procedures;
- Develop risk management culture at all levels of the organization, among others, including adequate communication to all levels of the organization on the importance of effective internal controls;
- Ensure competency enhancement of human resources related to the implementation of risk management, among others, with education and training programs that are sustainable, especially with regard to risk management systems and processes;
- Ensure that the risk management unit has the resources, authority, competence and independence sufficient to monitor, evaluate and validate the application of risk management processes by operational units within the Company that undertake and complete business transactions;
- Carry out periodic review of the Company's frequency as needed, to ensure:
 - The accuracy of risk assessment methodologies ;
 - Adequacy of risk management information system implementation; and
 - Appropriateness of policies, procedures and risk limits.

Indikator Risiko Kunci

Indikator risiko kunci adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. Penggunaan indikator risiko kunci dalam aktivitas pemantauan risiko dapat memberikan peringatan atau informasi lebih dini kepada manajemen entitas bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. Hal tersebut dapat terwujud karena pemantauan dilakukan untuk fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko, bukan terhadap peristiwa risiko itu sendiri.

Key Risk Indicators

Key risk indicator is a particular event that indicates the occurrence of risk. The use of key risk indicators in risk monitoring activities is to provide an early warning or information to the management about the increasing possibility of a risk event. This can be realized since the monitoring process is focused on events that indicate the occurrence of risk event, not the risk event itself.

Berdasarkan peringatan atau informasi tersebut entitas dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut (jika terjadi).

Di dalam setiap masing-masing risk description yang teridentifikasi di dalam pengelolaan manajemen risiko di Nasional Re memiliki Indikator risiko kunci yang sesuai dengan masing-masing risiko tersebut. Sehingga indicator risiko kunci tersebut akan berperan sebagai suatu sistem peringatan dini (*early warning*).

MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS PERUSAHAAN

Latar belakang dan konsep manajemen kelangsungan bisnis perusahaan

Sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada saat ini, maka kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sudah merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dipungkiri lagi. Berlatar belakang dari hal di atas, maka implementasi Business Continuity Management (BCM) merupakan suatu elemen yang sangat penting, sehingga perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk bertahan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya walaupun mengalami berbagai gangguan operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Implementasi BCM dapat meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam suatu organisasi.

Penerapan BCM pada perusahaan mendapat dukungan dari Top Management, dan dimulai dengan penetapan obyektif, identify kebutuhan resources (minimum), dan target yang akan dicapai. Sesuai dengan obyektif dan target yang sudah ditentukan, dan sejalan dengan hasil proses risk assessment, maka perusahaan dapat menentukan ancaman serta estimasi besarnya dampak yang mungkin akan terjadi, serta mitigasi risiko yang diperlukan.

Sesuai dengan hasil proses risk assessment tersebut, dalam methodology BCM, proses Business Impact Analysis (BIA) merupakan suatu proses yang sangat penting. Berdasarkan hasil BIA suatu organisasi harus menentukan Critical Business

Based on this warning or information, the entity can perform various mitigation measures in order to reduce the likelihood and impact of risk events posed by the risk (if it happens).

Each identified risk description in the risk management system applied at Nasional Re has the key risk indicators corresponding to each of these risks, to serve as an early warning system.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

Background and Concept of Business Continuity Management

In accordance with the current business development, the Company's ability to maintain its business continuity is a must and can not be denied. Against such background condition, the implementation of Business Continuity Management (BCM) is an essential element for the Company to be able to survive and conduct its business activities despite experiencing various operational disturbances caused by internal and external factors. Implementation of BCM increases the need for applying good corporate governance practices in an organization.

The implementation of BCM in the Company is supported by the Top Management, and started with determining the objective, identifying minimum resources needs, and setting the targets to be achieved. In accordance with the objectives and targets that have been determined, and in line with the results of the risk assessment process, the Company then can determine the threat and estimate the magnitude of impact that may occur, as well as risk mitigation required.

In accordance with the result of the risk assessment process, in BCM methodology, Business Impact Analysis (BIA) is a very important process. Based on the BIA results, an organization must determine the Critical Business Function (CBF) to be

Function (CBF) yang harus segera di-Recover, dan lamanya waktu CBF tersebut dapat berhenti melayani (tidak dilayani) yang biasa disebut dengan Recovery Time Objective (RTO),serta besarnya perbedaan data/kehilangan data yang dapat diterima (Recovery Point Objective/RPO)sampai CBF tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi tersebut.

Salah satu hasil atau *output* dari penerapan BCM pada perusahaan adalah *Business Continuity Plan* (BCP). BCP merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir tentang langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko, penanganan dampak gangguan operasional dan proses pemulihan agar kegiatan operasional perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan tetap dapat berlangsung saat terjadi bencana.

Penyusunan Business Continuity Plan (BCP) dilakukan berdasarkan CBF, RTO, dan RPO yang sudah disetujui. BCP dibuat sesederhana mungkin dan dibuat dengan menggunakan kata-kata yang sangat mudah dimengerti, mengingat BCP akan digunakan dalam kondisi disaster.

BCP yang sudah disiapkan dan telah diujicoba guna memastikan bahwa BCP tersebut dapat diimplementasikan/diterapkan dan telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Keberhasilan implementasi BCM pada perusahaan bukan hanya dilihat dari keberhasilan ujicoba BCP, namun juga perlu diketahui seberapa tinggi tingkat keperdulian/awareness dari setiap personil perusahaan terhadap implementasi BCM. Untuk itu diperlukan aktivitas untuk meningkatkan awareness dari seluruh personil yang dilakukan secara berkala dalam bentuk sosialisasi, simulasi, training, ataupun aktivitas permainan/games lainnya yang dibuat semenarik mungkin.

Kesiapan setiap personil dalam menghadapi gangguan/disaster didukung oleh kebijakan dan prosedur yang dicantumkan dalam BCP yang sudah diujicoba dandipastikan dapat diimplementasikan, sehingga dapat meningkatkan tingkat layanan perusahaan kepada mitra usaha yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan.

recovered immediately, and the maximum length of time can stop serving, commonly known as Recovery Time Objective (RTO), maximum tolerable loss of data until CBF has a significant impact on the organization.

One of the results or outputs of BCM implementation on a company is the Business Continuity Plan (BCP). BCP is a written document containing a series of planned and coordinated activities on measures to reduce the impact of risks, handling the impact of operational disruptions and recovery processes so that the Company's operational activities and services to customers can still take place during a disaster.

The preparation of the Business Continuity Plan (BCP) is based on approved CBF, RTO and RPO. BCP is made as simple as possible and is made using words that are very easy to understand, considering that BCP will be used in a disaster state.

Prepared BCP will be tested to ensure that the BCP can be implemented and adapted to the company's conditions.

The successful implementation of BCM in the Company is seen not only from the success of BCP trial, but also from the level of awareness of each personnel against the implementation of BCM. It is necessary to increase the awareness of all personnel, conducted periodically in the form of socialization, simulation, training, or other games activities made as attractive as possible.

The readiness of each personnel in dealing with disasters is supported by the policies and procedures listed in the BCP that have been tested and ensured that it can be implemented, thereby increasing the level of the Company's services to its business partners ultimately expected to increase the Company's profit.

Pelaksanaan Sistem Kelangsungan Bisnis Perusahaan

Pada pelaksanaannya PT Reasuransi Nasional Indonesia mengadopsi standar *ISO 22301:2012 Standard Business Continuity Management System*. *ISO 22301:2012* mengidentifikasi dasar-dasar sistem manajemen kelangsungan bisnis, membangun proses, prinsip dan terminologi manajemen kontinuitas bisnis. Standar ini antara lain, bertujuan untuk dapat memberikan dasar acuan bagi perusahaan, agar dapat memahami, mengembangkan dan menerapkan manajemen kelangsungan bisnis, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada seluruh stakeholder perusahaan bahwa perusahaan dapat terus beroperasi walaupun sedang mengalami keadaan bencana.

komponen penyusun BCMS pada *ISO 22301* antara lain;

- a. *Policy*(Kebijakan)
- b. *People* (Manusia) dengan tanggung jawab terdefinisi.
- c. Proses Pengelolaan yang berkaitan dengan:
 1. *Policy*
 2. *Planning*
 3. *Implementation and Operation*
 4. *Performance Assessment*
 5. *Management Review*
 6. *Improvement*
- d. Dokumentasi yang menyediakan bukti yang dapat diaudit
- e. Proses pengelolaan kelangsungan bisnis lain yang relevan untuk perusahaan

Standar *ISO 22301* juga mengikuti pola PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) yang merupakan standar pola *ISO* .

- **Plan** (*Establish*)
Menetapkan kebijakan, tujuan, sasaran, kontrol, proses dan prosedur. Kelangsungan bisnis yang relevan untuk meningkatkan kelangsungan bisnis agar dapat memberikan hasil yang selaras dengan kebijakan organisasi secara keseluruhan dan tujuannya.
- **Do** (*Implement and Operate*)
Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, kontrol, proses dan prosedur kelangsungan bisnis.
- **Check** (*Monitor and Review*)
Memantau dan menilai kinerja terhadap kebijakan dan tujuan kelangsungan bisnis, melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk ditinjau, dan menentukan serta mengotorisasi tindakan untuk remediasi dan perbaikan.

Implementation of Business Continuity Management System (BCMS)

In practice, PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted *ISO 22301: 2012 Standard Business Continuity Management System*. *ISO 22301: 2012* identifies the basics of business continuity management systems, builds processes, principles and terminology of business continuity management. This standard, among others, aims to provide a benchmark for the company, in order to understand, develop and implement business continuity management, so as to give confidence to all stakeholders of the company that the company can continue to operate despite the disaster.

Components of BCMS in *ISO 22301*, among others;

- a. *Policy* (*Policy*)
- b. *People* (*People*) with defined responsibilities.
- c. Management Process related to:
 1. *Policy*
 2. *Planning*
 3. *Implementation and Operation*
 4. *Performance Assessment*
 5. *Management Review*
 6. *Improvement*
- d. Documentation that provides auditable evidence
- e. Another business continuity management process that is relevant to the Company

The *ISO 22301* standard also follows the PDCA pattern (*Plan-Do-Check-Act*) which is a standard *ISO* pattern.

- **Plan** (*Establish*)
Establish policies, objectives, objectives, controls, processes and procedures; business continuity that is relevant to improving business continuity in order to deliver results that are aligned with the organization's overall policy and objectives.
- **Do** (*Implement and Operate*)
Implement and operate business continuity policies, controls, processes and procedures.
- **Check** (*Monitor and Review*)
Monitor and assess performance against business continuity policies and objectives, report results to management for review, and determine and authorize actions for remediation and improvement.

- **Act** (*Maintain and Improve*)
Memelihara dan meningkatkan BCMS dengan mengambil tindakan korektif, berdasarkan hasil tinjauan manajemen dan menilai kembali lingkup BCMS serta kebijakan dan tujuan kelangsungan bisnis.

Manfaat dari penetapan *Business Continuity Management System* ISO 22301 adalah:

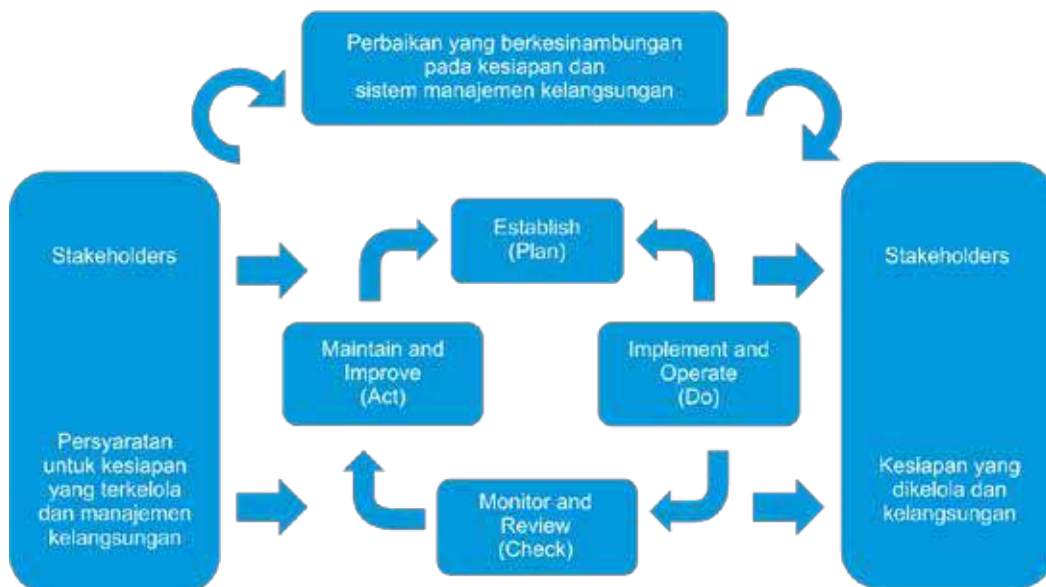
- mampu mengelola risiko terhadap potensi-potensi krisis bisnis organisasi
- mengembangkan kesadaran dan kepedulian karyawan dalam kontribusi BCM
- menjaga konsistensi kelangsungan bisnis ketika memasuki masa krisis
- menjaga produktivitas proses bisnis dari setiap lini manajemen
- meningkatkan wawasan dalam mengantisipasi potensi-potensi krisis bisnis

- **Act** (*Maintain and Improve*)
Maintain and enhance BCMS by taking corrective action, based on management review results and reassessing BCMS scope as well as business continuity policies and objectives.

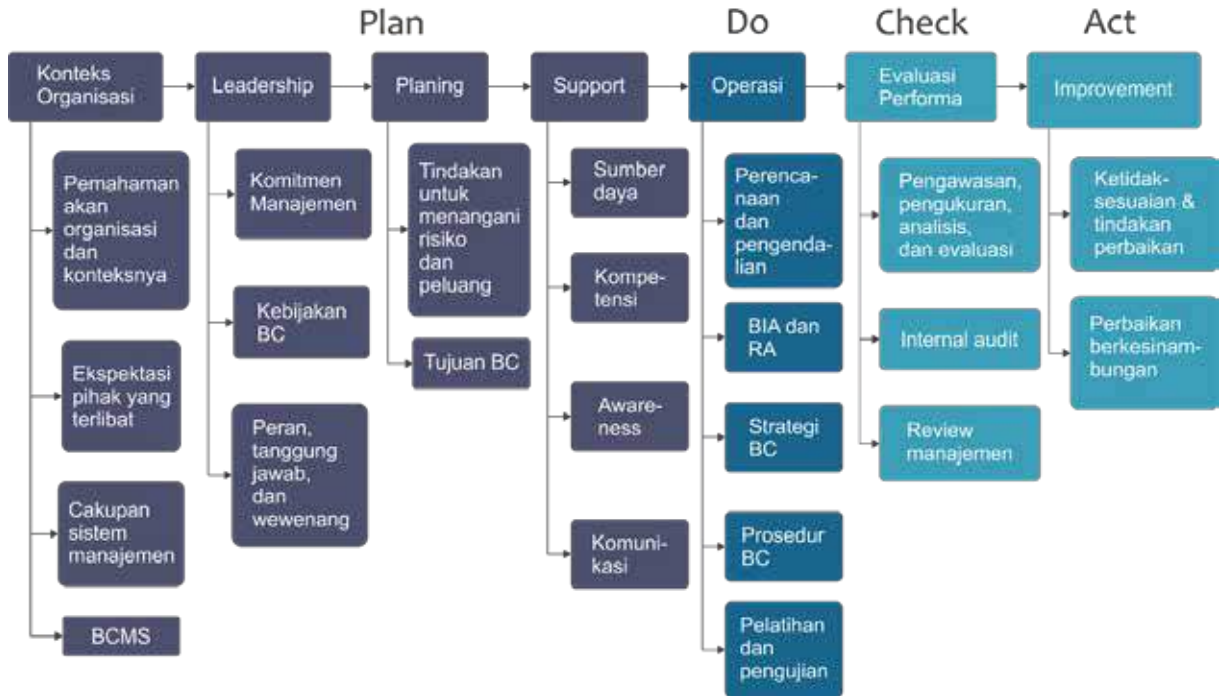
The benefits of establishing the Business Continuity Management System ISO 22301 are:

- Able to manage the risks to potential business crisis of the organization
- Developing awareness and employee awareness in BCM contributions
- Maintaining the consistency of business continuity when entering a period of crisis
- Maintaining the productivity of business processes from each line of management
- Increasing insight in anticipating potential business crises

Siklus PDCA pada ISO 22301:2012



Business Continuity Management System



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengertian pengendalian internal berdasarkan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) yang dikeluarkan pada tahun 1992 adalah sebagai berikut: *Internal control is process, affected by entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Reliability of Financial Reporting*
- *Compliance with Applicable laws and regulations*

Yang artinya: sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission), launched in 1992, internal control is a process affected by entity's Board of Directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

Which means: an internal control system is a process involving Boards of Commissioners, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance in achieving the following three goals:

1. Effectiveness and efficiency of operation
2. Reliability of financial reporting
3. Compliance with applicable laws and regulations.

COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.

Komponen pengendalian intern menurut COSO adalah:

- 1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)**
Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh *board*.
- 2. Penaksiran risiko (*risk assessment*)**
Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
- 3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)**
Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
- 4. Informasi dan komunikasi**
Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
- 5. Pemantauan (*monitoring*)**
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya

Kelima komponen pengendalian internal di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Larry F Konrath (1999) menggambarkan kelima komponen tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana Lingkungan Pengendalian menjadi pondasinya. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya. Sedangkan *Monitoring* menjadi atapnya. Dengan demikian, sebuah pengendalian internal akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.

COSO views internal control as a series of actions, which covers the entire process within the organization. Internal controls are in the basic management processes, including planning, implementation and monitoring.

Control is not something that is added in the management process, but is indeed an integral part of the process.

Internal control components according to COSO are:

- 1. Control environment**
Control environment factors include the integrity, ethical values and competence of the entity's people; management's philosophy and operating style; the way management assigns authority and responsibility and organizes and develops its people; and the attention and direction provided by the Board of Directors.
- 2. Risk assessment.**
The mechanism is set for the identification, analysis and management of relevant risks to various activities conducted whereby the Company domiciles.
- 3. Control Activities.**
Implementation of the policies and procedures set forth by the management to ensure the achievement of the entity's objectives.
- 4. Information and Communication.**
System that allows any person or entity to obtain and exchange information required for implementing, managing and controlling operations.
- 5. Monitoring**
Internal control systems need to be monitored, this process aims to assess the quality of system performance over time. It is run through the activity of continuous monitoring, separate evaluations, or a combination of both.

The five components of internal control above are closely related to each other. Larry F Konrath (1999) describes those five components as a house, with Environmental Control becoming the foundation. Risk assessment, control activities and information and communication become pillars. While monitoring serves as the roof. Thus, an internal control would be rendered effective if the five elements are well established and operating in accordance proportions respectively.

Menurut COSO, semua orang dalam organisasi yaitu Manajemen, Dewan direksi, Komite Audit, dan Personil lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal.

Pihak-pihak luar seringkali memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, seperti Auditor eksternal, Badan Regulasi dan legislatif, *customer*, analis keuangan, dan media massa. Namun demikian pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal yang dijalankan perusahaan adalah menggunakan metode COSO sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Keandalan informasi baik informasi yang bersifat keuangan maupun operasional.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Komitmen pentingnya pengendalian internal dapat dilihat pada:

1. Standar Profesional Auditor internal mengenai keharusan menguji sistem pengendalian internal.
2. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Industri Asuransi atau industri lain yang relevan.

Berdasarkan pengertian, tujuan dan komitmen di atas, pengendalian internal dinilai dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi I yaitu pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai.
- b. Dimensi II yaitu pengendalian internal dievaluasi dalam dua tingkat yaitu:

According to COSO, every person in the organization, namely Management, Board of Directors, Audit Committee and other personnel are responsible for internal control because everyone in the organization has a role in internal control so that internal control will not work properly should one of its members not perform his/her role in internal control.

Outsiders may often contribute to the achievement of corporate goals, such as external auditors and legislative and Regulatory Agencies, customers, financial analysts and the media. However, those third parties are not responsible for the internal control because they are not part of the organization, nor part of the internal control system.

Internal Control System

The Internal control system adopted by the Company uses COSO method as described above, a process which is conducted by the Board of Commissioners, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance about the achievement of 3 (three) objectives, namely:

1. Effectiveness and efficiency of the operation.
2. Reliability of information, both financial and operational.
3. Compliance with applicable laws and regulations, including Company internal regulations.

Commitment to internal control is evident by:

1. Internal Auditor Professional Standards, regarding the necessity to test the internal control system.
2. Applicable rules and regulations in the insurance industry or other relevant industries.

Based on the meaning, purpose, and commitment above, internal control is assessed based on the following 3 (three) dimensions:

- a. Dimension I, internal control is designed to provide reasonable assurance that the internal control objectives can be achieved.
- b. Dimension II, internal control is evaluated in two levels, namely:

- | | |
|---|---|
| <p>1) Tingkat entitas, pengendalian internal berlaku terhadap keseluruhan unit kerja seperti kebijakan, <i>codes of conduct</i>.</p> <p>2) Tingkat aktivitas, pengendalian yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>.</p> | <p>1) The entity level, internal control applies to the whole unit, such as policies, codes of conduct.</p> <p>2) The activity level, internal control is designed to achieve a particular goal, such as the Standard Operating Procedure (SOP).</p> |
| <p>c. Dimensi III, yaitu lima komponen pengendalian intern sebagai batasan dan kerangka kerja dalam mengevaluasi dengan menyediakan kriteria penaksiran yang diklasifikasikan dalam:</p> <p>1) Lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>)
Auditor internal melakukan evaluasi kecukupan dan keefektifan atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan perilaku manajemen puncak, direksi dan pemilik entitas atas pengendalian dan kepentingannya. Seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas dan nilai etis; • Komitmen terhadap kompetensi; • Filosofi manajemen dan gaya operasi; • Struktur organisasi; • Dewan direksi atau komite audit; • Pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab; • Kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia. <p>2) Penilaian risiko (<i>risk assessment</i>)
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggapan dan tindakan yang dilakukan manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini penilaian risiko dilihat dari asersi manajemen yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan dan kejadian; • Kelengkapan; • Penilaian dan alokasi; • Hak dan kewajiban; • Penyajian dan pengungkapan. <p>3) Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activity</i>)
Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemisahan tugas; 2. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas; 3. Adanya dokumen dan pencatatan yang memadai; | <p>c. Dimension III, the five components of internal control as a guidance and a framework for evaluating by providing assessment criteria classified into:</p> <p>1) Control Environment
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the actions, policies and procedures, which reflect the overall behavior of top management, BOD and the owner of the entity, for control and interests, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrity and ethical values; • Commitment on competence; • Management philosophy and operating style; • The structure of the organization; • The Board of Directors or audit committee; • Delegation of authority and responsibility; • The policies and practices of human resources. <p>2) Risk assessment
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness by identifying and analyzing the responses and actions taken over by the management of risks relevant to the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. In this case, the risk assessment from the management's assertions that must be met, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The existence and occurrence; • Completeness; • Assessment and allocation; • The rights and obligations; • Presentation and disclosure. <p>3) Control Activity
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the policies and procedures established by the management to achieve financial reporting purposes, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Separation of duties; 2. Authorization of transactions and activities; 3. Adequate documents and records; |

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;
5. Pengujian independen atas kinerja.

4. Physical control over assets and records;
5. Independent testing for performance.

4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas terhadap metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas atas aset-aset terkait.

Aktivitas pengendaliannya dapat berupa:

1. Keberadaan;
2. Kelengkapan;
3. Akurasi;
4. Klasifikasi;
5. Ketetapan waktu;
6. Posting dan pengikhtisaran.

4) Information and communication

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the methods used to identify, organize, classify, record, and report entity transactions and to maintain accountability for related assets.

Control activities may include:

1. Existence;
2. Completeness;
3. Accuracy;
4. Classification;
5. Timeliness;
6. Posting and summarizing.

5) Pemantauan (*monitoring*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari penaksiran terus menerus dan periodik yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa efektivitas rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian sedang berjalan sesuai dengan tujuannya atau perlu dimodifikasi.

5) Monitoring

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of continuous and periodic assessment carried out by the management to ensure whether the effectiveness of the design and implementation of the control structure is in accordance with the objectives or needs to be modified.

Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif:

- a. Tujuannya jelas;
- b. Dibangun untuk tanggungjawab bersama;
- c. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan;
- d. Didokumentasikan;
- e. Dapat diuji dan direview;
- f. Dapat dikelola.

The characteristics of an effective internal control:

- a. Clear objectives;
- b. Built for shared responsibility;
- c. The cost is justified to achieve the goal;
- d. Documented;
- e. Can be tested and reviewed;
- f. Can be managed.

Pada perusahaan reasuransi, lima komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian seperti:
 - a. Memahami lingkungan bisnis reasuransi
 - b. Supervisi dan pemantauan seperti kontrol atas kebijakan penerbitan polis/dokumen, batas (limit) persetujuan klaim.
2. Penilaian risiko berupa:
 - a. Peningkatan solvabilitas sebagai persyaratan dari regulator (pemerintah);
 - b. Belum adanya kebijakan terkait dengan pengawasan dan *update* data polis/peserta;

In the reinsurance industry, the above five components can be described as follows:

1. The control environment, such as:
 - a. Understanding the reinsurance business environment
 - b. Supervision and monitoring, such control over policy issuance/document, the limit of claim approval.
2. Risk Assessment, such as:
 - a. Increase in solvency as requirements from the regulator (government);
 - b. The absence of policies related to surveillance and policy/participants data update;

c. Kegagalan untuk memperbaharui data peserta yang mengakibatkan salah penilaian dalam menentukan premi.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian ini terkait pada siklus yang ada, seperti:

- a. Siklus pendapatan yaitu cara perusahaan reasuransi dalam memelihara keandalan master data pemegang polis/peserta.
- b. Siklus biaya yaitu kebijakan mengenai persetujuan pembayaran/pengajuan klaim, audit pengajuan klaim peserta.

4. Informasi dan komunikasi

Pada tahap ini, Auditor internal memastikan apakah sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan, diinformasikan dan dikomunikasikan ke semua unit kerja.

5. Pemantauan

Auditor internal melakukan kegiatan pengawasan yang sedang berjalan, evaluasi secara terpisah dan pelaporan atas manajemen risiko.

c. Failure to renew the participant data resulting in incorrect assessments in determining the premium.

3. Control activities

The control activities are related to the following cycle:

- a. Revenue cycle, how reinsurers in maintaining the reliability of the data master of policyholder/participant.
- b. Cost Cycle, the policy regarding approval of payment/submission of claims, claims submission audit.

4. Information and communication

At this stage, the internal auditor ensures whether the systems and procedures have been defined, shared and communicated to all work units.

5. Monitoring

Internal auditors conduct ongoing monitoring, evaluation, and reporting separately on risk management.

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk dapat menghasilkan dan melakukan evaluasi pengendalian intern yakni:

1. *Internal Control Questionnaires*

Merupakan cara yang paling sederhana dan praktis. Hal ini dengan memberikan pertanyaan yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di suatu unit kerja.

2. *Flowchart*

Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit kerja/divisi, misalnya penerbitan polis, penerbitan invoice (faktur), kelayakan penerimaan Principal, sistem dan prosedur akseptasi, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan akseptasi (*offer*), persetujuan akseptasi (*R/I Slip*) sampai dengan pembayaran premi yang berasal dari *offer* tersebut.

3. *Narrative*

Hal ini dilakukan auditor internal dengan cara menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, prosedur penerbitan polis.

There are three ways that can be used to prepare and evaluate the internal control:

1. Internal Control Questionnaires

It is the most simple and practical. It is performed by asking questions that can be used to understand and evaluate the internal control in a work unit.

2. Flowchart

Flowchart depicts the flow of documents in the system and procedures in a work unit/division, for example, policy issuance, invoice issuance, the feasibility of principal acceptance, system and procedures of acceptance, debt and cash disbursements, described as the flow of documents ranging from acceptance request (*offer*), approval acceptances (*R/I slip*) to the premium payment from the offer.

3. Narrative

It is brought about by the internal auditors by describing using memo, accounting systems, and procedures applied in the company, such as cash disbursements procedures, policy issuance procedures.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN

Tidak ada perkara penting yang dihadapi Perusahaan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Nasional Re yang dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kinerja maupun arah perusahaan.

KODE ETIK

Pedoman Etika Dan Perilaku Perusahaan

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari Pedoman GCG Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Keberadaan Pedoman Perilaku

Code of Conduct adalah panduan berperilaku yang menjabarkan tingkah laku moral dan etika yang diharapkan dari para Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan. Lebih lanjut, panduan ini memaparkan lebih rinci tentang kebijakan, standar dan prosedur Perusahaan serta bagaimana seharusnya para anggota Perusahaan bertingkah laku sebagai bagian dari tenaga kerja Perusahaan.

Tujuan *Code of Conduct*

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* ini akan terus dikaji secara berkala dan berkelanjutan serta dilakukan penyesuaian dengan perubahan dinamika lingkungan usaha dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter individu Perusahaan yang disiplin dan beretika dalam melaksanakan tugas

IMPORTANT CASES BEING FACED BY THE COMPANY, AND MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ANNUAL REPORT PERIOD

There were no important cases faced by the Company or members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Nasional Re which might have material impact on the performance or direction of the Company.

CODE OF CONDUCT

Code Of Conduct

Code of Conduct is part of the Company's GCG Guidelines drawn up on the consideration that, in managing the organization, not only must the Company comply with the laws and regulations, but also uphold ethical norms and values. The commitment to uphold the code of conduct in the Company is expected to increase and strengthen the reputation of the Company.

The Existence of Code of Conduct

The Code of Conduct is a guide that outlines the behavior of moral and ethical behavior expected by of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and other businesses doers related to the Company's business. Furthermore, this guide describes more detailed on policies, standards, and procedures of the Company and the members of the Company's, as well as how to behave as part of the Company's workforce.

The Purpose of Code of Conduct

As a guideline that is dynamic in nature, Code of Conduct will continue to be reviewed on a regular and an ongoing basis and be adjusted to the changing dynamics of the business environment with regard to the applicable Company's values, laws and regulations.

The purposes of the implementation of Code of Conduct for the Company are as follows:

1. Forming the Company's disciplined and ethical individual character in carrying out their duties and responsibilities

dan tanggungjawabnya masing-masing serta dalam berinteraksi dengan sesama individu dalam Perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.

2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan Perusahaan.
3. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan.

Isi Code of Conduct

Pedoman Perilaku Perusahaan berisikan mengenai:

1. Etika Bisnis
 - a. Etika terhadap Perusahaan Asuransi
 - b. Etika terhadap Sesama Perusahaan Reasuransi
 - c. Etika terhadap Broker Reasuransi
 - d. Etika terhadap Broker Retrosesional
 - e. Etika terhadap Retrosesional
 - f. Etika terhadap Mitra Bisnis
 - g. Etika terhadap Regulator
 - h. Etika terhadap Masyarakat
 - i. Etika terhadap Pegawai
 - j. Etika terhadap Pemegang Saham
2. Etika Kerja
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum
 - b. Benturan Kepentingan
 - c. Donasi dan Hadiah
 - d. Anti Diskriminasi
 - e. Integritas Laporan Keuangan
 - f. Perlindungan informasi Perusahaan
 - g. Perlindungan Harta Perusahaan
 - h. Kegiatan Sosial dan Politik
 - i. Perilaku sebagai Atasan
 - j. Perilaku sebagai Bawahan
 - k. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan
3. Penanganan Masalah Etika
 - a. Bagaimana Mengidentifikasi Masalah Etika
 - b. Kemana Harus Melapor
 - c. Perlindungan terhadap Saksi dan Pelapor
4. Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku
 - a. Organisasi
 - b. Penerapan Pedoman Perilaku
 - c. Penegakan Pedoman Perilaku
 - d. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku
 - e. Pernyataan kepatuhan.

as well as in interacting with other individuals within the Company and with other stakeholders.

2. Creating a conducive working atmosphere within the Company.
3. As guidelines that regulate, supervise, and prevent the abuse of power and position of each individual within the Company.

Code of Conduct Content

The Company's Code of Conduct consists of:

1. Business Ethics
 - a. Ethics to the Insurance Company;
 - b. Ethics to the Fellow Reinsurance Company;
 - c. Ethics to the Reinsurance Brokers;
 - d. Ethics to the Retrocessionaire Broker;
 - e. Ethics to the Retrocessionaire;
 - f. Ethics to the Business Partners;
 - g. Ethics to the Regulator;
 - h. Ethics to the Society;
 - i. Ethics to the Employee;
 - j. Ethics to the Shareholders.
2. Work Ethics
 - a. Compliance with Laws;
 - b. Conflict of Interest;
 - c. Donations and Gratification;
 - d. Anti Discrimination;
 - e. Integrity of Financial Statements;
 - f. Protection of Company information;
 - g. Protection of Company Property/Assets;
 - h. Social and Political Activity;
 - i. Behavior as Superior;
 - j. Behavior as Subordinate;
 - k. Ethical Behavior toward Fellow Employees.
3. Handling Ethical Issues
 - a. How to Identify Ethical Issues;
 - b. Where to Report;
 - c. Protection of Witness and Reporter.
4. Implementation and Enforcement of Code of Conduct
 - a. Organization;
 - b. Implementation of Code of Conduct;
 - c. Enforcement of Code of Conduct;
 - d. Sanctions for Violation of Code of Conduct;
 - e. Statement of Compliance.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Dasar Hukum

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di Nasional Re ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEP/DIR/II/2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Whistleblowing System ini merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Perusahaan berkomitmen untuk **melindungi** Pelapor dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor.

Mekanisme Whistleblowing

Mekanisme pelaporan pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh *Stakeholders* dalam rangka implementasi GCG di Nasional Re.

Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perusahaan telah menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Perusahaan telah menetapkan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang terdiri dari Bagian SPI, Bagian SDM dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/penyungkapan berdasarkan kategori Pelapor seperti:

- Direksi, jika Terlapor adalah Insan Perusahaan selain Tim Kepatuhan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
- Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris, Tim Kepatuhan GCG.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Legal Basis

The guidelines and procedures for handling report of violations (*whistleblowing*) at Nasional Re are stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 06/KEP/DIR/II/2014 on Guidelines for Reporting Violations System (*Whistleblowing System*).

Whistleblowing System is a system that serves as a medium for a witness, to convey information regarding the indication of violations that occur in the Company. Internally in the Company, reporting violations is a way to encourage employees to be more willing to act to prevent fraud and corruption by reporting it to parties assigned to handle it. The Company is committed to **protecting** the Whistleblower and the Company adheres to all relevant legislation and best practices applicable in the implementation of the Whistleblower protection.

Whistleblowing Mechanism

The mechanism on violation reporting is disseminated to all stakeholders in order to implement the GCG principles at Nasional Re.

The Company is required to receive the report of violations from internal as well as from external parties. The Company has provided 2 (two) alternatives of management reporting, namely through the Board of Directors and through the Board of Commissioners, in accordance with level of suspected violators.

The Company establishes the Violation Report Management Team, consisting of Internal Audit Unit (IAU), Human Resources Department, and other units under the authority of the Board of Directors, based on the decision of the BOD. The parties that are authorized to follow up reporting/disclosure by the Reporting category are:

- Board of Directors, if the Reported person is employee of the Company, except those serving in GCG Compliance Team, Board of Commissioners and Board of Directors.
- Board of Commissioners, if the Reported is a member of the Board of Directors.
- President Director, if the Reported is a member of BOC and GCG Compliance Team.

Penyampaian Pelaporan:

- a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris Nasional Re u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- c. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

Penerimaan Pelaporan:

- Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh *Stakeholders* dan/atau Perwakilan *Stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis.
- Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* mengajukan Pelaporan Pelanggaran.
- Perusahaan wajib memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
- Apabila Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi buku identitas *Stakeholders* dan perwakilan *Stakeholders* dan Surat kuasa dari *Stakeholders*.
- Jika perwakilan *Stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- Penerima Pelaporan Pelanggaran adalah Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Sejak dilakukannya sosialisasi atas mekanisme *whistleblowing* pada Februari 2014 sampai dengan akhir Desember 2016 tidak ada pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan.

Report Submission:

- a. Delivering an official letter addressed to the Board of Directors/President Director/Board of Commissioners of the Nasional Re to the attention of Violation Report Management Team, by hand delivery or by mail to the Company, Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Reporting violations in writing shall be furnished with a copy of identity and supporting evidence such as documents relating to the transactions carried out and/or reporting the violation to be delivered.
- c. Reporting violations in writing without copy of identity shall be furnished with copy of supporting documents, such as: documents relating to the transactions carried out and/or reporting the violation to be delivered.

Receiving Report:

- The Company receives reports of violations submitted by stakeholders and/or representative of stakeholders, both orally and in writing.
- The Company provides an explanation of the policies and procedures of resolving Violation Report, the moment Stakeholders and/or representatives filing Violation Report.
- The company must provide receipt, if report is submitted in writing and bearing identity.
- If the violation report is filed by representative of stakeholder, in addition to the above documents they should also submit other documents, namely copy of identity of Stakeholders, representative of Stakeholders, and the power of attorney from stakeholders.
- If the representatives of stakeholders are an institution or a legal entity, it must be accompanied by document stating that the party applying for Reporting Violations is authorized to represent the organization or legal entity.
- Recipients of Violation Report are Board of Directors/President Director/Board of Commissioners, to the attention of Violation Report Management Team.

Since the dissemination of whistleblowing mechanism in February 2014, until the end of December 2016, there are no complaints of violations reported throughout 2016.



Workshop "Manajemen Risiko Operasi" (internal dan mengundang cedants), 28 Juli 2016
Workshop on "Operation Risk Management" (internal participants and invited cedants), July 28, 2016



Konsinyering Review Manajemen Risiko, 30 April 2016
Confinement on Risk Management Review, April 30, 2016



In-House Training tentang Business Continuity Management System, 4 Mei 2016
In-House Training on Business Continuity Management System, May 4, 2016





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR)

Sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan, Perusahaan memiliki kebijakan CSR yang pada dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar Perusahaan. Melalui kegiatan-kegiatan CSR tersebut, Perusahaan menumbuhkan rasa keterikatan dengan penduduk dan sekaligus menjaga citra perusahaan.

As the embodiment of its social responsibility, the Company has established a CSR policy with the objective of helping people to improve their wellbeing, especially people that live in the vicinity of the Company. Through CSR activities, the Company fosters a sense of closeness to the community and at the same time maintains the company's image.

Secara ringkas, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan dapat dilihat pada table di bawah ini:

In summary, CSR activities undertaken by the Company can be seen in the table below:

TANGGAL DATE	ORGANISASI ORGANIZATION	KEGIATAN ACTIVITIES	NOMINAL (Rp)
18 Maret 2016	Mata Air Foundation	Bantuan Dana Persiapan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 Donating funds for preparation of Joint Admission Test for State Universities (SBMPTN) 2016	20,000,000
07 April 2016	Pondok Pesantren Nashrul Ummah	Bantuan Dana Pembangunan Pondok Pesantren Donating funds for Construction of Pondok Pesantren	50,000,000
24 Mei 2016	Pesantren AT-Taubah	Ceramah Umum KH Abdullah Gymnastiar 24 Mei 2016 di Masjid At Taubah Lapas Public Sermon by KH Abdullah Gymnastiar 24 May 2016 at Masjid At Taubah Lapas	10,000,000
31 Mei 2016	The Committee Of 1st North Sumatera International Choir Competition 2016	Bantuan Dana Donating Funds	50,000,000
29 Juni 2016	Kelurahan Kelapa Dua Wetan RT/RW 003/007	Pembangunan Pos Terpadu kelpa 2 Wetan Construction of Integrated Post Kelapa 2 Wetan	15,000,000
09 Agustus 2016	Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia	Bantuan Dana Donating Funds	55,000,000
22 Agustus 2016	Yayasan Masjid Al mamur cikini	Pemberian 1 (satu) Unit Ambulance Donating 1 (one) Unit Ambulance	173,500,000
22 Agustus 2016	Yayasan Thalassaemia Indonesia	Bantuan Dana Donating Funds	100,000,000
22 Agustus 2016	Yayasan Rumah Yatim Rawasari	Bantuan Dana Donating Funds	10,000,000
02 September 2016	Gunung Salak Open Charity Golf Tournament	Bantuan Dana Donating Funds	25,000,000
22 Desember 2016	Rukun Warga 28 Villa Nusa Indah	Bantuan Dana Perbaikan Jalan Donating Funds for Road Improvement	25,000,000
		TOTAL	533,500,000

Total anggaran CSR Perusahaan untuk tahun 2016 adalah Rp530.000.000, dengan demikian realisasinya mencapai 100,66%. (mohon penjelasan terkait kelebihan tersebut.)

The total CSR budget of the Company for 2016 is Rp530,000,000; thus the realization reached 100.66%.



CSR ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia 9 Agustus 2016
CSR to Indonesia Care for Cancer Kids Foundation, August 9, 2016



Penyerahan bantuan ambulans sebagai CSR Nasional Re ke Masjid Al Makmur Cikini, 25 Agustus 2016
Ambulance van handover as Nasional Re's CSR to Al Makmur Mosque in Cikini, August 25, 2016



Gathering Bersama Cedants, Danau Toba, 6-8 Oktober 2016
Gathering with Cedants, Toba Lake, October 6-8, 2016



	A	B	C	D	E	F
1	P.O. Number	Shipping				
2	44538	44538a				
3	44538					
4	44538					
5	44538					
6	33789	33789a				
7	33789					
8	33789					
9	33691	33691a				
10	33691					
...	-----					



Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Report

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
Beserta Laporan Auditor Independen**

**FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT THEREON**

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

	<u>Halaman</u> Page	
SURAT PERNYATAAN	i	STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016	1	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2016
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016	2	STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED IN DECEMBER 31, 2016
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016	3	STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016	4	STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016	5 - 71	NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

SURAT PERNYATAAN



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016**

**DIRECTOR'S STATEMENT ON
THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA (THE COMPANY)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We the undersigned :

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. N a m a / Name | : | Eddie Mulyono, SP, MM, AAIK, QIP, AHS, CRGP, CRMP |
| Alamat Kantor / Office Address | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili / Residential Address | : | Jl. Pangadegan Utara No. 4 RT 12 RW 006
Pangadegan, Puncoran, Jakarta Selatan |
| Nomor telepon / Telephone number | : | 021-80642500, 3140009, 3179373 |
| Jabatan/ Title | : | Pt Direktur Utama / Caretaker President Director
Direktur Operasi / Director of Operations |
| 2. N a m a / Name | : | Rusdianto, SE, MM, AAIK, QIP, FIIS, CFP®, CSA®, CRGP, CRMP |
| Alamat Kantor / Office Address | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat |
| Alamat Domisili / Residential Address | : | Jl. Lembah Pinang I Blok 1/14 No. 21-22
Kav. DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur |
| Nomor telepon / Telephone number | : | 021-80642500, 3140009, 3179373 |
| Jabatan/ Title | : | Direktur Keuangan & SDM /
Director of Finance & Human Resources |

dengan ini menyatakan bahwa :

hereby state that :

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 ; | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2016 ; |
| 2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ; | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia ; |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ; | 3. a. The information contained in the company's financial statements is complete and correct ;
b. The company's financial statements do not contain incorrect material information or facts and do not omit material information or facts ; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Reasuransi Nasional Indonesia. | 4. We are responsible for internal control system of PT Reasuransi Nasional Indonesia. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is issued to the best our knowledge and belief.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
Direksi/Board of Directors
9 Februari / February 9, 2017


Eddie Mulyono Rusdianto

**LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN**



Nomor: 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Reasuransi Nasional Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Number: 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Reasuransi Nasional Indonesia

We have audited the accompanying financial statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for the internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the State Financial Audit Standards prescribed by the Badan Pemeriksa Keuangan (the Audit Board of the Republic of Indonesia). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomor: 008/SMR/LAK-NASRE/II/2017 tanggal 09 Februari 2017

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2016, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The compliance to the applicable laws and regulations and the internal controls are presented in a separate report number 008/SMR/LAK-NASRE/II/2017 dated 09 February 2017

Drs. Sukarna Rusdjana, CA, CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0492 / Public Accountant License No. AP.0492

Jakarta, 09 Februari 2017 / 09 February 2017

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, financial performance and cash flows in accordance with financial accounting standards and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practises to review such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998, 25 August 1998

In association with  **TPL & Associates**, Malaysia

Nomor: 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017

Number: 008/SMR/LAI-NASRE/II/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Reasuransi Nasional Indonesia**

**The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Reasuransi Nasional Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the income statements and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for the internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the State Financial Audit Standards prescribed by the Badan Pemeriksa Keuangan (the Audit Board of the Republic of Indonesia). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu

An audit involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the



Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1996, 25 August 1998

In association with  TPL & Associates, Malaysia

audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomor: 008/SMR/LAK-NASRE/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2016, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The compliance to the applicable laws and regulations and the internal controls are presented in a separate report number 008/SMR/LAK-NASRE/II/2017 dated February 9, 2017.



Drs. Sukarna Rusdjana, CA, CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0492 / Public Accountant License No. AP.0492

Jakarta, 9 Februari 2017 / February 9, 2017

PERHATIAN UNTUK PEMBACA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur, dan praktek audit atas laporan keuangan ini adalah sesuai dengan yang diterima dan diterapkan di Indonesia.

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations, changes in equity and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN



NASIONAL RE

PT. REASURANSI NASIONAL INDONESIA

	Catatan / Note	2016	2015	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	3.	4.582.014.536	16.633.101.243	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha				Trade Receivables
Piutang Reasuransi	4.	551.889.881.656	353.446.457.168	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	5.	44.995.280.915	52.209.884.683	Retrocession receivables
Jumlah Piutang Usaha		<u>596.885.162.571</u>	<u>405.656.341.851</u>	Total Trade Receivables
Piutang Ujroh	6.	16.189.743.752	9.329.946.220	Ujroh receivables
Aset Retrosesi				Retrocession Assets
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan -				Un-earned premium
Bagian Retrosesi	7.	722.471.153.113	422.547.076.770	Retrocession Share
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	8.	718.736.171.560	664.107.711.421	Estimated claim - retrocession Share
Jumlah Aset Retrosesi		<u>1.441.207.324.673</u>	<u>1.086.654.788.191</u>	Total Retrocession Assets
Biaya dibayar dimuka	9.	104.093.500	43.865.809	Prepaid expenses
Piutang hasil Investasi	10.	8.413.321.551	7.708.424.639	Investment income receivable
Piutang Lain-lain	11.	7.507.971.501	3.428.924.302	Other Receivables
Instrumen Investasi :				: Investment Instrument
Dana Jaminan	12.	51.000.000.000	51.000.000.000	Guarantee funds
Deposito Biasa	13.	1.411.681.621.502	1.820.129.530.788	Deposits
Surat Berharga :				: Securities
Saham Yang Diperdagangkan	14.	127.034.530.140	72.930.428.377	Stocks for Trading
Saham Tersedia Untuk Dijual			-	Stocks Available for Sale
Obligasi Yang diperdagangkan	15.	632.531.740.809	276.650.530.622	Bonds for Trading
Obligasi Tersedia Untuk Dijual			-	Bonds Available for Sale
Reksadana	16.	294.127.068.380	165.222.566.483	Mutual Funds
(Cadangan Penyisihan Obligasi)				(Reserve Allowance Bonds)
Jumlah Surat Berharga		<u>1.053.693.339.329</u>	<u>514.803.525.482</u>	Total Investment
Penyertaan Saham	17.	1.423.700.000	1.423.700.000	Investment in Share
Jumlah Instrumen Investasi		<u>2.517.798.660.832</u>	<u>2.387.356.756.270</u>	Total Investment Instrument
Aset Tetap				Fixed Assets
Nilai Perolehan	18.	185.472.089.799	177.730.394.774	Cost
Akumulasi Penyusutan		<u>(12.924.589.626)</u>	<u>(11.283.845.500)</u>	Accumulated depreciation
Nilai Buku Aset Tetap		<u>172.547.500.173</u>	<u>166.446.549.273</u>	Net book value
Aset Pajak Tangguhan	19.	33.447.824.933	28.941.264.631	Deferred tax asset
Aset Lain-lain	20.	28.064.887.650	31.225.693.667	Other assets
Cadangan Penyisihan Aset Lain		<u>(27.000.000.000)</u>	<u>(27.000.000.000)</u>	Allowance for other assets
Aset Lain-lain		<u>1.064.887.650</u>	<u>4.225.693.667</u>	Other assets
JUMLAH ASET		<u>4.799.748.505.672</u>	<u>4.116.425.656.097</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

	Catatan / Note	2016	2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang Klaim Reasuransi	21.	46.317.849.655	72.045.599.652	Reinsurance claim payables
Utang Premi Retrosesi	22.	77.729.184.356	55.437.660.098	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	23.	1.472.225.992.149	1.380.616.866.850	Estimated Own Claim Retention
Premi Yg Belum Merupakan Pendapatan	24.	1.671.952.547.972	1.314.646.332.736	Un-Earned Premium
Kontribusi Diterima Dimuka	25	-	-	Contribution received in advance
Beban Yang Masih Harus Dibayar	26.	30.062.935.646	22.321.813.643	Accrued expenses
Utang Pajak	27.	13.642.400.943	36.819.905.407	Taxes payable
Liabilitas Pajak Tangguhan		-	-	
Utang Zakat	28.	840.212.621	819.964.322	Zakat Payable
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	29.	23.453.523.943	23.959.764.348	Post Service Benefit Liability
Utang Qard	30.	5.000.000.000	-	Deferred tax liability
Utang Lain-Lain	31.	3.263.975.757	2.791.612.265	Other payables
Jumlah Liabilitas		<u>3.344.488.623.042</u>	<u>2.909.459.519.321</u>	Total Liabilities
Dana Tabarru (Peserta)	32.	36.763.833.437	24.141.892.523	Tabarru Fund (Participant)
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	33.	538.000.000.000	538.000.000.000	Authorized Capital
Selisih Penilaian- Saham Yang Tersedia Untuk Dijual				Difference Assessment of securities available for sale
Saldo laba :				Retained Earnings:
Cadangan Umum		451.095.419.444	300.022.728.820	General reserve
Cadangan Tujuan		5.799.073.142	5.799.073.141	Allocated reserve
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		335.612.604.415	251.072.690.624	Current year profit
Komponen Ekuitas Lainnya	34.	87.988.952.192	87.929.751.667	Other Equity Components
Jumlah Saldo Laba		<u>880.496.049.193</u>	<u>644.824.244.253</u>	Total Retained earning
JUMLAH EKUITAS		<u>1.418.496.049.193</u>	<u>1.182.824.244.253</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>4.799.748.505.672</u>	<u>4.116.425.656.097</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED IN DECEMBER 31, 2016
(In Rupiah)

	Note	2016	2015	
PENDAPATAN PREMI				PREMIUM REVENUES
Premi Bruto	35	4.876.870.426.810	3.451.755.982.573	Gross Premium
Premi Retrosesi		(2.401.666.219.317)	(1.213.156.829.515)	Retrocession Premium
Pembentukan PYBMP Tahun Berjalan		(881.642.527.046)	(861.791.105.051)	Current Year Un-earned Premium
Pencairan PYBMP Tahun Lalu		861.791.105.048	799.151.507.411	Last Year Un-earned Premium
Penurunan (kenaikan) PYBMP		(19.851.421.998)	(62.639.597.640)	Decrease (Increase) Un-Earned Premium
JUMLAH PENDAPATAN PREMI	35	2.455.352.785.494	2.175.959.555.418	TOTAL PREMIUM REVENUES
BEBAN UNDERWRITING				UNDERWRITING EXPENSES
Beban Klaim				Claim expenses
Klaim Bruto	36	1.383.394.601.413	1.240.356.956.282	Gross Claim
Klaim Retrosesi		(149.008.120.000)	(156.320.620.315)	Retrocession Claim
Pembentukan EKRS		674.435.991.349	679.956.688.768	Current Year Estimated Own Claim Retention
Pencairan EKRS		(679.956.688.767)	(471.563.155.077)	Last Year Estimated Own Claim Retention
Kenaikan EKRS		(5.520.697.418)	208.393.533.691	Increase estimated own claim retention
Jumlah Beban Klaim	36	1.228.865.783.995	1.292.429.869.657	Total claim expenses
Beban Komisi Netto	37	841.946.203.578	691.395.755.679	Net Commission Expense
Beban Underwriting Lain Netto	38	3.695.651.600	5.625.459.437	Underwriting other expenses - Net
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING		2.074.507.639.173	1.989.451.084.773	TOTAL UNDERWRITING EXPENSES
HASIL UNDERWRITING		380.845.146.321	186.508.470.644	UNDERWRITING INCOME
PENDAPATAN UJRAH	39	26.228.989.136	24.154.978.060	UJRAH INCOME
ALOKASI SURPLUS DANA TABARRU	40	-	1.693.857.427	ALLOCATION OF TABARRU FUND SURPLUS
HASIL INVESTASI	41	155.725.193.634	185.420.084.370	INVESTMENT INCOME
BEBAN USAHA	42	(145.070.246.714)	(116.398.528.247)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		417.729.082.378	281.378.862.255	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	43	(10.157.072.948)	13.811.175.394	OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK		407.572.009.429	295.190.037.649	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Penghasilan telah dikenakan Pajak Final	29	(156.163.521.720)	(178.483.367.730)	Permanent and Temporary Differens
Beda Tetap dan Beda Temporer	29	51.094.523.073	138.582.884.939	Income subject to final tax
PENGHASILAN KENA PAJAK		302.503.010.782	255.289.554.858	TAXABLE INCOME
ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT :				ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT:
Pajak Kini	29	(75.625.752.696)	(63.822.388.714)	Current tax
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	29	4.506.560.302	20.525.006.012	Deferred tax income (expense)
Zakat	28	(840.212.621)	(819.964.322)	Zakat
JUMLAH ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT		(71.959.405.014)	(44.117.347.024)	TOTAL ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT
LABA SETELAH PAJAK DAN ZAKAT		335.612.604.415	251.072.690.624	EARNING AFTER TAX AND ZAKAT
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas Program Manfaat Pasti		59.200.525	(1.239.399.839,0)	Actuarial Gain (Loss) Define Benefit Program
Selisih Penilaian Kembali Aset tetap		-	109.300.432.681	
LABA KOMPREHENSIF		335.671.804.940	359.133.723.466	COMPREHENSIVE INCOME

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(In Rupiah)

	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Subscribed and Paid-in Capital</i>	Saldo Laba / <i>Retained earnings</i>		Laba Tahun Berjalan <i>/ Current Year Profit</i>	Pendapatan Komprehensif Lain / <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah <i>/ Total</i>	
		Ditetapkan Penggunaannya <i>/ Allocated to</i>					
		Cadangan Umum <i>/ General Reserve</i>	Cadangan Tujuan <i>/ Allocated Reserve</i>				
Saldo per 31 Desember 2014	463.000.000.000	167.865.806.930	5.799.073.141	132.156.921.289	(20.131.281.175)	748.690.520.185	Balance as at 31 Desember 2014
Tambahan Modal Disetor	75.000.000.000	-	-	-	-	75.000.000.000	Additional paid-in capital
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi	-	-	-	-	-	-	Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale
Laba Bersih tahun berjalan	-	-	-	251.072.690.624	-	251.072.690.624	Current year net profit
Pembentukan Dana Cadangan	-	132.156.921.890	-	(132.156.921.890)	-	-	Allocation for reserve fund
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	108.061.032.842	108.061.032.842	<i>Other Equity Components</i>
Koreksi Saldo Imbalan Paska Kerja	-	-	-	600	-	600	Ajustment for post employment benefits
Saldo per 31 Desember 2015	538.000.000.000	300.022.728.820	5.799.073.141	251.072.690.624	87.929.751.668	1.182.824.244.253	Balance as at 31 Desember 2015
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	Additional paid-in capital
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi	-	-	-	-	-	-	Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale
Laba Bersih tahun berjalan	-	-	-	335.612.604.415	-	335.612.604.415	Current year net profit
Pembentukan Dana Cadangan	-	251.072.690.624	-	(251.072.690.624)	-	-	Allocation for reserve fund
Penarikan Dividen Oleh Entitas Induk	-	(100.000.000.000)	-	-	-	(100.000.000.000)	<i>Withdrawal of dividends by the parent company</i>
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	59.200.525	59.200.525	<i>Other Equity Components</i>
Saldo per 31 Desember 2016	538.000.000.000	451.095.419.444	5.799.073.141	335.612.604.415	87.988.952.193	1.418.496.049.193	Balance as at 31 Desember 2016

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / *See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.*

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Premi	3.718.162.052.526	2.894.687.739.676	Cash received from premium
Penerimaan Klaim Retrosesi	156.222.723.769	154.607.938.738	Cash flow from retrocession claims
Penerimaan Lain-lain	19.369.191.605	11.460.244.767	Cash received from other income
Pembayaran Premi Retrosesi	(1.978.718.273.231)	(1.007.550.018.580)	Payments for retrocession premiums
Pembayaran Klaim	(1.596.280.681.640)	(1.387.277.347.192)	Claims payments
Pembayaran Beban Pemasaran	(11.529.455.688)	(8.395.512.787)	Marketing expenses
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(137.329.124.711)	(87.257.580.918)	General and administrative expenses
Pembayaran Pajak	(99.683.449.173)	(11.502.251.025)	Payments for taxes
Pembayaran Uang Muka	-	(18.149.861.805)	Advances
Pengeluaran Lain-lain	(6.680.291.563)	(43.020.467.314)	Other disbursement
	<u>63.532.691.894</u>	<u>497.602.883.560</u>	Net cash received from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Hasil Investasi	155.020.296.723	158.326.676.183	Investment income
Pencairan Deposito	4.250.614.051.605	2.858.949.130.138	Deposit withdrawals
Pencairan Obligasi	34.243.000.000	107.792.965.000	Bond withdrawals
Pencairan Reksadana	51.972.681.055	5.000.000.000	Mutual funds withdrawals
Pencairan Saham	138.256.212.915	1.475.946.989	Sale of stocks
Hasil Penjualan Aset Tetap	780.971.278	427.608.250	Fixed assets disposals
Penempatan Deposito	(3.842.379.834.105)	(3.532.450.111.833)	Deposit placement
Penempatan Obligasi	(389.270.613.681)	(30.898.023.066)	Purchases of bonds
Penempatan Saham	(198.957.484.658)	-	Purchases of stocks
Penempatan Reksadana	(166.714.612.733)	(121.420.000.000)	Deposit in mutual funds
Perolehan Aset Tetap dan Perangkat Lunak	(9.599.370.671)	(6.184.174.569)	Cash disbursement for fixed assets and softwares
Penerimaan Jasa Giro	450.923.669	550.168.656	Cash received from bank interests
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>24.416.221.397</u>	<u>(558.429.814.250)</u>	Net cash used for investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES
Penambahan Modal Disetor	-	75.000.000.000	Additional paid-in capital
Pembayaran Dividen	(100.000.000.000)	-	Dividen payments
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>(100.000.000.000)</u>	<u>75.000.000.000</u>	Net cash received from funding activities
(KENAIKAN) PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	(12.051.086.708)	14.173.069.310	(INCREASE) DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL	16.633.101.243	2.460.031.933	BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR	4.582.014.535	16.633.101.243	ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
Terdiri dari :			: Comprising of
Kas	339.818.250	123.464.832	Cash on hand
Bank	4.242.196.286	16.509.636.411	Cash in banks
Jumlah	<u>4.582.014.536</u>	<u>16.633.101.243</u>	Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



1. Informasi Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Reasuransi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 129 dan 130 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta diatas diubah dengan akta No. 53 tanggal 15 September 1994 di hadapan Achmad Abid, SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan akta No. 15 tanggal 7 Oktober 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 tanggal 11 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1994 No. 103 Tambahan No. 10862.

Pendirian perusahaan telah memperoleh ijin prinsip dari Menteri Keuangan sesuai dengan Surat Nomor S.1369/KMK.017/1994 tanggal 26 September 1994, dan ijin operasional telah diperoleh dari Menteri Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/KMK.017/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Melalui Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 62 dan Nomor 64 tanggal 21 April 1998 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman sesuai surat persetujuan Menteri Kehakiman Nomor. C2-26.636-HT 01.04 tahun 1998 tanggal 27 Nopember 1998. Kemudian diubah dalam akta No. 37 tanggal 16 Juni 2000 dibuat di hadapan Nyonya Vita Buena, SH, Notaris pengganti Sutjipto SH, di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 tanggal 18 Januari 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 74 tanggal 13 September 2002 Tambahan No. 727.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, yang menyebutkan menambah bidang usaha Perseroan yaitu Reasuransi Syariah, dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005. Perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, mengalami penambahan sesuai dengan akta No. 108 tanggal 22 Pebruari 2007 dari Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima milyar rupiah) yang disetor seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4562 tanggal 9 April 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No. 1148/2007.

1. General Information

a. Establishment and General Information

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("the Company") was established on the basis of the deed No. 129 dated August 22, 1994, of the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed was then amended with the deed No. 53 dated 15 September 1994, made before the notary Achmad Abid, SH, a substitute notary in Jakarta and the deed No. 15 dated October 7, 1994, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed was then approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his letter No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 dated October 11, 1994 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 27, 1994 No. 103 and Supplement thereto No. 10862.

The establishment of the company has obtained principle approval from the Minister of Finance in accordance with the Letter No. S.1369/KMK.017/1994 dated September 26, 1994, and the operating license has been obtained from the Ministry of Finance in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 27/KMK.017/1995 dated January 9, 1995.

The Company's articles of association have been amended by notarial deeds No. 62 and No. 64 dated April 21, 1998, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta, which were approved by the Minister of Justice by letter No. C2-26.636-HT 01.04 year 1998 dated November 27, 1998. Further amendment was with the deed No. 37 dated June 16, 2000 made before the notary Mrs. Vita Buena, SH, acting as a substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta. The amendment of the Company's articles of association were received by the Director General of General Legal Administration – the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under registration No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 dated January 18, 2002 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 13, 2002 and Supplement thereto No. 727.

Based on the notarial deed of No. 42 dated August 10, 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, a substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta, the Company's line of business is extended by adding Syariah reinsurance business unit, and the Company's issued and paid-in capital was increased from Rp65,000,000,000 (sixty five billion rupiah) to Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) which was fully paid in by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The increase was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 dated August 31, 2005. The Company's issued and paid-in capital was further increased in accordance with the deed No. 108 dated February 22, 2007 from Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiahs) to Rp85,000,000,000 (eight five billion rupiahs) which was subscribed and fully paid by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The notarial deed No.108 was registered in the database of Sisminbakum of the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. W7-HT.01.04-4562 dated April 9, 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 9, 2007; Supplement thereto No. 1148/2007.

1. Informasi Umum - pindahan

a. Pendirian Perusahaan - pindahan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan akta No. 12 tanggal 8 Agustus 2008 di hadapan Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta, yang menyatakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-68917.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 85 tanggal 21 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20697/2008.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010.

Sampai dengan 31 Desember 2010 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah). Dengan adanya pengalihan tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham terdiri dari 103.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setara Rp103.000.000.000 (seratus tiga milyar rupiah).

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah). Pencatatan aset tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (market value) pada tanggal 20 Mei 2011, sebesar Rp35.078.800.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan demikian jumlah modal disetor per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan milyar rupiah). Akta Notaris mengenai penambahan modal disetor tersebut tertanggal 29 Juli 2011 dengan nomor Akte 9.

Berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor : S-208/MBU/2013 tanggal 4 (empat) April 2013 (dua ribu tiga belas) perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, memutuskan pinjaman subordinasi sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) dialihkan menjadi penyertaan modal PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) pada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Dengan demikian modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas milyar rupiah).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sepakat menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga milyar rupiah).

1. General Information

a. Establishment and General Information

The amendment of the Company's articles of association by notarial deed No. 12 dated August 8, 2008, made before the notary Umaran Mansjur, SH, in Jakarta, approved the change in the Company's authorized capital to conform to the Law No. 40 of 2007 on limited liability companies. The approval was granted by the Department of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. AHU-68917.AH.01.02 of 2008 dated September 2008 24, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated October 21, 2008 and Supplement thereto No. 20697/2008.

Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on November 29, 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia, it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp20,000,000,000 (twenty billion rupiah) effective November 30, 2010.

By December 31, 2010 the realized transfer of reserve funds was Rp18,000,000,000 (eighteen billion rupiah). With the transfer of the paid up capital of the Company, it has been issued and fully paid by shareholders consisting of 103,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000, - (one million rupiah) or equivalent to Rp103,000,000,000 (one hundred and three billion rupiah).

For addition in the paid-in capital, based on minute of extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated July 26, 2011 and the parent company's letter No 15/RR/DIR the Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Menteng District, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiah). The valuation was made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, with their report No. 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on May 20, 2011 of Rp35,078,800,000 (thirty five billion seventy eight million eight hundred thousand rupiah) . It resulted at December 31, 2011 in the amount of paid-in capital of Rp138,000,000,000 (one hundred and thirty eight billion rupiah). The notarial deed of the paid-up capital increase was dated July 29, 2011 with the deed No. 9.

Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) No. : S-208/MBU/2013 dated April 4, 2013 about PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan on PT Reasuransi Nasional Indonesia, it was decided that subordinated loans amounting Rp75,000,000,000 (seventyfive billion dollars) was converted into equity of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) on PT Reasuransi Nasional Indonesia. Thus the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia as per December 31, 2013 was Rp213,000,000,000 (two hundred and thirteen billion rupiah).

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated September 23, 2014 regarding additional paid-in capital of Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) agreed to increase the paid up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia amounting Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) by December 31, 2014 that the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia became Rp463,000,000,000 (four hundred sixty three billion rupiah) accordingly.

1. Informasi Umum - pindahan

a. Pendirian Perusahaan - pindahan

Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 24 Juni 2015 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga per 31 Desember 2015 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah). Pengesahan mengenai penambahan modal disetor tersebut berdasarkan Akta Notaris tertanggal 13 Juli 2015 dengan nomor Akte 53 yang dibuat di hadapan H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH, Notaris di Jakarta,

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i Menyelenggarakan usaha pertanggungungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
- ii Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- iii Melakukan retrosesi atau reasuransi sub i di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- iv Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

b. Misi, Visi, Tujuan dan Lapangan Usaha

i. Misi Perusahaan

Pernyataan misi perusahaan yang merupakan tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan usaha perusahaan, dirumuskan seperti dibawah ini :

- 1) Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah;
- 2) Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional;
- 3) Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada stakeholder lainnya.

ii. Visi Perusahaan

Pernyataan misi tersebut yang menunjukkan peran yang akan diambil oleh perusahaan sejalan dengan cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang atau visi perusahaan, yaitu :

"Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh, dan terus tumbuh".

1. General Information

a. Establishment and General Information

Further in 2015 by the decision made in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on June 24, 2015 concerning the increase in paid-up capital of initially Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) added the paid-up capital PT Reasuransi Nasional Indonesia so that as at December 31, 2015 the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia became Rp538,000,000,000 (five hundred and thirty-eight billion rupiahs). The ratification of the increase in capital by notarial deed No. 53 dated July 13, 2015, made before the notary H. Bambang Suprianto SH, SpN, MH in Jakarta.

The goals and objectives of the Company are to participate in implementing the government policies and in supporting the government's programs in economy and national development in general, and running a high quality and competitive reinsurance business in particular, and to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles, by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either on the basis of conventional principles or syariah principles.

To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:

- i doing reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
- ii accepting reinsurance of general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers; and
- iii doing retrocession or reinsurance business as mentioned in point i above to insurance and/ or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers
- iv doing some portions of the reinsurance business under Syariah principles, by establishing a Syariah unit.

b. Mission, Vision, Objectives and Line of Business

i. The Company's Mission

The mission statement of the Company which is the Company's long-term goals that underlie the company's business, defined as below:

- 1) Providing services and solutions on general reinsurance and life insurance, both in conventional and syariah bases;
- 2) Providing services in the national, regional, and International markets;
- 3) Provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and the capacity of national insurance and to other stakeholders.

ii. Company's Vision

The mission statement that shows the role to be taken by the Company in line with the goals to achieve in the future or the vision of the Company, i.e.:

"To be the most trusted, strong and growing reinsurance company"

1. Informasi Umum - pindahan

b. Misi, Visi, Tujuan dan Lapangan Usaha - pindahan

iii. Tujuan dan Lapangan Usaha

Sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pendirian tujuan dan lapangan usaha dari perseroan adalah

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dibidang reasuransi dalam arti seluas-luasnya;
- 2) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan menyelenggarakan segala macam usaha reasuransi;
- 3) Perseroan dapat pula menjalankan usaha yang sama dengan bidang usaha Perseroan tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, secara bersama-sama dengan perusahaan atau badan lain sepanjang usaha tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dan ketentuan berlaku dalam Anggaran Dasar

c. Struktur Organisasi

Susunan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	<u>Tahun 2016/ Year 2016</u>
Komisaris	
Komisaris Utama	Rinarno Pramudiyanto
Komisaris	Endang Tri Kuswati
Komisaris Independen	Raymond Buisson
Komisaris Independen	Edy Suandi Hamid

	<u>Tahun 2016/ Year 2016</u>
Direksi	
Direktur Utama	-
Plt. Direktur Utama	Edhie Mulyono
Direktur Operasi	Edhie Mulyono
Direktur Keuangan & SDM	Rusdianto

Komisaris

Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 17 Februari 2016 memutuskan untuk :

1. Memberhentikan dengan hormat saudara Sulaeman sebagai Komisaris PT. Reasuransi Nasional Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016
2. Mengangkat Dewan Komisaris PT. Reasuransi Nasional Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu 2016 s.d 2021 dengan susunan dan ketetapan sebagai berikut :
 - i. Komisaris Utama : Rinarno Pramudiyanto
 - ii. Komisaris : Endang Tri Kuswati
 - iii. Komisaris Independen : Raymond Buisson
 - iv. Komisaris Independen : Edy Suandi Hamid

Keputusan tersebut tercatat dalam akta No. 24 tanggal 16 Maret 2016 di hadapan Arleni Sahfitri Purba, SH Notaris pengganti dari H. Bambang Suprianto, SH, MH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0032095 tanggal 17 Maret 2016.

Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan tanggal 09-02-2016 memutuskan untuk mengangkat kembali anggota Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak tanggal 09-02-2016 dengan susunan sebagai berikut :

1. General Information

b. Mission, Vision, Objectives and Line of Business

iii. Objectives and Line of Business

As stated in the Articles of Incorporation, the goals and line of business of the Company are:

- 1) To conduct and support government policies and programs in the field of economic and national development in general, especially in the field of reinsurance in the broadest sense;
- 2) To achieve the objectives the Company organizes all kinds of reinsurance business;
- 3) The Company may also carry out the same ventures with the business of the Company in points 1 and 2 above, together with other companies or other entities as long as these ventures do not violate the laws and regulations in force as well as conditions and provisions in the Articles of Association.

c. The Company's Management

Members of the Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

	<u>Tahun 2015/ Year 2015</u>	
		Commissioners
Rinarno Pramudiyanto		President
Sulaeman		Commissioner
Raymond Buisson		Independent Commissioner
-		Independent Commissioner

	<u>Tahun 2015/ Year 2015</u>	
		Board of Directors
M.Shaifie Zein		President Director
-		Caretaker President Director
Edhie Mulyono		Operations Director
Rusdianto		Finance and Human Resources Director

Commissioners

According to the General Meeting of Shareholders (AGM) dated February 17, 2016, it was decided as follows:

1. Terminate with honor Mr. Sulaeman as a Commissioner of PT. Reasuransi Nasional Indonesia as of the date February 17, 2016
2. Appointing the Board of Commissioners of PT. Reasuransi Nasional Indonesia for a term of 5 (five) years, 2016 to 2021, as follows:
 - i. President : Rinarno Pramudiyanto
 - ii. Commissioner : Endang Tri Kuswati
 - iii. Independent Commissioner : Raymond Buisson
 - iv. Independent Commissioner : Edy Suandi Hamid

The decision is recorded in the deed No. 24 dated March 16, 2016 in the presence of Arleni Sahfitri Purba, SH, substitute notary of H. Bambang Suprianto, SH, MH, Notary in Jakarta. These amendments have been approved by the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032095 dated March 17, 2016.

Board of Directors

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 09, 2016 decided to reappoint members of the Board of Directors of PT Reasuransi Nasional Indonesia since the date of February 09, 2016 with the following composition:

1. Informasi Umum - pindahan

c. Struktur Organisasi - pindahan

Direksi - pindahan

Direktur Utama	:	M.Shaifie Zein
Direktur Operasi	:	Edhie Mulyono
Direktur Keuangan dan SDM	:	Rusdianto

Pengangkatan Direksi PT. Reasuransi Nasional Indonesia ditetapkan dengan memperhatikan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-83/MBU/01/2016 tanggal 25-01-2016 mengenai persetujuan calon Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas keputusan tersebut telah diaktakan pada tanggal 8 Maret 2016 Nomor 13.

Berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor 31/DK/NR/VII/ 2016 tertanggal 19 Juli 2016 yang berisi: Berkenaan dengan kekosongan posisi jabatan Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan memperhatikan :

1. Pernyataan pengunduran diri Sdr. M. Saifie Zein dari posisi jabatannya selaku Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia yang disampaikan melalui surat Nomor: 456/DIR/NR/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
2. Surat Pemegang Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor: 1167/DIR tanggal 18 Juli 2016 perihal Penunjukan Plt Direktur Utama dan Usulan Calon Direktur PT Nasre;
3. Surat Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia kepada Pemegang Saham Nomor: 30/DK/NR/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia;

Sesuai pasal 16 ayat 25 Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 12 tanggal 8 Agustus 2008, Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia memutuskan menunjuk dan menetapkan Edhie Mulyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama. Penetapan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan adanya penetapan Direktur Utama secara definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-00229858 tanggal 09 Maret 2016.

Unit Syariah

Sesuai surat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS	Chairman
Anggota	Drs. H. Safaruddin Rozali, MM	Member
Anggota	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM	Member

Struktur organisasi PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- i. Divisi Underwriting Treaty dan Retrosesi yang membawahi 2 bagian:
 - Bagian Retrosesi
 - Bagian Treaty
- ii. Divisi Facultative yang membawahi 3 Bagian
 - Bagian Facultative Fire & Engineering
 - Bagian Facultative Non-Fire
 - Bagian Facultative Marine & Casualty

1. General Information

c. The Company's Management

President Director	:	M.Shaifie Zein
Director of Operations	:	Edhie Mulyono
Director of Finance and Human Resources	:	Rusdianto

The appointment of the Board of Directors of PT. Reasuransi Nasional Indonesia determined by considering the letter of the Minister of State Owned Enterprises No. S-83/MBU/01/2016 dated January 25, 2016 on approval of the candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia and also considering the prevailing legislations and regulations. The decision was notarized on March 8, 2016 by No. 13.

Based on the letter of the Board of Commissioners No. 31/DK/NR/VII/2016 dated July 19, 2016 which contains the following: With regard to the post vacancy of President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia, and considering:

1. The resignation statement of Mr. Saifie M. Zein from his position as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia delivered through letter No. 456/DIR/NR/VII/2016 dated July 11, 2016;
2. The letter of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia No.: 1167/DIR dated July 18, 2016 regarding the appointment of the Caretaker President Director and the Nominated Candidates for Director of PT Nasre;
3. The Letter of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia to Shareholders No. 30/DK/NR/VII/2016 dated July 19, 2016 regarding the appointment of Caretaker President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia;

Furthermore, according to Article 16, paragraph 25, Amendment of Articles of Association of PT Reasuransi Nasional Indonesia No. 12 dated August 8, 2008, the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia decided to appoint and assign Edhie Mulyono as Caretaker President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia with full authority. This designation has been effective from July 19, 2016 until the determination of definite President Director by the General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia. These amendments have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03.00229858 dated March 9, 2016

Syariah Unit

In conformity with the letter of Dewan Syariah Nasional (National Syariah Board) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 dated August 27, 2005 on Recommendation of Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah), the members of Syariah Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia are as follows:

Organizational structure PT Reasuransi Nasional Indonesia in 2016 is as follows:

- i. Underwriting Treaty and Retrocession Division, which supervises 2
 - Retrocession
 - Treaty
- ii. Facultative Division, which supervises 3 departments
 - Facultative Fire & Engineering
 - Facultative Non-Fire
 - Facultative Marine & Casualty

1. Informasi Umum - pindahan

c. Struktur Organisasi - pindahan

- iii Divisi Reasuransi Jiwa yang membawahi :
 - Bagian Reasuransi Jiwa
- iv Divisi Klaim yang membawahi 2 bagian
 - Bagian Klaim Fire & Engineering
 - Bagian Klaim Non-Fire
- v Divisi Reasuransi Syariah yang membawahi 3 bagian
 - Bagian Underwriting & Klaim Umum
 - Bagian Underwriting & Klaim Jiwa
 - Bagian Keuangan & Akuntansi
- vi Divisi Keuangan & Akuntansi yang membawahi 3 bagian
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Akuntansi
 - Bagian Penagihan
- vii Divisi SDM & Umum yang membawahi 3 bagian
 - Bagian Sumber Daya manusia dan Operasional
 - Tim Perencanaan Strategis SDM
 - Bagian Umum
- viii Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi, membawahi 2 bagian
 - Bagian Perencanaan & Strategi TIK
 - Tim Operasional & Layanan
- ix Divisi Aktuaris Perusahaan, membawahi
 - Tim Aktuaris Perusahaan
- x Divisi Satuan Pengawasan Interen, membawahi 2 bagian
 - Tim Audit Operasional
 - Tim Audit Non Operasional
- xi Sekretaris Perusahaan yang membawahi 2 bagian.
 - Bagian Sekretariat & Humas
 - Bagian Hukum & Kepatuhan
- xii Divisi Manajemen Risiko, membawahi 2 bagian
 - Tim Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko
 - Tim Business Continuity Plan

Jumlah karyawan tetap tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang menjadi 201 orang dengan data sebagai berikut:

	as at Desember 31, 2016
Pegawai Tetap/Permanent Employees	195 Orang/personnel
Pegawai Honorer/Termed Employees	6 Orang/personnel
Jumlah/Total	201 Orang/personnel

Komposisi karyawan menurut jabatan, pendidikan dan keahliannya dapat dilihat dibawah ini:

i. Menurut jabatan	2016	2015	In terms of position/job title
Kepala Divisi	12	12	Heads of Divisions
Kepala Bagian	23	23	Heads of Units
Kepala Seksi	51	48	Heads of Sections
Pelaksana	79	69	Duty Officers
Pegawai Kontrak	21	0	Honorary officers
Pegawai Dasar	15	15	Junior duty officers
Jumlah	201	167	Total

1. General Information

c. The Company's Management

- iii. Life Division, which supervises :
 - Life Reinsurance
- iv. Claim Division, which supervises 2 departments
 - Claim Fire & Engineering
 - Claim Non-Fire
- v. Syariah Reinsurance Division, which supervises 3 departments
 - General Underwriting & Claims
 - Life Underwriting & Claims
 - Finance & Accounting
- vi. Finance & Accounting Division, which supervises 3 departments
 - Finance
 - Accounting
 - Collection
- vii. Human Resources & General Affairs Division, which supervises 3
 - Human Resources & Operational
 - Human Resources Strategic Planning
 - General Affairs
- viii. Information Technology & Communication Division supervises 2 units
 - Planning & Strategy ICT
 - Operations & Services Team
- ix Actuary Division
 - Corporate Actuarial Team
- x Internal Audit Unit supervises 2 departments
 - Operational Audit Team
 - Non-Operational Audit Team
- xi Corporate Secretary supervises 2 departments
 - Secretariat & Public Relations
 - Legal and Compliance
- xii Risk Management Division supervises 2 departments
 - Development Planning & Risk Management Team
 - Business Continuity Plan Team

The number of permanent employees in 2016 increased by 34 (thirty four) people to 201 people with the following composition:

The composition of employees according to job title, education and expertise can be seen below:

1. Informasi Umum - pindahan

c. Struktur Organisasi - pindahan

ii. Menurut jenjang pendidikan

Strata 2	17	15
Strata 1	163	130
Sarjana Muda / D3	5	6
Sekolah Lanjutan Atas	15	12
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	3
Sekolah Dasar	1	1
Jumlah	201	167
iii Menurut jenjang pendidikan / Keahlian		
AAIK - Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	5	5
AAIJ - Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	1	1
AAAIK - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	12	10
AAAIJ - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	11	11
FSAI - Fellow Society of Actuary Indonesia	1	1
ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance	1	1
ACII - Associate of the Chartered Institute	4	4
AMII - Associate Malaysian Insurance Institute	7	8
FIIS - Fellow Islamic Insurance Society	2	2
AIIS - Associate of Islamic Insurance Society	9	9
IPGDI - International Post Graduate Diploma in Insurance	1	1
	54	53

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk)

i. Pendirian Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), selanjutnya disebut dengan "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 dengan akta Nomor 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, SH, Notaris Pengganti di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, diantaranya melalui Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan NO.C2-7.504.HT.01.01.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 1998 nomor 92, Tambahan Nomor 6370.

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Nopember 2005 oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), yang berasal dari kapasitas konversi cadangan umum Perusahaan, dengan komposisi pemegang saham yaitu Negara Republik Indonesia sebesar Rp180.000.000.000 (180.000 saham) dan Bank Indonesia sebesar Rp220.000.000.000 (220.000 saham). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-34240 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 mei 2006 nomor 40, tambahan Nomor 508.

1. General Information

c. The Company's Management

In terms of educational background

	Post Graduate Degree
	Bachelor Degree
	Diploma degree / D3
	Senior High School
	Junior High School
	Elementary School
	Total
	In terms of professional background :
	AAIK - Indonesian General Insurance Expert
	AAIJ - Indonesian Life Insurance Expert
	AAAIK - Adjutant Indonesian General Insurance Expert
	AAAIJ - Adjutant Indonesian Life Insurance Expert
	FSAI - Fellow of the Society of Actuary of Indonesia
	ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance
	ACII - Associate of the Chartered Insurance Institute
	AMII - Associate of the Malaysian Insurance Institute
	FIIS - Fellow of Islamic Insurance Society
	AIIS - Associate of Islamic Insurance Society
	IPGDI - International Post Graduate Diploma in Insurance

d. About the Parent Company

i. Establishment of the Company

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), hereinafter referred to as "the Company", was incorporated on the basis of the Government Regulation No. 1 of 1971 dated January 11, 1971, under the notarial deed No. 2 dated April 6, 1971 of the notary Prabowo Achmad Kadijono, SH. The Company's Articles of Association have been amended in a No. of times, the latest of which was with the notarial deed No. 18 dated May 19, 1998 of the notary Imas Fatimah. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice with his letter No.C2-7.504.HT.01.04.TH.98 dated June 25, 1998 and were published in the State Gazette No. 92 dated November 16, 1998, and Supplement there to No. 6370

With the notarial deed No. 29 dated November 30, 2005 of the notary Imas Fatimah, SH, an increase in paid-in capital was made from the initially Rp320,000,000,000 (three hundred and twenty billion rupiah) to become Rp400,000,000,000 (four hundred bill, originating from conversion of the Company's general reserve, with the share holding: the Government of the Republic of Indonesia: Rp180,000,000,000 (180,000 shares) and Bank Indonesia: Rp220,000,000,000 (220,000 shares). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. C-34240 HT. 01.04.TH.2005 dated December 22, 2005, and was published in the State Gazette No. 40 dated May 19, 2006, and the Supplement thereto No. 508.

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

i. Pendirian Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) - pindahan

Selanjutnya berdasarkan Akta No.63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah mengambil keputusan antara lain : Perubahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan/portopel) sejumlah 850.000 saham (Rp850.000.000.000) diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; menyetujui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diatur dalam PP No. 65 tahun 2007. Dengan penambahan tersebut, maka modal ditempatkan yang semula Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) menjadi Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar). Akta tersebut telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25451.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 nomor 96, Tambahan Nomor 27910.

Perubahan selanjutnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sesuai dengan Akta No.102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas fatimah, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-72573.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan : penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 Nomor 96, Tambahan Nomor 27911

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan besarnya modal yang semula Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, M, Kn No. 17 tanggal 22 April 2010.

Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan berkantor pusat di jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, dengan kantor cabang di Kemayoran, Cikini, Medan, Makasar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, Samarinda, Jogjakarta, Jambi, Bengkulu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bogor, Purwokerto, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Jayapura, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Manggelang, Tasikmalaya dan Kisaran.

1. General Information

d. About the Parent Company

i. Establishment of the Company

Further, with the notarial deed No. 63, on the shareholders' decision dated April 24, 2008, concluded in general meeting of the shareholders, made before the notary Imas Fatimah, SH, the shareholders have agreed to: increase the Company's authorized capital from initially Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) to Rp2,500,000,000,000 (two trillion and five hundred million rupiah); subscribed 850,000 shares (equivalent Rp850,000,000,000) by the Government of the Republic of Indonesia; the additional investment by the Government of the Republic of Indonesia comes from the 2007 state budget, as specified in the Government Regulation No. 65 of 2007. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp400,000,000,000 (four hundred million rupiah) to become Rp1,250,000,000,000 (one trillion and two hundred fifty million rupiah). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-25451.AH.01.02 of 2008 dated May 14, 2008, and was published in the State Gazette No. 96 dated December 1, 2009, and the Supplement thereto No. 27910.

Another amendment to the Company's Articles of Association was with the notarial deed No. 102 dated August 15, 2008 of the notary Imas Fatimah, SH, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-72573.AH.01.02. of 2008 dated October 13, 2008, on changes in the Company's goals and objectives as well as in its activities to be in line with the Law No. 19 of 2003, Law No.40 of 2007, the Government Regulation No.45 of 2005 and requirements in the Company's management. The amendment was published in the State Gazette No. 96 dated December 1, 2009, and the Supplement thereto No. 27911.

With the Government Regulation No. 64 of 2009 dated October 31, 2009, an additional investment of Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty million rupiah) was made by the Government of the Republic of Indonesia, originating from the year 2009 State Budget. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp1,250,000,000,000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1,500,000,000,000 (one trillion and five hundred billion rupiah). The change in the subscribed and paid-in capital was documented in the notarial deed No 17 dated April 22, 2010 of the notary Imas Fatimah,SH.,M.Kn.

The Company domiciles in Jakarta, with the head office located at Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, and with branch offices at Kemayoran, Cikini, Medan, Makassar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, Samarinda, Jayapura and Jogjakarta. The Company also have Service Unit Offices located at Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bengkulu, Bogor, Purwokerto, Jambi, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Magelang, Tasikmalaya and Kisaran.

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

ii. Maksud, Tujuan dan Kegiatan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Pada awalnya maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya diluar perbankan. Selanjutnya dengan adanya perkembangan dunia usaha, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian sebagaimana yang dinyatakan dalam akta pendiriannya yaitu, melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan melaksanakan penutupan pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 2) Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 3) Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 4) Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Entitas Anak

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan yaitu:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

Pada saat pendirian perusahaan, bidang usaha yang dijalankan termasuk reasuransi yaitu menutup pertanggungan ulang atas risiko-risiko asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Namun, dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi. Untuk itu, pada tanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Akta No.129 dan 130 dengan Notaris Sutjipto, SH. Perusahaan mendirikan Entitas Anak dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia yang bergerak dalam usaha reasuransi, yang sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas pertanggungan nasional.

1. General Information

d. About the Parent Company

ii. The Company's Goals, Objectives and Lines of Business

Initially, the Company's goals and objectives are to assist direction and safe flows of loan fund from banks to medium and small scale industries, and to provide risk of loans insurance of other non-bank financial institutions. Further, with development in business activities, the Company's goals and objectives are changed accordingly, as specified in the Articles of Association, i.e. ventures into insurance businesses, including those under syariah principles, optimizing the Company's resources, to provide high quality services and competitive advantage to derive profit and to add value to the Company, under good corporate principles.

To achieve the goals and objectives, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) engages in the following business activities:

- 1) Provide coverage against risks of non-repayment of loans and / or financing, including financing based on Sharia principles, of debtors, especially loans to Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (MSME) provided by the Bank or financial institution, provides insurance coverage for risks of non repayment of the credit given by banks or other financial institutions
- 2) Provides direct insurance of any kind of loss insurance, and the like from inside and domestic and overseas entities, either by itself or together with other insurance companies, either for retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company.
- 3) Provides indirect insurance from domestic and overseas insurance / reinsurance companies for any type of insurance, either retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company
- 4) Performs other activities commonly conducted by insurance companies, under the legal and regulatory provisions.

iii. Subsidiary Company

PT Asuransi Kredit Indonesia has 3 (three) subsidiaries, namely:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

At the time of its incorporation, the Company's lines of business included reinsurance and life insurance. With the adoption of Law No. 2 of 1992 on line of business of insurance companies, the Company was required to separate insurance business from reinsurance one. It was, therefore, on August 22, 1994, based on the deeds No.129 and 130 of the notary Sutjipto, SH, the Company established a 99,99% interest subsidiary, PT Reasuransi Nasional Indonesia, which engaged in reinsurance business, which at the same time was intended to increase the national capacity in insurance business activities.

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iii. Entitas Anak - pindahan

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

Maksud dan tujuan dari mendirikan Entitas Anak adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PT Reasuransi Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan usaha pertanggung jawaban ulang untuk risiko yang dihadapi Perusahaan Asuransi Kerugian/Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b) Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- c) Melakukan retrosesi atau reasuransi sub a. Diatas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- d) Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Pada bulan Desember 2006, Perusahaan telah meningkatkan penyertaan saham ke Entitas Anak menjadi sebesar Rp84.999.000.000 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp74.999.000.000 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah). Peningkatan setoran modal tersebut telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia No.108 tanggal 22 Februari 2007 dengan Notaris Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010. Sampai dengan 31 Desember 2013 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).

1. General Information

d. About the Parent Company

iii. Subsidiary Company

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

The establishment of the Subsidiary is intended to support and participate in the Government's policies and programs relating to national economy and development in general, and in providing high quality and competitive insurance businesses in particular, and to gain profit in order to add value to the Company, under good corporate principles, by providing services in risks reinsurance to other insurance companies, either under conventional or sharia principles.

To achieve the goals and objectives, PT Reasuransi Nasional Indonesia engages in the following business activities:

- a) *running the reinsurance of risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;*
- b) *accepting reinsurance of general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;*
- c) *doing retrocession or reinsurance of point a. above to insurance and/or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers; and*
- d) *providing partial reinsurance services under syariah principles by establishing a syariah unit.*

In December 2006, the Company increased its investment in the Subsidiary from initially Rp74,999,000,000 (seventy four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah) to Rp84,999,000,000 (eighty four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah). The increase in paid-in capital was conveyed in the notarial deed of the amendment of Articles of Association No.108 dated February 22, 2007 of the notary Sutjipto, SH.

Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on November 29, 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia, to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp20,000,000,000 (twenty billion rupiah) effective November 30, 2010. By December 31, 2013 the reallocation of an amount of Rp18,000,000,000 (eighteen billion rupiah) was realized.

For addition in the paid-in capital, based on minute of extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated July 26, 2011 No. 15/RR/DIR the Subsidiary received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Menteng District, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company: PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35,000,000,000 (thirty five billion rupiah). The amount is recognized as paid-in capital.

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iii. Entitas Anak - pindahan

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor: S-208/MBU/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Askrindo (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia memutuskan untuk mengalihkan pinjaman Subordinasi PT Askrindo (Persero) sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Modal Disetor atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebanyak 75.000 lembar saham senilai @ Rp1.000.000, sehingga keseluruhan saham PT Askrindo (Persero) menjadi sebanyak 212.999 lembar saham senilai @ Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan disetor sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Askrindo (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 24 Juli 2015 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah), sehingga per 31 Desember 2015 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp538.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah).

2) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Dalam rangka memanfaatkan peluang pasar penjaminan syariah yang masih terbuka, pada penghujung tahun 2013 perusahaan telah mendirikan Entitas Anak yakni PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dengan modal setor sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) Perusahaan ini telah memperoleh izin dari Dewan Syariah Nasional dan Bapepam LK Departemen Keuangan RI pada tanggal 28 Desember 2013 dan telah beroperasi sejak Mei 2014.

Maksud dan tujuan dirikannya Perusahaan ini adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. General Information

d. About the Parent Company

iii. Subsidiary Company

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Number: S-208/MBU/2013 dated April 4, 2013 concerning PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan to PT Reasuransi Nasional Indonesia, it was decided to divert the Subordinated Loans to Paid-in Capital on behalf of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia in PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah), equals to 75,000 shares of par value of Rp1,000,000 each, so that the entire stock of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia become 212,999 shares of par value of Rp1,000,000 (one million rupiah) each.

Based on the decision made in Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on September 23, 2014, on additional paid-in capital, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) has added Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) in paid-in capital in PT Reasuransi Nasional Indonesia, resulting in the paid-in capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp463,000,000,000 (four hundred and sixty three billion rupiah).

In 2015 by the decision made in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on July 24, 2015 concerning the increase in paid-up capital of initially Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) added to the paid-up capital PT Reasuransi Nasional Indonesia so that as at December 31, 2015 the paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia becomes Rp538,000,000,000 (five hundred and thirty-eight billion rupiahs).

2) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

In order to take advantage of market opportunities that are still open for Syariah insurance, at the end of 2013, the Company has established a subsidiary named PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, with a paid up capital of 100 billion rupiahs. The company has obtained a license from the National Syariah Board and Indonesia Financial Services Board (OJK) on December 28, 2013 and has been operating since May 2014.

The goals and objectives are to contribute to implement and support the government's policies and economic programs and national development in general, especially in the field of financing insurance business under Islamic principles as well as optimizing the utilization of company resources to produce high-quality services and strong competitiveness to increase the value of the Company by applying the principles of good corporate governance.

To achieve the goals and objectives, the Subsidiary engages in the following business activities:

- a) *provides financing insurance under syariah principles;*
- b) *undertake other businesses relevant to business relationship with kafalah (guarantee) in accordance with prevailing legal and regulatory requirements.*

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iii. Entitas Anak - pindahan

3) PT Askrindo Mitra Utama

PT Askrindo Mitra Utama awal dibentuknya bernama PT Usayasa Utama. Entitas mengganti Nama dan Logo perusahaan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 08 Januari tahun 2016 dan telah disahkan Berdasarkan Akta Notaris No. 06 tanggal 4 Februari 2016 oleh Notaris Hadijah, SH. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003461.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016.

Tujuan Pemegang Saham membentuk PT Askrindo Mitra Utama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan usaha, baik produk eksisting maupun produk-produk baru yang akan dikembangkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) serta menambah jejaring bisnisnya. Dengan demikian, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat lebih fokus dalam menggali produk-produk baru, menyempurnakan produk eksisting, meningkatkan pelayanan pelanggan dan mengembangkan prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*).

PT Askrindo Mitra Utama didirikan pada tanggal 7 Oktober 1997 dengan Akta Pendirian Perusahaan dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H. yaitu Akta No. 5 tahun 1997. Perusahaan ini didirikan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sebagai pemegang saham mayoritas dan Koperasi Karyawan Askrindo (KKA) sebagai pemegang saham minoritas.

Pada awal tahun 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mengambil alih sebagian tersebut sebesar saham 95% dan telah di sahkan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH No. 28 tanggal 30 Januari 2014. Pengambilalihan ini dilatarbelakangi oleh kepentingan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) memasarkan produk-produknya yang diageni oleh PT Askrindo Mitra Utama.

Sesuai risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 23 Desember 2014, modal dasar Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi dalam 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham.

Dari modal saham tersebut telah disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

iii. Entitas Anak - pindahan

3) PT Askrindo Mitra Utama - pindahan

Dengan menjadi pemegang saham pengendali, maka PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat memanfaatkan keberadaan PT Askrindo Mitra Utama secara optimal dalam mendukung fungsi pemasaran produk PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Selain itu, PT Askrindo Mitra Utama dapat menjadi "jembatan" dan instrument bagi Askrindo untuk memasuki industri penunjang bisnis asuransi yang diperkirakan mampu memberikan yield usaha yang relatif tinggi.

1. General Information

d. About the Parent Company

iii. Subsidiary Company

3) PT Askrindo Mitra Utama

Initially, PT Askrindo Mitra Utama was named PT Usayasa Utama. The entity changed the company name and logo based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 08, 2016 which has been ratified by notarial Deed No. 06 dated February 4, 2016 by Hadijah, SH, notary in Jakarta. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0003461.AH.01.02.Tahun 2016 dated February 22, 2016.

*The objective of the Shareholders in establishing PT Askrindo Mitra Utama is to increase growth in revenue, both from existing products and/or new products that will be developed by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and increase business networking. Thus, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) will be more focused in exploring new products, enhance existing products, improving customer service and developing the principle of customer recognition (*Know Your Customer*).*

PT Askrindo Mitra Utama was established on October 07, 1997 with the notarial deed No. 5 in 1997 of the notary Sulami Mustafa, SH. The company was founded by Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) as the majority shareholder and Askrindo Employees Cooperative (KKA) as minority shareholder.

In early 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) took over the majority stake of 95% and has been legalized by notarial deed No. 28 dated January 30, 2014 by notary Hadijah, SH. This acquisition was triggered by the interest of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for marketing its products for which PT Askrindo Mitra Utama acts as one of the agents.

In line with the minutes of the General Meeting of the Extraordinary Shareholders (EGM) on December 23, 2014, the Company's authorized capital was Rp10,000,000,000, - (ten billion rupiah) divided into 10,000 (ten thousand) shares with a par value of Rp1,000,000, - (one million rupiah) per share.

25% or 2,500 shares have been paid in amounting to Rp2,500,000,000 (two billion and five hundred million rupiah) out of the capital shares above, comprising the following:

iii. Subsidiary Company

3) PT Askrindo Mitra Utama

By becoming the controlling shareholder, then PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) can benefit from the presence of PT Askrindo Mitra Utama optimally in support of marketing functions of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) products. In addition, PT Askrindo Mitra Utama can act as bridging unit and instrument for PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to penetrate the insurance business support industry which is predicted to provide a relatively high yield.

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iv. Permodalan

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah merealisasikan penambahan PMN sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) tanggal 28 Desember 2007 sesuai dengan akta No. 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, di hadapan notaris Imas Fatimah, SH, dan Surat dari Meneg BUMN No. S-137/MBU/2010 tanggal 3 Maret 2010 ditetapkan penambahan penyertaan modal negara RI sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga keseluruhan PMN RI menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus milyar rupiah).

Penambahan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham menjadi 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), sesuai akta notaris Imas Fatimah, SH., MKn notaris di Jakarta No. 17 tanggal 22 April 2010.

Berdasarkan PP 81 tahun 2010 Pemerintah menambah PMN RI sebesar Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus milyar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus milyar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2011 sesuai PP No. 60 tahun 2011 tanggal 29 Des 2011 Pemerintah menambah PMN sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah) dan pada tahun 2013 berdasarkan surat dari Menteri Negara BUMN No. S-390/MBU/2013 tanggal 25 Juli 2013, Pemerintah memberikan kembali tambahan PMN sebesar Rp831.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh satu milyar rupiah), sehingga total PMN sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah) sehingga berdasarkan Perubahan anggaran dasar Perusahaan, modal menjadi 3.631.000 lembar dengan nilai Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah). Pada tahun 2013 Pemerintah kembali menambahkan PMN sebesar Rp 880.000.000.000 (delapan ratus delapan puluh milyar rupiah) sehingga sampai dengan bulan Desember 2013 total PMN adalah sebesar Rp4.511.000.000.000 (Empat triliun lima ratus sebelas milyar rupiah).

1. General Information

d. About the Parent Company

iv. Capital

Addition in the Government Investment.

The President's Instruction (Inpres) No. 6 of 2007 is a policy to expedite development in real sector and empowerment of small scale and medium industries to boost growth in the national economy. In relation to the policy, on December 28, 2007 the Government added its national investment amounting to Rp850,000,000,000 (eight hundred and fifty billion rupiah), with the notarial deed No. 63 dated April 24, 2008, of notary Imas Fatimah, SH. The deed was made following the decision of the shareholders which was made outside their general meeting. Further, with the letter No. S-137/MBU/2010 dated March 03, 2010, the Minister of SOEs has decided to add another Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) to its investment originating, resulting in a total of Rp1,100,000,000,000 (one trillion and one hundred billion rupiah) of the additional Government's investment.

The additional investment is intended to increase the Company's business capacity and to strengthen its capital structure for insuring loans provided to the community's businesses and for improving micro business activities, and in turn to increase growth in the national economy.

Based on the deed No. 102 dated August 15, 2008 of notary Imas Fatimah, SH, the subscribed and paid-in capital of the Company is 1,250,000 shares of par value of Rp1,000,000 (one million rupiah) each, and based on the Government Regulation No. 64 of 2009 additional investment was made by the Government in the amount of Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah), originating from the year 2009 state budget. It resulted in increase of the Company's paid-in capital from initially Rp1,250,000,000,000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1,500,000,000,000 (one trillion and five hundred billion rupiah), which is documented in the notarial deed No. 17 dated April 22, 2010 of the notary Imas Fatimah, SH., MKn.

Based on the Government Regulation No.81 of 2010, the Government has again added another investment in the amount of Rp900.000.000.000 (nine hundred billion rupiah), resulting in the total paid in capital of Rp2.400.000.000.000 (two trillion and four hundred billion rupiah). In 2011, with the Government Regulation No.60 of 2011 dated 29 December 2011 the Government puts another investment in the amount of Rp800.000.000.000 (eight hundred billion rupiah). Subsequently with the Minister of SOE's letter No. S-390/MBU/2012 dated 25 July 2012, the government again added its investment of Rp.831.000.000.000 (eight hundred and thirty one billion rupiah) , to come to a total of Rp.3.631.000.000.000 (three trillion six hundred and thirty one billion rupiah). In 2013 the Government again adding PMN of Rp880.000.000.000 (eight hundred and eighty billion rupiahs) so that up to the month of December 2013 the total PMN is Rp4.511.000.000.000 (four trillion and five hundred eleven billion rupiahs).

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iv. Permodalan - pindahan

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) - pindahan

Pada tanggal 31 Desember 2014 Pemerintah menambah PMN sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus milyar rupiah) sehingga total PMN sampai dengan akhir tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.211.000.000.000 (lima triliun dua ratus sebelas milyar rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2015 Pemerintah menambah PMN sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) sehingga total PMN sampai akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp5.711.000.000.000 (lima triliun tujuh ratus sebelas milyar rupiah) Penambahan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

v. Struktur Organisasi

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: KEP-23/MBU/2006 dan Nomor: 8/16/KEP.GBI/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-komisaris PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan Keputusan Meneg BUMN Nomor: KEP-202/MBU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero), Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-27/MBU/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pengangkatan Komisaris Independen, Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor: SK-161/MBU/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), serta Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor: SK-122/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Nomor: SK-213/MBU/09/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 / Year 2016	
Dewan Komisaris PT Askrindo (Persero)	
Komisaris Utama	Siti Agnes Ratnawati
Komisaris	Deddy S. Priatna
Komisaris	Kondar Sinaga
Komisaris	Silvester Budi Agung
Komisaris Independen	Agustina Murbaningsih

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: KEP-149/MBU/2007 dan Nomor: 9/31/KEP.GBI/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan sesuai dengan akta No. 50, notaris Imas Fatimah SH di Jakarta perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 30 Oktober 2009, dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-354/MBU/2013 tanggal 16 September 2013, serta Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-397/MBU/2013 tanggal 22 November 2013, dan Nomor SK-229/MBU/09/2016 tanggal 9 September 2016, maka susunan Direksi per 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:

1. General Information

d. About the Parent Company

iv. Capital

Addition in the Government Investment.

On December 31, 2014 the Government increased PMN of Rp700.000.000.000 (seven hundred billion rupiahs) so that the total PMN until the end of 2014 amounted Rp5.211.000.000.000 (five trillion and two hundred eleven billion rupiahs), and on December 31, 2015 the Government increased PMN for Rp500.000.000.000 (five hundred billion rupiahs) so that the total PMN until the end of 2015 amounted Rp5.711.000.000.000 (five trillion seven hundred and eleven billion rupiahs). Additions made to increase capacity business and strengthen the company's capital structure in order to implement the people's business credit guaranteed for the survival and development of real sector activities by micro, small and medium enterprises in order to boost national economic growth.

v. Organizational Structure

Composition of the Board of Commissioners per December 31, 2016 and 2015 under the Joint Decree of the Minister for State Owned Enterprises and the Governor of Bank Indonesia Number: KEP-23/MBU/2006 and No. 8/16/KEP.GBI/2006 dated February 15, 2006 on Dismissal and Appointment of members of Commissioners of PT (Persero) Credit Insurance Indonesia and the Decree of State Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-202/MBU/2011 dated August 22, 2011 on Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of PT Askrindo (Persero), copy of the Decree of the Minister state Owned Enterprises No. KEP-27/MBU/2012 dated January 17, 2012 on the Appointment of the Independent Commissioner, the Minister of SOEs as the AGM-Owned Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Number: SK-161/MBU/2013 dated February 27, 2013 on the Appointment of Members of BOC of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), as well as the Minister of SOEs As General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia Number: SK-122/MBU/2014 dated June 10, 2014 and No. SK 213/MBU/09/2016 dated September 5, 2016 on the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia are as follows:

Tahun 2015 / Year 2015		Commissioners
Suradji		President
Deddy S. Priatna		Commissioner
Kondar Sinaga		Commissioner
Silvester Budi Agung		Commissioner
Siti Agnes Ratnawati		Independent Commissioner

Based on the Joint Decree of the Minister for State Owned Enterprises and the Governor of Bank Indonesia Number: KEP-149/MBU/2007 and No. 9/31/KEP.GBI/2007 dated July 17, 2007 and in accordance with the deed No. 50, notary Imas Fatimah SH in Jakarta regarding the Statement of Shareholders Off Meeting of the Company dated October 30, 2009, and the Decree of the Minister for State Owned Enterprises Number: SK-354/MBU/2013 dated September 16, 2013, and Decree of the Minister of Enterprises State Property Number: SK-397/MBU/2013 dated November 22, 2013, and No. SK-229/MBU/09/2016 dated September 9, 2016, the Board of Directors per December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

1. Informasi Umum - pindahan

d. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk) - pindahan

iv. Permodalan - pindahan

v. Struktur Organisasi - pindahan

<u>Tahun 2016 / Year 2016</u>	
Direksi PT Askrindo (Persero)	
Direktur Utama	Budi Tjahjono
Direktur Pemasaran	Dwi Agus Sumarsono
Direktur Teknik	M. Shaifie Zein
Direktur Keuangan	Sabdono
Direktur SDM & Umum	Firman Berahima

PT Askrindo (Persero) adalah perusahaan asuransi nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham. Jumlah modal sebanyak 4.511.000 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp4.511.000.000.000,- (empat triliun lima ratus sebelas milyar rupiah) dengan nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia yang dimiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah 99% terdiri dari 462.999 lembar saham @Rp1.000.000 (satu juta rupiah) senilai Rp462.999.000.000 (empat ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

e. Pernyataan atas Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah mata uang Rupiah (Rp) dengan pembulatan dalam rupiah penuh dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan ini, Perusahaan mendefinisikan setara kas adalah kas dan bank, tanpa adanya pembatasan penggunaan atau tujuan tertentu.

Dengan berlakunya PSAK 1 (Revisi 2013) per 01 Januari 2015, tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 28 (revisi 2011) yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian atas penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK tersebut di atas. Semula disusun berdasarkan PSAK 28 (Revisi 2004) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian.

1. General Information

d. About the Parent Company

iv. Capital

v. Organizational Structure

Tahun 2015 / Year 2015

Antonius Chandra S.N.
Singgih Hardjanto
Singgih Hardjanto
T. Widya Kuntarto
Sabdono

Board of Directors

President Director
Marketing Director
Technical Director
Finance Director
HR & GA Director

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) was a national insurance company whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, through the Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) as Authorized Shareholders. Total capital as much as 4,511,000 have been issued and fully paid Rp4,511,000,000,000 (four trillion five hundred and eleven billion rupiah) with a par value of Rp1,000,000, - (one million rupiah)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) is the Parent Company of PT Reasuransi Nasional Indonesia, having 99,99% of shares equivalent to 462,999 unit @ Rp1,000,000 (one million rupiah), or totally Rp462,999,000,000,-(four hundred sixty two billion nine hundred and ninty nine million rupiah).

e. Statement of Compliance with SAK

The Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the accounting standards in Indonesia.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Summary of significant accounting policies adopted by the Company for the preparation of the financial statements in conformity with Indonesian accounting principles:

a. Presentation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared on accrual basis. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), and the financial statements are prepared on the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using direct method with the following classifications: operating, investing and financing activities. For cash flows reporting purposes, the Company defines cash equivalents include cash in banks, unrestricted in use and not designated for certain purpose.

With the pronouncement of PSAK 1 (Revised 2013) in January 01, 2015, on Presentation of Financial Statements, the Company has made necessary adjustments in the presentation of financial statements to conform to the PSAK. Previously the financial statements were prepared on the basis of PSAK 28 (Revisi 2004) on Accounting for Loss Insurance.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - lanjutan

b. Aset dan Liabilitas Keuangan

Pada tahun 2015, DSAK IAI menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Ketiga pernyataan ini menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan"; PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Ketiga pernyataan tersebut berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2014) dan PSAK 55 (Revisi 2014), serta PSAK 60 (Revisi 2014), perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari investasi, kas dan setara kas, piutang reasuransi, piutang retrosesi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

c. Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam beberapa kategori. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan dan upaya, perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan ketika mencatat transaksi aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi yang diperdagangkan serta reksadana.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya. Dalam hal pinjaman yang diberikan dan piutang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan piutang dan pinjaman yang diberikan tersebut. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur pinjaman yang diberikan dan piutang, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti berikut:

2. Summary of Significant Accounting Policies

b. Financial Assets and Liabilities

In 2015, the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) issued PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK 55 (Revisi 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60 Financial Instruments: Disclosure. The above statements replace PSAK 50 (Revisi 2006) "Accounting for Investment in Certain Securities" and PSAK 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities". Those statements are effective for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 2012.

In the application of PSAK 50 (Revisi 2014), PSAK 55 (Revised 2014), and PSAK 60 (Revised 2014), the Company has to classify the financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Company's financial assets include investments, cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets

The Company's financial liabilities include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments.

c. Financial Assets

The Company classifies its financial assets into several categories. This classification depends on the designation of the financial assets. Management determines the classification of financial assets at its initial recognition. The Company uses trade-date-accounting in recording financial assets transactions

i. Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or

Financial assets measured at fair value through profit and loss are financial assets that are designated for trading. Financial assets classified as trading if acquired primarily for the purpose of sale or repurchased in the near future and there is evidence of current short-term profit taking. Derivatives are classified as assets for trading unless designated and effective as hedging instruments.

The Company's financial assets which are classified as financial assets for trading include shares, bonds for trading and mutual funds.

ii. Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payment and do not have price quotation in active market.

At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value. When loan and receivable are not measured at fair value through profit and loss, the fair value is added with all directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, the entity measures the loan and receivable at fair value, not deducted with transaction costs at sale or other means of disposal, except for the following loans and receivable:

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

c. Aset Keuangan - pindahan

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang - pindahan

- 1) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- 2) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- 3) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi piutang reasuransi, piutang retroseksi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

iii. Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- 1) Investasi pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- 2) Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- 3) Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sampai saat ini perusahaan belum memiliki aset keuangan yang memenuhi syarat kategori dimiliki hingga jatuh tempo.

iv. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meliputi obligasi, reksadana dan penyertaan saham.

Pada saat ini perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang memenuhi kategori aset tersedia untuk dijual

2. Summary of Significant Accounting Policies

c. Financial Assets

ii. Loans and receivables

- 1) *loans and receivables designated for sale in the near future, classified as for trade, and loans and receivables which at initial recognition classified as financial assets measured at fair value through profit and loss;*
- 2) *loans and receivables which at initial recognition are designated as available for sale, or*
- 3) *loans and receivables for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration; they are classified as available-for-sale. They are measured at cost and amortized using effective interest rate.*
- 4) *The Company's financial assets which are classified as loans and receivables include cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets.*

iii. Held-to-Maturity Financial Assets

Financial assets classified as held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and have defined maturities, and management has the positive intention and ability to hold the financial assets to maturity, unless:

- 1) *Investment at initial recognition designated as financial assets measured at fair value through profit and loss.*
- 2) *Investment classified by the entity as available for sale.*
- 3) *Investments which have the definition of loans and*

At initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at their fair values plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate. Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as held to maturity.

iv. Financial Assets Available for Sale

Investments classified as available for sale are non-derivative financial assets designated as held for a specified period which will be sold for liquidity purposes or to expect changes in interest rates, foreign exchange or those financial assets which are not classified as loans or receivables, investments which are classified as held to maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

When there is impairment in value of financial assets classified as available for sale, the accumulated gains and losses previously recognized in equity are recognized in statement of income. However, interest income which is calculated using the effective interest rate method is recognized in statement of income.

The Company's financial assets classified as available for sale include bonds, mutual funds and investment in stocks.

Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as available for sale.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

d. Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam beberapa kategori

i Liabilitas Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi.

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

ii Liabilitas Keuangan Yang Diukur Dengan Biaya Perolehan Diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain - lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

e. Nilai Wajar Instrumen Keuangan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran (bid price). Sedangkan untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan (offer price).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan perbedaan antara estimasi dan realisasi dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

2. Summary of Significant Accounting Policies

d. Financial Liabilities

The Company classifies its financial liabilities into several categories

i Financial Liabilities Measured At Fair Value Through Profit and Loss Statement.

The fair value of financial liabilities measured at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading.

Financial liabilities are classified as held for trading if acquired principally for the purpose of selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a pattern of short term profit taking that date. Derivatives are classified as liabilities for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. There are no financial liabilities The Company is classified as financial liabilities held for trading.

ii Financial Liabilities Measured at Amortized Cost.

Financial liabilities which are not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss are classified and measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized cost include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments

e. Estimated Fair Value

The fair value of financial instruments held for trading in active market is based on the prevailing market value at the balance sheet date. The fair value used by the Company for the assets owned or obligations to be issued is the bid price. While for assets to be acquired or liability held is the offered price.

The fair value of financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques.

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian accounting principles, requires that the management make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of its contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those estimates

In preparing the financial statements, the Management has made their best judgments and estimates over certain amounts. Judgments and estimates used in these financial statements are based on the Management's evaluation of relevant facts and circumstances at the date of the financial statements. Actual results could differ from these estimates, and the difference between the estimated and realization is charged or credited to current operations.

Information on the major assumptions which is made concerning the future and major source of other estimated uncertainty at the end of the reporting period, that have significant risks resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are described below.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

i. Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS).

Perusahaan membuat estimasi atas risiko klaim yang harus dibayar di masa yang akan datang berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini dan yang akan datang. Estimasi klaim retensi sendiri adalah estimasi klaim yang menjadi tanggungan perusahaan, sebelumnya dihitung berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Mulai tahun 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-09/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu sebagai berikut:

- 1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a) nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian;
 - b) nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*).
- 2) Nilai klaim untuk produk asuransi dan atau produk reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
- 3) Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian reasuransi.
- 4) Dalam hal cadangan klaim dalam proses belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah prosentase rata-rata klaim yang dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.

Penentuan Estimasi Klaim Retensi Sendiri Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, penggunaan metode loss ratio, margin provision of adverse deviation (PAD), tingkat inflasi masa lalu dan masa datang, dan bunga diskonto. Perubahan dalam asumsi yang diterapkan akan berdampak pada beban klaim yang diakui dalam laba (rugi) perusahaan dan mungkin dimasa depan akan direvisi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS). Nilai tercatat Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.472.225.992.149,- (Catatan 23).

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

i. Estimated Own Retention Claims (EKRS).

The Company makes an estimate of the risk of claims to be paid in the future based on consideration of current conditions and future. Estimated own retention claims are estimated to be borne by the company claims, previously calculated based on the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 424/KMK/06/2003 September 30, 2003. Starting in 2013 calculated by the Chairman of Bapepam Regulation No. PER-09/BL/2012 dated December 27, 2012 on Guidelines for the Establishment of the Technical Reserves of Insurance and Reinsurance Company is as follows:

- 1) Technical reserves in the form of least claims reserve is calculated by the sum of:
 - a) the estimated value of the claims that are still in the process of
 - b) the estimated value of claims incurred but not reported (IBNR).
- 2) Value of claims for insurance or reinsurance products which are still in the process of completion is estimated at least on the basis of central estimate or best estimate for claims that have occurred and have been reported but are still in the process of completion, together with insurance loss appraisal costs, legal settlement costs and other costs associated with the settlement of claims.
- 3) Value of claims incurred but not reported is estimated as the central or best estimate for claims incurred but not reported claims using the ratio method or one of the triangle methods, together with costs of assessor loss reinsurance assessor.
- 4) In the case of claims reserves in the process can not be estimated, the amount reserved is the average percentage of claims paid to the sum insured for the same line of business in the last financial year multiplied by the sum of the claim.

In determining of Estimated Own Retention Claims the Company relies on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the use of methods of loss ratio, margin provision of adverse deviation (PAD), the inflation rate of the past and the future, and the discount rate. Changes in the assumptions applied will impact the claims expense recognized in earnings (losses) of the Company and may be revised in the future.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the Estimated Own Retention Claims (EKRS). The carrying value of the Estimated Own Retention Claims (EKRS) on December 31, 2016 amounted to Rp1,472,225,992,149,- (Note 23).

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

- ii. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP).
Premi yang belum merupakan pendapatan atau cadangan premi reasuransi adalah pendapatan premi yang ditangguhkan. Untuk reasuransi umum dan jiwa, dihitung dari jumlah pendapatan premi neto (premi bruto dikurangi premi retrocesi dan komisi) dikalikan 40% mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Untuk reasuransi syariah menggunakan prorata harian berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Mulai tahun 2013 dalam perhitungan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, berlaku Peraturan Ketua Bapepam Nomor: PER-09/BL/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berlaku per 1 Januari 2013. Hal hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- a. Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada saat ulang tahun polis, Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD.
- b. Cadangan yang dibentuk untuk produk tersebut adalah jumlah cadangan yang lebih besar antara hasil perhitungan CAPYBMP dan CARYBD

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP)

- a. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
- b. Premi bruto sebagaimana dimaksud di atas adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.
- c. Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayarkan perusahaan
- d. Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP paling tinggi sebesar 20% dari premi bruto.

Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD)

- a. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis termasuk risiko bencana (*catastrophic risk*) berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP.
- b. Rasio klaim dihitung berdasarkan dari klaim dibayar selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi selama periode 1 (satu) tahun untuk tahun yang sama .
- c. Rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim selama 3 (tiga) tahun dibagi 3 (tiga).
- d. Pendapatan premi adalah pendapatan premi selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP selama 1 (satu) tahun terakhir.
- e. Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
- f. Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

- ii. *Unearned premiums*
Unearned premiums or reserve for reinsurance premiums represent deferred premium revenues. For general and life reinsurances, they are calculated on the basis of total net premium revenues (gross premiums deducted by retrocession premium and commission) multiplied by 40% in accordance with the stipulations in the decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424/KMK.06/2003 dated 30 September 2003. For syariah reinsurance, daily prorated according to 11/PMK.010/2011 PMK dated January 12, 2011 is used.

Starting in 2013 in the calculation of unearned premium reserves, the regulations of Bapepam Number: PER-09/BL/2012, dated December 27, 2012, on Guidelines for Technical Allowance for Insurance and Reinsurance Companies effective as of January 1, 2013, is applicable. Matters governed by these regulations are as the followings:

- a. *For products with a maturity of up to one (1) year or more than 1 (one) year term which the policy's terms and conditions are renewable at the next year of the policy, the Company shall calculate Reserve for Uncovered Risk Period (CARYBD) and the Reserves of Unearned*
- b. *Reserves are established for these products is the greatest amount of reserves between the calculation results of CARYBD and CAPYBMP*

The reserves of Unearned Premiums (CAPYBMP)

- a. *CAPYBMP is calculated on the basis of the proportion of gross premiums on a daily basis for the uncovered period of insurance.*
- b. *Gross premium referred to above is a gross premium net of direct commissions.*
- c. *Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is the actual commission paid by the Company*
- d. *Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is 20% maximum of gross premium.*

Reserve for Uncovered Risk Period (CARYBD)

- a. *CARYBD is calculated for each line of business or products that have similar risk characteristics including disaster risk (catastrophic risk) based on the average claims ratio for three years multiplied by CAPYBMP*
- b. *Claims ratio is calculated based on claims paid during the period of one year divided by premium income over a period of one year for the same year.*
- c. *Average claim ratio is the sum of the claim ratio for 3 (three) years divided by 3 (three).*
- d. *Premium income is the premium income for one year plus decrease or minus increase in CAPYBMP within the last one year.*
- e. *CAPYBMP value for each policy should not be less than zero.*
- f. *In case of overall CAPYBMP or CARYBD established is less than the value of the promised return of premium, the Company has to add the value of the reserves reported to be at least the same amount as the overall value of the promised return of premium.*

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

ii. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP) - pindahan

Penentuan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat pembatalan polis, dan biaya komisi langsung. Perubahan dalam asumsi yang diterapkan akan berdampak pada pendapatan premi yang diakui dalam laba (rugi) perusahaan dan mungkin dimasa depan akan direvisi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP). Nilai tercatat Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP) pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.671.952.547.971,- (Catatan 24).

iii. Aset Retrosesi

a Dalam hal perusahaan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditanggung, nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan dihitung secara konsisten dengan pembentukan cadangan teknis sebagaimana yang diatur.

b Nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan disajikan sebagai aset yang merupakan bagian dari tagihan retrosesi dan termasuk dalam aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan.

Jumlah tercatat aset retrosesi bagian EKRS dalam laporan keuangan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp722.471.153.113,- (Catatan 7) , dan jumlah tercatat aset retrosesi bagian PYBMP dalam laporan keuangan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp718.736.171.560,- (Catatan. 8)

iv. Tes Kecukupan Liabilitas

Perusahaan menilai setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas reasuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak reasuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas reasuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan terkait aset takberwujud terkait) tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Untuk melaksanakan tes kecukupan liabilitas (*Liability Adequacy Test*) tersebut pada akhir periode perusahaan menunjuk Aktuaris Independen untuk melaksanakan perhitungan cadangan teknis dimaksud.

Perubahan kebijakan akuntansi atas perhitungan cadangan teknis tersebut di atas perusahaan tidak melakukan penyajian kembali secara retrospektif, dengan pertimbangan kepraktisan sebagaimana diatur dalam PSAK 25 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan paragraf 05.

Jumlah tercatat hasil test kecukupan liabilitas untuk reasuransi konvensional adalah sebesar Rp6.723.075.969,- (catatan 25) di atas estimasi nilai kini arus kas masa depan sesuai kontrak asuransinya. Dan jumlah tercatat hasil test kecukupan liabilitas untuk reasuransi syariah adalah sebesar Rp1.190.695.025,- (Catatan 25) di atas estimasi nilai kini arus kas masa depan sesuai dengan kontrak asuransinya.

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

ii. Unearned premiums

In determining of Unearned Premiums the Company relies on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, cancellation policy, and commission fees directly. Changes in the assumptions applied will impact on premium income recognized in earnings (losses) of companies and may be revised in the future.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the Estimated Own Retention Claims (EKRS). The carrying value of the Estimated Own Retention Claims (EKRS) on December 31, 2016 amounted to Rp1,671,952,547,971,- (Note 24).

iii. Retrocession Assets

a In the case the Company reschedules the risks covered, the estimated value of the claim recovery for the insured portion established by the Company is calculated consistent with the formation of technical reserves as stipulated.

b Estimated value of the claim recovery value of the reinsured portion established by the Company is presented as an asset as a part of the retrocession receivable and included in the assets allowed in the calculation of the level of financial health.

The carrying amount of retrocession assets of part of the IFRS in the financial statements as of December 31, 2016 amounted to Rp722,471,153,113,- (Note 7), and the carrying amount of retrocession assets of part of PYBMP in the financial statements as of December 31, 2016 amounted to Rp718,736,171,560,- (Note. 8)

iv. Liability Adequacy Test

The Company assesses in each reporting date whether the recognized reinsurance liability is sufficient by using current estimates of future cash flows under the reinsurance contracts. If that assessment shows that the carrying amount of the reinsurance liabilities (net of deferred acquisition costs related to intangible assets associated) is insufficient compared to the estimated future cash flows then the entire deficiency is recognized in profit or loss.

To carry out the liability adequacy test at the end of the period, the Company appointed an Independent Actuary to calculate the technical reserves.

For change in accounting policy for the calculation of technical reserves, the Company does not restate the item retrospectively for practical considerations as set out in PSAK 25 on Changes in Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors paragraph 05.

The resulting carrying amount of a liability adequacy test for conventional reinsurance is Rp6,723,075,969,- (note 25) above the estimated present value of future cash flows under the contract of insurance. And the resulting carrying amount of the liability adequacy test for Syariah reinsurance amounted to Rp1,190,695,025,- (Note. 25) above the estimated present value of future cash flows in accordance with insurance contracts.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

v. Piutang / Utang Reasuransi dan Retrosesi

Piutang reasuransi adalah saldo piutang premi kepada ceding company/broker yang telah dikompensasi dengan komisi dan komisi keuntungan reasuransi, setelah dikurangi dengan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang yang tidak tertagih sampai dengan tahun buku berakhir. Piutang untuk reasuransi umum dibentuk cadangan penyisihannya dengan metode amortisasi dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitasnya, atau ceding company telah tidak beroperasi lagi.

Utang reasuransi adalah utang klaim yaitu jumlah kerugian pasti yang telah disetujui secara teknis tetapi belum dibayar sampai dengan tahun buku berakhir.

Piutang retrosesi umum/jiwa adalah saldo tagihan klaim retrosesi kepada retrosesional yang sampai dengan tahun buku berakhir belum diterima.

Piutang retrosesi umum/jiwa dibentuk cadangan penyisihannya setelah umur piutang mencapai 5 (lima) tahun atau retrosesional (reinsurers) telah bangkrut/likuidasi

Utang retrosesi adalah saldo utang premi retrosesi kepada retrosesional yang telah dikompensasi dengan komisi retrosesi dan komisi keuntungan sampai dengan tahun buku berakhir.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu setiap akhir tahun buku berdasarkan analisa atas keterlambatan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai perolehan piutang usaha terdiri atas piutang reasuransi dan piutang retrosesi dikurangi cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagih dan penurunan nilai piutang dengan menggunakan metode suku bunga efektif berdasarkan taksiran umur piutang. Manajemen mengestimasi taksiran umur piutang sampai dengan penyelesaiannya dalam 3 (tiga) periode, yaitu: 1 tahun; 2 tahun; dan 3 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat penyelesaian dapat mempengaruhi umur piutang, dan karenanya biaya penyisihan piutang masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto Piutang Reasuransi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp551.889.881.656,- (Catatan 4) dan nilai tercatat neto Piutang Retrosesi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp44.995.280.915,- (Catatan 5).

vi. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya (cost) untuk menentukan nilai aset tetap, sehingga aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method), sesuai dengan taksiran masa manfaat yang penetapannya berdasarkan tarif sebagai berikut:

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

v. Reinsurance and Retrocession Receivables/Payables

Reinsurance receivables are balance of premium receivables from ceding companies/brokers, deducted with reinsurance commissions and profit commissions, net of allowance for doubtful accounts at the balance sheet date. Allowance for doubtful receivables for general reinsurance is provided taken into account their rates of collectability, or the ceding company is out of operation.

Reinsurance payables represent total fixed losses, which have been approved technically, but have not been paid at the balance sheet date.

General or life retrocession receivables represent the balance of retrocession claims receivables from retrocessioners, yet to be received at the balance sheet date.

Allowance for doubtful account of general and life retrocession receivables is provided after receivable maturity has reached five (5) years or retrocessioners (reinsurers) are out of operations due to bankruptcy or liquidation.

Retrocession payables represent retrocession premium payables to retrocessioners compensated with retrocession commissions and profit commissions at the balance sheet date.

Allowance for Doubtful Accounts

The Company makes allowance for doubtful accounts at each of financial year end based on an analysis of the collectability of receivables and loans. Allowance established for loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balances will not be collectible. Identification of loans and receivables uncollected requires judgment and estimates. When the expectation is different from the initial estimate, then this difference will impact the carrying value of loans and receivables and uncollectible accounts expense in the period where the change in estimate occurs. Judgments and estimates are the basis for calculating the allowance for impairment of receivables may not tertagihnya using the effective interest method.

The acquisition value of trade receivables comprise of reinsurance receivables and retrocession receivables less allowance for doubtful receivables and allowance for impairment of receivables using the effective interest method over the estimated life of the receivables. Management estimates the useful life of receivables up to its period of settlement within three (3) categories, namely: 1 year; 2 years; and 3 years. This is the age that generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in rates of settlements can affect the aging of receivables, and therefore the future cost allowance may be revised. Reinsurance receivables net carrying value of the Company as of December 31, 2016 amounted to Rp551,889,881,656,- (Note 4) and the net carrying value of retrocession receivables on December 31, 2016 amounting to Rp44,995,280,915,- (Note 5).

vi. Fixed Assets

The Company uses cost model to determine fixed asset value, therefore fixed assets are recognized at acquisition cost net of accumulated depreciation. Depreciation of fixed assets is calculated using straight-line method, over their useful lives at the following rates:

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

	Masa Manfaat Useful Life (year)
Bangunan Kantor	20
Renovasi Ruang Kantor	5
Kendaraan	5
Peralatan Komputer	5
Peralatan Non Komputer	5
Perabot Kantor	5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan.

Apabila aset tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Perusahaan juga menetapkan pengeluaran lebih dari Rp2.500.000 dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dikapitalisasi.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas. Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap bangunan kantor selama 20 (dua puluh) tahun, dan aset tetap lainnya selama 5 (lima) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp172.547.500.173,- (Catatan 18).

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

	Persentase Percentage	
	5,00%	Office building
	20,00%	Office renovation
	20,00%	Motor vehicles
	20,00%	Computer hardware
	20,00%	Non-computer
	20,00%	Office furniture & fixtures

Cost of maintenance and repairs are recognized as expense as incurred. Expenditures which extend the useful life of the asset or result in increased future economic benefits such as increased in capacity and improvement in the quality, are capitalized and depreciated in accordance with the respective depreciation rate.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in income statement.

The Company also determines that expenditure of more than Rp2,500,000 with useful life of more than one (1) year is capitalized.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each asset in the Company is determined based on the expected utility of the asset. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of the Company for similar assets. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of the asset. However there is a possibility that the results of future operations can be significantly affected by changes in the amount and period of record of costs resulting from changes in above mentioned factors.

Changes in useful lives of fixed assets and investment properties can affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying value of fixed assets.

Cost of acquisition of fixed assets are depreciated using the straight-line method based on their estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of office buildings for 20 (twenty) years, and other fixed assets for 5 (five) years. Those are the estimated useful lives that generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological developments could affect the economic useful lives and residual value of assets, and therefore future depreciation charges may be revised. The net carrying value of fixed assets of the Company on December 31, 2016 amounted to Rp172,547,500,173,- (Note 18).

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

f. Pertimbangan dan Sumber Estimasi Ketidakpastian - pindahan

vii. Penurunan Nilai Asset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

viii. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan pada catatan No. 2. b, c dan d)

ix. Penilaian instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi perusahaan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.588.002.184.879,- (catatan 4 sampai dengan 17), sedangkan nilai tercatat liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.381.252.456.479,- (Catatan 21 sampai dengan 32.).

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan" ditetapkan:

- i. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode;
- ii. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode;
- iii. Laba kena Pajak atau laba fiscal (rugi pajak atau rugi fiscal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan);
- iv. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - 1) Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
 - 2) Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - 3) Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, sepanjang tidak melanggar peraturan pajak.

2. Summary of Significant Accounting Policies

f. Estimates and Assumptions on Uncertainty

vii. Impairment of Assets

Testing for impairment is done when there is indication of impairment. Determination of asset value in use requires the estimation of the expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating unit) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value. Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements are deemed appropriate and reasonable, but significant changes in the above assumptions will have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently an impairment loss will have an impact on results

viii. Classification of Financial assets and Liabilities

The Company establishes the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions in PSAK No. 55 (Revised 2014) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with accounting policies as disclosed in Note No. 2. b, c and d)

ix. Valuation of financial instruments

The Company recorded certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components on the measurement of fair value is determined using verifiable objective evidence, the amount of change in fair value of the Company may be different when using different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities that can directly affect the company's profit or loss. The carrying amounts of financial assets at fair value in the statement of financial position at the date of December 31, 2016 amounted to Rp4,588,002,184,879,- (note 4 to 17), while the carrying value of financial liabilities in the statement of financial position on December 31, 2016 amounting to Rp3,381,252,456,479,- (Notes 21 and 32.).

Current tax expense is determined based on the taxable income for the related year computed using prevailing tax rates. The PSAK No.46 (Revised 2011) on "Accounting for Income Taxes" specifies:

- i. Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.
- ii. Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period
- iii. Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable).
- iv. Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods arising from:
 - 1) deductible temporary differences
 - 2) the carryforward of unused tax losses; and
 - 3) the carryforward of unused tax credits, when the tax law permits.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

g. Taksiran Pajak Penghasilan

- v. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantive telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba-rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari:

- i. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas; atau

- ii. Suatu kombinasi bisnis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait dasar pos yang ada pada periode sama atau berbeda, diakui diluar laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos yang diakui:

- i. Dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

- ii. Langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Beban (penghasilan) Pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif. Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dapat dilakukan jika mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum. Dan bermaksud menyelesaikan dengan dasar neto.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Berdasarkan ketentuan paragraf 100 PSAK 46 revisi 2010 tentang pajak penghasilan dinyatakan bahwa: sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut perusahaan menyajikan penghasilan yang telah dikenakan pajak final dalam laporan laba rugi sebagai unsur pengurang laba sebelum pajak.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat pajak penghasilan badan pada laporan keuangan Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp75.625.752.696,- (Catatan 29)

2. Summary of Significant Accounting Policies

g. Estimated Income Tax

- v. *Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax is measured at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the balance sheet date. Deferred tax is charged or credited in the statement of income, except when it relates to items charged or credited directly to equity. Current and deferred tax shall be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from:

- i. *a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity, or*

- ii. *a business combination*

Current tax and deferred tax shall be recognised outside profit or loss if the tax relates to items that are recognised, in the same or a different period, outside profit or loss. Therefore, in the same or a different period, current tax and deferred tax that relates to items that are recognised:

- i. *in other comprehensive income, shall be recognised in other comprehensive income;*

- ii. *directly in equity, shall be recognised directly in equity.*

The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities shall be specifically presented in the statement of comprehensive income. Offsetting deferred tax assets and deferred tax can be done if the entity has a legally enforceable right to set off. And to settle them on net basis.

The carrying amount of deferred tax asset is assess at end of reporting period. The carrying amount shall be written down when the taxable profit is not sufficient for compensating part or the entire deferred tax asset. The write-down of the tax asset is reversed when taxable profit is sufficient for compensation.

Under the provisions of paragraph 46 of PSAK 100, revised in 2010, on income tax, it is stated that: in accordance with the tax laws, the income already subjected to final tax is no longer reported as taxable income and all expenses relating to income already subjected to final tax are not deductible. In connection with the provisions the Company presented income already subjected to final tax on the income statement as deduction component of income before tax.

Income Tax

Significant judgment is made in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations that ultimate determination of tax is uncertain throughout the normal course of business. The Company records a liability for corporate income tax is based on estimates of whether there are additional corporate income tax. The carrying amount of corporate income tax in the financial statements as of December 31, 2016 amounted to Rp75,625,752,696,- (Note 29)

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

g. Taksiran Pajak Penghasilan - pindahan

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinannya besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Jumlah tercatat Aset Pajak Tangguhan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016, adalah sebesar Rp33.447.824.933,- (Catatan 19.)

h. Pensiun dan Penyisihan Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mempunyai program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan Perusahaan. Iuran dana pensiun 100% ditanggung oleh Perusahaan melalui DPLK Manulife dengan Manulife Program Pensiun (MPP). Perusahaan mengakui penyisihan untuk imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi pengganti dengan menghitung secara aktuarial berdasarkan metode projected unit credit, setelah memperhitungkan nilai wajar aset pendanaan ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Manulife. Selain itu, Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.

Penentuan beban dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera dalam laporan laba rugi komprehensif dan pada saat terjadi.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat neto atas liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp23.453.523.943,- (Catatan 29). dan beban imbalan kerja sebesar Rp4.732.867.797 (catatan 29).

f. Investasi dan Hasil Investasi

Deposito

Investasi dalam deposito disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai nominal.

Obligasi

Investasi dalam surat berharga obligasi korporat dan obligasi pemerintah disajikan berdasarkan nilai pasar dengan kategori surat berharga yang tersedia untuk dijual. Selisih antara nilai pasar dan harga perolehan yang belum direalisasikan akibat kenaikan (penurunan) harga pasar disajikan sebagai komponen ekuitas.

2. Summary of Significant Accounting Policies

g. Estimated Income Tax

Deferred Tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized. Significant estimates by management is required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based on current usage and the level of taxable income and future tax planning strategies.

The carrying amount of deferred tax assets in the financial statements on December 31, 2016, amounted to Rp33,447,824,933 (Note 19.)

h. Pension and Allowance for Post Employment Benefit

The Company provides defined benefit pension program for all of its employees, who meet the criteria determined by the Company. Pension fund contribution at 100% is paid by the Company through DPLK Manulife with Pension Program Manulife (MPP). The Company recognizes allowance for post employment benefit in accordance with the Labor Law No. 13/2003, which stipulated severance payments, post employment benefits and other compensation by calculating on actuary basis using projected unit credit method, after calculating fair value of assets funded to financial institution of pension fund (DPLK) PT Manulife. The Company also provides additional benefit to its employees such as old age allowance through PT Asuransi Jiwasraya, calculated at pension period of 60 x basic employees' salary. The Company pays 70% of the premium.

Determination of expenses and liabilities for employees' benefits depend on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increases, annual employee resignation rate, level of disability, retirement age and mortality rates. Actual results that differ from the assumptions determined by the Company are recognized immediately in the statement of comprehensive income as incurred.

While the Company believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions determined by the Company may materially affect the estimated liabilities for employee benefits liabilities and net employee benefits expense. The net carrying value on employee benefits liabilities on December 31, 2016 amounted to Rp23,453,523,943, - (Note 29). and the employee benefits amounted to Rp4,732,867,797 (note 29).

f. Investments and Investment Income

Deposits

Investment in deposits is presented in the financial statements at its pair value.

Bonds

Investments in marketable securities such as corporate bonds and government bonds are presented at market price and classified as marketable securities available for sale. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in market value is presented in equity.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

Saham, Obligasi Yang Diperdagangkan

Investasi dalam saham atau obligasi yang diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Reksadana

Investasi dalam unit penyertaan reksadana penawaran umum dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) disajikan sebesar nilai wajar, yang merupakan nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan. Selisih laba rugi yang timbul dari perbedaan biaya perolehan dengan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013, antara lain ditetapkan:

- i Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
- ii Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.

Perusahaan telah menerapkan ketentuan tersebut di atas untuk pengukuran nilai wajar portofolio reksadana sejak 31 Desember 2012.

Penyertaan Saham

Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya).

Hasil Investasi

Hasil investasi dari bunga deposito dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku. Penghasilan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian dividen diterima. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing yang berkaitan dengan investasi dicatat sebagai bagian dari hasil investasi.

g. Pendapatan dan Beban Underwriting

Pendapatan premi reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero premi/nota premi/*Statement of Account* reasuransi *treaty* dan slip premi reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan beban premi retoseksi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *technical statement of account retoseksi treaty* dan slip premi retoseksi *facultative*.

Pendapatan komisi retoseksi dan beban komisi reasuransi dicatat bersamaan dengan pencatatan premi yang bersangkutan.

Klaim reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero klaim/nota klaim/*Definite Loss Advice (DLA)*, *Statement of Account* reasuransi *treaty* dan *DLA* reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan pendapatan klaim retoseksi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *Definite Loss Advice/Statement of Account* retoseksi *treaty* dan *DLA* retoseksi *facultative*.

2. Summary of Significant Accounting Policies

Stocks or Bonds For Trading.

Investment in shares or bonds for trading are presented at fair value. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in fair value, are recognized in the current statement of income.

Mutual Funds

Investments in public offering mutual funds and limited investments mutual funds (RDPT) are presented at fair value, which represent value of net assets of the mutual funds at the reporting date. The resulting gains or losses due to difference of acquisition cost and fair value, are reported in the current statement of income.

In reference to the decree of the Head of Bapepam/LK No.: KEP-367/BL/2012, dated July 9, 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, effective January 1, 2013, which reads:

- i The basis for fair market value of securities in mutual fund portfolio is the provision No.: IV.C.2, attached hereto.*
- ii The investment manager of the mutual fund is required to estimate market fair value of securities in the mutual fund portfolio as specified in the provision No.: IV.C.2 attached hereto effective 1 January 2013.*

For measuring the fair value of mutual funds since 31 December 2012, the Company has adopted those provisions

Investments in Stocks

Investments in stock of ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long term investments are recognized at acquisition cost (cost method).

Investment Income

Investment income from deposit and bond interests is recognized based on proportionate time and prevailing interest rate. Dividend income is recognized at the time the dividends are declared. The resulting gains or losses in foreign currency related to the investment are recognized as part of investment income

g. Underwriting revenues and expenses

Treaty and facultative reinsurance premium revenues are recorded at portfolio of premium/premium note/statement of account of treaty reinsurance and facultative reinsurance premium notes which have been approved, while treaty and facultative retrocession premium expenses are recorded in accordance with the statement of account of treaty retrocession and facultative retrocession premium notes.

Retrocession commission revenues and reinsurance commission expenses are recognized at the time the related premiums are recorded.

Treaty and facultative treaty reinsurance claims are recognized in accordance with bordereaux of claims/claim notes/Definite Loss Advice (DLA), Statement of Account of treaty reinsurance and DLA facultative reinsurance which have been approved, while treaty and facultative retrocession claim revenues are recorded in accordance with Definite Loss Advice/Statement of Account of treaty retrocession and DLA facultative retrocession.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

h. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dan dijabarkan dalam mata uang rupiah sebagai mata uang penyajian dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi (kurs spot). Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut (kurs penutup). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan atau diakui dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Jenis Mata Uang	2016 Rp
1 Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar 1	13.436,00
1 Poundsterling Inggris/ Poundsterling 1	16.507,51
1 Euro/ Euro 1	14.161,55
1 Yen Jepang/ Japanese Yen 1	115,40
1 Dollar Singapura/ Singapore Dollar 1	9.298,92
1 Dollar Hongkong/ Hongkong Dollar 1	1.732,47
1 Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit 1	2.996,11

i. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). PSAK 7 revisi 2010 par 9.

j. Kebijakan Akuntansi Syariah

- i. Waad surplus, Dana tabarru, dan Dana tabungan
- Bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta kepada pengelola baik hasil investasi maupun dari hasil pengelolaan (surplus underwriting), sesuai akad yang digunakan. Dasar pengaturan bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta pada asuransi syariah mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- PSAK Nomor 108, tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
 - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21, 50 dan 51.

2. Summary of Significant Accounting Policies

h. Foreign Currencies Transactions and Balances

The Company's accounting is maintained in Indonesian Rupiah (Rp) as the functional denomination. Transactions involving foreign currencies during the year are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made (spot rate). At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are converted into Rupiah to reflect the rates of exchanges prevailing at that date (the closing rate). The resulting gains or losses are recognized in the statement of income of the current year.

2015 Rp	Currency
13.795,00	United States Dollar 1
20.451,11	Poundsterling 1
15.069,68	Euro 1
114,53	Japanese Yen 1
9.751,19	Singapore Dollar 1
1.779,83	Hongkong Dollar 1
3.209,65	Malaysian Ringgit 1

i. Transactions With Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
- has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - Both entities are joint ventures of the same third party.
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - A person identified in (1) (a.) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

j. Sharia Accounting Policies

- i. Waad surplus tabarru funds and saving funds
- Profit sharing of participants' funds represents participants' fund distribution to the manager either investment income from tabarru fund or management income (surplus underwriting), in accordance with agreements used. The basis for arrangement of profit sharing of participants' funds is the following regulations:
- PSAK 108, on accounting for Syariah Insurance Transactions
 - Official religious advices (Fatwa) of Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21, 50 and 51.

2. Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia - pindahan

j. Kebijakan Akuntansi Syariah - pindahan

- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Bagi hasil dana peserta diakui pada saat akhir periode laporan.
 - b) Bagi hasil dana peserta diukur berdasarkan total hasil investasi dan hasil pengelolaan (surplus underwriting) dana tabarru dengan nisbah yang ditetapkan oleh pengelola.
- 2) Penyajian
 Bagi hasil investasi dana peserta disajikan dalam laporan pendapatan dan beban dana peserta dengan judul bagi hasil ke Perusahaan. Di dalam neraca, bagi hasil dana peserta disajikan dalam item utang dengan judul utang bagi hasil.
- 3) Pengungkapan
 Hal yang diungkapkan terkait dengan bagi hasil dana peserta adalah pembagian dari hasil investasi dana tabarru dan hasil pengelolaan dana tabarru, begitu juga dengan metode akad investasi yang digunakan.

Dasar perhitungan:

$$\text{Waad} = \frac{\text{Tabarru per cedant}}{\text{Total Dana Tabarru}} \times (\text{Surplus underwriting} \times \% \text{ Waad}) + \frac{\text{Hasil Investasi Tabarru}}{\text{Cedant} \times \% \text{ Waad}}$$

(Total Tabarru Fund)

ii. Zakat

Zakat menurut istilah syara adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dan tanggal 22 Desember 2006 Dewan Pengawas Syariah memutuskan bahwa untuk menghitung zakat Perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Keuntungan Sebelum Pajak Usaha Syariah x 2,5%

2. Summary of Significant Accounting Policies

j. Sharia Accounting Policies

- 1) Recognition and Measurement
 - a) Profit sharing of participants' funds are recognized at the end of the reporting period.
 - b) Profit sharing of participants' funds are measured based on total investment income and management income (surplus underwriting) of tabarru funds with nisbah determined by the management of sharia.
- 2) Presentation
 Profit sharing of participants' fund investments is presented in the statement of revenues and expenses of participants' funds under title of profit sharing to the Company. In the balance sheet, profit sharing of participants' funds is presented as payable account under title of profit sharing payable.
- 3) Disclosure
 Matters disclosed in relation to profit sharing of participants' funds are distribution of investment income from tabarru funds and management income from tabarru funds, as well as investment agreement (akad) method used.

:Basis of calculation

ii. Zakat

Zakat according to syara (the Moslem law) means expending an amount of certain possession given to people, who are entitled to accept under terms determined by syara. Zakat represents one of the third Moslem pillars of faith, which is compulsory.

Based on the decision of the meetings of Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah) of PT Reasuransi Nasional Indonesia on December 8 and December 22, 2006, it was decided that for calculating Zakat, the Company may use the following formula:

Profit Before Tax from Sharia Business x 2.5%

	31-Des-16	31-Des-15	
3. Kas dan Setara Kas	4.582.014.536	16.633.101.243	3. Cash and Cash Equivalents
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
Kas			Cash on Hand:
Kas Konvensional	338.392.456	89.632.854	<i>Conventional</i>
Kas Syariah	1.425.794	33.831.977	<i>Syariah</i>
Jumlah Kas	339.818.250	123.464.832	Total Cash
Bank			<i>In Banks</i>
Bank Konvensional			<i>Conventional (in Rupiah)</i>
Pihak Relasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	872.419.252	14.098.352.055	<i>PT Bank Mandiri Tbk - W. Metropolitan Branch</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	581.378.597	162.883.972	<i>PT Bank Mandiri Tbk - Cikini Branch</i>
PT Bank BPD Bengkulu	20.029.248	20.028.474	<i>PT Bank BPD Bengkulu</i>
	1.473.827.097	14.281.264.501	
Bank Konvensional (dalam Valuta Asing)			<i>Conventional (in Foreign Currency)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	1.959.561.059	1.533.712.926	<i>PT Bank Mandiri Tbk - W. Metropolitan Branch</i>
(2016): USD 145.844,08; (2015): USD 111.178,90			<i>(2016): USD 145,844.08; (2015): USD 111,178.90</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	154.382.730	212.381.750	<i>PT Bank Mandiri Tbk - Cikini Branch</i>
(2016): USD 11.490,23; (2015): USD 15.395,56			<i>(2016): USD 11,490.23; (2015): USD 15,395.56</i>
Jumlah Konvensional	3.587.770.886	16.027.359.177	Total conventional
Bank Syariah (dalam Rupiah)			<i>Syariah Banks (in Rupiah)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin	126.525.133	100.834.393	<i>PT Bank Mandiri Syariah Tabarru - Thamrin Branch</i>
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin	258.839.530	100.442.416	<i>PT Bank Mandiri Syariah Ujroh - Thamrin Branch</i>
Jumlah	385.364.662	201.276.809	Total
Bank Syariah (dalam Valuta Asing)			<i>Syariah Banks (in Foreign Currency)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin	134.671.850	138.104.780	<i>PT Bank Mandiri Syariah Tabarru - Thamrin Branch</i>
(2016): USD 10.023,21;			<i>(2016): USD 10,023,21;</i>
(2015): USD 10,011,22;			<i>(2015): USD 10,011,22;</i>
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin	134.388.887	142.895.645	<i>PT Bank Mandiri Syariah Ujroh - Thamrin Branch</i>
Cab. Thamrin (2016): USD 10.002,15;			<i>Thamrin Branch (2016): USD 10,002,15;</i>
Cab. Thamrin (2015): USD 10.358,51			<i>Thamrin Branch (2015): USD 10,358.51</i>
	269.060.738	281.000.425	
Jumlah Bank Syariah	654.425.400	482.277.234	Total in Syariah Banks
Jumlah Bank	4.242.196.286	16.509.636.411	Total in Syariah and Conventional Banks
Jumlah Kas dan Setara Kas	4.582.014.536	16.633.101.243	Total Cash and Cash Equivalents

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-16	31-Des-15	
4. Piutang Reasuransi	551.889.881.656	353.446.457.168	4. Reinsurance Receivables
Piutang Reasuransi Konvensional			Conventional Reinsurance receivables
Piutang Reasuransi Umum			General Reinsurance receivables
Saldo Awal	265.671.007.292	389.329.172.443	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	3.293.100.346.796	2.344.334.720.171	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	3.558.771.354.088	2.733.663.892.614	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	3.157.288.879.544	2.462.368.732.398	Collection in current year
	401.482.474.544	271.295.160.216	Remaining balance
Cadangan Penyisihan Piutang	410.239.941	410.239.941	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	8.275.011.483	5.213.912.983	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	392.797.223.120	265.671.007.292	Balance as at December 31
Piutang Reasuransi Jiwa			Life Reinsurance Receivable
Saldo Awal	23.678.939.638	37.042.744.182	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	333.136.893.350	226.698.914.436	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	356.815.832.988	263.741.658.618	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	322.815.440.218	240.062.718.980	Collection in current year
	34.000.392.770	23.678.939.638	
Cadangan penyisihan piutang	-	-	Allowance for bad debts
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	34.000.392.770	23.678.939.638	Balance as at 31 December
Jumlah Piutang Reasuransi Konvensional	426.797.615.890	289.349.946.930	Balance of conventional reinsurance receivable
Piutang Reasuransi Syariah			Syariah reinsurance receivable
Piutang Reasuransi Umum			General reinsurance receivable
Saldo Awal	35.883.686.202	21.444.067.059	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	114.106.283.158	86.955.963.362	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	149.989.969.360	108.400.030.421	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	116.813.493.981	71.821.043.187	Collection in current year
	33.176.475.379	36.578.987.234	
Cadangan Penyisihan Piutang	(630.625.474)	(695.301.032)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	32.545.849.905	35.883.686.202	Balance as at 31 December
Piutang Reasuransi Jiwa			Life reinsurance receivable
Saldo Awal	28.212.824.036	47.523.909.356	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	163.499.267.441	74.112.834.179	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	191.712.091.477	121.636.743.535	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	97.372.069.074	92.877.253.095	Collection in current year
	94.340.022.403	28.759.490.440	
Cadangan Penyisihan Piutang	(1.793.606.542)	(546.666.404)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	92.546.415.861	28.212.824.036	Balance as at December 31
Jumlah Piutang Reasuransi Syariah	125.092.265.766	64.096.510.238	Balance of syariah reinsurance receivable
Jumlah Piutang Reasuransi	551.889.881.656	353.446.457.168	Total reinsurance receivable
	31-Des-16	31-Des-15	
Piutang Reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:			Reinsurance Receivable Based on transaction with
Pihak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	79.813.630.152	23.346.530.639	Affiliation - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Pihak ketiga	472.076.251.504	330.099.926.528	Third parties
Jumlah Piutang Reasuransi	551.889.881.656	353.446.457.168	Total Reinsurance Receivable
	31-Des-16	31-Des-15	
Piutang Reasuransi berdasarkan mata uang :			Reinsurance receivables by currency:
Rp (Rupiah)	422.132.237.955	230.177.994.631	Rp (Rupiah)
USD (2016) : 9,299,994.2; (2015) : 8,676,046.76;	124.954.722.071	119.686.065.054	USD (2016) : 9,299,994.2; (2015) : 8,676,046.76;
EUR (2016) : 59,881.98; (2015) : 66,008.81;	848.021.654	994.731.644	EUR (2016) : 59,881.98; (2015) : 66,008.81;
JPY (2016) : 6,054,143.26; (2015) : 2,838,140.60;	698.648.132	325.052.243	JPY (2016) : 6,054,143.26; (2015) : 2,838,140.60;
SGD (2016) : 346,468.97; (2015) : 229,410.70;	3.221.787.235	2.237.027.324	SGD (2016) : 346,468.97; (2015) : 229,410.70;
GBP (2016) : 76.37; (2015) : 29.10 ;	1.260.679	595.127	GBP (2016) : 76.37; (2015) : 29.10 ;
HKD (2016) : 19,165.66; (2015) : 14,041.31	33.203.931	24.991.145	HKD (2016) : 19,165.66; (2015) : 14,041.31
	129.757.643.701	123.268.462.537	
Jumlah Piutang Reasuransi	551.889.881.656	353.446.457.168	Total receivables Reinsurance

	31-Des-16	31-Des-15	
5. Piutang Retrosesi	44.995.280.915	52.209.884.684	5. Retrocession Receivables
Piutang Retrosesi Umum - Konvensional			<i>General Retrocession Receivable-Conventional</i>
Saldo Awal	51.401.279.312	34.007.715.398	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	147.246.730.695	158.091.782.034	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	198.648.010.007	192.099.497.432	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	159.424.541.413	138.751.793.722	<i>Collection in current year</i>
	39.223.468.594	53.347.703.710	
Cadangan Penyisihan Piutang	(930.675.801)	(930.675.801)	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(751.645.617)	(1.015.748.597)	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	37.541.147.176	51.401.279.312	Balance as at December 31
Piutang Retrosesi Jiwa - Konvensional			Life Retrocession Receivable - Conventional
Saldo Awal	413.411.409	-	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	1.761.390.856	481.106.697	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	2.174.802.265	481.106.697	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	1.855.059.865	67.695.288	<i>Collection in current year</i>
	319.742.400	413.411.409	
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	319.742.400	413.411.409	Balance as at December 31
Jumlah Piutang Retrosesi - Konvensional	37.860.889.576	51.814.690.721	<i>Balance of Retrocession Receivable - Conventional</i>
Piutang Retrosesi Umum - Syariah			General Retrocession Receivable - Syariah
Saldo Awal	402.851.447	592.250.580	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	20.891.557.131	14.253.092.130	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	21.294.408.579	14.845.342.710	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	14.021.777.550	14.442.491.263	<i>Collection in current year</i>
Jumlah saldo piutang retrosesi umum - Syariah	7.272.631.029	402.851.447	<i>Total accounts receivable general retrocession - Sharia</i>
Cadangan Penyisihan Piutang	(138.239.690)	(7.657.484)	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	7.134.391.339	395.193.963	Balance as at December 31
Piutang Retrosesi Jiwa-Syariah	-	-	Life Retrocession Receivable - Syariah
Jumlah Piutang Retrosesi Jiwa + Umum - Syariah	7.134.391.339	395.193.963	Balance of General + Life Retrocession Receivable - Syariah
Jumlah Piutang Retrosesi	44.995.280.915	52.209.884.684	Total Retrocession Receivable
Piutang Retrosesi berdasarkan hubungan transaksi:			<i>Retrocession Receivable Based on transaction with</i>
Phak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia	2.399.276.348	1.019.226.865	<i>Affiliation with - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Pihak ketiga	42.596.004.567	51.190.657.819	<i>Third Parties</i>
Jumlah Piutang Retrosesi	44.995.280.915	52.209.884.684	<i>Total Retrocession Receivable</i>
	31-Des-16	31-Des-15	
Piutang Retrosesi berdasarkan mata uang :			<i>Retrocession receivables by currency:</i>
Rp (Rupiah)	25.538.970.878	17.453.863.905	<i>Rp (Rupiah)</i>
USD (2016) : 1,448,073.09; (2015) : 2,519,465.08;-	19.456.310.037	34.756.020.779	<i>USD (2016) : 1,448,073.09; (2015) : 2,519,465.08;-</i>
Jumlah Piutang Reasuransi	44.995.280.915	52.209.884.684	<i>Total receivables Reinsurance</i>
	31-Des-16	31-Des-15	
6. Piutang Ujroh	16.189.743.752	9.329.946.220	6. Ujroh Receivable

	31-Des-16		31-Des-15		
7. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Bagian Retrosesi	722.471.153.113		422.547.076.770		7. Un-earned Premium Retrocession Share
Kelas Bisnis	31-Des-16	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-15		Classification of Business
Harta Benda	376.338.084.446	85.849.778.680	290.488.305.766		Properties
Kendaraan Bermotor	62.324.649	39.644.623	22.680.026		Motor
Pengangkutan	196.588.346.579	118.833.748.297	77.754.598.282		Marine Cargo
Rangka Kapal	13.375.013.008	7.874.170.763	5.500.842.245		Marine Hull
Rangka Pesawat	1.799.152.416	268.280.725	1.530.871.691		Aviation
Satelit	-	-	-		Satellite
Energi	35.188.310.170	32.354.407.303	2.833.902.867		Energy
Rekayasa	6.779.098.141	541.626.700	6.237.471.441		Engineering
Tanggung Gugat	39.933.161.421	14.927.267.998	25.005.893.423		Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1.553.146.199	(627.998.207)	2.181.144.406		Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	29.607.952.814	23.611.243.248	5.996.709.566		Credit and surety bond
Aneka	13.048.407.476	8.190.578.475	4.857.829.001		Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	8.198.155.794	8.061.327.738	136.828.056		Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>722.471.153.113</u>	<u>299.924.076.343</u>	<u>422.547.076.770</u>		Total Unearned Premium of Retrocession Share

Kelas Bisnis	31-Des-15	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-14		Classification Of Business
Harta Benda	290.488.305.766	234.470.102.977	56.018.202.789		Properties
Kendaraan Bermotor	22.680.026	22.680.026	-		Motor
Pengangkutan	77.754.598.282	77.383.568.474	371.029.808		Marine Cargo
Rangka Kapal	5.500.842.245	2.982.066.900	2.518.775.345		Marine Hull
Rangka Pesawat	1.530.871.691	1.530.871.691	-		Aviation
Satelit	-	-	-		Satellite
Energi	2.833.902.866	(5.035.629.163)	7.869.532.029		Energy
Rekayasa	6.237.471.441	455.105.755	5.782.365.686		Engineering
Tanggung Gugat	25.005.893.424	24.549.442.398	456.451.026		Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	2.181.144.406	875.886.883	1.305.257.523		Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	5.996.709.566	3.394.918.622	2.601.790.944		Credit and surety bond
Aneka	4.857.829.001	849.589.731	4.008.239.270		Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	136.828.056	(259.100.536)	395.928.592		Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>422.547.076.770</u>	<u>341.219.503.758</u>	<u>81.327.573.012</u>		Total Unearned Premium of Retrocession Component

	31-Des-16		31-Des-15		
8. Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	718.736.171.560		664.107.711.421		8. Estimated Claim Retrocession Share
Kelas Bisnis	31-Des-16	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-15		Classification Of Business
Harta Benda	475.486.833.550	(65.825.042.078)	541.311.875.628		Properties
Kendaraan Bermotor	4.561.851	4.561.851	-		Motor
Pengangkutan	36.378.424.557	35.034.223.135	1.344.201.422		Marine Cargo
Rangka Kapal	31.013.747.676	3.336.589.646	27.677.158.030		Marine Hull
Rangka Pesawat	-	-	-		Aviation
Satelit	-	-	-		Satellite
Energi	17.330.477.793	10.718.189.694	6.612.288.099		Energy
Rekayasa	76.795.695.210	290.096.500	76.505.598.710		Engineering
Tanggung Gugat	51.796.992.613	51.796.992.613	-		Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	125.390.418	125.390.418	-		Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	25.654.034.468	16.311.136.463	9.342.898.005		Credit and surety bond
Aneka	4.150.013.424	4.084.376.975	65.636.449		Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	-	(1.248.055.078)	1.248.055.078		Life reinsurance
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>718.736.171.560</u>	<u>54.628.460.139</u>	<u>664.107.711.421</u>		Total estimated claim retrocession component

8. Estimasi Klaim Bagian Retrosesi - pindahan

8. Estimated Claim Retrocession Share

Kelas Bisnis	31-Des-15	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Des-14	Classification Of Business
Harta Benda	541.311.875.628	9.620.091.358	531.691.784.270	Properties
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor
Pengangkutan	1.344.201.422	791.068.633	553.132.789	Marine Cargo
Rangka Kapal	27.677.158.030	(2.229.337.957)	29.906.495.987	Marine Hull
Rangka Pesawat	-	-	-	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	6.612.288.099	6.612.288.099	-	Energy
Rekayasa	76.505.598.710	51.401.279.214	25.104.319.496	Engineering
Tanggung Gugat	-	(57.150)	57.150	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	-	(701.264)	701.264	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	9.342.898.005	7.466.973.202	1.875.924.803	Credit and surety bond
Aneka	65.636.449	(186.557.515)	252.193.964	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	1.248.055.078	1.104.180.545	143.874.533	Life reinsurance
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>664.107.711.421</u>	<u>74.579.227.166</u>	<u>589.528.484.255</u>	Total estimated claim retrocession component

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesional dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim retensi sendiri yang menjadi hak kontraktual neto retrosesional (lihat catatan 23 dan 24).

Retrocession asset is the net value of contractual right of reinsurer in a retrocession agreement. The amount represents a component of un-earned premium and estimated own claim retention which become the net value of contractual right of retrocessioner (See notes 23 and 24)

9. Biaya Dibayar Dimuka

31-Des-16	31-Des-15
<u>104.093.500</u>	<u>43.865.809</u>

9. Prepaid Expenses

10. Piutang Hasil Investasi

31-Des-16	31-Des-15
<u>8.413.321.551</u>	<u>7.708.424.639</u>
Kupon Obligasi	1.574.040.218
Bunga Deposito	6.839.281.333
Jumlah Piutang Hasil Investasi	<u>7.708.424.639</u>

10. Investment Income Receivable

coupon Bonds
 Deposit interest
Total

Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke Bank pengelola obligasi dan deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

No allowance for bad debts and impairment is made for investment receivables since they are receivables from banks which manage securities and deposits and their payments are secured.

11. Piutang Lain-lain

31-Des-16	31-Des-15
<u>7.507.971.501</u>	<u>3.428.924.302</u>
Piutang Pegawai	7.507.971.501
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>3.428.924.302</u>

11. Other Receivables

Loans to employees
Total other receivables

Piutang pegawai diberikan kepada pegawai untuk keperluan perumahan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/KEP/DIR/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Pinjaman Perumahan bagi pegawai PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Loans to employees are provided for housing facilities, given to those employees of minimum service period of one (1) year with credit maturity period of ten (10) years in accordance with the decree of the Company's director No. 19/KEP/DIR/VII/2002 dated July 8, 2002 regarding Housing Facility Loan for Employees of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Untuk piutang pegawai tidak dilakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan yang dijamin pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai.

No allowance for uncollectible and impairment is made for receivable from employees, since the receivables are secured through deduction from the employees' salaries.

	31-Des-16	31-Des-15	
12. Dana Jaminan	51.000.000.000	51.000.000.000	12. Guarantee Funds
Dana Jaminan Konvensional:			Conventional
PT Bank Jabar Cab. DKI	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Jabar - DKI Branch
PT Bank BTN Cab. Ciputat	10.000.000.000	10.000.000.000	PT Bank BTN - Ciputat Branch
PT Bank Mandiri Cab. Cikini	5.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank Mandiri - Cikini Branch
PT Bank Sulut	21.000.000.000	21.000.000.000	PT Bank Sulut
	<u>40.000.000.000</u>	<u>40.000.000.000</u>	
Dana Jaminan Syariah:			Syariah
PT Bank Jabar Syariah Cab. Bekasi	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Jabar Syariah - Bekasi Branch
PT Bank Mandiri Syariah Cab. Cikini	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Mandiri Syariah - Cikini Branch
PT BRI Syariah Cab. Rawamangun	3.000.000.000	3.000.000.000	PT BRI Syariah - Rawamangun Branch
	<u>11.000.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>	
Jumlah Dana Jaminan	<u>51.000.000.000</u>	<u>51.000.000.000</u>	Total Guarantee Funds

Tahun 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 diubah menjadi sebagai berikut: perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp51.000.000.000,- dan Rp51.000.000.000,- sudah memenuhi ketentuan di atas.

In 2008, in accordance with the regulation of the Minister of Finance No. 158/PMK.010/2008 on second amendment of the decree of the Finance Minister No. 424/KMK.06/2003 on financial healthiness of insurance companies and reinsurance companies, a No. of provisions in the decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 was amended by the followings: Insurance and reinsurance companies should have guarantee funds of at least equal to larger than 20% of their required paid-in capital, and the result of 1% of net premiums earned plus 0.25% from reinsurance premium. The guarantee funds as of December 31, 2016 and 2015 of Rp51,000,000,000 and Rp51,000,000,000, have exceeded the above requirement.

	31-Des-16	31-Des-15	
13. Deposito Biasa	1.411.681.621.502	1.820.129.530.788	13. Deposits
Deposito Berjangka Rupiah			<i>Time deposits (in Rupiah)</i>
Pihak Berelasi (Bank Pemerintah):			<i>With related parties</i>
PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Tangerang	500.000.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab Cikini
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	3.212.747.786	1.245.690.323	PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin
PT Bank Tabungan Negara	-	5.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara
PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni	21.750.000.000	24.750.000.000	PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau	6.000.000.000	6.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang	-	500.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kota Wisata	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kemang Pratama
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Taman Galaxy	8.000.000.000	15.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Taman Galaxy
PT Bank Syariah Mandiri Cab Baturaja	-	500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Baturaja
PT Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Kelapa Gading	-	500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Kelapa Gading
PT Bank Syariah Mandiri Cab Citeureup	-	500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Citeureup
PT Bank Syariah Mandiri Cab Klewer Solo	-	500.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Klewer Solo
PT Bank Syariah Mandiri Cab Luwuk	-	3.000.000.000	PT Bank Syariah Mandiri Cab Luwuk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis	4.500.000.000	6.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang	1.500.000.000	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Gubeng Surabaya	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Gubeng Surabaya
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon	4.000.000.000	4.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung	-	1.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung	-	1.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jemursari	-	14.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jemursari
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Krian	-	15.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Krian
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gresik	-	12.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gresik
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jombang	-	10.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jombang
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manukan	-	7.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manukan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bojonegoro	-	20.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bojonegoro

13. Deposito Biasa - pindahan

13. Deposits

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mojokerto	-	20.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mojokerto
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lamongan	-	12.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lamongan
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tuban	-	12.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tuban
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sidoarjo	-	10.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sidoarjo
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Waru	-	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Waru
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kertajaya	-	5.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kertajaya
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mulyosari	-	2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Mulyosari
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Diponegoro	-	2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Diponegoro
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Rajawali	-	2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Rajawali
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kusuma Bangsa	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kusuma Bangsa
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab HR Muhammad	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab HR Muhammad
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kapas Krampung	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kapas Krampung
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pamekasan	-	2.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pamekasan
Jumlah Deposito Pada Pihak Berelasi	52.462.747.786	236.995.690.323	
Pihak Tidak Berelasi:			With un-related parties
PT Bank DKI Syariah Cab Pondok Indah	25.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank DKI Syariah Cab Pondok Indah
PT Bank QNB Indonesia	40.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank QNB Indonesia
PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)	-	45.000.000.000	PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)
PT Bank Maluku	275.000.000.000	193.500.000.000	PT Bank Maluku
PT Bank Lampung	-	110.000.000.000	PT Bank Lampung
PT Bank Sulawesi Utara	167.000.000.000	150.000.000.000	PT Bank Sulawesi Utara
PT Bank Sulawesi Selatan dan Barat	173.000.000.000	-	PT Bank Sulawesi Selatan dan Barat
PT Bank Jawa Tengah	5.000.000.000	-	PT Bank Jawa Tengah
PT Bank Bukopin	-	55.000.000.000	PT Bank Bukopin
PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba	67.250.000.000	43.250.000.000	PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	258.000.000.000	110.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka	56.500.000.000	46.250.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Kemayoran	-	2.000.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Kemayoran
PT Bank Woori Saudara Indonesia	-	30.000.000.000	PT Bank Woori Saudara Indonesia
PT Bank Kalimantan Barat	-	25.000.000.000	PT Bank Kalimantan Barat
PT Bank Nusa Tenggara Barat	-	35.000.000.000	PT Bank Nusa Tenggara Barat
PT Bank Mega Syariah Cab Kuningan	-	15.000.000.000	PT Bank Mega Syariah Cab Kuningan
PT Bank Panin Syariah Cab Slipi	12.000.000.000	51.500.000.000	PT Bank Panin Syariah Cab Slipi
PT Bank Panin Syariah Cab. Simatupang	6.500.000.000	-	PT Bank Panin Syariah Cab. Simatupang
PT Bank BTPN Syariah	-	8.000.000.000	PT Bank BTPN Syariah
PT Bank Jabar Banten Cab Depok	-	15.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Cab Depok
PT Bank Aceh Cab Utama	-	7.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Utama
PT Bank Aceh Cab Sinabang	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Sinabang
PT Bank Aceh Cab Lhoksumawe	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Lhoksumawe
PT Bank Aceh Cab langsa	-	2.500.000.000	PT Bank Aceh Cab langsa
PT Bank Aceh Cab Takengon	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Takengon
PT Bank Aceh Cab Meulaboh	-	3.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Meulaboh
PT Bank Aceh Cab Kutacane	-	3.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Kutacane
PT Bank Aceh Cab Sigli	-	3.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Sigli
PT Bank Aceh Cab Blang Pidie	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Blang Pidie
PT Bank Aceh Cab Bireuen	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Bireuen
PT Bank Aceh Cab Sabang	-	2.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Sabang
PT Bank Aceh Cab Tapak Tuan	-	2.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Tapak Tuan
PT Bank Aceh Cab Syar. Banda Aceh	-	5.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Syar. Banda Aceh
PT Bank Aceh Cab Syar. LhokSumawe	-	3.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Syar. LhokSumawe
PT Bank Aceh Cab Syar. Medan	-	1.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Syar. Medan
PT Bank Aceh Cab Singkil	-	1.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Singkil
PT Bank Aceh Cab Bener Moriah	-	1.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Bener Moriah
PT Bank Aceh Cab Blang Keujeren	-	2.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Blang Keujeren
PT Bank Aceh Cab Calang	-	3.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Calang
PT Bank Aceh Cab Jeuram	-	1.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Jeuram
PT Bank Aceh Cab Jantho	-	2.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Jantho
PT Bank Aceh Cab Kuala Simpang	-	3.500.000.000	PT Bank Aceh Cab Kuala Simpang
PT Bank Aceh Cab Meureudu	-	2.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Meureudu
PT Bank Aceh Cab Subulussalam	-	2.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Subulussalam
PT Bank Aceh Cab Pidi	-	2.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Pidi
PT Bank Aceh Cab Medan	-	5.000.000.000	PT Bank Aceh Cab Medan

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. Deposito Biasa - pindahan

13. Deposits

PT Bank Jabar Banten	10.000.000.000	-
PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi	53.000.000.000	37.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang	3.500.000.000	7.500.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon	4.500.000.000	3.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang	-	500.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung	-	1.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati	-	2.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok	-	1.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung	-	500.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung	-	2.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber	-	500.000.000
PT Bank Sumatera Barat (Nagari)	169.000.000.000	239.000.000.000
PT Bank Jambi	-	120.000.000.000
PT Bank Bengkulu	20.000.000.000	50.000.000.000
Jumlah Deposito Pada Pihak Tidak Berelasi	1.345.250.000.000	1.479.500.000.000
Total Deposito Rupiah	1.397.712.747.786	1.716.495.690.323
Deposito Berjangka (dalam mata uang asing)		
Pihak Berelasi		
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	1.894.473.716	2.443.340.465
(2016): USD 140.999,83; (2015): USD 177.117,83		
PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini	4.030.800.000	4.138.500.000
(2016): USD 300,000.00 (2014): USD 300,000.00		
Jumlah Deposito Berjangka Pihak Berelasi	5.925.273.716	6.581.840.465
Pihak Ketiga		
PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Arthaloka	1.343.600.000	73.113.500.000
(2016): USD 100.000,00; (2015): USD 5.300.000,00		
PT Bank Bukopin	-	4.138.500.000
(2016): USD 0 ;(2015): USD 300,000.00		
Jumlah Deposito Berjangka Pihak Ketiga	1.343.600.000	77.252.000.000
Jumlah Deposito Dalam Valuta Asing	7.268.873.716	83.833.840.465
	1.404.981.621.502	1.800.329.530.788
Deposito On Call:		
Pihak Berelasi :		
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	5.875.000.000	15.000.000.000
PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini	825.000.000	4.800.000.000
	6.700.000.000	19.800.000.000
Jumlah Deposito	1.411.681.621.502	1.820.129.530.788

PT Bank Jabar Banten	
PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung	
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber	
PT Bank Sumatera Barat (Nagari)	
PT Bank Jambi	
PT Bank Bengkulu	
Time Deposits (in Foreign Exchange)	
With Related Parties	
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	
(2016): USD 140.999,83; (2015): USD 177,117.83	
PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini	
(2016): USD300,000.00 (2014): USD 300,000.00	
Total Time Deposits With Related Parties	
With Un-related Parties	
PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Arthaloka	
(2016): USD 100.000,00; (2015): USD 5,300,000.00	
PT Bank Bukopin	
(2016): USD 0 ;(2015): USD 300,000.00	
Total Time Deposits With Un-related Parties	
Total deposits in the Foreign Exchange	
Deposit on Call	
With Related Parties	
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	
PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini	
Total Deposit	

		31-Dec-16	31-Dec-15		
14. Saham Yang Diperdagangkan		127.034.530.140	72.930.428.377	14. Stocks Held for Trading	
		31-Dec-16			
Emiten:	Jumlah Saham/No. of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) /Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2016	Emitent:
Adhi Karya Tbk	1.207.900	522.823.800	1.989.608.200	2.512.432.000	Adhi Karya Tbk
Agung Podomoro Tbk	1.188.600	339.873.164	(90.267.164)	249.606.000	Agung Podomoro Tbk
Alam Sutera Reality Tbk	421.300	187.352.012	(39.054.412)	148.297.600	Alam Sutera Reality Tbk
Astra Internasional IndonesiaTbk	316.500	2.351.739.688	267.297.812	2.619.037.500	Astra Internasional IndonesiaTbk
Bank Mandiri Tbk	600.000	6.293.593.750	651.406.250	6.945.000.000	Bank Mandiri Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk	50.000	249.622.500	26.627.500	276.250.000	Bank Negara Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk	950.000	10.092.901.302	998.348.698	11.091.250.000	Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk	3.000.000	5.567.167.210	(302.167.210)	5.265.000.000	Bumi Serpong Damai Tbk
H.M Sampoerna Tbk	1.500.000	5.802.898.186	(57.898.186)	5.745.000.000	H.M Sampoerna Tbk
Industri Jamu dan Farmasi SIDA Tbk	845.600	425.324.259	14.387.741	439.712.000	Industri Jamu dan Farmasi SIDA Tbk
Intiagri Resources Tbk	17.237.100	60.243.664.500	(16.978.543.500)	43.265.121.000	Intiagri Resources Tbk
Island Concepts Tbk	3.510.000	1.516.320.000	238.680.000	1.755.000.000	Island Concepts Tbk
Matahari Departement Store Tbk	70.000	1.143.797.361	(85.047.361)	1.058.750.000	Matahari Departement Store Tbk
Media Nusantara Citra Tbk	1.200.000	2.346.100.625	(240.100.625)	2.106.000.000	Media Nusantara Citra Tbk
Moderenland Reality Tbk	463.600	189.456.560	(30.905.360)	158.551.200	Moderenland Reality Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk	484.700	1.209.164.368	99.525.632	1.308.690.000	Perusahaan Gas Negara Tbk
Semen Indonesia Tbk	570.000	5.512.496.875	(282.746.875)	5.229.750.000	Semen Indonesia Tbk
Summarecon Agung Tbk	1.900.000	2.626.299.375	(108.799.375)	2.517.500.000	Summarecon Agung Tbk
Surya Citra Media Tbk	800.000	2.087.706.240	152.293.760	2.240.000.000	Surya Citra Media Tbk
Tambang Batu Bara Tbk	18.500	292.300.000	(61.050.000)	231.250.000	Tambang Batu Bara Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.500.000	17.113.272.490	796.727.510	17.910.000.000	Telekomunikasi Indonesia Tbk
Waskita Karya Tbk	1.900.000	4.707.158.024	137.841.976	4.845.000.000	Waskita Karya Tbk
Wijaya Karya Tbk	2.590.819	6.438.291.094	(323.958.254)	6.114.332.840	Wijaya Karya Tbk
Wijaya Karya Beton Tbk	3.640.000	3.392.141.626	(389.141.626)	3.003.000.000	Wijaya Karya Beton Tbk
Jumlah	48.964.619	140.651.465.009	(13.616.934.869)	127.034.530.140	Total

		31-Dec-15			
Emiten:	Jumlah Saham/No. of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) /Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2015	Emitent:
Sugih Energy Tbk	3.764.600	1.566.073.600	203.288.400	1.769.362.000	Sugih Energy Tbk
Bukit Asam Tbk	18.500	292.300.000	(208.587.500)	83.712.500	Bukit Asam Tbk
Ratu Prabu Energy Tbk	2.839.739	1.590.253.840	(1.107.498.210)	482.755.630	Ratu Prabu Energy Tbk
Semen Batu Raja Tbk	23.000	12.880.000	(6.187.000)	6.693.000	Semen Batu Raja Tbk
Darma Henwa Tbk	8.415.500	639.578.000	(218.803.000)	420.775.000	Darma Henwa Tbk
Intiagri Resources Tbk	17.927.500	19.182.425.000	46.701.137.500	65.883.562.500	Intiagri Resources Tbk
Trub Alam Tbk	151.710	7.585.501	(1)	7.585.500	Trub Alam Tbk
Bank Central Asia Tbk	58	661.200	(22.800)	638.400	Bank Central Asia Tbk
Bakrie & Brother Tbk	6.964	348.200	-	348.200	Bakrie & Brother Tbk
Island Concepts Tbk	3.510.000	1.516.320.000	607.230.000	2.123.550.000	Island Concepts Tbk
Kertas Basuki R Tbk	78	3.900	-	3.900	Kertas Basuki R Tbk
Multipolar Tbk	33	23.925	(15.444)	8.481	Multipolar Tbk
Steady Safe Tbk	641.733	62.889.834	(5.133.864)	57.755.970	Steady Safe Tbk
Sigma Gold Inti Perkasa Tbk	4.780.077	2.141.475.085	(47.801.359)	2.093.673.726	Sigma Gold Inti Perkasa Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk	6	6.000	(2.430)	3.570	Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah	42.079.498	27.012.824.085	45.917.604.292	72.930.428.377	Total

			31-Des-16	31-Des-15		
15. Obligasi Yang Diperdagangkan			632.531.740.809	276.650.530.623	15. Bonds Held for Trading	
			31-Des-16			
Emiten	Maturity	Rating	Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2016	Emittent
Konvensional						
Adhi Karya Tbk		A	11.120.000.000	(99.500.000)	11.020.500.000	Adhi Karya Tbk
Angkasa Pura II Tbk		AAA	39.000.000.000	(282.128.000)	38.717.872.000	Angkasa Pura II Tbk
ANTAM Tbk		A-	5.012.500.000	(354.500.000)	4.658.000.000	ANTAM Tbk
Astra Sedaya Tbk		AAA	15.397.000.000	(320.500.000)	15.076.500.000	Astra Sedaya Tbk
Bank Bukopin Tbk		A+	24.585.519.792	(826.719.792)	23.758.800.000	Bank Bukopin Tbk
Bank DKI		A+	20.000.000.000	324.000.000	20.324.000.000	Bank DKI
Bank Exim Tbk		AAA	55.000.000.000	(1.079.500.000)	53.920.500.000	Bank Exim Tbk
Bank Mandiri Tbk		AAA	28.000.000.000	-	28.000.000.000	Bank Mandiri Tbk
Bank Nagari		A	5.000.000.000	-	5.000.000.000	Bank Nagari
Bank Permata		AAA	5.000.000.000	100.000.000	5.100.000.000	Bank Permata
Bank Rakyat Indonesia Tbk		AAA	23.000.000.000	(24.500.000)	22.975.500.000	Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank SULSELBAR		A+	21.000.000.000	63.000.000	21.063.000.000	Bank SULSELBAR
Bank Tabungan Negara Tbk		AA	69.444.500.000	(2.607.200.000)	66.837.300.000	Bank Tabungan Negara Tbk
BCA Finance		AA+	2.000.000.000	8.000.000	2.008.000.000	BCA Finance
Bumi Serpong Damai Tbk		AA-	5.000.000.000	(99.000.000)	4.901.000.000	Bumi Serpong Damai Tbk
Garuda Indonesia Tbk		A-	5.000.000.000	17.500.000	5.017.500.000	Garuda Indonesia Tbk
Hutama Karya Tbk		A-	2.000.000.000	10.000.000	2.010.000.000	Hutama Karya Tbk
INDON 43		-	23.508.969.200	38.658.059	23.547.627.259	INDON 43
Indosat Tbk		AA	12.247.583.333	(247.583.333)	12.000.000.000	Indosat Tbk
Pegadaian		AA+	53.877.500.000	(1.307.000.000)	52.570.500.000	Pegadaian
Pelindo		AA	7.179.550.000	(131.350.000)	7.048.200.000	Pelindo
PLN 42		AAA	48.768.649.200	(4.717.211.650)	44.051.437.550	PLN 42
PNM Investment Manajemen		A	15.000.000.000	(37.500.000)	14.962.500.000	PNM Investment Manajemen
PP Properti		A-	9.000.000.000	(109.800.000)	8.890.200.000	PP Properti
Sarana Multigriya Financial		AA	3.000.000.000	(125.481.000)	2.874.519.000	Sarana Multigriya Financial
Sukuk Bank Muamalat		AA-	5.065.000.000	(57.000.000)	5.008.000.000	Sukuk Bank Muamalat
Surat Utang Negara FR72 & FR65		-	23.985.765.000	(410.000.000)	23.575.765.000	SUN FR72 & FR65
Waskita Karya Tbk		A-	57.000.000.000	99.700.000	57.099.700.000	Waskita Karya Tbk
Syariah						
Adhi Karya Tbk		A	1.000.000.000	(100.000)	999.900.000	Adhi Karya Tbk
Angkasa Pura I		AAA	5.000.000.000	(41.780.000)	4.958.220.000	Angkasa Pura I
Bank Mandiri Syariah		AA	5.000.000.000	-	5.000.000.000	Bank Mandiri Syariah
Bank Muamalat Tbk		A+	13.219.000.000	(274.600.000)	12.944.400.000	Bank Muamalat Tbk
Bank SULSELBAR		A+	4.000.000.000	(231.200.000)	3.768.800.000	Bank SULSELBAR
Bank BRI Syariah		A+	4.000.000.000	-	4.000.000.000	Bank BRI Syariah
Indosat Tbk		AAA	1.000.000.000	4.000.000	1.004.000.000	Indosat Tbk
PBS011		-	10.881.790.000	(549.790.000)	10.332.000.000	PBS011
PBS004		-	5.453.000.000	(983.000.000)	4.470.000.000	PBS004
Sukuk SR008		-	3.000.000.000	37.500.000	3.037.500.000	Sukuk SR008
			646.746.326.525	(14.214.585.716)	632.531.740.809	

15. Obligasi Yang Diperdagangkan - pindahan

15. Bonds Held for Trading

Emiten	Maturity	Rating	31-Des-15		Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2015	Emiten
			Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)		
Indosat		AA	2.000.000.000	(149.910.000)	1.850.090.000	Indosat
Adhi Karya		A	11.000.000.000	(1.204.052.000)	9.795.948.000	Adhi Karya
Astra Sedaya Finance		AA	15.000.000.000	(297.045.000)	14.702.955.000	Astra Sedaya Finance
Pegadaian		AA	45.877.500.000	4.353.360.000	50.230.860.000	Pegadaian
Bank Exim		AAA	15.267.500.000	(532.505.000)	14.734.995.000	Bank Exim
Bank Tabungan Negara		AA	45.444.500.000	2.559.720.000	48.004.220.000	Bank Tabungan Negara
Bank Bukopin		A	19.445.000.000	(1.087.466.000)	18.357.534.000	Bank Bukopin
Bank Nagari		A	5.000.000.000	(272.580.000)	4.727.420.000	Bank Nagari
Bank Permata		AA	5.000.000.000	(172.810.000)	4.827.190.000	Bank Permata
BCA Finance		AA	2.000.000.000	(62.122.000)	1.937.878.000	BCA Finance
Bumi Serpong Damai		AA	5.000.000.000	(266.560.000)	4.733.440.000	Bumi Serpong Damai
PLN	PLN	AAA	57.251.368.000	(6.136.030.263)	51.115.337.738	PLN
Hutama Karya		A	2.000.000.000	(187.658.000)	1.812.342.000	Hutama Karya
Garuda Indonesia		A	5.000.000.000	(387.775.000)	4.612.225.000	Garuda Indonesia
Sarana Multi Griya Financial		AA	3.000.000.000	(290.367.000)	2.709.633.000	Sarana Multi Griya Financial
INDON 43		-	15.693.682.000	5.706.542.885	21.400.224.885	INDON 43
Sukuk		A	21.347.000.000	(17.459.085.000)	3.887.915.000	Sukuk
Syariah						Sharia
Indosat		AA	1.000.000.000	(50.060.000)	949.940.000	Indosat
Adhi Karya		A	1.000.000.000	(26.628.000)	973.372.000	Adhi Karya
Adira Dinamika M. Finance		AA	1.000.000.000	(2.012.000)	997.988.000	Adira Dinamika M. Finance
PBS004		-	5.937.000.000	(1.802.220.000)	4.134.780.000	PBS004
Sukuk		A	13.219.000.000	(3.064.757.000)	10.154.243.000	Sukuk
			<u>297.482.550.000</u>	<u>(20.832.019.378)</u>	<u>276.650.530.623</u>	

	31-Des-16	31-Des-15	
Obligasi berdasarkan mata uang :			Bonds by currency:
Rp (Rupiah)	564.932.676.000	204.134.968.000	Rp (rupiah)
Obligasi (2016) : USD 5,031,189.7; (2015) : USD 5,256,655.50	67.599.064.809	72.515.562.623	Obligasi (2016) : USD 5,031,189.7; (2015) : USD 5,256,655.50;
Jumlah Obligasi Yang Diperdagangkan	<u>632.531.740.809</u>	<u>276.650.530.623</u>	The No. of Bonds Traded

16. Reksadana

16. Mutual funds

	31-Des-16	31-Des-15	
Reksadana Konvensional			Mutual Funds - Conventional
PT Danareksa	-	5.077.073.021	PT Danareksa
Mandiri Manajer Investasi	27.238.057.271	9.283.208.225	Mandiri Manajer Investasi
Manulife Aset Managemen	10.060.348.818	-	Manulife Aset Managemen
Mega Capital	8.229.644.077	9.637.082.077	Mega Capital
Trimegah	9.870.258.639	1.084.300.000	Trimegah
PT Batavia Prosperindo Asset Manajemnt	-	1.872.165.315	PT Batavia Prosperindo Asset Manajemnt
AAA Asset Manajemnt	-	1.965.868.028	AAA Asset Manajemnt
Asanusa Asset Management	4.896.598.935	-	Asanusa Asset Management
Sucorinvest Asset Manajemnt	-	1.747.112.369	Sucorinvest Asset Manajemnt
BNI Asset Manajemnt	163.061.637.855	106.984.026.000	BNI Asset Manajemnt
Exchange Traded Fund	2.771.265.419	-	Exchange Traded Fund
GMT Aset Manajemnt	-	1.720.525.377	GMT Aset Manajemnt
Henan Putihrai	12.955.497.040	2.457.355.375	Henan Putihrai
Insight Investment Management	2.025.375.791	-	Insight Investment Management
Millenium Danatama Indonesia	7.109.400.340	15.171.883.834	Millenium Danatama Indonesia
Philip Asset Management	5.215.431.408	-	Philip Asset Management
Pratama Cepital Manajemnt	14.994.015.000	-	Pratama Cepital Manajemnt
PNM Investment Manajemnt	-	1.570.103.815	PNM Investment Manajemnt
Jumlah Reksadana	<u>268.427.530.593</u>	<u>158.570.703.436</u>	Total Investment in Mutual Funds
Reksadana Syariah			Mutual funds - Syariah
PNM Ekuitas Syariah	-	718.636.020	PNM Ekuitas Syariah
PNM Amanah Syariah	2.762.662.274	1.984.215.237	PNM Amanah Syariah
Mandiri Investama Atraktif Syariah	-	3.949.011.790	Mandiri Investama Atraktif Syariah
Mandiri Manajemen Investasi	4.432.968.322	-	Mandiri Manajemen Investasi
Bahana TCW Investment Management	1.985.200.000	-	Bahana TCW Investment Management
Assanusa Asset Management	1.998.407.191	-	Assanusa Asset Management
BNI Sekuritas	14.520.300.000	-	BNI Sekuritas
	<u>25.699.537.787</u>	<u>6.651.863.047</u>	
Total Reksadana Konvensional dan Syariah	<u>294.127.068.380</u>	<u>165.222.566.483</u>	Total Mutual Fund - Conventional and Sharia

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. Reksadana - pindahan

	31-Des-16	31-Des-15
Reksadana berdasarkan mata uang :		
Rp (Rupiah)	294.127.068.380	160.830.108.258
Reksadana (2016) : USD 0 (2015) : USD 318,409.44	-	4.392.458.225
Jumlah Reksadana	<u>294.127.068.380</u>	<u>165.222.566.483</u>

16. Mutual funds

Mutual funds by currency:
 Rp (rupiah)
 Reksadana (2016) : USD 0 (2015) : USD 318,409.44
 Total Mutual funds

17. Penyertaan Saham

	31-Des-16	31-Des-15
Jumlah Penyertaan Saham	<u>1.423.700.000</u>	<u>1.423.700.000</u>
PT Reasuransi Maipark Indonesia	723.700.000	723.700.000
Dana Konsorsium Asuransi Khusus	700.000.000	700.000.000
Jumlah Penyertaan Saham	<u>1.423.700.000</u>	<u>1.423.700.000</u>

17. Stock Investment

PT Reasuransi Maipark Indonesia
 Special insurance consortium fund
 Total stock investment

Penyertaan saham kepada PT Asuransi Maipark Indonesia dilakukan sehubungan dengan Surat Edaran (SE) Departemen Keuangan - Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE-604/LK/2003 tanggal 11 November 2003, kepada semua perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk menjadi pemegang saham PT Asuransi Maipark Indonesia minimal sebesar 0,5% dari total nilai investasi per tanggal 31 Desember 2002.

Investments in shares of PT Asuransi Maipark Indonesia was made in conformity with the circular of the Ministry of Finance – Directorate General of Financial Institution No. SE-604/LK/2003 dated 11 November 2003 that all general insurance and reinsurance companies be shareholders of PT Asuransi Maipark Indonesia at minimum 0.5% of total investment value as of 31 December 2002.

Dana Konsorsium Asuransi Risiko Khusus merupakan pembayaran dana klaim kepada Konsorsium Asuransi Risiko Khusus dalam rangka partisipasi perusahaan-perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam bentuk penutupan asuransi pasar-pasar tradisional.

Special Insurance Risk Consortium Funds represents payments of claim funds to Special Insurance Risk Consortium in relation to participation of general insurance and reinsurance companies to assist small societies by giving them services in form of insurance coverage for traditional markets.

Pengukuran atas penyertaan saham tersebut di atas adalah dengan metode biaya (cost method).

Cost method is used for measuring the stock investment.

18. Aset Tetap

31-Des-16
172.547.500.173

31-Des-15
166.446.549.273

18. Fixed Assets

Aset	31-Des-16				Saldo Akhir (Ending Balance)	Assets
	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)		
Biaya Perolehan:						Cost
Tanah	140.220.000.000	-	-	-	140.220.000.000	Lands
Bangunan	22.143.241.116	2.886.676.498	-	-	25.029.917.614	Buildings
Renovasi	41.261.788	-	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	3.051.100.000	2.907.141.648	2.203.040.954	-	3.755.200.694	Vehicles
Komputer	6.885.805.260	1.587.175.700	-	-	8.472.980.960	Computers
Peralatan Kantor	892.247.070	-	-	-	892.247.070	Office equipment
Perabot Kantor	2.323.275.186	461.287.100	-	-	2.784.562.286	Office furniture and fixture
Software	2.173.464.363	2.102.455.025	-	-	4.275.919.388	Software
Jumlah	<u>177.730.394.782</u>	<u>9.944.735.971</u>	<u>2.203.040.954</u>	<u>-</u>	<u>185.472.089.799</u>	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	2.595.400.310	1.122.655.123	-	-	3.718.055.433	Buildings
Renovasi	41.261.788	-	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	2.583.958.477	751.941.795	2.180.673.333	-	1.155.226.940	Vehicles
Komputer	3.458.792.651	1.181.077.082	-	-	4.639.869.734	Computers
Peralatan Kantor	37.239.720	173.899.800	-	-	211.139.520	Office equipment
Perabot Kantor	1.404.540.168	308.228.901	-	-	1.712.769.069	Office furniture and fixture
Software	1.162.652.394	283.614.748	-	-	1.446.267.142	Software
Jml Ak Penyusutan	<u>11.283.845.509</u>	<u>3.821.417.450</u>	<u>2.180.673.333</u>	<u>-</u>	<u>12.924.589.626</u>	
Nilai Buku	<u>166.446.549.273</u>				<u>172.547.500.173</u>	Net Book Value

18. Aset Tetap - pindahahan

18. Fixed Assets

Aset	31-Des-15					Assets
	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)	Saldo Akhir (Ending Balance)	
Biaya Perolehan:						Cost
Tanah	31.262.092.800	108.957.907.200	-	-	140.220.000.000	Lands
Bangunan	15.902.116.577	6.241.124.539	-	-	22.143.241.116	Buildings
Renovasi	41.261.788	-	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	3.792.353.333	-	741.253.333	-	3.051.100.000	Vehicles
Komputer	6.749.001.068	1.207.500.000	1.070.695.808	-	6.885.805.260	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	869.499.000	-	-	892.247.070	Office equipment
Perabot Kantor	1.689.404.556	633.870.630	-	-	2.323.275.186	Office furniture and fixture
Software	1.973.429.261	200.035.102	-	-	2.173.464.363	Software
Jumlah	61.432.407.453	118.109.936.471	1.811.949.141	-	177.730.394.782	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	1.789.982.843	805.417.467	-	-	2.595.400.310	Buildings
Renovasi	33.697.127	7.564.661	-	-	41.261.788	Renovation
Kendaraan	2.784.771.810	540.440.000	741.253.333	-	2.583.958.477	Vehicles
Komputer	3.631.779.645	897.708.814	1.070.695.808	-	3.458.792.651	Computers
Peralatan Kantor	22.748.070	14.491.650	-	-	37.239.720	Office equipment
Perabot Kantor	1.183.202.928	221.337.240	-	-	1.404.540.168	Office furniture and fixture
Software	947.869.347	214.783.047	-	-	1.162.652.394	Software
Jml Ak Penyusutan	10.394.051.771	2.701.742.879	1.811.949.141	-	11.283.845.509	
Nilai Buku	51.038.355.682				166.446.549.273	Net Book Value

Biaya penyusutan aset tetap per 31 Desember 2016, dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.821.417.450,- dan Rp2.701.742.879,- dibukukan di beban usaha.

Depreciation expenses of fixed assets for the year ended December 31, 2016, and 2015 are Rp3,821,417,450,- and Rp2,701,742,879,- respectively and charged as operating expenses.

Seluruh aset tetap berupa Gedung Kantor dan Perlengkapan Elektronik, telah diasuransikan terhadap risiko: gempa bumi, kebakaran, angin topan, banjir, pencurian, huru-hara, kerusakan, pemogokan, dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp109.620.268.000,- dan Rp92.736.268.000,-, untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets in the form of Office Building and Electronic Equipment, has been insured against the risk: earthquakes, fires, hurricanes, floods, theft, riot, riots, strikes, with total coverage of Rp109,620,268,000,- and Rp92,736,268,000, -, for each of the years 2016 and 2015. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan notulen rapat RUPSLB tentang Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Usaha Konvensional Nomor 15/RR/DIR tanggal 26 Juli 2011, Perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari PT PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000. Pencatatan tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset Perusahaan dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (market value) sebesar Rp35.078.800.000.

For increase in paid-in capital, base on minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders No 15/RR/DIR dated July 26, 2011, on increase in authorized and paid-in capital of conventional business, The Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp35,000,000,000. The valuation is made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan with the report No. 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on 20 May 2011 of Rp35,078,800,000.

Dalam tahun 2015, entitas melakukan revaluasi aset tetap (tanah dan bangunan/gedung) untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan. Penilaian aset tersebut dilakukan oleh Perusahaan Jasa Penilai Publik Bidang Properti "Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi" dengan hasil penilaian untuk tanah (luas : 1.710 m2) sebesar Rp140.220.000.000,- dan Gedung Kantor beserta sarana pelengkap (luas : 3.575 m2) sebesar Rp17.837.000.000,- Jumlah hasil revaluasi Rp158.057.000.000,- sejumlah tersebut sudah termasuk dalam nilai tercatat aset tetap per 31 Desember 2015.

In 2015, the entity revalued its fixed assets (land and buildings) for tax purposes by the Finance Minister Regulation; 191/PMK.010/2015 on Revaluation of Assets to Interest Taxation. The asset valuation conducted by the Field Services Company Property Appraisal "Toto Suharto & Partners Bekasi branch" with the results of the assessment for the land (area: 1,710 m2) of Rp140,220,000,000, - and Office Building along with complementary means (area: 3,575 m2) of Rp17,837,000,000, - Total revaluation Rp158,057,000,000, - a No. that is already included in the carrying value of fixed assets per December 31, 2015.

	31-Des-16	31-Des-15		
19. Aset Pajak Tangguhan	33.447.824.933	28.941.264.631	19. Deferred Tax Asset	
Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan per 31 Desember 2016 dan 2015 serta pendapatan (beban) pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sebagai berikut:			<i>The breakdown of deferred tax assets (liabilities) as of December 31, 2016 and 2015 and deferred tax benefits (expenses) for the years ended December 31, 2016 and 2015:</i>	
	31-Des-16	(Beban)/Manfaat Pajak Tangguhan/Deferred Tax Expense (benefit)	31-Des-15	
Cadangan IBNR	34.793.974.899	7.311.038.936	27.482.935.963	Allowance for IBNR claims
Imbalan Pasca Kerja	(8.239.920)	(1.114.191.626)	1.105.951.706	Post employment benefit
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	699.248.880	(69.810.015)	769.058.895	Receivable impairment
Penyusutan	(2.062.225.973)	(712.656.023)	(1.349.569.950)	Depreciation
Surplus Revaluasi Gedung	-	(931.102.868)	931.102.868	Revaluation Surplus Building
	33.422.757.886	4.483.278.404	28.939.479.482	
Penurunan Nilai Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	Decrease in value of deferred tax assets
Syariah	25.067.047	23.281.898	1.785.149	Sharia
Saldo Akhir Aset Pajak Tangguhan	33.447.824.933	4.506.560.302	28.941.264.631	Deferred Tax Asset

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

In September 2008, Law No. 7 of 1983 on "Income Tax" was revised for the fourth time with the Law No. 36 of 2008. The revised Law stipulates changes in corporate tax rate from a progressive rate to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and thereafter

	31-Des-16	31-Des-15	
20. Aset Lain-lain	1.064.887.652	4.225.693.667	20. Other Assets
Terdiri dari :			Comprising of:
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	27.000.000.000	27.000.000.000	Fund Management Contracts
(Cadangan Penyisihan KPD)	(27.000.000.000)	(27.000.000.000)	Allowance for Doubtful KPD
Corp. Member Rancamaya	165.000.000	165.000.000	Corp. Member Rancamaya
Corp. Member Bogor Raya	120.000.000	120.000.000	Corp. Member Bogor Raya
Corp. Member Gunung Geulis	110.000.000	110.000.000	Corp. Member Gunung Geulis
Corp. Member Emeraldal	60.000.000	60.000.000	Corp. Member Emeraldal
Lain-lain	609.887.652	3.770.693.667	Miscellaneous
Jumlah Aset Lain-lain	1.064.887.652	4.225.693.667	Total

Perusahaan menggunakan Manajer Investasi untuk mengelola dana melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam bentuk saham, obligasi, kas bank dan lain-lain.

The Company uses an Investment Manager to manage the funds through Funds Management Contracts in the form of stocks, bonds, cash and banks and others.

Saldo Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) per 31 Desember 2016, yang telah direklasifikasi ke Aset lain-lain (non admitted asset) adalah sebesar Rp27.000.000.000,-, disebabkan karena Kontrak Pengelolaan Dana telah jatuh tempo tetapi perusahaan kesulitan mencairkan dana.

Balance of Investment in Fund Management Contracts as at December 31, 2016, which has been reclassified to other assets (non admitted assets) is Rp27,000,000,000,-, because the Fund Management Contracts have expired but the Company finds it difficult to withdraw funds.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas sampai dengan tahun 2016 perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai kontrak pengelolaan dana sebesar 100% atau Rp27.000.000.000,-

Taking into account the above conditions until 2016, the Company has to amortize the entire value of the fund management contracts at 100% or Rp27 billion,-

Rincian kontrak pengelolaan dana adalah sebagai berikut :

Fund management contract details are as follows:

	31-Des-16	31-Des-15	
Rincian Kontrak Pengelolaan Dana:			Breakdown of Fund Management Contracts:
PT Synergy Asset Management (SYAM)	12.000.000.000	12.000.000.000	PT Synergy Asset Management (SYAM)
PT Euro Capital Pregrine Securities (PT EPS)	15.000.000.000	15.000.000.000	PT Euro Capital Pregrine Securities (PT EPS)
	27.000.000.000	27.000.000.000	

Perkembangan terakhir tahun 2016 penagihan dana investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah sebagai berikut:

The latest information on investment fund billing of Fund Management Contract (KPD) is as follow:

20. Aset Lain-lain - pindahahan

20. Other Assets

PT Synergy Asset Management

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.184/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 07 September 2016 pihak PT Synergy Asset Management diharuskan membayar ganti kerugian materil sebesar Rp31.200.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas dana investasi sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan keuntungan bunga sebesar Rp19.200.000.000,- (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah).

PT Eurocapital Peregrine Securities

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No.583/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 08 Nopember 2016 pihak PT Eurocapital Peregrine Securities diharuskan membayar ganti kerugian materil sebesar Rp31.800.000.000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas dana investasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan keuntungan bunga sebesar Rp16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah).

PT Synergy Asset Management

Based on the decision of the District Court (PN) South Jakarta 184 / Pdt.G / 2016 / PN. Jkt.Sel dated September 7, 2016 the PT Synergy Asset Management is required to pay compensation amounting Rp31.200.000.000 material, - (thirty-one billion two hundred million), consisting of an investment fund of Rp12.000.000.000, - (two fourteen billion rupiah) and gains interest at Rp19.200.000.000, - (nineteen billion two hundred million rupiah).

Based on the decision of the District Court (PN) South Jakarta 583 / Pdt.G / 2016 / PN. Jkt.Sel dated November 08, 2016, the PT Eurocapital Peregrine Securities material required to pay compensation amounting to Rp31.800.000.000, - (thirty-one billion eight hundred million rupiah) consisting of an investment fund of Rp15,000,000,000, - (five fourteen billion rupiah) and gains interest at Rp16.800.000.000, - (sixteen billion eight hundred million rupiah).

	31-Des-16	31-Des-15
21. Utang Klaim Reasuransi	46.317.849.655	72.045.599.652
Utang Klaim Reasuransi Konvensional		
Utang Klaim Reasuransi Umum		
Saldo Awal	30.904.015.561	36.261.637.474
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	1.147.835.478.812	1.060.376.560.875
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	1.178.739.494.373	1.096.638.198.349
Penyelesaian Tahun Berjalan	1.150.833.923.543	1.065.734.182.788
	27.905.570.830	30.904.015.561
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	27.905.570.830	30.904.015.561
Utang Klaim Reasuransi Jiwa		
Saldo Awal	33.700.353.810	9.604.182.136
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	235.559.122.601	179.980.395.407
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	269.259.476.411	189.584.577.543
Penyelesaian Tahun Berjalan	254.236.259.366	155.884.223.733
	15.023.217.045	33.700.353.810
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	15.023.217.045	33.700.353.810
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Konvensional	42.928.787.875	64.604.369.371
Utang Klaim Reasuransi Syariah		
Utang Klaim Reasuransi Umum		
Saldo Awal	5.567.790.286	2.220.877.704
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	79.980.457.955	47.123.971.650
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	85.548.248.241	49.344.849.354
Penyelesaian Tahun Berjalan	84.195.268.758	43.777.059.068
	1.352.979.483	5.567.790.286
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	1.352.979.483	5.567.790.286
Utang Klaim Reasuransi Jiwa		
Saldo Awal	1.873.439.996	1.005.276.253
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	108.392.901.904	121.084.522.586
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	110.266.341.900	122.089.798.839
Penyelesaian Tahun Berjalan	108.230.259.602	120.216.358.843
	2.036.082.298	1.873.439.996
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	2.036.082.298	1.873.439.996
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Syariah	3.389.061.780	7.441.230.281
Jumlah Utang Klaim Reasuransi	46.317.849.655	72.045.599.652

21. Reinsurance Claim Payables

Conventional Reinsurance Claim Payable

General Reinsurance Claim Payable

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Impairment

Balance as at December 31

Life Reinsurance Claim Payable

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Impairment

Balance as at December 31

Total reinsurance claim payable - conventional

Reinsurance Claim Payable - Syariah

General Reinsurance Claim Payable

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Impairment

Balance as at December 31

Life Reinsurance Claim Payable

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Impairment

Balance as at December 31

Total reinsurance claim payable - syariah

Total Reinsurance Claim Payable

21. Utang Klaim Reasuransi - pindahan

21. Reinsurance Claim Payables

	31-Des-16	31-Des-15	
Hutang Klaim Reasuransi umum - konvensional	27.905.570.830	30.904.015.561	General Reinsurance Claim Payable-Conventional
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - konvensional	15.023.217.045	33.700.353.810	Life Reinsurance Claim Payable-Conventional
Hutang Klaim Reasuransi umum - syariah	1.352.979.483	5.567.790.286	General Reinsurance Claim Payable-Syariah
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - syariah	2.036.082.298	1.873.439.996	Life Reinsurance Claim Payable-Syariah
Jumlah hutang klaim reasuransi	<u>46.317.849.655</u>	<u>72.045.599.652</u>	Total Reinsurance Claim Payable

Jumlah hutang tersebut di atas menunjukkan nilai wajar hutang reasuransi setelah dikurangi cadangan Penurunan nilai.

The total debt shows the fair value of debt net of allowance for impairment

Hutang klaim reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:

Reinsurance Claim Payable Based on transaction with

Phak hubungan istimewa PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Affiliation with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Pihak ketiga

Third party

Jumlah hutang klaim reasuransi

Total reinsurance claim payable

Utang klaim reasuransi per 31 Desember 2016 seluruhnya merupakan utang kepada pihak ketiga.

All of reinsurance claim payable at Desember, 31, 2016 were to third parties

	31-Des-16	31-Des-15	
Utang Klaim Reasuransi berdasarkan mata uang :			Reinsurance Claims debt by currency:
Rp (Rupiah)	37.674.581.143	59.313.458.857	Rp (Rupiah)
USD (2016) : 638,515.50; (2015) : 891.319,34;	8.579.094.258	12.295.750.295	USD (2016) : 638,515.50; (2015) : 891,319.34;
SGD (2016) : 6,845.98; (2015) : 8,971.51;	63.660.220	87.473.147	SGD (2016) : 6,845.98; (2015) : 8,971.51;
JPY (2016) : 0,00; (2015) : 2,967,658.00 ;-	-	339.885.871	JPY (2016) : 0,00; (2015) : 2,967,658.00 ;-
EUR (2016) : 5,00; (2015) : 568.59 ;-	70.808	8.568.469	EUR (2016) : 5,00; (2015) : 568.59 ;-
GBP (2016) : 26,85; (2015) : 22,64;	443.227	463.013	GBP (2016) : 26,85; (2015) : 22,64;
	<u>8.643.268.513</u>	<u>12.732.140.795</u>	
Jumlah Utang Klaim Reasuransi	<u>46.317.849.655</u>	<u>72.045.599.652</u>	Total Reinsurance Claim Payable

22. Utang Premi Retrosesi

Total Reinsurance Claim Payable

Utang Premi Retrosesi Umum - Konvensional

General Retrocession Premium Payable - Conventional

Saldo Awal	52.902.461.881	27.505.527.767	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	2.373.219.392.736	155.839.417.098	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	2.426.121.854.617	183.344.944.865	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	2.354.042.815.845	130.442.482.984	Settlement in current year
Saldo Utang Premi Retrosesi	72.079.038.773	52.902.461.881	General Retrocession Payable Balance
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	<u>72.079.038.773</u>	<u>52.902.461.881</u>	Balance as at December 31

Utang Premi Retrosesi Jiwa - Konvensional

Life Retrocession Premium Payable-Conventional

Saldo Awal	534.902.983	55.155.321	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	28.446.826.581	481.203.217	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	28.981.729.564	536.358.538	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	26.417.360.755	1.455.556	Settlement in current year
	<u>2.564.368.809</u>	<u>534.902.983</u>	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	<u>2.564.368.809</u>	<u>534.902.983</u>	Balance as at December 31
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konvensional	<u>74.643.407.581</u>	<u>53.437.364.864</u>	Total Retrocession Premium Payable - Conventional

22. Utang Premi Retrosesi - pindah

22. Retrocession Premium Payable

Retrosesi Syariah

Syariah retrocession

Utang Premi Retrosesi Umum

General Retrocession Premium Payable

Saldo Awal	1.814.784.719	912.535.553
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	24.226.110.432	24.118.363.023
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	26.040.895.152	25.030.898.576
Penyelesaian Tahun Berjalan	23.207.625.501	23.216.113.857
Saldo sebelum penurunan nilai	2.833.269.650	1.814.784.719
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	2.833.269.650	1.814.784.719

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Balance Before Impairment

Allowance for impairment

Balance as at December 31

Utang Premi Retrosesi Jiwa - Syariah

Life Retrocession Premium Payable - Syariah

Saldo Awal	185.510.515	185.510.515
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	186.714.170	90.672.718
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	372.224.685	276.183.233
Penyelesaian Tahun Berjalan	119.717.561	90.672.718
	252.507.125	185.510.515
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-
Saldo per 31 Desember	252.507.125	185.510.515
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Syariah	3.085.776.775	2.000.295.235
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konven & Syariah	77.729.184.356	55.437.660.098

Beginning balance

Payable arising in the current year

Total payable

Settlement in current year

Allowance for impairment

Balance as at 31 Desember

Total Retrocession Premium Payable - Syariah

Total Retrocession Premium Payable - Convent. & Syariah

31-Des-16

31-Des-15

Utang premi retrosesi berdasarkan jenis:

Retrocession Premium Payable based on:

Utang premi retrosesi umum - konvensional	72.079.038.773	52.902.461.881
Utang prem retrosesi jiwa - konvensional	2.564.368.809	534.902.983
Utang premi retrosesi umum - syariah	2.833.269.650	1.814.784.719
Utang premi retrosesi jiwa - syariah	252.507.125	185.510.515
Jumlah Utang premi retrosesi	77.729.184.356	55.437.660.098

General Retrocession Premium Payable - Conventional

Life Retrocession Payable - Conventional

General Retrocession Premium Payable - Syariah

Life Retrocession Premium Payable - Syariah

Total Retrocession Premium Payable

31-Des-16

31-Des-15

Utang Premi Retrosesi berdasarkan mata uang :

Retrocession premium payable by currency:

Rp (Rupiah)	44.852.384.905	14.333.231.548
USD (2016) : 2,427,202.2; (2015) : 2,975,583,56;	32.611.888.759	41.048.175.210
SGD (2016) : 2,460.48; (2015) : 3,436.40;	22.879.807	33.508.989
JPY (2016) : 22,339.08; (2015) : 16,368.35 ;-	2.577.930	1.874.667
MYR (2016) : 44,66; (2015) : 730.79 ;-	133.806	2.345.580
EUR (2016) : 16,899.22 ; (2015) : 1,229.23 ;-	239.319.149	18.524.103
	32.876.799.451	41.104.428.550
Jumlah Utang Premi Retrosesi	77.729.184.356	55.437.660.098

Rp (Rupiah)

USD (2016) : 2,427,202.2; (2015) : 2,975,583.56;

SGD (2016) : 2,460.48; (2015) : 3,436.40;

JPY (2016) : 22,339.08; (2015) : 16,368.35 ;-

MYR (2016) : 44,66; (2015) : 730.79 ;-

EUR (2016) : 16,899.22 ; (2015) : 1,229.23 ;-

Total Retrocession Premium Payable

23. Estimasi Klaim Retensi Sendiri

31-Des-16

31-Des-15

1.472.225.992.149

1.380.616.866.849

23. Estimated Own Retention Claim

Kelas Bisnis	Saldo Balance as at 31-Des-16	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo Balance as at 31-Des-15	Classification of Business
Harta Benda	749.589.143.330	(74.755.254.391)	824.344.397.721	Properties
Kendaraan Bermotor	33.633.095.939	7.833.603.545	25.799.492.395	Motor
Pengangkutan	103.674.044.291	54.959.828.150	48.714.216.141	Marine Cargo
Rangka Kapal	97.698.909.406	(12.150.704.532)	109.849.613.938	Marine Hull
Rangka Pesawat	569.685.866	(1.503.534.180)	2.073.220.046	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	23.805.049.279	3.069.124.884	20.735.924.395	Energy
Rekayasa	148.082.610.016	27.956.837.231	120.125.772.785	Engineering
Tanggung Gugat	82.355.814.400	76.562.374.324	5.793.440.076	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	4.723.448.851	1.105.071.013	3.618.377.838	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	123.159.773.937	48.818.369.674	74.341.404.263	Credit and surety bond
Aneka	55.620.561.419	18.116.349.031	37.504.212.388	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	49.313.855.413	(58.402.939.450)	107.716.794.863	Life reinsurance
Jumlah	1.472.225.992.149	91.609.125.299	1.380.616.866.849	Total

23. Estimasi Klaim Retensi Sendiri - pindahan

23. Estimated Own Retention Claim

Kelas Bisnis	Saldo Balance as at 31-Des-15	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo Balance as at 31-Des-14	Classification of Business
Harta Benda	824.344.397.721	124.068.513.401	700.275.884.320	Properties
Kendaraan Bermotor	25.799.492.395	8.733.063.061	17.066.429.334	Motor
Pengangkutan	48.714.216.141	(210.950.444)	48.925.166.585	Marine Cargo
Rangka Kapal	109.849.613.938	(4.396.571.137)	114.246.185.075	Marine Hull
Rangka Pesawat	2.073.220.046	(126.477.729)	2.199.697.775	Aviation
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	20.735.924.395	14.129.990.695	6.605.933.700	Energy
Rekayasa	120.125.772.785	42.494.453.280	77.631.319.505	Engineering
Tanggung Gugat	5.793.440.076	343.237.797	5.450.202.279	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	3.618.377.838	1.713.419.028	1.904.958.810	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	74.341.404.263	21.772.124.744	52.569.279.519	Credit and surety bond
Aneka	37.504.212.388	2.428.229.618	35.075.982.770	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	107.716.794.863	54.851.110.158	52.865.684.705	Life reinsurance
Jumlah	<u>1.380.616.866.849</u>	<u>265.800.142.473</u>	<u>1.114.816.724.377</u>	Total

	31-Des-16	31-Des-15	
Estimasi Klaim Retensi Sendiri berdasarkan mata uang : Rp (Rupiah)	1.374.045.476.897	1.232.363.127.377	Estimated Own Retention Claims by currency: Rp (Rupiah)
USD (2016) : 6,105,425.63; (2015) : 9,381,390.83;	82.032.498.765	129.416.286.500	USD (2016) : 6,105,425.63; (2015) : 9,381,390.83;
EUR (2016) : 68,203.12; (2015) : 115,574.65 ;-	965.861.894	1.741.672.992	EUR (2016) : 68,203.12; (2015) : 115,574.65 ;-
JPY (2016) : 16,857,225.00; (2015) : 16,857,225. ;-	1.945.323.765	1.930.657.979	JPY (2016) : 16,857,225.00; (2015) : 16,857,225. ;-
SGD (2016) : 256,571.01; (2015) : 208,277.14 ;	2.385.833.296	2.030.949.965	SGD (2016) : 256,571.01; (2015) : 208,277.14 ;
GBP (2016) : 656,814.79; (2015) : 641,779.86 ;	10.842.376.714	13.125.110.513	GBP (2016) : 656,814.79; (2015) : 641,779.86 ;
KRW (2016) : 773,167.50 ; (2015) : 773,167.50	8.620.818	9.061.523	KRW (2016) : 773,167.50 ; (2015) : 773,167.50
	<u>98.180.515.252</u>	<u>148.253.739.472</u>	
Jumlah Estimasi Klaim Retensi Sendiri	<u>1.472.225.992.149</u>	<u>1.380.616.866.849</u>	Total Estimated Own Retention Claims

24. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

24. Un-Earned Premium

Kelas Bisnis	Saldo/Balance as at 31-Dec-2016	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	Saldo/Balance as at 31-Dec-2015	Classification of Business
Harta Benda	615.910.001.122	59.383.413.829	556.526.587.293	Properties
Kendaraan Bermotor	41.951.623.552	(11.197.613.111)	53.149.236.663	Motor
Pengangkutan	239.003.507.664	124.863.168.354	114.140.339.310	Marine Cargo
Rangka Kapal	63.201.341.575	9.522.273.378	53.679.068.197	Marine Hull
Rangka Pesawat	2.197.609.380	(3.303.551.874)	5.501.161.254	Aviation
Satelit	692.085.829	538.378.264	153.707.565	Satellite
Energi	38.459.362.129	19.762.027.458	18.697.334.671	Energy
Rekayasa	50.007.981.448	(3.083.154.746)	53.091.136.194	Engineering
Tanggung Gugat	51.214.247.175	13.166.889.270	38.047.357.905	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	11.617.921.305	(1.527.783.257)	13.145.704.562	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	216.216.019.031	21.935.854.468	194.280.164.563	Credit and surety bond
Aneka	71.890.326.618	528.731.091	71.361.595.527	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	269.590.521.144	126.717.582.112	142.872.939.032	Life reinsurance
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	<u>1.671.952.547.972</u>	<u>357.306.215.235</u>	<u>1.314.646.332.737</u>	Total Un-earned Premium

24. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan - pindahan

**24. Un-Earned Premium
 Classification of Business**

Kelas Bisnis	Saldo/Balance as at 31-Des-15	Kenaikan/Penurunan Increase/decrease	Saldo/Balance as at 31-Des-14	
Harta Benda	556.526.587.293	315.771.903.328	240.754.683.965	Properties
Kendaraan Bermotor	53.149.236.663	21.052.780.675	32.096.455.988	Motor
Pengangkutan	114.140.339.310	99.059.450.085	15.080.889.225	Marine Cargo
Rangka Kapal	53.679.068.197	9.611.995.636	44.067.072.561	Marine Hull
Rangka Pesawat	5.501.161.254	4.113.374.855	1.387.786.399	Aviation
Satelit	153.707.565	153.707.565	-	Satellite
Energi	18.697.334.671	(3.134.951.620)	21.832.286.291	Energy
Rekayasa	53.091.136.194	18.008.184.457	35.082.951.737	Engineering
Tanggung Gugat	38.047.357.905	34.093.601.089	3.953.756.816	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	13.145.704.562	(8.209.425.969)	21.355.130.531	Personal Accident and health
Kredit dan Surety Bond	194.280.164.563	(27.999.846.003)	222.280.010.566	Credit and surety bond
Aneka	71.361.595.527	(280.200.979)	71.641.796.506	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	142.872.939.032	(63.009.653.166)	205.882.592.198	Life reinsurance
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	<u>1.314.646.332.737</u>	<u>399.230.919.953</u>	<u>915.415.412.784</u>	Total un-earned premium

	31-Des-16	31-Des-15	
PYBMP berdasarkan mata uang :			PYBMP by currency:
Rp (Rupiah)	1.669.663.319.839	1.215.309.251.301	Rp (Rupiah)
USD (2016) : 154,099.72; (2015) : 7,135,214.32;	2.070.483.838	98.430.281.544	USD (2016) : 154,099.72; (2015) : 7,135,214.32;
JPY (2016) : 382,890.29; (2015) : 493,957.88 ;-	44.185.539	56.572.996	JPY (2016) : 382,890.29; (2015) : 493,957.88 ;-
SGD (2016) : 1,996.00; (2015) : 53,999.54 ;	18.560.644	526.559.774	SGD (2016) : 1,996.00; (2015) : 53,999.54 ;
EUR (2016) : 11,015.61; (2015) : 16,304.56 ;-	155.998.112	245.704.502	EUR (2016) : 11,015.61; (2015) : 16,304.56 ;-
MMK (2016) : 0,00; (2015) : 7,019,855.77 ;-	-	74.340.273	MMK (2016) : 0,00; (2015) : 7,019,855.77 ;-
MYR (2016) : 0,00; (2015) : 1,1258.58 ;-	-	3.622.347	MYR (2016) : 0,00; (2015) : 1,1258.58 ;-
	<u>2.289.228.134</u>	<u>99.337.081.436</u>	
Jumlah PYBMP berdasarkan mata uang :	<u>1.671.952.547.972</u>	<u>1.314.646.332.737</u>	Total PYBMP by currency:

25. Test Kecukupan Liabilitas (TKL)

25. Liability Adequacy Test (LAT)

Berikut adalah hasil perhitungan LAT yang dilakukan oleh Divisi Aktuaria Perusahaan untuk reasuransi konvensional dan Syariah, tanggal 31 Desember 2016, secara keseluruhan total cadangan yang tersedia dibandingkan dengan total nilai kini arus kas masa depan adalah sebagai berikut:

Here are the results LAT calculations performed by the Company's Actuarial Division for conventional and syariah reinsurance, dated December 31, 2016; that the overall total available reserves compared to the total present value of future cash flows is as follows:

No	Uraian/ Description	Cadangan Neto / Net Reserve	Nilai Kini Arus Kas Masa Depan Berdasarkan Kontrak Asuransi/ Present Value of Future Cash Flows Based on Insurance Contract	Tes Kecukupan Liabilitas/Liability Adequate Test (LAT)	Description	No
A	Konvensional				Conventional	A
1	Cadangan Atas PYBMP	790.109.716.700	622.189.535.770	167.920.180.930	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	91.532.810.351	74.187.161.941	17.345.648.410	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	674.435.991.351	852.978.744.722	(178.542.753.371)	Reserve for Claim	3
	Jumlah Konvensional	1.556.078.518.402	1.549.355.442.433	6.723.075.969	Total	
B	Syariah				Syariah	B
1	Cadangan Atas PYBMP	62.851.446.032	54.641.852.873	8.209.593.159	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	4.987.421.777	2.385.963.613	2.601.458.164	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	79.053.829.238	88.674.185.536	(9.620.356.298)	Reserve for Claim	3
	Jumlah Syariah	146.892.697.047	145.702.002.022	1.190.695.025	Total	
	Total	1.702.971.215.449	1.695.057.444.455	7.913.770.994	Total	

Data dari tabel tersebut dia atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan total cadangan teknis untuk reasuransi konvensional dan syariah yang tersedia lebih besar dari nilai kini arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransinya, sehingga cadangan yang ada telah mencukupi.

The data in the above table showed that overall total technical reserves for conventional and syariah reinsurance available is greater than the present value of future cash flows under the contract of insurance, so that there has been sufficient reserves.

	31-Des-16	31-Des-15	
26. Beban Yang Masih Harus Dibayar	30.062.935.646	22.321.813.643	26. Accrued Expenses
Beban Umum	30.062.935.646	22.321.813.643	General Expenses
Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, SDM dan umum, seperti: merit prestasi, jasa produksi karyawan dan beban SDM dan umum lainnya.			<i>Accrued expenses relates to employees, human resources and general administrative, such as: merit system, employees' production bonus and other human resources expenses as well as other general expenses.</i>
	31-Des-16	31-Des-15	
27. Utang Pajak	13.642.400.943	36.819.905.407	27. Taxes Payable
Terdiri dari :			
PPh Pasal 21	998.610.448	-	Income tax article 21
PPh Pasal 23	77.080.819	-	Income tax article 23
PPh Pasal 25 *)	12.512.151.604	36.819.905.407	Income tax article 25 *)
PPh Pasal 26	54.558.072	-	Income tax article 26
Jumlah Utang Pajak	<u>13.642.400.943</u>	<u>36.819.905.407</u>	Total
*) Perhitungan Pajak Penghasilan:			Income tax
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:			<i>Reconciliation between profit (loss) before income tax based on statement of income and fiscal profit (loss) as follows:</i>
27. Utang Pajak - pindahan	2016	2015	27. Taxes Payable
1) Laba Sebelum Pajak Penghasilan:	407.572.009.431	295.190.037.649	1) Profit before income tax:
Koreksi Pajak:			Tax Correction
2) Penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final:			2) Income after tax
a. Hasil Investasi	(154.860.302.016)	(177.103.894.570)	Investment income
b. Zakat	(840.212.621)	(819.964.322)	Zakat
c. Jasa Giro	(463.007.084)	(559.508.838)	Banking fee
Penghasilan kena pajak final	<u>(156.163.521.720)</u>	<u>(178.483.367.730)</u>	Income subject to final tax
3) Beda Tetap:			3) Permanent differences:
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pajak Penghasilan 21	11.672.778.563	12.232.981.121	Income tax article 21
Jamuan dan Representasi	2.205.632.267	1.830.326.810	Entertainments and representation
Cadangan Klaim (IBNR)	-	-	Allowance for IBNR claims
Biaya Perawatan/Pengobatan Pegawai	2.924.404.124	2.722.604.063	Employees medical expenses
Iuran Keanggotaan	2.596.812.675	1.903.162.000	Membership fee
Biaya Kendaraan Dinas	683.961.654	782.195.083	Company vehicle expenses
Biaya Telepon Gengam dan Fax (30%)	181.721.764	151.583.222	Hand phones and fax (30%)
Beban HUT dan Silaturahmi	896.272.800	567.437.826	Anniversary and relation expenses
Biaya Olah Raga, Rekreasi dan Bintang	787.162.562	659.436.656	Sports, recreations and mental fostering
Jamuan Makan dan Minum Pegawai	50.261.000	46.702.819	Drinking expenses for employees
Lain-lain	470.132.302	1.836.858.799	
Jumlah Beda Tetap	<u>22.469.139.711</u>	<u>22.733.288.399</u>	Total permanent differences
4) Beda Temporer:			Temporary differences:
Cadangan Klaim IBNR	29.244.155.746	109.931.743.851	Allowance for IBNR claims
Imbalan Pasca Kerja	4.732.867.797	4.423.806.825	Post employment benefit
Penyusutan	(8.281.554.718)	(5.372.210.450)	Depreciation
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	2.929.914.537	3.141.844.843	Allowance for impairment of receivables
Surplus Revaluasi Gedung	-	3.724.411.472	
a) Jumlah Beda Temporer	<u>28.625.383.362</u>	<u>115.849.596.540</u>	a) Total temporary difference
b) Jumlah Beda Tetap + Beda Temporer	<u>51.094.523.073</u>	<u>138.582.884.939</u>	b) Total permanent + temporary differences
Laba Kena Pajak (1+2+4b)	302.503.010.784	255.289.554.858	Taxable income
Pajak Kini (25% x Laba kena pajak)	75.625.752.696	63.822.388.714	Current tax (25% x Rp 17,488,644,411)
Kredit Pajak:			Tax credit:
PPh Pasal 25	63.113.601.092	27.002.483.307	Income tax article 25
PPh Badan Kurang Bayar	<u>12.512.151.604</u>	<u>36.819.905.407</u>	Corporate income tax over/(under) payment

	31-Dec-16	31-Dec-15	
28. Utang Zakat	840.212.621	819.964.322	28. Zakat Payable
Merupakan utang zakat yang belum diselesaikan dengan saldo per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp840.212.621,- dan Rp819.964.322,-.			Represent zakat payable as of 31 December 2016 and 2015 amounting to Rp Rp 840.212.621,- and Rp 819.964.322,-, respectively.
29. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	23.453.523.943	23.959.764.348	29. Post Service Benefit Liability
Berdasarkan laporan aktuaria PT KIS Actuaris tanggal 10 Januari 2017, beban, aset dan liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4,732,867,797,- ; Rp 19,853,549,649 ; dan Rp 43,307,073,594., serta untuk 31 Desember 2015 adalah Rp 4,423,806,825. ; Rp 16,985,777,695., dan Rp40.945.542.044,- , masing-masing dengan rincian sebagai berikut:			Based on PT KIS Actuaris actuarial report dated January 10, 2017, expenses, assets and post-employment benefit liabilities per December 31, 2016 amounted to Rp 4,732,867,797, -; Rp 19,853,549,649; and Rp 43,307,073,594., and for 31 Desember 2015 is Rp 4,423,806,825. ; Rp 16,985,777,695., And Rp40.945.542.044, -, respectively, with details as follows:
Liabilitas:			Liability
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	43.307.073.594	40.945.542.044	Present value of benefit obligation
Nilai Wajar Aset Program	(19.853.549.649)	(16.985.777.695)	Fair value of program assets
Status Pendanaan	23.453.523.943	23.959.764.348	Funding status
Liabilitas Masa Lalu Yang Masih Akan Diakui di Tahun-Tahun Mendatang	-	-	Past service liabilities to be recognized in future years
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Yang Belum Diakui	-	-	Unrecognized actuarial gain (loss)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Akhir	23.453.523.943	23.959.764.348	Net Liability of Post Employment Benefit
Beban:			Cost:
Beban Jasa Kini	2.894.984.906	2.653.916.210	Current service expenses
Beban Bunga	3.665.857.900	3.035.220.717	Interest expenses
Hasil yang Diharapkan dari Aset Program	(1.392.833.796)	(1.345.127.595)	Expected income from program assets
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Diakui	(435.141.214)	79.797.493	Recognized actuarial gain (loss)
Beban Jasa Lalu yang Vested	-	-	Vested past service expenses
Amortisasi Beban Jasa Lalu yang Belum Vested	-	-	Amortization of unvested past service expenses
	4.732.867.797	4.423.806.825	
Rekonsiliasi Beban dan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja:			Reconciliation between cost and liability of post employment benefit:
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Awal	23.959.764.348	22.976.083.443	Net liability at beginning of years
Koreksi Saldo Aset Program	-	-	Adjustment in the balance of program assets
Adjustment Saldo Awal Aset Program	(351)	-	Adjustment in the beginning balance of program assets
Uran Bersih yang Dibayarkan ke Aset Program	(4.765.827.476)	(4.078.425.654)	Net contribution paid to Program Asset
Pembayaran Manfaat (Imbalan)	(532.480.885)	(601.100.104)	Benefit paid
Beban Imbalan Kerja Tahun Berjalan	4.732.867.797	4.423.806.825	Current Service Cost
Pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain	59.200.509	1.239.399.839	Remeasurement of other comprehensive income
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja akhir	23.453.523.942	23.959.764.348	Net liability at end of years
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat karyawan oleh aktuaris independen, sebagai berikut:			The followings are major assumptions used in determining post employment benefit expenses by the independent actuary:
Tingkat Diskonto	8,20% per annum	8,5% per annum	Discount rate
Tingkat hasil aset program	9,00% per annum	8,00% per annum	Yield rate of program assets
Kenaikan Gaji Rata-rata per Tahun	9%	10%	Average salary increase per annum
Usia Pensiun Normal	56 tahun	56 tahun	Normal pension age
Tingkat Mortalita	TMI III/2011	TMI III/2011	Mortality rate
Tingkat Cacat/Disability	5% TMI III2011	5% TMI III2011	Disability rate
Tingkat Pengunduran Diri : usia 20-29	6%	6%	Age 20-29
usia 30-34	3%	3%	Age 30-34
usia 35-39	1,80%	1,80%	Age 35-39
usia 40-50	1..20%	1..20%	Age 40-50
usia 51-52	0,60%	0,60%	Age 51-22
usia > 52	0,00%	0,00%	Age > 52
Metode Aktuarial	Project unit credit	Project unit credit	Actuary method
Jumlah Pekerja	173	165	No. of Personnel
Rata-rata Usia (Tahun)	38,64	38,74	Average of age (Year)
Rata-rata Masa Kerja (Tahun)	11,29	11,59	Average of service term (Year)
Rata-rata Sisa Masa kerja (Tahun)	17,36	17,26	Average of remaining service term (Year)
Rata-rata Sisa Masa Yang diperkirakan kerja (Tahun)	11,28	11,24	remaining service term estimated to be used working (Year)
Jumlah Upah (sebulan)	Rp 1,941,805,754	Rp 1,656,800,000	Total salary (Month)

29. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - pindahan

Perusahaan menyerahkan pengelolaan aset pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun sebesar 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.

	31-Dec-16
30. Utang Qard	5.000.000.000

	31-Dec-16
31. Utang Lain-lain	3.263.975.757

Merupakan beban yang masih harus dibayar pada divisi syariah yang belum diselesaikan per 31 Desember 2016 dan 2015, terdiri dari :

- Beban pegawai yang masih harus dibayar	3.263.975.757
- Dana PKBL	-
	<u>3.263.975.757</u>

	31-Dec-16
32. Dana Tabarru (Peserta)	36.763.833.437

Merupakan alokasi surplus dana tabarru untuk cadangan dengan rincian sebagai

Saldo Awal	24.141.892.523
Alokasi Surplus Dana Tabarru	12.621.940.914
Dana Tabarru Tahun Berjalan	-
Jumlah Dana Tabarru (Peserta)	<u>36.763.833.437</u>

	31-Dec-16
33. Modal	538.000.000.000

Modal telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 538.000 (lima ratus tiga puluh delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp538.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh delapan milyar rupiah) oleh para pemegang saham, dengan rincian setoran saham sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) merupakan setoran saham lama sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 8 Agustus 2008 nomor 12, yang dibuat dihadapan Umaran Mansjur, notaris di Jakarta Timur.
- b. Sebesar Rp 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) terdiri dari:
 - 1) Sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) bersumber dari pengalihan cadangan umum Perseroan usaha konvensional menjadi modal setor usaha Syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 29 November 2010 ; dan
 - 2) Sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) berupa inbreng melalui pengalihan hak atas asset milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia berupa tanah sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 867/Cikini.
- c. Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) merupakan pengalihan pinjaman Subordinasi menjadi setoran modal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Perseroan, sebagaimana keputusan RUPS PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tanggal 30 April 2013.
- d. Sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) tambahan modal disetor dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah disetor ke Perusahaan masing-masing tanggal 24 September 2014 sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

29. Post Employment Benefit Liability

The Company has entrusted PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia to manage its defined benefit pension plan, and the Company provides additional benefit in terms of old age benefit through PT Asuransi Jiwasraya, in which an employee is entitled to get payment equals to 60X of his/her basic salary upon retirement; 70% of the insurance premium is paid by the Company.

	31-Dec-15	
	-	30. Qard Payable

	31-Dec-15	
	2.791.612.265	31. Other Payables

Represents provision accrued on the unpaid Syariah division of December 31, 2016 and 2015, consisting of:

	2.791.612.265	- Accrued personnel expenses
	-	- Partnership program & environment building (CSR) fund
	<u>2.791.612.265</u>	

	31-Dec-15	
	24.141.892.523	32. Tabarru Fund (Participant)

Allocation of tabarru fund surplus for allowance in the following breakdown:

	21.485.294.417	Beginning balance
	4.350.455.533	Allocated Tabarru fund surplus
	(1.693.857.427)	Current year tabarru fund
	<u>24.141.892.523</u>	Total Tabarru Fund (Participant)

	31-Dec-15	
	538.000.000.000	33. Capital

Capital has been placed and paid amounting 538.000 (five hundred and thirty eight thousand) shares with a nominal value totaling Rp538.000.000.000, (five hundred and thirty eight billion rupiah) by the shareholders, with details of deposit shares as follows:

- a. Amounting to Rp85,000,000,000 (eighty billion rupiahs) was an old stock payment as evidence in notarial deed No. 12 dated August 8, 2008 which was made before Umaran Mansjur,SH, a notary in East Jakarta.
- b. Amounting to Rp 53,000,000,000 (fifty three billion rupiahs) consisting of:
 - 1) Rp18,000,000,000 (eighteen billion rupiahs) originating from the transfer of the Company's general reserves of conventional business into Syariah unit paid up capital as stipulated in the General Meeting of Shareholders dated November 29, 2010, and
 - 2) Amounting to Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiahs) in the form of the transfer of ownership right over the assets of (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia in the form of land, based on right-to-build certificate No. 867/Cikini.
- c. Amounting to Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiahs) represents the transfer of the Subordinated loans into capital injection of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to the Company, as evident from the company balance sheet as at April 30, 2013.
- d. A total of Rp 250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) has been deposited to PT Reasuransi Nasional Indonesia respectively on September 24, 2014 amounting to Rp150,000,000,000, -(one hundred and fifty billion rupiah) and on December 17, 2014 amounting to Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)

33. Modal - pindahan

Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tambahan setoran modal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana keputusan RUPSLB PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 24 Juni 2015.

Dengan adanya perubahan Modal Dasar tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham terdiri dari 538.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

33. Capital

Additional capital injection of Rp75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) was released by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to the Company on August 19, 2015 as a result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Reasuransi Nasional

The change in the authorized capital resulted in the No. of paid-in capital shares becoming 538,000 of par value of Rp1,000,000 (one million rupiah), each in the following breakdown:

2016				
Pemegang Saham	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Jumlah Modal Disetor <i>Paid-in Capital</i>	Persentase <i>Percentage of Interest</i>	Shareholders
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	537.999	537.999.000.000	99,9998	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1.000.000	0,0002	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	538.000	538.000.000.000	100,00	Total

2015				
Pemegang Saham	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Jumlah Modal Disetor <i>Paid-in Capital</i>	Persentase <i>Percentage of Interest</i>	Shareholders
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	537.999	537.999.000.000	99,9998	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1.000.000	0,0002	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	538.000	538.000.000.000	100,00	Total

34. Komponen Ekuitas Lainnya

a) Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba/(rugi)

	31-Des-16	31-Des-15
- Keuntungan(kerugian) aktuarial imbalan kerja	(21.311.480.489)	(21.370.681.014)
Beban pajak	-	-
Jumlah setelah pajak	(21.311.480.489)	(21.370.681.014)
- Surplus revaluasi gedung	109.300.432.681	109.300.432.681
Beban pajak	-	-
Jumlah setelah pajak	109.300.432.681	109.300.432.681

b) Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba/(rugi)

Jumlah komponen ekuitas lainnya	Nihil	Nihil
	87.988.952.192	87.929.751.667

34. Other Equity Components

a) Items not to be classified to profit/(loss)

Gains (losses) on actuarial employee benefits	-
Tax expense	-
Total after tax	-
Buildings revaluation gains	-
Tax expense	-
Total after tax	-

b) Items to be classified to profit/(loss)

Total other equity components

	31-Dec-16	31-Dec-15	
35. Pendapatan Premi	4.876.870.426.810	3.451.755.982.573	35. Premium Revenues
Rincian pendapatan premi reasuransi adalah sebagai berikut:			Details of Premium Revenues is as follows:

Kelas Bisnis	31-Dec-16			Jumlah Pendapatan Premi (Total Premium Revenues)	Classification of Business
	Premi Bruto (Gross Premium)	Premi Retrosesi (Retrocession Premium)	Penurunan(Kenaikan) PYBMP/Decrease (Increase) in Un-Earned		
Konvensional					Conventional
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	2.445.790.076.629	(1.477.470.703.826)	26.819.486.147	995.138.858.950	Properties
Kendaraan Bermotor	80.380.511.546	(105.571.553)	11.820.653.039	92.095.593.032	Motor
Pengangkutan	622.959.573.725	(492.536.547.609)	(6.403.570.103)	124.019.456.014	Marine Cargo
Rangka Kapal	171.482.064.544	(29.584.393.847)	(1.239.648.024)	140.658.022.673	Marine Hull
Rangka Pesawat	6.505.779.730	(4.413.754.299)	3.571.832.599	5.663.858.030	Aviation
Satelit	1.061.800.000	-	(538.378.264)	523.421.736	Satellite
Energi	70.334.078.452	(56.613.527.973)	12.592.379.845	26.312.930.325	Energy
Rekayasa	114.242.292.488	(13.263.840.348)	3.805.372.254	104.783.824.394	Engineering
Tanggung Gugat	308.880.952.269	(215.686.860.995)	1.812.528.671	95.006.619.945	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	17.429.704.283	(2.053.197.082)	1.683.438.068	17.059.945.269	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	423.988.121.137	(54.165.497.298)	6.061.560.059	375.884.183.898	Credit and surety bond
Aneka	181.257.212.918	(27.325.497.907)	7.282.402.752	161.214.117.763	Miscellaneous
	<u>4.444.312.167.721</u>	<u>(2.373.219.392.736)</u>	<u>67.268.057.043</u>	<u>2.138.360.832.028</u>	
Reasuransi Jiwa	432.558.259.088	(28.446.826.581)	(87.119.479.041)	316.991.953.466	Life reinsurance
Jumlah	<u>4.876.870.426.810</u>	<u>(2.401.666.219.317)</u>	<u>(19.851.421.998)</u>	<u>2.455.352.785.494</u>	Total

35. Pendapatan Premi - pindahan **35. Premium Revenues**

Kelas Bisnis	31-Dec-15			Jumlah Pendapatan Premi (Total Premium Revenues)	Classification of Business
	Premi Bruto (Gross Premium)	Premi Retrosesi (Retrocession Premium)	Penurunan(Kenaikan) PYBMP/Decrease (Increase) in Un-Earned		
Konvensional					Conventional
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	1.677.279.717.873	(848.845.807.169)	(78.832.129.819)	749.601.780.885	Properties
Kendaraan Bermotor	105.255.161.094	(38.981.910)	(19.596.241.500)	85.619.937.684	Motor
Pengangkutan	315.909.956.519	(195.753.648.626)	(21.476.450.922)	98.679.856.971	Marine Cargo
Rangka Kapal	137.059.783.890	(13.213.888.332)	(6.116.666.563)	117.729.228.995	Marine Hull
Rangka Pesawat	16.552.434.235	(15.333.256.735)	(2.582.503.164)	(1.363.325.665)	Aviation
Satelit	266.437.854	-	(153.707.564)	112.730.290	Satellite
Energi	44.949.535.052	(3.738.529.272)	(1.900.677.542)	39.310.328.238	Energy
Rekayasa	116.335.169.687	(13.627.199.251)	(17.240.082.433)	85.467.888.003	Engineering
Tanggung Gugat	111.237.514.777	(89.439.339.731)	(9.542.979.088)	12.255.195.958	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	27.505.692.312	(5.192.940.900)	8.226.098.600	30.538.850.011	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	429.452.969.430	(12.332.545.952)	31.402.809.466	448.523.232.944	Credit and surety bond
Aneka	173.811.356.307	(11.168.161.460)	1.477.870.753	164.121.065.600	Miscellaneous
	<u>3.155.615.729.029</u>	<u>(1.208.684.299.338)</u>	<u>(116.334.659.776)</u>	<u>1.830.596.769.916</u>	
Reasuransi Jiwa	296.140.253.544	(4.472.530.178)	53.695.062.137	345.362.785.503	Life reinsurance
Jumlah	<u>3.451.755.982.573</u>	<u>(1.213.156.829.515)</u>	<u>(62.639.597.639)</u>	<u>2.175.959.555.418</u>	Total

		31-Des-16	31-Des-15		
36. Klaim Bruto		1.383.394.601.413	1.240.356.956.282	36. Gross Claim	
2016					
Kelas Bisnis	Klaim Bruto (Gross Claim)	Klaim Retrosesi (Retrocession Claim)	(Penurunan) Kenaikan EKRS ((Decrease) Increase in EKRS)	Jumlah Beban Klaim (Total Claim Expenses)	Classification of Business
Klaim Reasuransi - Konvensional					Reinsurance Claim - Conventional
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	531.666.647.094	(103.363.467.374)	(6.554.780.623)	421.748.399.096	Properties
Kendaraan Bermotor	49.547.270.834	-	8.646.374.625	58.193.645.459	Motor
Pengangkutan	54.947.883.761	(1.652.529.431)	19.888.578.303	73.183.932.632	Marine Cargo
Rangka Kapal	118.492.636.211	(17.502.204.378)	(20.068.355.574)	80.922.076.259	Marine Hull
Rangka Pesawat	6.071.279.119	(1.205.444.174)	(1.503.534.179)	3.362.300.766	Aviation
Satelit	-	-	-	-	Satellite
Energi	41.046.633.881	(13.150.099.015)	(7.649.064.810)	20.247.470.056	Energy
Rekayasa	111.626.869.308	(10.431.071.819)	28.259.077.388	129.454.874.877	Engineering
Tanggung Gugat	4.947.024.871	-	24.765.899.535	29.712.924.406	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	2.637.552.591	-	1.110.276.585	3.747.829.176	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	148.442.370.431	788.820.737	32.507.661.315	181.738.852.482	Credit and surety bond
Aneka	78.409.310.712	(730.733.712)	12.254.893.415	89.933.470.414	Miscellaneous
	1.147.835.478.811	(147.246.729.167)	91.657.025.979	1.092.245.775.623	
Reasuransi Jiwa	235.559.122.601	(1.761.390.833)	(97.177.723.397)	136.620.008.372	Life reinsurance
Jumlah	1.383.394.601.413	(149.008.120.000)	(5.520.697.418)	1.228.865.783.995	Total
2015					
Kelas Bisnis	Klaim Bruto (Gross Claim)	Klaim Retrosesi (Retrocession Claim)	(Penurunan) Kenaikan EKRS ((Decrease) Increase in EKRS)	Jumlah Beban Klaim (Total Claim Expenses)	Classification of Business
Klaim Reasuransi - Konvensional					Reinsurance Claim - Conventional
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	425.374.432.006	(108.887.240.743)	111.267.130.977	427.754.322.240	Properties
Kendaraan Bermotor	43.471.406.848	-	6.514.386.604	49.985.793.453	Motor
Pengangkutan	65.675.335.496	(6.222.085)	1.177.653.143	66.846.766.554	Marine Cargo
Rangka Kapal	71.699.059.867	(6.547.605.325)	(3.928.667.127)	61.222.787.415	Marine Hull
Rangka Pesawat	11.920.111.916	(8.686.087.947)	(126.477.729)	3.107.546.240	Aviation
Satelit	-	-	-	-	Satellite
Energi	35.129.603.196	(20.902.561.538)	7.517.702.596	21.744.744.253	Energy
Rekayasa	64.431.038.803	(6.315.550.408)	(11.917.141.300)	46.198.347.095	Engineering
Tanggung Gugat	7.512.069.096	-	342.210.122	7.854.279.218	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	7.248.706.225	-	1.990.596.158	9.239.302.383	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	226.314.176.519	(4.433.549.477)	14.304.723.439	236.185.350.481	Credit and surety bond
Aneka	101.600.620.902	(60.599.574)	8.444.533.064	109.984.554.392	Miscellaneous
	1.060.376.560.875	(155.839.417.098)	135.586.649.947	1.040.123.793.724	
Reasuransi Jiwa	179.980.395.407	(481.203.217)	72.806.883.744	252.306.075.934	Life reinsurance
Jumlah	1.240.356.956.282	(156.320.620.315)	208.393.533.691	1.292.429.869.658	Total

	31-Des-16	31-Des-15		
37. Beban Komisi Netto	841.946.203.578	691.395.755.679	37. Net Commission Expense	
2016				
Kelas Bisnis	Beban Komisi (<i>Commission Expense</i>)	Pendapatan Komisi (<i>Commission Income</i>)	Beban komisi Bersih (<i>Commission Expense</i>)	<i>Classification of Business</i>
Komisi Reasuransi Dibayar Konvensional				<i>Paid reinsurance commission</i> <i>Conventional</i>
Reasuransi Umum				<i>General Reinsurance</i>
Harta Benda	646.980.585.779	243.921.669.184	403.058.916.595	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	26.712.009.395	13.662.931	26.698.346.464	<i>Motor</i>
Pengangkutan	149.757.373.464	109.779.179.967	39.978.193.496	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	38.290.872.207	3.336.696.644	34.954.175.564	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	1.283.574.220	1.543.275.433	(259.701.212)	<i>Aviation</i>
Satelit	212.360.000	-	212.360.000	<i>Satellite</i>
Energi	11.628.786.821	2.686.929.870	8.941.856.951	<i>Energy</i>
Rekayasa	33.449.025.235	974.129.878	32.474.895.357	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	67.472.296.710	37.055.648.030	30.416.648.680	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	6.157.818.821	-	6.157.818.821	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	113.998.397.103	4.746.223.603	109.252.173.500	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	55.211.525.143	1.763.202.399	53.448.322.744	<i>Miscellaneous</i>
	<u>1.151.154.624.899</u>	<u>405.820.617.939</u>	<u>745.334.006.961</u>	
Reasuransi Jiwa	99.421.425.367	2.809.228.750	96.612.196.617	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah	<u>1.250.576.050.267</u>	<u>408.629.846.689</u>	<u>841.946.203.578</u>	Total
2015				
Kelas Bisnis	Beban Komisi (<i>Commission Expense</i>)	Pendapatan Komisi (<i>Commission Income</i>)	Beban komisi Bersih (<i>Commission Expense</i>)	<i>Classification of Business</i>
Komisi Reasuransi Dibayar Konvensional				<i>Paid reinsurance commission</i> <i>Conventional</i>
Reasuransi Umum				<i>General Reinsurance</i>
Harta Benda	450.582.778.034	155.566.806.116	295.015.971.918	<i>Properties</i>
Kendaraan Bermotor	34.052.771.258	8.160.550	34.044.610.708	<i>Motor</i>
Pengangkutan	68.562.210.781	37.432.965.665	31.129.245.116	<i>Marine Cargo</i>
Rangka Kapal	32.432.986.413	1.428.939.476	31.004.046.937	<i>Marine Hull</i>
Rangka Pesawat	3.743.899.591	3.656.991.593	86.907.998	<i>Aviation</i>
Satelit	59.547.657	-	59.547.657	<i>Satellite</i>
Energi	8.079.256.217	152.371.857	7.926.884.360	<i>Energy</i>
Rekayasa	33.513.885.348	594.259.433	32.919.625.915	<i>Engineering</i>
Tanggung Gugat	24.589.761.687	2.203.286.021	22.386.475.667	<i>Liability</i>
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	10.558.784.719	-	10.558.784.719	<i>Personal injury and health</i>
Kredit dan Surety Bond	106.522.771.446	50.813.903	106.471.957.543	<i>Credit and surety bond</i>
Aneka	53.551.455.887	680.108.787	52.871.347.099	<i>Miscellaneous</i>
	<u>826.250.109.039</u>	<u>201.774.703.402</u>	<u>624.475.405.637</u>	
Reasuransi Jiwa	69.543.364.820	2.623.014.777	66.920.350.042	<i>Life reinsurance</i>
Jumlah	<u>895.793.473.859</u>	<u>204.397.718.179</u>	<u>691.395.755.679</u>	Total
38. Beban Underwriting Lain Netto	3.695.651.600	5.625.459.437		38. Underwriting other expenses - Net
39. Pendapatan Ujrah	26.228.989.136	24.154.978.060		39. Ujrah Income
40. Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	1.693.857.427		40. Allocation of Tabarru Fund Surplus
41. Hasil Investasi	155.725.193.634	185.420.084.370		41. Investment Income
Terdiri dari:				
Bunga Deposito	115.175.123.214	104.828.449.496		<i>Deposits interest</i>
Obligasi	44.995.810.989	38.053.655.037		<i>Bonds</i>
Saham	(3.522.127.688)	32.029.700.263		<i>Stocks</i>
Reksadana	3.971.196.518	(2.118.390.437)		<i>Mutual funds</i>
Penyertaan	784.991.071	244.281.605		<i>Capital investment</i>
Selisih Kurs	(5.679.800.470)	12.382.388.405		<i>Exchange rate difference</i>
Jumlah Hasil Investasi Neto	<u>155.725.193.634</u>	<u>185.420.084.370</u>		Total

	31-Des-16	31-Des-15	
42. Beban Usaha	145.070.246.714	116.398.528.247	42. Operating Expenses
Terdiri dari:			
Beban Umum	122.299.866.151	99.645.776.227	General expenses
Beban Administrasi	11.478.644.908	9.804.080.929	Administrative expenses
Beban Pemasaran	11.291.735.655	6.948.671.091	Marketing expenses
Jumlah Beban Usaha	<u>145.070.246.714</u>	<u>116.398.528.247</u>	Total
43. Penghasilan (Beban) Lain-lain	(10.157.072.949)	13.811.175.394	43. Other income (expenses)
Hasil Lain-lain terdiri dari :			Other income:
Laba Beda Kurs Non Investasi	53.147.189.450	17.615.908.889	Gain on Foreign Exchange of Non Investment
Jasa Giro	463.007.084	559.038.765	Banking fee
Bunga Piutang Pegawai	89.855.312	99.646.667	Interest on loans to employees
Laba pelepasan aset tetap	780.971.278	358.765.750	Net sales fix asset
Lain-lain	114.431.874	1.395.965.891	Other
Jumlah Hasil Lain-lain	<u>54.595.454.998</u>	<u>20.029.325.962</u>	Total
Beban Lain-lain:			Other expenses:
Selisih Kurs Penerimaan/Pembayaran Reasuransi/Retrosesi	5.417.614.146	(1.883.160.801)	Exchange rate differences on receipt/payment of reinsurance/retrocession
Biaya Bank	464.163.503	318.583.676	Banking expenses
Beban Lainnya	3.085.294.617	7.782.727.693	Other expenses
Rugi Beda Kurs Non Investasi	55.785.455.680	-	Loss on Foreign Exchange Differences Non Investment
Jumlah Beban Lain-lain	<u>64.752.527.947</u>	<u>6.218.150.568</u>	Total
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	<u>(10.157.072.949)</u>	<u>13.811.175.394</u>	Total other income (expenses)
	31-Des-16	31-Des-15	
44. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa			44. Transactions with Related Parties
Pemegang Saham:			Shareholders:
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)			<i>PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Premi Reasuransi	300.948.520.869	201.183.136.097	Reinsurance premiums
Premi Retrosesi	20.130.463.996	18.930.675.357	Retrocession premiums
Klaim Reasuransi	40.945.516.040	154.506.325.328	Reinsurance claims
Beban Sewa Kantor	-	-	Office rental expenses
Pejabat Kunci:			Key personnel:
Komisaris dan Direksi	-	-	Commissioners and directors
Gaji/Honorarium	-	-	Salaries/remuneration
Tunjangan-Tunjangan	-	-	Allowance
Tantiem	-	-	Bonus
	31-Des-16	31-Des-15	
45. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing			45 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies
Aset			Assets
Deposito (2016) : USD 540,999.83; (2015) : USD 6,077,117.83	7.268.873.716	83.833.840.465	Deposits (2016) : USD 540,999.83; (2015) : USD 6,077,117.83
Kas dan Bank (2016) : USD 177,359.67; (2015) : USD 146,944.19	2.383.004.526	2.027.095.101	Cash and Banks (2016) : USD 177,359.67; (2015) : USD 146,944.19
Reksadana (2016) : USD 0,00; (2015) : USD 318,409.44;	-	4.392.458.225	Mutual Funds (2016) : USD 0,00; (2015) : USD 318,409.44;
Obligasi (2016) : USD 5,031,189.7; (2015) : USD 5,256,655.50	67.599.064.809	72.515.562.623	Bonds (2016) : USD 5,031,189.7; (2015) : USD 5,256,655.50
	<u>77.250.943.051</u>	<u>162.768.956.414</u>	
Piutang Reasuransi			Reinsurance Receivable
USD (2016) : 9,299,994.2; (2015) : 8.676.046,76;	124.954.722.071	119.686.065.054	USD (2016) : 9,299,994.2; (2015) : 8.676.046,76;
EUR (2016) : 59,881.98; (2015) : 66.008,81;	848.021.654	994.731.644	EUR (2016) : 59,881.98; (2015) : 66.008,81;
JPY (2016) : 6,054,143.26; (2015) : 2.838.140,60;	698.648.132	325.052.243	JPY (2016) : 6,054,143.26; (2015) : 2.838.140,60;
SGD (2016) : 346,468.97; (2015) : 229.410,70;	3.221.787.235	2.237.027.324	SGD (2016) : 346,468.97; (2015) : 229.410,70;
GBP (2016) : 76.37; (2015) : 29.10 ;	1.260.679	595.127	GBP (2016) : 76.37; (2015) : 29.10 ;
HKD (2016) : 19,165.66; (2015) : 14.041,31	33.203.931	24.991.145	HKD (2016) : 19,165.66; (2015) : 14.041,31
	<u>129.757.643.701</u>	<u>123.268.462.537</u>	
Piutang Retrosesi			Retrocession Receivable
USD (2016) : 1,448,073.09; (2015) : 2,519,465.08;-	19.456.310.037	34.756.020.779	USD (2016) : 1,448,073.09; (2015) : 2,519,465.08;-
	<u>19.456.310.037</u>	<u>34.756.020.779</u>	

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

45. Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing - pindahan

45 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies

	31-Des-16	31-Des-15	
Liabilitas			<i>Liabilities</i>
Utang Reasuransi			<i>Reinsurance Liabilities</i>
USD (2016) : 638,515.50; (2015) : 891,319.34;	8.579.094.258	12.295.750.295	<i>USD (2016) : 638,515.50; (2015) : 891,319.34;</i>
SGD (2016) : 6,845.98; (2015) : 8,971.51;	63.660.220	87.473.147	<i>SGD (2016) : 6,845.98; (2015) : 8,971.51;</i>
JPY (2016) : 0,00; (2015) : 2,967,658.00 ;-	-	339.885.871	<i>JPY (2016) : 0,00; (2015) : 2,967,658.00 ;-</i>
EUR (2016) : 5,00; (2015) : 568.59 ;-	70.808	8.568.469	<i>EUR (2016) : 5,00; (2015) : 568.59 ;-</i>
GBP (2016) : 26,85; (2015) : 22,64;	443.227	463.013	<i>GBP (2016) : 26,85; (2015) : 22,64;</i>
	<u>8.643.268.513</u>	<u>12.731.677.782</u>	
Utang Retrosesi			<i>Retrocession Liabilities</i>
USD (2016) : 2,427,202.2; (2015) : 2,975,583.56;	32.611.888.759	41.048.175.210	<i>USD (2016) : 2,427,202.2; (2015) : 2,975,583.56;</i>
SGD (2016) : 2,460.48; (2015) : 3,436.40;	22.879.807	33.508.989	<i>SGD (2016) : 2,460.48; (2015) : 3,436.40;</i>
JPY (2016) : 22,339.08; (2015) : 16,368.35 ;-	2.577.930	1.874.667	<i>JPY (2016) : 22,339.08; (2015) : 16,368.35 ;-</i>
MYR (2016) : 44,66; (2015) : 730.79 ;-	133.806	2.345.580	<i>MYR (2016) : 44,66; (2015) : 730.79 ;-</i>
EUR (2016) : 16,899.22 ; (2015) : 1,229.23 ;-	239.319.149	18.524.103	<i>EUR (2016) : 16,899.22 ; (2015) : 1,229.23 ;-</i>
	<u>32.876.799.451</u>	<u>41.048.175.210</u>	
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan			<i>Unearned Premium</i>
USD (2016) : 154,099.72; (2015) : 7,135,214.32;	2.070.483.838	98.430.281.544	<i>USD (2016) : 154,099.72; (2015) : 7,135,214.32;</i>
JPY (2016) : 382,890.29; (2015) : 493,957.88 ;-	44.185.539	56.572.996	<i>JPY (2016) : 382,890.29; (2015) : 493,957.88 ;-</i>
SGD (2016) : 1,996.00; (2015) : 53,999.54 ;	18.560.644	526.559.774	<i>SGD (2016) : 1,996.00; (2015) : 53,999.54 ;</i>
EUR (2016) : 11,015.61; (2015) : 16,304.56 ;-	155.998.112	245.704.502	<i>EUR (2016) : 11,015.61; (2015) : 16,304.56 ;-</i>
MMK (2016) : 0,00; (2015) : 7,019,855.77 ;-	-	74.340.273	<i>MMK (2016) : 0,00; (2015) : 7,019,855.77 ;-</i>
MYR (2016) : 0,00; (2015) : 1,128.58 ;-	-	3.622.347	<i>MYR (2016) : 0,00; (2015) : 1,128.58 ;-</i>
	<u>2.289.228.134</u>	<u>99.337.081.436</u>	
Estimasi Klaim Retensi Sendiri			<i>Estimated own retention claim</i>
USD (2016) : 6,105,425.63; (2015) : 9,381,390.83;	82.032.498.765	129.416.286.500	<i>USD (2016) : 6,105,425.63; (2015) : 9,381,390.83;</i>
EUR (2016) : 68,203.12; (2015) : 115,574.65 ;-	965.861.894	1.741.672.992	<i>EUR (2016) : 68,203.12; (2015) : 115,574.65 ;-</i>
JPY (2016) : 16,857,225.00; (2015) : 16,857,225.00 ;-	1.945.323.765	1.930.657.979	<i>JPY (2016) : 16,857,225.00; (2015) : 16,857,225.00 ;-</i>
SGD (2016) : 256,571.01; (2015) : 208,277.14 ;	2.385.833.296	2.030.949.965	<i>SGD (2016) : 256,571.01; (2015) : 208,277.14 ;</i>
GBP (2016) : 656,814.79; (2015) : 641,779.86 ;	10.842.376.714	13.125.110.513	<i>GBP (2016) : 656,814.79; (2015) : 641,779.86 ;</i>
KRW (2016) : 773,167.50 ; (2015) : 773,167.50	8.620.818	9.061.523	<i>KRW (2016) : 773,167.50 ; (2015) : 773,167.50</i>
	<u>98.180.515.252</u>	<u>148.253.739.471</u>	
Selisih Aset atas Liabilitas	<u>84.475.085.441</u>	<u>19.422.765.831</u>	<i>Difference of assets and liabilities</i>

46. Informasi Segmen	2016			46. Segment information
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Aset				Assets
Kas dan setara Kas	3.926.163.342	655.851.194	4.582.014.536	Cash and cash equivalents
Piutang Reasuransi	426.797.615.891	125.092.265.765	551.889.881.656	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	37.860.889.575	7.134.391.339	44.995.280.915	Retrocession receivables
Piutang Ujroh	-	16.189.743.752	16.189.743.752	Ujroh receivables
Aset Retrosesi:				Retrocession Assets
-Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan I	722.471.153.113	-	722.471.153.113	- Un-earned premium Retrocession Share
- Estimasi Klaim Retensi Sendiri Bagian Retr	718.736.171.560	-	718.736.171.560	- Estimated claim - retrocession Share
Jumlah Aset Retrosesi	1.441.207.324.673	-	1.441.207.324.673	Total Retrocession Assets
Biaya Dibayar Dimuka	104.093.500	-	104.093.500	Prepaid expenses
Piutang Hasil Investasi	8.413.321.551	-	8.413.321.551	Investment income receivable
Piutang lain-lain	2.146.804.831	5.361.166.670	7.507.971.501	Other Receivables
Instrumen Investasi :				: Investment Instrument
Dana Jaminan	40.000.000.000	11.000.000.000	51.000.000.000	Guarantee funds
Deposito Berjangka	1.132.000.000.000	272.981.621.502	1.404.981.621.502	Deposits
Deposit On Call	6.700.000.000	-	6.700.000.000	Deposit on Call
Obligasi diperdagangkan	582.016.920.809	50.514.820.000	632.531.740.809	Bonds for Trading
Reksadana	268.427.530.593	25.699.537.787	294.127.068.380	Mutual Funds
Saham yang Diperdagangkan	127.034.530.140	-	127.034.530.140	Stocks for Trading
Penyertaan Saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Investment in Share
Jumlah Instrumen Investasi	2.157.602.681.543	360.195.974.289	2.517.798.660.832	Total Investment Instrument
Aset Tetap	172.485.941.838	61.558.335	172.547.500.173	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	33.422.757.886	25.067.047	33.447.824.933	Deferred tax asset
Aset Lain-lain	1.064.887.650	-	1.064.887.650	Other assets
Total Aset	4.285.032.482.282	514.716.023.390	4.799.748.505.672	Total Assets
Liabilitas & Ekuitas				Liabilities And Equity
Liabilitas				Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	42.928.787.875	3.389.061.780	46.317.849.655	Reinsurance claim payables
Utang Premi Retrosesi	74.643.407.581	3.085.776.775	77.729.184.355	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	1.393.172.162.910	79.053.829.239	1.472.225.992.149	Estimated Own Retention Claim
Premi/Kontribusi Yang Belum Merupa	1.604.113.680.164	67.838.867.808	1.671.952.547.972	Un-Earned Premium
Beban Yang Masih harus Dibayar	30.062.935.646	-	30.062.935.646	Contribution received in advance
Utang Pajak	9.339.130.008	4.303.270.935	13.642.400.944	Taxes payable
Utang Zakat	-	840.212.621	840.212.621	Zakat Payable
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	23.453.523.943	-	23.453.523.943	Post Employment Benefit Liability
Utang Qard	-	5.000.000.000	5.000.000.000	Qard payables
Utang Lain Lain	-	3.263.975.757	3.263.975.757	Other payables
Dana Tabarru (Peserta)	-	36.763.833.437	36.763.833.437	Tabarru Fund (Participant)
Jumlah Liabilitas	3.177.713.628.128	203.538.828.351	3.381.252.456.479	Total Liabilities
Ekuitas	1.107.318.854.154	311.177.195.039	1.418.496.049.193	Equity
Total Liabilitas & Ekuitas	4.285.032.482.282	514.716.023.390	4.799.748.505.672	Total Liabilities & Equity
Laba /Rugi				Statements Of Comprehensive Income
Pendapatan Premi	2.455.352.785.495	-	2.455.352.785.495	Premium Revenues
Beban Klaim	(1.228.865.783.995)	-	(1.228.865.783.995)	Claim expenses
Beban Komisi	(841.946.203.578)	-	(841.946.203.578)	Net Commission Expense
Beban Underwriting Lainnya	(3.695.651.600)	-	(3.695.651.600)	Other Underwriting expenses - Net
Pendapatan Ujroh	-	26.228.989.136	26.228.989.136	Ujroh Income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	-	-	Allocation Of Tabarru Fund Surplus
Hasil Investasi	137.928.123.908	17.797.069.726	155.725.193.634	Investment Income
Beban Usaha	(135.231.566.277)	(9.838.680.437)	(145.070.246.714)	Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(9.578.199.349)	(578.873.599)	(10.157.072.948)	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	373.963.504.603	33.608.504.827	407.572.009.430	Profit Before Income Tax
Estimasi Pajak Penghasilan & Zakat	(66.839.203.356)	(5.120.201.658)	(71.959.405.014)	Estimated Income Tax & Zakat:
Hasil Usaha	307.124.301.248	28.488.303.169	335.612.604.415	Comprehensive Income

46. Informasi Segmen - pindahan

46. Segment information

	2015			
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Aset				
Kas dan setara Kas	16.116.992.031	516.109.212	16.633.101.243	Cash and cash equivalents
Piutang Reasuransi	289.349.946.930	64.096.510.238	353.446.457.168	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	51.814.690.721	395.193.962	52.209.884.683	Retrocession receivables
Piutang Ujroh		9.329.946.220	9.329.946.220	Ujroh receivables
Aset Retrosesi:			-	Retrocession Assets
- Premi Yang Belum Merupakan Penc	422.547.076.770	-	422.547.076.770	- Un-earned premium Retrocession Share
- Estimasi Klaim Retensi Sendiri Bagi:	664.107.711.421	-	664.107.711.421	- Estimated claim - retrocession Share
Jumlah Aset Retrosesi	1.086.654.788.191		1.086.654.788.191	Total Retrocession Assets
Biaya Dibayar Dimuka	43.865.809	-	43.865.809	Prepaid expenses
Piutang Hasil Investasi	7.708.424.639	-	7.708.424.639	Investment income receivable
Piutang lain-lain	2.980.257.652	448.666.650	3.428.924.302	Other Receivables
Investasi			-	: Investment Instrument
Dana Jaminan	40.000.000.000	11.000.000.000	51.000.000.000	Guarantee funds
Deposito Berjangka	1.518.993.000.000	281.336.530.788	1.800.329.530.788	Deposits
Deposit On Call	19.800.000.000	-	19.800.000.000	Deposit on Call
Obligasi diperdagangkan	259.440.207.622	17.210.323.000	276.650.530.622	Bonds for Trading
Reksadana	158.570.703.436	6.651.863.047	165.222.566.483	Mutual Funds
Saham yang Diperdagangkan	72.930.428.377	-	72.930.428.377	Stocks for Trading
Penyertaan Saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Investment in Share
Jumlah Instrumen Investasi			-	Total Investment Instrument
Aset Tetap	166.322.537.605	124.011.668	166.446.549.273	Fixed Assets
Aset Pajak Tangguhan	28.939.479.483	1.785.149	28.941.264.631	Deferred tax asset
Aset Lain-lain	4.225.693.667	-	4.225.693.667	Other assets
Total Aset	3.725.314.716.162	391.110.939.934	4.116.425.656.097	TOTAL ASSETS
Liabilitas & Ekuitas				Liabilities & Equity
Liabilitas			-	Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	64.604.369.371	7.441.230.281	72.045.599.652	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	53.437.364.864	2.000.295.235	55.437.660.098	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	1.344.064.400.190	36.552.466.660	1.380.616.866.850	Estimated Own Retention Claim
Premi/Kontribusi yang Belum Merupa	1.284.338.181.821	30.308.150.915	1.314.646.332.736	Unearned Premium
Beban Yang Masih harus Dibayar	22.321.813.643		22.321.813.643	Contribution received in advance
Utang Pajak	32.453.469.543	4.366.435.864	36.819.905.407	Taxes payable
Utang Zakat	-	819.964.322	819.964.322	Zakat Payable
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	23.959.764.348	-	23.959.764.348	Post Employment Benefit Liability
Utang Qard	-	-	-	Loans
Utang Lain Lain	-	2.791.612.265	2.791.612.265	Other payables
Dana Tabarru (Peserta)	-	24.141.892.523	24.141.892.523	Tabarru Fund (Participant)
Jumlah Liabilitas	2.825.179.363.780	108.422.048.064	2.933.601.411.844	Total Liabilities
Ekuitas	900.135.352.384	282.688.891.869	1.182.824.244.253	Equity
Total Liabilitas & Ekuitas	3.725.314.716.164	391.110.939.933	4.116.425.656.097	Total Liabilities & Equity
Laba /Rugi				Statements Of Comprehensive Income
Pendapatan Premi	2.175.959.555.418	-	2.175.959.555.418	Premium Revenues
Beban Klaim	(1.292.429.869.657)	-	(1.292.429.869.657)	Claim expenses
Beban Komisi	(691.395.755.679)	-	(691.395.755.679)	Net Commission Expense
Beban Underwriting Lainnya	(5.625.459.437)	-	(5.625.459.437)	Other underwriting expenses - Net
Pendapatan Ujroh	-	24.154.978.060	24.154.978.060	Ujroh Income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	1.693.857.427	1.693.857.427	Allocation Of Tabarru Fund Surplus
Hasil Investasi	168.020.818.975	17.399.265.395	185.420.084.370	Investment Income
Beban Usaha	(107.463.637.623)	(8.934.890.624)	(116.398.528.247)	Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain	15.325.812.788	(1.514.637.394)	13.811.175.394	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak	262.391.464.785	32.798.572.864	295.190.037.648	Profit Before Income Tax
Estimasi Pajak Penghasilan dan Zakat	(38.954.004.442)	(5.163.342.582)	(44.117.347.024)	Estimated Income Tax & Zakat
Hasil Usaha	223.437.460.342	27.635.230.282	251.072.690.624	Comprehensive Income

47. Perkembangan Terakhir Peraturan Perasuransian

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha perasuransian.

b. Modal Perusahaan Reasuransi

Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dimana dalam pasal 6B ayat 2 disebutkan Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000 pada 31 Desember 2010
- ii. Paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000 pada 31 Desember 2012
- iii. Paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000 pada 31 Desember 2014

Sedangkan untuk perusahaan reasuransi yang memiliki unit kerja syariah diatur sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp12.500.000.000 pada 31 Desember 2008
- ii. Paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000 pada 31 Desember 2009
- iii. Paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000 pada 31 Desember 2010

Perusahaan sampai dengan posisi per 31 Desember 2016 baik untuk reasuransi konvensional maupun reasuransi syariah telah memenuhi ketentuan permodalan tersebut.

Pada tahun 2014 telah terealisasi pula pengalihan aset berupa tanah dan gedung senilai Rp.35 milyar. Dan pengalihan pinjaman subordinasi sebesar Rp.75 milyar dalam rangka pemenuhan modal kerja/ ekuitas perusahaan.

c. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Pada tahun 2011 telah keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pasal 41 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

d. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011.

Pada tahun 2011 telah dikeluarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan ini mencabut PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Beberapa keputusan dari peraturan tersebut sebagai berikut:

47. New Regulation Pronouncement in Insurance

a. *The Law number 40 of the year 2014 on Insurance*

On 17 October 2014 the law on insurance was adopted to supersede the earlier law number 2 of the year 1992 on Insurance Companies.

b. *Reinsurance Companies Capital*

With the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 81 of 2008, the third amendment of the Government Regulation No. 73 of 1992 on operations of insurance companies where the article 6B paragraph 2 stipulates that reinsurance companies are required to have the following equity gradually as follows:

- i. *At least Rp100.000.000.000 by Desember 31, 2010*
- ii. *At least Rp150.000.000.000 by Desember 31, 2012*
- iii. *At least Rp200.000.000.000 by Desember 31, 2014*

Whereas for reinsurance companies with syariah units the following requirement applies:

- i. *At least Rp12.500.000.000 by Desember 31, 2008*
- ii. *At least Rp25.000.000.000 by Desember 31, 2009*
- iii. *At least Rp50.000.000.000 by Desember 31, 2010*

By December 31, 2016 the Company has complied with the capital requirement for both conventional and syariah reinsurance.

Also by 2014 the transfer of assets in terms of land and office buildings valued at Rp.35 billion was realized. And transfer of subordinated loans amounting to Rp.75 billion in order to meet working capital or equity compliance.

c. *Regulation of Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated 12 January 2011.*

In 2011 the Regulation of the Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated January 12, 2011 on financial health of insurance and reinsurance businesses with syariah principles was adopted, where the Article 41 requires that insurance and reinsurance companies which maintain part of their businesses on the basis of syariah principles are mandatory to prepare annual financial statements; whereas the Article 40 verse 1 letter a of the said regulation requires that the financial statements of syariah and non-syariah be prepared separately.

d. *The Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: PER-09/BL/2011 dated December 1, 2011.*

In 2011 the Regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board by No. PER-09/BL/2011 dated December 1, 2011 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Limit Levels for Insurance and Reinsurance Companies was adopted. This regulation has superseded PER-02/BL/2009 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Level Limits for Insurance and Reinsurance Companies. Some portions of the stipulation in the regulations are as follows:

47. Perkembangan Terakhir Peraturan Perasuransian - pindah

- i. Batas Tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
 - ii. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.
 - iii. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.
 - iv. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi periode Triwulan I yang berakhir 31 Maret 2012 dan seterusnya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.

Hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan di atas antara lain:

- i. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
 - ii. Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis.
 - iii. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
 - iv. Kecukupan Investasi, Perusahaan wajib memiliki aset dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- e. Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.
- Hal-hal yang diatur dalam keputusan tersebut antara lain:
- i. Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2.
 - ii. Manajer Investasi yang mengelola Reksadana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.

47. New Regulation Pronouncement in Insurance

- i. *The minimum limit level of solvency for insurance and reinsurance companies as referred to in Article 3 of the Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 on Healthiness of Financial Insurance and Reinsurance Companies, as has been amended several times, the latest of which was by the Regulation of the Minister of Finance number 158/PMK.010 / 2008, shall be determined on the basis of risk of loss which may arise as a result of deviation in management assets and liabilities.*
 - ii. *Calculation of risk of loss that may arise as a result of deviation in management of assets and liabilities referred to in Article 1 shall be conducted under guidelines for calculation of minimum limit of solvency level as referred to in the Appendix which is an integral part of the Regulations of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board.*
 - iii. *The regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board does not apply to report on calculation of solvency of insurance and reinsurance companies which run their entire business on principles of syariah and their syariah units as well as for those insurance and reinsurance companies which do not run their business on syariah principles.*
 - iv. *Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board is applicable for calculation of the solvency reports of insurance and reinsurance companies for the period ended March 31, 2012 and thereafter.*
- d. *The regulation of the Minister of Finance of the Republik f Indonesia No.: 53/PMK.010/2012 dated 3 April 2012, on Financial Healthiness of Insurance and Reinsurance Companies, effective 1 Januari 2013.*

Matters regulated include:

- i. *At any time those companies are to maintain solvability rate of 100% of their risk based minimum capital.*
 - ii. *Liabilities taken into account in calculating the solvability rate are the entire liabilities of the company inclusive of technical reserve.*
 - iii. *The targeted solvability rate referred to in point 2) shall at least 120% of risk based minimum capital.*
 - iv. *Adequacy of investment. Companies are required to have investments in permitted assets in terms of type, method added with permitted assets in terms of cash on hand and in banks, of at least equal to their technical reserves plus their own retention claims and other liabilities to their insured parties.*
- e. *The decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) Number: KEP-367/BL/2012, dated July 9, 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, which effective*
- Matters regulated include:*
- i. *Rule on fair value of securities in mutual fund portfolio is stipulated under paragraph IV C.2*
 - ii. *Investment managers who manage mutual funds must calculate the fair market value of the securities in the portfolio of Mutual Funds in accordance with the regulation Number: IV.C.2 on appendice of the decision effective from January 1, 2013.*

47. Perkembangan Terakhir Peraturan Perasuransian - pindah

- f. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- i. Bagian ke empat pasal 7 sampai dengan 9 mengatur tata cara perhitungan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) dan Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD).
 - ii. Bagian ke enam pasal 11 mengatur tata cara perhitungan Cadangan klaim.
 - iii. Bagian ke tujuh pasal 12 mengatur tata cara perhitungan aset reasuransi.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perasuransian.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- i. Prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- ii. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- iii. Pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- iv. Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Mengatur Tentang Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah.
- vi. Mengatur tentang pemegang saham, Komite Audit eksternal, Praktik dan kebijakan remunerasi, tata kelola investasi, Tata kelola teknologi informasi, Manajemen risiko dan pengendalian internal.
- vii. Mengatur rencana strategis perusahaan asuransi dan reasuransi, keterbukaan informasi, Hubungan dengan pemangku kepentingan, etika bisnis, self assesment dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Monitoring dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

48. Manajemen Risiko Keuangan

Sehubungan dengan risiko keuangan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan terfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis, yaitu: risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga lain.
- i. Risiko Mata Uang
Risiko mata uang timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs valuta asing. Perubahan nilai tukar memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan. Aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang asing paling banyak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sebagian besar pendapatan Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah.
- ii. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar
Risiko suku bunga timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, perusahaan melakukan analisa pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

47. Update on Regulation Pronouncement in Insurance

- f. Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. PER-09/BL/2012 on Guidelines for Technical Allowance for Insurance Companies and Reinsurance Matters set out in these regulations include:

- i. Part four chapters 7 through 9 govern the procedures for calculation of the Unearned Premiums (CAPYBMP) and Reserves for Uncovered Period Risks (CARYBD).
- ii. Part six of Article 11 governs the calculation of claims reserves
- iii. Part seven of Article 12 governs the calculation of reinsurance assets.

- g. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 152/PMK.010/2012 on Good Corporate Governance On Insurance Company.

Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) No. 73 / POJK.05 / 2016 About Corporate Governance Good On Insurance Company.

Matters set out in the regulation are:

- i. The principles of implementation of good corporate governance.
- ii. Purpose of applying good corporate governance.
- iii. Implementation of the application of the principles of good corporate governance.
- iv. General Meeting of Shareholders
- v. Organize On Board of Directors, Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board.
- vi. Regulates shareholders, external audit committee, remuneration practices and policies, governance of investment, information technology governance, risk management and internal control.
- vii. Organize strategic plan of insurance and reinsurance companies, information disclosure, relationship with stakeholders, business ethics, self assessment and implementation of good corporate governance, monitoring and evaluation of the implementation of good corporate governance.

48. Financial Risk Management

In relation to financial risk, the Company's financial risk management program focuses on the uncertainty of financial markets and minimize potential losses that affect the financial performance of the Company, including the following:

- a. Market risk
Market risks are risks related to fair value of financial assets or future cash flows of financial instruments which tend to fluctuate. The market risks include monetary risk, interest risk, and risk of commodities prices.
- i. Currency Risk
The monetary risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in rates of foreign currencies. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are mostly in U.S. dollars and most of the revenues of the Company are denominated in rupiah.
- ii. Interest Rate Risk on Fair Value
The interest risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in interest rates. The Company supervises the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Company. To measure the market risk of interest rate movements, the Company conducted an analysis on the movement of interest rates margins and on the maturity profile of assets and liabilities based on the schedule of interest rate changes.

48. Manajemen Risiko Keuangan - pindahan

48. Financial Risk Management

Tabel dibawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

The table below shows details on maturity of financial assets and financial liabilities influenced by interest rates.

Suku Bunga Tetap	Per 31 Desember 2016			Jumlah	
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga		
	Less than One Year	More Than One Year	No Interest Charged	Total	
Aset					Assets
Investasi					Investments
Deposito	1.462.681.621.502	-	-	1.462.681.621.502	Deposits
Surat Berharga:	-	-	-	-	Securities
Obligasi	-	632.531.740.809	-	632.531.740.809	Bonds
Reksadana	-	-	294.127.068.380	294.127.068.380	Mutual funds
Saham Diperdagangkan	-	-	127.034.530.140	127.034.530.140	Stocks for trading
Penyertaan Saham	-	-	1.423.700.000	1.423.700.000	Investment in share
Kas dan Setara Kas	4.582.014.536	-	-	4.582.014.536	Cash and cash equivalent
Piutang Reasuransi	-	-	551.889.881.656	551.889.881.656	Reinsurance receivable
Piutang Retrosesi	-	-	44.995.280.915	44.995.280.915	Retrocession receivable
PYBMP Bagian Retrosesi	-	-	722.471.153.113	722.471.153.113	Retrocession's Unearned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	-	718.736.171.560	718.736.171.560	Retrocession's estimated claim
Piutang Ujroh	-	-	16.189.743.752	16.189.743.752	Ujroh Receivable
Piutang Hasil Investasi	-	-	8.413.321.551	8.413.321.551	Investment income receivable
Piutang Lain-lain	-	-	7.507.971.501	7.507.971.501	Other receivables
Aset Lain-lain	-	-	1.064.887.650	1.064.887.650	Other assets
Jumlah Aset Keuangan	1.467.263.636.038	632.531.740.809	2.493.853.710.219	4.593.649.087.066	Total financial assets
Liabilitas					Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	-	-	46.317.849.655	46.317.849.655	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	-	-	77.729.184.356	77.729.184.356	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	-	1.472.225.992.149	1.472.225.992.149	Estimated own claim retention
Premi Yg Belum Mrpk. Pendapatan	-	-	1.671.952.547.972	1.671.952.547.972	Un-earned premium
Utang Pajak	13.642.400.943	-	-	13.642.400.943	Tax Payable
Utang Zakat	840.212.621	-	-	840.212.621	Zakat Payable
Utang Qard	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	Qard Payable
Utang Lain-lain	-	-	3.263.975.757	3.263.975.757	Other payables
Beban Yang Masih Harus Dibayar	30.062.935.646	-	-	30.062.935.646	Accrued expenses
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	-	23.453.523.943	23.453.523.943	Post employment benefit liability
Dana Tabarru (Peserta)	-	-	36.763.833.437	36.763.833.437	Tabarru Funds (Participant)
Jumlah Liabilitas Keuangan	49.545.549.210	-	3.331.706.907.269	3.381.252.456.479	Total financial liabilities
Selisih Bersih	1.417.718.086.828	632.531.740.809	(837.853.197.050)	1.212.396.630.587	Net balance

iii. Risiko Harga Lain

Risiko harga lain timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau risiko mata uang), apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor spesifik pada instrumen keuangan individual atau penerbitnya, atau faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen keuangan serupa yang diperdagangkan di pasar (misal dampak penurunan indeks bursa saham, harga komoditas, atau variable risiko lain tertentu). Perusahaan tidak memiliki secara signifikan jenis aset keuangan yang dipengaruhi oleh faktor spesifik sebagaimana dimaksudkan di atas.

iii. Other Price Risks

Other price risks arise when the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than the risk arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in the market (eg the impact of decline in the stock market index, commodity price, or certain other risk variables). The Company does not have significant types of financial assets that are affected by specific factors, as referred to above.

48. Manajemen Risiko Keuangan - pindahan

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban. Perusahaan memiliki kebijakan kredit untuk menetapkan batas kredit nasabah dan memantau saldonya secara berkelanjutan. Kualitas kredit dinilai setelah mempertimbangkan posisi keuangan dan pengalaman masa lalu nasabah. Perusahaan akan membentuk suatu penyisihan yang merupakan estimasi kerugian yang terjadi dalam akun piutang reasuransi, piutang retrosesi dan piutang lain-lain. Penyisihan digunakan untuk mencatat kerugian atas penurunan nilai suatu akun piutang, kecuali jika perusahaan merasa yakin bahwa tidak ada pemulihan yang mungkin terjadi terhadap tagihan tersebut. Pada saat itu, aset keuangan dianggap tidak tertagih dan akumulasi penyisihannya dihapuskan atas nilai tercatat dari aset keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Eksposur maksimum dicatat berdasarkan nilai tercatat bersih yang dilaporkan di neraca.

	Konsentrasi Risiko Kredit Concentration of Credit Risks			
	Korporasi Corporate	Lain-Lain Other	Eksposur Maksimum Maximum Exposure	
Aset				Assets
Investasi				Investments
Deposito	1.462.681.621.502	-	1.462.681.621.502	Deposits
Surat berharga				Securities
Obligasi	632.531.740.809	-	632.531.740.809	Bonds
Reksadana	294.127.068.380	-	294.127.068.380	Mutual funds
Saham Yang Diperdagangkan	127.034.530.140	-	127.034.530.140	Stocks for trading
Penyertaan saham	1.423.700.000	-	1.423.700.000	Investment in share
Kas dan setara kas	4.582.014.536	-	4.582.014.536	Cash and cash equivalent
Piutang reasuransi	551.889.881.656	-	551.889.881.656	Reinsurance receivable
Piutang retrosesi	44.995.280.915	-	44.995.280.915	Retrocession receivable
PYBMP Bagian Retrosesi	722.471.153.113	-	722.471.153.113	Retrocession's unearned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	718.736.171.560	-	718.736.171.560	Retrocession's estimated claim
Piutang Ujroh	16.189.743.752	-	16.189.743.752	Ujroh receivable
Piutang hasil investasi	8.413.321.551	-	8.413.321.551	Investment income receivable
Piutang lain-lain	7.507.971.501	-	7.507.971.501	Other receivables
Aset lain-lain	1.064.887.650	-	1.064.887.650	Other assets
Jumlah aset keuangan	4.593.649.087.066	-	4.593.649.087.066	Total financial assets

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya. Risiko likuiditas timbul jika Perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan dasar transaksi yang wajar.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Eksposur maksimum dicatat berdasarkan nilai tercatat bersih yang dilaporkan di neraca.

48. Financial Risk Management

b. Credit Risk

Credit risk is a risk which one party involved in financial instrument may cause financial loss to other party due to failure in meeting his responsibility. The Company has a credit policy to set customers credit limits and monitor sustainable balance. Credit quality is assessed after considering the financial position and past experience of customers. The Company will establish an allowance which represents the estimated losses that occur in reinsurance receivables and other receivables accounts. Allowance is used to record impairment losses on an account except, when the Company feels confident that no recovery may occur on those collectibles. At that time, the financial asset is considered uncollectible and the accumulated allowances are written off on the carrying value of financial assets.

The table below illustrates the maximum exposure to credit risk and risk concentration of the Company on December 31, 2016. Maximum exposure is recorded at the net carrying value reported in the balance sheet.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises when the entity is experiencing difficulty in fulfilling its liabilities in terms of financial which is settled by cash or other financial assets. Liquidity risk arises when the Company is experiencing difficulty in securing sources of funding. Liquidity risk management means maintaining adequate cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and continuous supervision of the maturity date of assets and financial liabilities.

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Fair value is an amount in which the asset could be exchanged, or liability can be solved on an arm's-length transactions.

The table below illustrates the maximum exposure to credit risk and concentration risk of the Company on 31 December 2016. Maximum exposure is recorded at the net carrying value reported in the balance sheet.

48. Manajemen Risiko Keuangan - pindahan

48. Financial Risk Management

Diukur Pada	(Rp 000,000)						Measured at
	Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (Fair value through profit and loss)	Pinjaman Diberikan dan Piutang (Loan and Receivable)	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity)	Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale)	Jumlah Perolehan Diamortisasi (Total Cost Amortized)	Jumlah Nilai Tercatat (Carrying Amount)	Nilai Wajar (Fair Value)
Aset							Assets
Investasi	-	-	1.462.682	-	-	1.462.682	Investments
Deposito	-	-	-	-	-	1.462.682	Deposits
Surat Berharga :							Securities
Obligasi	632.532	-	-	-	-	632.532	Bonds
Reksadana	294.127	-	-	-	-	294.127	Mutual funds
Saham Yang Diperdagangkan	127.035	-	-	-	-	127.035	Stocks for trading
Penyertaan Saham	-	-	-	1.424	-	1.424	Investment in share
Kas dan Setara Kas	-	4.582	-	-	-	4.582	Cash and cash equivalent
Piutang Reasuransi	-	551.890	-	-	-	551.890	Reinsurance receivable
Piutang Retrosesi	-	44.995	-	-	-	44.995	Retrocession receivable
PYBMP Bagian Retrosesi	-	722.471	-	-	-	722.471	Retrocession's unearned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	718.736	-	-	-	718.736	Retrocession's estimated claim
Piutang Ujroh	-	-	-	-	-	16.189	Ujroh receivable
Piutang Hasil Investasi	-	8.413	-	-	-	8.413	Investment income receivable
Piutang Lain-lain	-	7.508	-	-	-	7.508	Other receivables
Aset Lain-lain	-	1.065	-	-	-	1.065	Other assets
Jumlah Aset Keuangan	1.053.693	2.059.661	1.462.682	1.424	-	4.593.648	Total financial assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Klaim Reasuransi	-	46.318	-	-	-	46.318	Reinsurance Claim Payable
Utang Premi Retrosesi	-	77.729	-	-	-	77.729	Retrocession Premium Payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	1.472.226	-	-	-	1.472.226	Estimated Own Retention Claims
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	-	1.671.953	-	-	-	1.671.953	Unearned Premiums
Utang Pajak	-	-	-	-	-	13.642	Tax Payable
Utang Zakat	-	-	-	-	-	840	Zakat Payable
Utang Qard	-	-	-	-	-	5.000	Qard Payable
Dana Tabarru (Peserta)	-	-	-	-	-	36.764	Tabarru Funds(participants)
Utang Lain-lain	-	3.264	-	-	-	3.264	Other Liability
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	30.063	-	-	-	30.063	Accrued Expenses
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	23.454	-	-	-	23.454	Post-Employment Benefits Liability
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	3.325.006	-	-	-	3.381.252	Total Financial Liabilities
Selisih Bersih	1.053.693	(1.265.345)	1.462.682	1.424	-	1.212.396	Net difference

Nilai wajar atas investasi pada surat berharga per 31 Desember 2016 didasarkan kepada harga pasar pada tanggal tersebut.

The fair value of investments in marketable securities as of December 31, 2016 is based on the market price on that date.

e. Risiko Suku Bunga atas Arus Kas

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga pasar atas arus kas yang akan diterima di masa depan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Akun yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar adalah deposito berjangka pada bank dan liabilitas diestimasi kesejahteraan karyawan.

e. Interest Rate Risk on Cash Flows

The Company supervises the impact of movements in market interest rates on cash flows to be received in the future to minimize the negative impact on the Company.

Accounts that are affected by changes in market interest rates are time deposits in banks and the estimated liability for employee welfare.

49. PSAK baru yang Berlaku Efektif Tanggal 1 Januari 2015

Dalam tahun 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari:

- 1) PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 1 (2013) ini menggantikan PSAK 1 (2009) : Penyajian Laporan Standar yang baru ini merevisi mengenai komponen laporan keuangan, judul laporan laba rugi, penyajian dan pengungkapan informasi komparatif (komparatif minimum dan komparatif tambahan) serta penyajian penghasilan komprehensif lain (OCI).
- 2) PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
Standar yang baru ini merevisi sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada dan menambahkan beberapa pengungkapan baru, antara lain:
 - a) Ruang lingkup hanya mencakup laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.
 - b) Terdapat pengaturan mengenai penyusunan laporan keuangan tersendiri untuk entitas yang berhenti menjadi entitas investasi.

Dewan Standar Akuntansi IAI selanjutnya menerbitkan:
PSAK 4 (Amandemen 2015) "Laporan Keuangan Tersendiri"

Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri mengamandemen paragraf 04-07, 10, 11B, dan 12. Jika entitas induk menyusun LK tersendiri, maka entitas induk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi pada (Par 10):

- a) Biaya perolehan; atau
 - b) Sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.; atau
 - c) Menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
- 3) PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
PSAK 15 (Revisi 2013) ini menggantikan PSAK 15 (2009) : Investasi pada Entitas Asosiasi.
 - 4) PSAK 24 (2013) "Imbalan Kerja"
PSAK 24 (2013) ini menggantikan PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja Beberapa revisi penting pada standar ini adalah antara lain :
 - a) Penyajian dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain (*Other Comprehensive Income*).
 - b) Menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan kerja pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
 - 5) PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
 - 6) PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
PSAK 66: Pengaturan Bersama menggantikan:
 - a) PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
 - b) ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas-Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
 - 7) PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
PSAK 67 memberikan ketentuan transisi atas persyaratan pengungkapan untuk
 - 8) PSAK 46 (2014) "Pajak Penghasilan"
PSAK 46 (2014) ini menggantikan PSAK 46 (2010) : Pajak Penghasilan Standar yang baru ini merevisi sejumlah aturan yang telah ada dan menambahkan
 - a) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak
 - b) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi
 - 9) PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"
PSAK 48 (2014) ini menggantikan PSAK 48 (2009) : Penurunan Nilai Aset
 - 10) ISAK 27 (2014) "Pergalihan Aset dari Pelanggan"
 - 11) ISAK 29 (2014) "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada ISAK 29 (2014) menggantikan PSAK 33 : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan

49. New PSAK Effective from January 1, 2015

In the years 2013 the Indonesian Accounting Standard Board (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) IAI has adopted the following PSAK which has become effective by January 1, 2015 :

- 1) PSAK 1 (2013): Presentation of Financial Statement
This PSAK supersedes PSAK 1 (2009): Presentation of Financial This new standard revises the financial statements of the component, heading of the income statement, presentation and disclosure of comparative information (comparative minimum and comparative supplementary) as well as the presentation of other comprehensive income (OCI).
- 2) PSAK 4 "Separate Financial Statements"
This new standard describes a number of existing disclosure requirements and adds some new disclosures, among others:
 - a) The scope includes separate financial statements for additional information.
 - b) There are regulations concerning the preparation of separate financial statements for the entity that is no longer the investment entity.

Recently the Indonesian Accounting Standard Board - Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI has adopted :

PSAK 4 (Ammendement 2015) " Separate Financial Statements", about Equity Method on the Separate Financial Statements ammended paragraf 04-07, 10, 11B, and 12. If the Parent Company presenting Separate Financial Statements, therefore parent company recording investation in subsidiary company, joint venture and association company (Par 10):

- a) Cost method; or
 - b) Agreed to PSAK 55: Financial Instrument; Recognition and Measurement ; or
 - c) Used equity method such as described in PSAK 15; Investation in Association and Joint Venture Company.
- 3) PSAK 15 "Investments in Associate Entities and Joint Ventures "
This PSAK supersedes PSAK 15 (2009): Investments in Associate Entities
 - 4) PSAK 24 (2013) "Employee Benefits"
This PSAK 24 (2013) supersedes PSAK 24 (2010) : Employee Benefits Some important revisions to this standard are, among others:
 - a) Actuarial gains and losses are recognized entirely through other comprehensive income.
 - b) Determining the remeasurement on net employee benefit liabilities (assets), which will be recognized as other comprehensive income.
 - 5) PSAK 65 "Consolidated Financial Statements"
 - 6) PSAK 66 "Joint Arrangements"
This PSAK supersedes:
 - a) PSAK 12 (2009): Interest in Joint Venture
 - b) ISAK 12: Jointly Controlled Entities - Non Monetary Contributions by
 - 7) PSAK 67 "Disclosure of Interest in Other Entities"
PSAK 67 provides the transitional provisions of the disclosure requirements
 - 8) PSAK 46 (2014) "Income Tax"
This PSAK 46 (2014) supersedes PSAK 46 (2010) : Income Tax This new standard revises a No. of existing rules and add new rules,
 - a) Regulate deferred tax assets and liabilities from assets that are not
 - b) Regulate deferred tax assets and liabilities from investment property
 - 9) PSAK 48 (2014) "Impairment of Assets"
This PSAK supersedes PSAK 48 (2009) : Impairment of Assets
 - 10) ISAK 27 (2014) "Transfers of Assets from Customers"
 - 11) ISAK 29 (2014) "Stripping Cost in Production Phase of a Surface Mine"
This PSAK supersedes PSAK 33 (2014)

49. PSAK baru yang Berlaku Efektif Tanggal 1 Januari 2015 - pindahan

Entitas sedang melakukan penelaahan PSAK-PSAK tersebut di atas dalam rangka penerapannya sepanjang relevan dengan praktek-praktek yang dilaksanakan di perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi dan reasuransi .

50. Tanggung Jawab Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan, sesuai dengan paragraph 16 PSAK 1 (Revisi 2014) Penyajian Laporan Keuangan.

49. New PSAK Effective Januari 1, 2015

The Management is assessing the impact of those standards on the financial statements, in view of adopting them so far they are relevant to practices in insurance and reinsurance companies.

50. Responsibility for Financial Statements

The Management is responsible for the preparation and the content of the financial statements, in compliance with paragraph 16 of the Indonesian Financial Accounting Standard 1 (Revision 2014) Presentation of Financial Statements.



PT. Reasuransi Nasional Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330, Indonesia
PO Box. 1618 JKP 10016

Telp. 62-21 80642500, 3140009, 3149373 (Hunting)

Fax. 62-21 3143716, 3904900430

E-mail: nasionalre@nasionalre.id